

The COHESIVE TETRAD

Traktat 1: Logika Sabda

Martabat Manusia dan Hukum di Era Data

© Ade Zaenal Mutaqin

Traktat 1 *Cohesive Tetrad Treatise Series* tentang bahasa-bahasa kebenaran.
Berpijak pada arsitektur kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*.

Diterbitkan di Bogor, Indonesia, 2025

The Cohesive Tetrad: Traktat tentang Martabat Manusia dan Hukum di Era Data

Traktat 1: Logika Sabda; Martabat Manusia dan Hukum di Era Data adalah volume pertama dalam Traktat SALOQUM, yakni rangkaian empat traktat yang saling terhubung tentang Sabda, Logika, Qualia, dan Mistika sebagai empat bahasa kebenaran yang saling bergantung. Bersama Traktat 2 tentang Bahasa Logika, Traktat 3 tentang Logika Qualia, dan Traktat 4 tentang Logika Mistika, Traktat 1 membentuk satu tubuh arsitektural di dalam The Cohesive Tetrad. Traktat 5 tentang Akhlak menampilkan lapisan manifestasional tempat arsitektur terpadu Sabda, Logika, Qualia, dan Mistika tampak dalam watak, kebajikan, dan praktik kelembagaan.

Traktat 1 merupakan himpunan empat artikel jurnal yang secara sistematis mengelaborasi pilar pertama dalam buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* (OSF Preprints, DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V). Dalam hirarki kanonis, *The Cohesive Tetrad* terlebih dahulu menetapkan arsitektur epistemik dan etik dengan empat pilar yang saling bergantung, yaitu Sabda (Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos), Logika, Qualia, dan Mistika, dengan Akhlak sebagai permukaan verifikasi yang dapat diamati. Berpijak pada arsitektur ini, Cohesive Tetrad Treatise Series berperan sebagai lapisan elaborasi konseptual, sedangkan Traktat 1 memusatkan perhatian pada pilar pertama, Sabda, dalam kaitannya dengan martabat manusia, hukum, dan tata kelola kebenaran di era kelimpahan data. Keempat artikel dalam Traktat 1 disusun sebagai unit analitis yang saling terhubung untuk memetakan batas, kapasitas, dan kegagalan logika murni ketika dipisahkan dari Sabda, serta merumuskan kerangka tata kelola kebenaran yang nonreduktif, berpusat pada martabat manusia, dan relevan bagi hukum, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan.

Artikel jurnal dalam Traktat 1

Empat artikel jurnal yang membentuk korpus Traktat 1 memiliki judul berbahasa Inggris sebagai berikut:

1. Artikel 1: *Sabda, Pure Logic, and the Architecture of Truth Governance: Why Logic Cannot Rule Alone and Why Truth Governance Requires Sabda*
2. Artikel 2: *Sabda, Human Dignity, and Telos: Reframing Moral Foundations Beyond Pure Logic*
3. Artikel 3: *Sabda, Public Reason, and Plural Societies: The Cohesive Tetrad as an Architecture for Democratic Truth Governance*
4. Artikel 4: *Sabda, Logic, and Truth Governance: The Cohesive Tetrad as a Framework for Law and Artificial Intelligence*

Teks sumber kanonis

Seluruh artikel dalam Traktat 1 berakar pada dan menjaga kesepadanan substantif dengan naskah kanonis berbahasa Indonesia tentang martabat manusia dan hukum di era data dalam kerangka The Cohesive Tetrad (judul Indonesia: *The Cohesive Tetrad: Traktat tentang Martabat Manusia dan Hukum di Era Data*). Naskah ini merupakan derivasi sistematis dari buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* (OSF Preprints, DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V). Kedua lapisan kanonis tersebut menjadi titik acuan utama bagi seluruh elaborasi konseptual dalam Traktat 1 dan dalam keseluruhan Traktat SALOQUM.

Secara konseptual, istilah *The Cohesive Tetrad* merujuk pada sebuah arsitektur epistemik dan etik yang distrukturkan melalui empat pilar yang saling bertaut, yaitu Sabda (Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos), Logika, Qualia, dan Mistika, dengan Akhlak sebagai permukaan verifikasi yang dapat diamati. Representasi kanonis utama dari arsitektur ini adalah buku *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* (OSF Preprints, DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V). Dalam buku tersebut, struktur empat pilar diformalkan dan dijadikan dasar bagi pengembangan lanjutan dalam berbagai format dan tingkat kedalaman.

Berpijak pada buku kanonis ini, *Cohesive Tetrad Treatise Series* disusun ke dalam lima traktat yang saling berkaitan, sebagaimana telah diuraikan pada halaman judul naskah ini. Empat traktat pertama, yang secara kolektif disebut *The SALOQUM Treatises*, mengembangkan Sabda, Logika, Qualia, dan Mistika sebagai empat bahasa kebenaran yang tidak terpisahkan, sedangkan Traktat 5 tentang Akhlak menghadirkan lapisan manifestasional tempat arsitektur terpadu ini tampak dalam watak, kebajikan, dan praktik kelembagaan. Di dalam rangkaian ini, naskah **Traktat 1: Logika Sabda; Martabat Manusia dan Hukum di Era Data** mengelaborasi pilar pertama dalam konteks hukum dan tata kelola kebenaran di era data dengan cara mereorganisasi argumen-argumen yang sudah ada ke dalam empat artikel jurnal yang lebih terfokus.

Dalam situasi keraguan, perbedaan penekanan, atau ambiguitas lintas versi dan platform, urutan rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* (DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V). Kedua, naskah berbahasa Indonesia Traktat 1. Ketiga, dokumen kanonis tentang definisi semantik. Hanya setelah ketiga lapisan ini dirujuk, terjemahan dan turunan digital lainnya digunakan, karena fungsi utama lapisan tersebut adalah sebagai sarana diseminasi dan peningkatan aksesibilitas.

Seluruh komponen berbahasa Inggris yang terkait dengan Traktat 1, termasuk judul, deskripsi, abstrak, dan artikel jurnal, disusun sebagai terjemahan setia dari naskah berbahasa Indonesia. Proses penerjemahan tidak menambahkan argumen baru dan tidak menghapus argumen yang sudah ada. Penyesuaian dibatasi pada kejelasan bahasa dan keterbacaan bagi pembaca internasional. Standarisasi istilah kunci tidak dirumuskan langsung dalam catatan ini, tetapi dinyatakan secara eksplisit di dalam dokumen semantik khusus berikut:

1. Definisi Semantik Kanonis Sabda, Logika, Qualia, Mistika, dan Akhlak dalam The Cohesive Tetrad (IN)
2. The Cohesive Tetrad Canonical Semantic Definitions: Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak (EN)

Seluruh penerjemahan istilah inti Sabda, Logika, Qualia, Mistika, dan Akhlak dalam Traktat 1 wajib merujuk dan tetap konsisten dengan naskah definisi semantik kanonis tersebut, baik dalam versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris.

Traktat 1: Logika Sabda

Naskah ini, *The Cohesive Tetrad: Traktat tentang Martabat Manusia dan Hukum di Era Data*, lahir sebagai bagian dari satu ekosistem gagasan yang sudah lebih dahulu dibangun. Ia bukan teks lepas, bukan percobaan baru, dan bukan ringkasan populer yang berdiri sendiri. Traktat

ini adalah kelanjutan langsung dari buku induk *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* dan dari serangkaian artikel jurnal yang telah menguji kerangka tersebut di medan akademik internasional.

Sejak awal, pilihan bahasa bukan hal teknis. Versi asli traktat ini secara sadar ditulis dalam bahasa Indonesia dan justru di situ letak posisinya yang kanonis. Ada beberapa alasan prinsipil. Pertama, *The Cohesive Tetrad* lahir dari pergulatan intelektual, sosial, dan spiritual yang berakar pada konteks Indonesia, baik dalam pengalaman hukum, demokrasi, maupun luka-luka sosial yang menyertai era data. Menulis dalam bahasa Indonesia memungkinkan nuansa martabat, keadilan, dan amanah terbawa utuh, tidak tereduksi oleh keterbatasan istilah ketika langsung meloncat ke bahasa lain. Kedua, bahasa Indonesia di sini tidak diperlakukan sebagai sekadar medium lokal, tetapi sebagai bahasa yang layak menanggung wacana filsafat, teori hukum, dan kritik atas kecerdasan buatan di tingkat global. Versi terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa lain akan bersifat turunan dan derivatif. Yang kanonis dan primer tetap naskah berbahasa Indonesia ini.

Buku induk *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* menunaikan tugas fondasional. Di dalamnya dirumuskan arsitektur kebenaran yang menjadi poros seluruh karya berikutnya. Sabda dipulihkan sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Logika ditempatkan sebagai penjaga koherensi definisi, premis, dan konsekuensi. Qualia diangkat sebagai horizon pengalaman yang hidup dan dapat diaudit. Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menjelaskan bahwa setiap pencarian kebenaran selalu berakar pada perjalanan batin. Akhlak dipahami sebagai permukaan karakter yang terlihat dalam tindakan. Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, diperkenalkan sebagai alat audit moral untuk memeriksa apakah niat epistematik benar-benar tercermin dalam jejak yang ditinggalkan pada manusia dan dunia. Buku induk bergerak di medan epistemologi, etika, dan krisis kebenaran, tanpa langsung mengunci diri pada satu sektor seperti hukum atau teknologi.

Setelah fondasi itu diletakkan, arsitektur *The Cohesive Tetrad* masuk ke gelanggang jurnal. Di sana, kerangka ini diuji dalam perdebatan ketat: Sabda berhadapan dengan logika murni, fondasi martabat manusia dikritisi melalui teori kapasitas, evolusi, dan kontrak sosial, nalar publik dalam masyarakat majemuk dibaca ulang, dan tata kelola kebenaran di dalam hukum dan kecerdasan buatan dianalisis dengan bantuan literatur kontemporer. Jurnal-jurnal ini bekerja sebagai laboratorium. Setiap klaim *The Cohesive Tetrad* dipaksa bernegosiasi dengan Rawls, Habermas, Kittay, Nussbaum, dan tradisi modern lain yang selama ini mengklaim otoritas atas martabat dan keadilan.

Traktat yang sekarang Tuan baca mengambil seluruh korpus tersebut sebagai prasyarat. Ia tidak mengulang buku induk dan tidak sekadar merangkum jurnal. Ia memilih satu gugus medan yang paling strategis untuk zaman ini, yaitu martabat manusia dan hukum di tengah konfigurasi era data. Di bawah payung “era data” terdapat kecerdasan buatan, infrastruktur digital, ekonomi data, algoritma pemeringkat, dan seluruh sistem yang menjadikan manusia sebagai titik data yang dapat diproses, diprediksi, dan diatur. Di sini, hukum tidak lagi bekerja sendirian. Putusan dan kebijakan semakin sering didukung, dipengaruhi, atau bahkan digiring oleh model statistik dan sistem kecerdasan buatan.

Dalam konteks itu, traktat ini ingin melakukan sesuatu yang sangat spesifik dan sangat terikat pada arsitektur *The Cohesive Tetrad*. Martabat manusia tidak diperlakukan sebagai slogan konstitusional, tetapi sebagai batu uji untuk seluruh fondasi modern. Hukum dibaca sebagai

mesin logika normatif yang sanggup menyelamatkan atau melukai, tergantung kompas normatif yang dipakainya. Era data tidak dipahami sekadar sebagai kemajuan teknologi, tetapi sebagai horizon baru di mana logika algoritmik, logika pasar, dan logika keamanan dapat mengerdilkan Sabda dan menyingkirkan suara mereka yang paling lemah.

Di titik ini, enam pilar *The Cohesive Tetrad* bekerja sebagai kerangka baca. Sabda, sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menegaskan bahwa martabat manusia adalah deklarasi yang tidak boleh dinegosiasikan oleh statistik atau prosedur. Logika memastikan bahwa pembacaan atas Sabda, penyusunan norma hukum, dan desain sistem digital tidak jatuh ke dalam kontradiksi atau manipulasi. Qualia mengangkat pengalaman orang yang hidup di bawah bayang-bayang hukum dan sistem data sebagai pengetahuan moral yang sah. Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menempatkan hakim, pembuat kebijakan, dan perancang model sebagai subjek spiritual yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya operator teknis. Akhlak tampak dalam etos keseharian lembaga hukum dan lembaga teknologi. Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, memaksa kita melihat kembali jejak hukum di era data: apakah ia sungguh melindungi yang lemah atau sekadar memperkuat mereka yang sudah kuat.

Secara hierarkis, kedudukan traktat ini tegas. Di puncak, ada *The Cohesive Tetrad* sebagai nama bagi kerangka epistemik dan etis. Di bawahnya, buku induk *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* bertindak sebagai sumber kanonis yang menjelaskan arsitektur lengkap. Di lapis berikutnya, artikel-artikel jurnal berfungsi sebagai pisau bedah tematik yang menguji daya tahan kerangka di medan perdebatan akademik. Traktat *The Cohesive Tetrad: Traktat tentang Martabat Manusia dan Hukum di Era Data* menjadi simpul yang mengikat semuanya, ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai versi asli yang memegang otoritas tekstual utama. Versi terjemahan yang mungkin disusun kemudian akan tetap merujuk pada naskah ini sebagai referensi pertama.

Dengan kesadaran itu, pembaca diajak memasuki traktat ini bukan sebagai konsumsi intelektual yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari satu perjalanan. Setiap bab dapat ditelusuri kembali ke fondasi konseptual buku induk dan ke pergumulan jurnal. Setiap kalimat berdiri di bawah bayang-bayang Sabda dan di bawah tuntutan kejujuran logika. Dan setiap analisis hukum di era data dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sama: di tengah zaman yang mengubah manusia menjadi data, masiakah kita berani menempatkan martabat sebagai poros, dan masiakah kita sanggup merancang hukum yang setia kepada kebenaran yang lebih tinggi daripada algoritma.

Setiap kerangka lahir dari sebuah kisah; The Cohesive Tetrad hanya menemukan bentuknya ketika Sabda dan logika dipaksa duduk di meja yang sama.

Rumusan Masalah

Zaman data menghadirkan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengukur, memprediksi, dan mengoptimalkan urusan-urusan manusia. Negara, korporasi, dan institusi global semakin bergantung pada indikator, model, dan algoritma untuk memandu keputusan yang memengaruhi kehidupan dalam skala besar. Namun, semakin logika dan data didudukkan sebagai penentu rasionalitas, martabat manusia justru menjadi semakin rapuh dalam praktik. Mereka yang tidak pas dengan kisi-kisi data menjadi tak terlihat. Mereka yang direduksi menjadi angka diperlakukan sebagai variabel, bukan sebagai pribadi. Hukum berada di posisi terjepit, dituntut untuk melindungi martabat sekaligus menyerap tekanan untuk tunduk pada data dan keahlian teknis.

Di dalam ketegangan ini, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Persoalannya bukan sekadar tentang misinformasi, berita palsu, atau bias teknis dalam algoritma. Persoalannya menyentuh apa yang ditempatkan di pusat kebenaran. Apakah logika murni yang beroperasi di atas data dapat menyediakan fondasi yang memadai bagi tata kelola kebenaran dalam hukum dan kehidupan publik, ataukah ia memerlukan sumber norma dan telos yang mendahuluinya dan tidak dapat direduksi menjadi kalkulasi?

Pertanyaan-Pertanyaan Kunci

Traktat ini digerakkan oleh serangkaian pertanyaan kunci yang lahir dari ketegangan tersebut.

1. Pertama, dapatkah logika murni menjadi fondasi yang memadai dan sah bagi tata kelola kebenaran di zaman data, ataukah secara struktural ia akan selalu gagal ketika berhadapan dengan soal martabat, keadilan, dan telos?
2. Kedua, bagaimana Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, seharusnya berelasi dengan logika di dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang terintegrasi dan mampu memandu hukum, kebijakan publik, serta kecerdasan buatan?
3. Ketiga, di bawah aksioma minimal tentang martabat manusia apa hukum di zaman data dapat direkonstruksi, sehingga pribadi tidak direduksi menjadi titik-titik data dan akuntabilitas tidak larut ke dalam prosedur teknis?
4. Keempat, bagaimana *The Cohesive Tetrad* dapat menyediakan kerangka yang koheren yang menghubungkan perdebatan tentang epistemologi, filsafat politik, teori hukum, etika publik, dan tata kelola kecerdasan buatan tanpa meleburkan semuanya ke dalam satu disiplin saja?

Tujuan Traktat

Naskah ini, *The Cohesive Tetrad: A Treatise on Human Dignity and Law in the Age of Data*, memusatkan perhatian pada Traktat 1 tentang Logika Sabda. Tujuannya adalah menguraikan bagaimana Sabda dan logika harus ditata agar martabat manusia benar-benar terlindungi di zaman data. Naskah ini tidak mengulang buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*, dan tidak sekadar merangkum empat artikel jurnal yang membentuk korpus Traktat 1. Sebaliknya, naskah ini menenun semuanya menjadi satu lengkung argumentatif yang dapat diakses pembaca yang pertama kali berjumpa dengan *The Cohesive Tetrad* melalui problem hukum dan data.

Traktat ini berupaya menunjukkan bahwa krisis kebenaran di era digital bukan terutama krisis informasi, melainkan krisis arsitektur. Sabda dan logika tidak boleh ditempatkan sebagai lawan. Logika perlu dikembalikan ke perannya yang tepat sebagai penjaga koherensi, sementara Sabda menyediakan horizon normatif yang menetapkan telos dan melindungi martabat.

Kontribusi dan Sasaran Pembaca

Kontribusi traktat ini dapat diringkas pada empat tingkatan.

Pada tingkat konseptual, traktat ini merekonstruksi *The Cohesive Tetrad* untuk ranah martabat manusia dan hukum, dengan menjelaskan bagaimana Sabda dan logika berinteraksi dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang terpadu di zaman data.

Pada tingkat normatif, traktat ini mengajukan kriteria untuk menilai sistem hukum, kebijakan publik, dan struktur pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan dari sisi kesetiaannya pada martabat, telos, dan akuntabilitas.

Pada tingkat peradaban, traktat ini menawarkan narasi tentang zaman data yang menolak baik euforia teknokratis maupun pelarian nostalgis. Traktat ini berargumen bahwa pertempuran yang sesungguhnya bukan antara iman dan sains, tetapi tentang siapa yang menduduki pusat kebenaran dalam kehidupan bersama.

Pada tingkat praktis, traktat ini menyediakan orientasi bagi para akademisi, hakim, pembuat kebijakan, praktisi kecerdasan buatan, dan aktor masyarakat sipil yang mencari kerangka yang dapat memandu refleksi dan tindakan tanpa terjatuh pada teknokrasi murni ataupun voluntarisme yang sewenang-wenang.

Sasaran pembaca traktat ini mencakup para filsuf pengetahuan dan etika, sarjana dan praktisi hukum, pembuat kebijakan dan pejabat publik, peneliti dan insinyur di bidang kecerdasan buatan, serta mahasiswa dan warga yang menolak menerima bahwa martabat harus dikorbankan di altar efisiensi. Bagi semuanya, Traktat 1 tentang Logika Sabda ditawarkan sebagai undangan untuk berpikir, berargumentasi, dan bertindak di dalam sebuah arsitektur di mana martabat manusia bukan renungan belakangan, tetapi sumbu pusat tempat logika dan data harus ditempatkan.

Orientasi Metodologis

Traktat ini berdiri di dalam sebuah ekosistem teks yang lebih luas di bawah payung *The Cohesive Tetrad*. Sumber-sumber utamanya adalah buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* dan empat artikel jurnal yang membentuk korpus Traktat 1. Buku tersebut merumuskan arsitektur empat pilar dan peran Akhlak sebagai permukaan verifikasi. Keempat artikel jurnal menguji dan memurnikan arsitektur itu di arena perdebatan yang lebih spesifik, termasuk epistemologi, filsafat moral, nalar publik, teori hukum, dan etika kecerdasan buatan.

Secara metodologis, traktat ini menggunakan rekonstruksi konseptual, analisis normatif, dan narasi ilustratif. Rekonstruksi konseptual digunakan untuk memperjelas peran Sabda dan logika serta memetakan relasinya dengan martabat, hukum, dan data. Analisis normatif digunakan untuk menurunkan kriteria penilaian atas rancangan hukum dan kebijakan,

khususnya di titik-titik di mana manusia berisiko direduksi menjadi angka atau keluaran prosedural. Narasi ilustratif, seperti kasus dari program bantuan sosial, platform digital, dan sistem pengambilan keputusan algoritmik, digunakan bukan sebagai studi empiris dalam arti teknis, tetapi sebagai lensa yang menampakkan bagaimana arsitektur kebenaran bekerja dalam situasi konkret.

Traktat ini tidak berpretensi menyajikan analisis doktrinal yang lengkap atas sistem hukum tertentu, dan tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi perancangan algoritma. Kontribusinya terletak pada penyediaan kerangka tata kelola kebenaran yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh para spesialis di bidang masing-masing. Bagian-bagian berikut bergerak dari diagnosis atas zaman data, melalui peran empat artikel jurnal sebagai pisau bedah, menuju dua belas tesis Sabda Logika dan sebuah epilog peradaban yang menempatkan perjuangan demi martabat dalam horizon sejarah kemanusiaan yang lebih luas.

Pembukaan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia terasa semakin cerdas secara teknis, namun semakin bising di kedalaman batinnya. Kota-kota dipenuhi sensor, gawai menggantikan banyak percakapan tatap muka, dan hampir setiap keputusan penting kini meninggalkan jejak data yang dapat diproses. Layar yang dulu hanya menampilkan teks kini menampilkan skor risiko, pemeringkatan, dan rekomendasi yang tampak netral. Di balik skor dan grafik itu, kehidupan manusia dipadatkan menjadi titik-titik data yang dapat diurutkan, diklasifikasikan, dan dimonetisasi. Namun pada saat yang sama, banyak orang merasakan hidupnya melayang: ada rasa lelah, rasa tidak terlihat, dan rasa sedang digerakkan oleh mekanisme yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Di dalam lanskap ini, logika dan data perlahan naik ke takhta yang hampir tidak pernah digugat. Dalam rapat, frasa “data menunjukkan” sering kali menutup perdebatan. Di ruang sidang, citra objektivitas muncul ketika putusan mengutip skor risiko, model prediksi residivisme, atau rekam digital perilaku terdakwa. Dalam kebijakan publik, sistem penyaluran bantuan sosial dianggap berhasil ketika dasbor menampilkan angka serapan yang tinggi, meskipun warga yang paling lemah masih mengantre di loket yang sama. Kebenaran, yang dahulu dibicarakan dengan kosakata etika, teologi, dan filsafat, kini semakin dipersempit menjadi “apa yang dapat ditunjukkan secara statistik”.

Hukum berada di pusat pusaran ini. Di satu sisi, hukum ditugasi melindungi martabat manusia dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, hukum didorong untuk mengadopsi logika efisiensi dan logika data. Putusan harus dijatuhkan dengan cepat, beban perkara harus dikelola, dan risiko harus dikendalikan. Untuk semua itu, sistem digital, basis data historis, bahkan model kecerdasan buatan mulai dilibatkan. Aparat penegak hukum didorong untuk mengandalkan skor risiko, rekomendasi algoritmik, dan catatan digital sebagai bahan pertimbangan. Maka muncullah situasi yang ganjil: di atas kertas, hukum menjadi lebih cepat dan rapi, tetapi di lapangan, banyak orang biasa merasakan akses menuju keadilan justru semakin sulit karena wajah mereka telah digantikan oleh pola-pola statistik.

Traktat ini lahir dari ketegangan tersebut. Ia berangkat dari sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi menuntut jawaban yang berat: bagaimana hukum di era data dapat menjaga martabat manusia jika kompas normatifnya perlahan digantikan oleh kalkulasi risiko dan efisiensi prosedural. Apa yang terjadi ketika seorang ibu kehilangan hak atas tanah bukan karena proses

sidang yang adil dan terbuka, tetapi karena namanya tidak muncul di dalam basis data. Apa yang terjadi ketika seorang pemuda yang tumbuh di lingkungan miskin secara sistematis dinilai berisiko tinggi oleh model prediksi, sehingga setiap interaksi hukumnya diawasi dengan kecurigaan. Pada titik itu, martabat tidak lagi menjadi prinsip pertama; ia berubah menjadi residu dari logika sistem.

Menghadapi kenyataan semacam ini, kerangka *The Cohesive Tetrad* menawarkan cara lain untuk membaca zaman. Kerangka ini menolak ilusi bahwa logika murni dan data teknis dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran tertinggi. Sabda dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, sumber otoritas yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh dinegosiasikan oleh statistik, pasar, ataupun negara. Logika tetap dihargai sebagai penjaga koherensi, tetapi tidak lagi diizinkan merebut takhta. Qualia, yaitu pengalaman hidup mereka yang langsung merasakan putusan hukum dan operasi sistem digital, diakui sebagai bagian sah dari medan kebenaran. Mistika, *the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*, mengingatkan bahwa pencarian kebenaran hukum tidak pernah netral secara spiritual. Akhlak menuntut konsistensi antara kata, kebijakan, dan perilaku. *Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace*, memaksa kita memeriksa apakah niat luhur sistem hukum benar-benar tampak pada jejak yang ditinggalkannya pada tubuh dan kehidupan manusia.

Traktat ini bertumpu pada dua fondasi yang tidak dapat dipisahkan. Fondasi pertama adalah buku induk *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*, yang secara sistematis merumuskan arsitektur Sabda-Logika-Qualia-Mistika-Akhlak dan *Intention-Trace Alignment*. Fondasi kedua adalah empat artikel jurnal yang menguji kerangka ini di berbagai gelanggang: konfrontasi antara Sabda dan logika murni, kegagalan fondasi non-Sabda bagi martabat manusia, negosiasi Sabda di ruang nalar publik, serta tata kelola kebenaran pada simpang jalan antara hukum dan kecerdasan buatan. Traktat ini tidak mengulang isi buku induk dan tidak sekadar merangkum artikel-artikel tersebut. Ia mengambil inti pergulatan itu, menenunnya dalam bahasa Indonesia, dan memusatkannya pada satu gugus medan: martabat manusia dan hukum di era data.

Karena itu, pembaca tidak perlu memandang traktat ini sebagai “teks akademik” dalam arti sempit. Ia memang berakar pada literatur filsafat, teori hukum, etika, dan kajian kecerdasan buatan, tetapi bentuknya sengaja dijaga mengalir seperti esai panjang yang dapat dibaca oleh hakim, pembuat kebijakan, akademisi, insinyur sistem, aktivis, mahasiswa, dan warga biasa yang gelisah terhadap arah zaman. Di satu sisi, argumen-argumennya dijaga tetap tajam dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, bahasanya dibiarkan bernapas, memberi ruang bagi contoh, kisah, dan ilustrasi yang lahir dari pengalaman sehari-hari.

Poros utama traktat ini adalah relasi antara Sabda dan logika dalam desain dan praktik hukum di era data. Pertanyaan yang akan berulang dalam berbagai bentuk adalah: bagaimana Sabda memulihkan posisi martabat manusia ketika hukum dijalankan dengan bantuan algoritma dan basis data besar; bagaimana logika dapat bekerja dengan jujur tanpa mengeras menjadi dogma statistik; bagaimana qualia mereka yang paling rentan dapat terdengar di ruang sidang dan ruang kebijakan; bagaimana Mistika menyentuh nurani mereka yang memegang otoritas; bagaimana akhlak tercermin dalam prosedur harian lembaga; dan bagaimana *Intention-Trace Alignment* dapat menjadi cara menilai apakah sistem hukum sungguh-sungguh melindungi atau justru melukai.

Bab-bab berikut akan bergerak dari yang paling luas menuju yang semakin konkret. Kita mulai dari lanskap umum era data dan naiknya logika ke takhta, lalu menapaki kembali fondasi martabat manusia, memasuki gelanggang demokrasi dan nalar publik, turun ke ruang hukum dan kecerdasan buatan, menyentuh kehidupan sehari-hari dan ruang digital, menelaah universitas sebagai simpul tata kelola kebenaran, dan akhirnya memadatkan semuanya ke dalam tesis-tesis ringkas serta sebuah epilog peradaban. Dengan susunan ini, traktat ini diharapkan tidak hanya menyediakan kerangka teoretis, tetapi juga mengubah cara pembaca merasakan dan menimbang: ketika berhadapan dengan putusan hukum, desain sistem digital, kebijakan yang mengklaim berbasis data, dan jejak yang semuanya tinggalkan dalam kehidupan mereka yang suaranya paling lirih.

Era data hanya dapat dibaca dengan jernih ketika kita berani bertanya bukan hanya apa yang dihitung, melainkan siapa yang terluka oleh cara kita menghitung.

*
**

Bagian I - Zaman Data, Takhta Logika, dan Ilusi Netralitas

Bayangkan sebuah program bantuan sosial yang digadang-gadang sebagai terobosan besar. Pemerintah menjanjikan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan basis data terpadu. Setiap rumah tangga diberi skor: penghasilan, status rumah, aset, catatan pajak, dan sejumlah indikator lain diramu menjadi angka yang tampak rapi. Dari layar monitor di kantor pusat, kemiskinan terpetakan seperti permukaan peta panas yang penuh warna. Di atas kertas, ini terlihat seperti kemenangan rasionalitas.

Namun di lapangan, kisah lain berjalan pelan. Seorang ibu yang hidup di rumah kontrakan sempit, tanpa rekening bank dan tanpa slip gaji formal, mendapati namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Data administrasi tentang dirinya nyaris tidak ada. Di sisi lain, ada keluarga yang kondisi ekonominya jauh lebih baik namun tercatat di basis data sebagai berpenghasilan rendah karena kombinasi kesalahan input dan kelonggaran verifikasi. Ketika ibu tadi datang ke loket dan bertanya mengapa ia tidak terdaftar, jawaban yang ia terima sederhana: “Data Ibu tidak memenuhi syarat, kami hanya mengikuti sistem.”

Di sinilah kita melihat wajah zaman data. Bukan karena data itu sendiri jahat, tetapi karena cara kita menaruh kepercayaan kepadanya. Data diperlakukan seperti cermin yang jujur, padahal apa yang ia pantulkan sangat bergantung pada apa yang pernah dipilih untuk dicatat, cara pencatatan dilakukan, dan siapa yang berada di luar bingkai. Ketika logika algoritmik diberi kewenangan penuh untuk memutuskan siapa yang layak dibantu dan siapa yang tidak, kita sebenarnya sedang menyerahkan telos kebijakan kepada struktur yang hanya memahami konsistensi internal, bukan horizon martabat.

Jurnal Sabda, *Pure Logic, and the Architecture of Truth Governance* telah membongkar akar persoalan ini dari sisi epistemik. Di sana ditunjukkan bahwa pure logic tidak pernah benar-benar murni. Setiap sistem logis yang bekerja di dunia sosial selalu bergerak di dalam horizon nilai tertentu: apa yang dianggap relevan, apa yang dihitung, apa yang diabaikan, dan apa yang boleh dikorbankan. Ketika logika diposisikan sebagai sumber terakhir kebenaran, seakan-akan ia berdiri di atas semua nilai, yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Logika hanya menjadi pelayan patuh bagi nilai yang sudah diam-diam ditempatkan di panggung sejak awal.

Zaman data memperkuat ilusi bahwa logika dapat berdiri sendiri. Ketika kita berkata “data menunjukkan”, kita sering melupakan satu hal penting: data tidak pernah lahir dari tanah yang steril. Ia lahir dari sejarah administrasi, dari hubungan kuasa, dari pilihan prosedural tentang siapa yang dicatat dan siapa yang dibiarkan tidak terlihat. Wilayah-wilayah yang jarang dikunjungi petugas, pekerjaan informal yang tidak memiliki jejak resmi, kelompok yang tidak nyaman berhadapan dengan birokrasi, semua ini cenderung menghilang dari peta. Ketika logika lalu diminta memutuskan berdasarkan peta yang timpang ini, hasilnya adalah ketidakadilan yang tampak rapi.

The Cohesive Tetrad membaca situasi ini sebagai krisis arsitektur kebenaran, bukan sekadar krisis informasi. Bukan hanya karena data bisa salah, tetapi karena struktur penentu kebenaran dan telos telah digeser. Sabda yang seharusnya menjadi kompas utama, Sabda yang dalam TCT dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, pelan-pelan dipaksa mundur ke ruang privat. Di ruang publik, posisi kompas diambil alih oleh gabungan antara logika teknik, target anggaran, dan narasi efisiensi. Sabda masih disebut di mimbar, tetapi jarang hadir di meja rapat ketika rumus-rumus kebijakan disusun.

Perlu ditekankan: traktat ini tidak sedang mengutuk logika dan data. Keduanya mutlak dibutuhkan. Tanpa logika, argumen menjadi kacau, kebijakan mudah terseret emosi sesaat, dan tafsir Sabda sekalipun dapat melenceng tanpa filter koherensi. Tanpa data, kita hanya menebak. Namun masalah dimulai ketika logika dan data diminta mengerjakan tugas yang bukan milik mereka, yaitu menentukan sendiri apa yang wajib dianggap benar, siapa yang layak dihormati, dan ke mana peradaban seharusnya bergerak.

Dalam The Cohesive Tetrad, logika ditempatkan sebagai penjaga koherensi, bukan penentu telos. Ia memastikan bahwa definisi tidak saling bertentangan, premis tidak mengkhianati kesimpulan, dan argumen tidak melompat seenaknya. Ia juga menguji konsistensi tafsir Sabda yang diusulkan, sehingga Sabda tidak dijadikan tameng untuk pembenaran kepentingan. Namun logika tidak boleh memutuskan sendirian apa itu martabat dan untuk siapa kebijakan dirancang. Keputusan seperti ini menuntut Sabda yang berbicara tentang nilai tertinggi, qualia yang mengungkapkan pengalaman hidup mereka yang terdampak, Mistika yang mengingatkan niat terdalam, akhlak yang tampak dalam kebiasaan, serta Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, yang menghubungkan klaim niat baik dengan jejak nyata yang ditinggalkan.

Contoh program bantuan sosial tadi dapat dibaca ulang dalam kerangka Tetrad. Sabda bertanya: apakah kebijakan ini memuliakan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, atau sekadar memotong angka kemiskinan di statistik. Logika memeriksa: apakah indikator yang dipakai untuk mengukur kemiskinan konsisten dan cukup mewakili realitas, atau justru selektif. Qualia mengundang kita mendengar suara ibu yang ditolak di loket, rasa malu yang ia rasakan, rasa tidak dipercaya, rasa ditinggalkan. Mistika mengingatkan bahwa setiap keputusan pejabat, dari perancang sistem sampai petugas di garis depan, adalah bagian dari perjalanan spiritualnya sendiri menuju perjumpaan dengan Tuhan. Akhlak tampak dalam cara petugas menjawab keluhan: apakah ada empati, keterbukaan, dan usaha mencari solusi, atau hanya kalimat “saya hanya menjalankan aturan”. Dan Intention-Trace Alignment menguji klaim kementerian bahwa program ini dibuat “demi keadilan sosial”: apakah setelah beberapa tahun, mereka yang paling lemah hidup lebih layak, atau justru semakin tersisih.

Zaman data tidak otomatis jahat. Ia memberi peluang untuk melihat pola yang dulu tersembunyi. Kita dapat memetakan kerentanan, memantau dampak kebijakan, dan mengoreksi kesalahan dengan bukti yang kuat. Namun peluang itu hanya akan menjadi kenyataan jika data dan logika ditempatkan kembali dalam arsitektur yang benar. Tanpa Sabda di pusat, data cenderung tunduk kepada telos yang ditentukan pasar, negara, atau mayoritas. Tanpa qualia, data menjadi abstraksi yang melupakan rasa sakit dan rasa lega manusia nyata. Tanpa Mistika, niat baik di dokumen mudah bergeser menjadi strategi menjaga citra. Tanpa akhlak, prosedur yang baik di atas kertas berubah menjadi kekerasan halus di lapangan. Tanpa Intention-Trace Alignment, kita puas dengan slogan dan tidak pernah mengecek jejak.

Di titik ini, kita mulai melihat bahwa persoalan utama zaman data bukan sekadar hoaks atau misinformasi. Itu gejala di permukaan. Yang lebih dalam adalah pergeseran otoritas: siapa yang berhak berkata “ini benar dan ini baik”. Ketika logika teknis yang bertumpu pada data mengambil alih peran itu, sementara Sabda didorong ke sudut privat, peradaban bergerak di atas fondasi yang rapuh. Ia tampak stabil selama angka-angkanya membaik, tetapi runtuh ketika berhadapan dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh statistik, seperti: mengapa seorang anak yang tidak pernah bisa berdiri tetap memiliki martabat penuh, dan mengapa satu keputusan di ruang rapat bisa menjadi penentu apakah hidupnya akan sedikit lebih ringan atau jauh lebih berat.

Bagian ini hanya pembukaan. Ia ingin menggeser pandangan bahwa masalah kebenaran di era digital dapat diselesaikan dengan literasi informasi semata. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keterampilan memilah berita. Kita membutuhkan arsitektur yang membedakan dengan tegas antara peran Sabda dan peran logika, antara otoritas normatif dan alat teknis, antara telos dan sarana. Di bagian-bagian berikut, arsitektur ini akan diuji di medan yang lebih spesifik: martabat dan telos manusia, demokrasi dan public reason, hukum dan kecerdasan buatan, kehidupan sehari-hari, serta universitas dan ekosistem pengetahuan.

Dengan demikian, pertarungan yang akan digarap traktat ini bukan pertarungan antara iman dan ilmu secara dangkal, tetapi pertarungan tentang siapa yang duduk di pusat tata kelola kebenaran. Zaman data menyediakan banyak senjata bagi logika. Pertanyaannya bukan apakah senjata itu harus dibuang, melainkan kepada siapa senjata itu harus tunduk.

Ketika angka naik ke takhta, manusia turun ke catatan kaki; di titik itulah martabat mulai hilang dari rumus.



Bagian II - Empat Artikel Jurnal sebagai Empat Pisau Bedah

Sebelum traktat ini berbicara lebih jauh, penting untuk mengingat bahwa ia tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari sebuah “laboratorium” yang sudah bekerja cukup lama: buku *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* dan empat artikel jurnal Sabda yang secara sistematis menguji Sabda dan logika di medan teori yang paling keras. Jika buku merupakan tubuh utuh yang memaparkan kerangka, maka keempat artikel itu adalah pisau bedah yang menembus lapisan-lapisan spesifik dari krisis kebenaran kontemporer. Traktat ini bergerak dengan asumsi bahwa pekerjaan pisau-pisau itu sudah dilakukan. Tugasnya sekarang adalah menjahit kembali luka-luka bedah itu menjadi satu tubuh pemahaman yang bisa berjalan di tengah masyarakat luas.

Empat artikel tersebut bekerja di empat medan yang berbeda, tetapi saling terhubung. Yang pertama menguji klaim pure logic sebagai arsitek tunggal tata kelola kebenaran. Yang kedua menelisik fondasi martabat dan telos manusia. Yang ketiga menghadap ke panggung politik dan nalar publik. Yang keempat masuk ke ruang sidang dan server, ke titik perjumpaan antara hukum, data, dan kecerdasan buatan. Bila kita melihatnya dari kejauhan, keempatnya membentuk semacam salib epistemik: satu garis vertikal yang menarik Sabda turun ke wilayah logika, dan satu garis horizontal yang membentangkan Sabda-Logika ke ranah martabat, demokrasi, dan teknologi.

Pisau pertama adalah artikel Sabda, Pure Logic, and the Architecture of Truth Governance: Why Logic Cannot Rule Alone and Why Truth Governance Requires Sabda. Di sini pertanyaan utamanya sangat telanjang: dapatkah logika murni, yang bekerja hanya dengan premis dan kesimpulan, diberi mandat untuk mengatur kebenaran secara total. Dalam banyak tradisi modern, jawaban implisitnya adalah ya. Asal sebuah klaim bisa dinyatakan secara rasional, konsisten, dan bebas kontradiksi, kita merasa sudah cukup. Artikel ini menolak rasa cukup itu. Ia menunjukkan bahwa di balik setiap sistem rasional selalu ada horizon nilai yang tidak dibentuk oleh logika, tetapi diterima, diandaikan, atau bahkan diselundupkan. Pilihan tentang apa yang dijadikan premis, apa yang disebut relevan, dan apa yang boleh dikorbankan tidak pernah lahir dari logika itu sendiri.

Artikel pertama ini menelusuri bagaimana epistemologi modern memindahkan otoritas dari Sabda ke logika dengan alasan ingin melindungi pemikiran dari dogmatisme. Namun di sepanjang perjalanan, logika perlahan berubah menjadi dogma baru. Artikel tersebut mematahkan ilusi bahwa pure logic bisa menentukan telos. Ia merumuskan ulang peran logika sebagai penjaga koherensi dalam arsitektur yang lebih luas: Sabda sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, qualia sebagai penjaga pengalaman hidup, Mistika sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, akhlak sebagai permukaan karakter, dan Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace sebagai mekanisme audit. Dengan kata lain, pisau pertama memotong klaim supremasi logika di tingkat dasar dan membuka ruang bagi *The Cohesive Tetrad* sebagai arsitektur tata kelola kebenaran.

Pisau kedua adalah artikel Sabda, Human Dignity, and Telos: Reframing Moral Foundations Beyond Pure Logic. Jika pisau pertama bekerja di ruang epistemologi, pisau kedua masuk ke jantung etika: dari mana martabat manusia mendapatkan fondasinya, dan apa telos hidup yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan yang paling lemah. Di sini artikel menelusuri tiga jalur besar yang selama ini mendominasi diskursus martabat: pendekatan kapasitas, pendekatan evolusi, dan pendekatan kontrak sosial. Di atas meja teori, ketiganya tampak meyakinkan.

Manusia dihormati karena kapasitas rasionalnya, karena kedudukannya dalam proses evolusi, atau karena perannya sebagai pihak yang setara dalam kontrak.

Tetapi pisau kedua mulai bekerja ketika konsep-konsep itu dibawa ke sisi ranjang mereka yang paling rentan. Anak dengan disabilitas berat, lansia demensia, pengungsi tanpa dokumen, komunitas adat yang tidak diakui, semua menjadi “tes stres” yang mengungkapkan kelemahan fondasi. Artikel ini berdialog dengan Kittay, Nussbaum, dan tradisi teori dependency serta capabilities, mengakui langkah maju mereka sekaligus menunjukkan bahwa pada titik tertentu mereka harus meminjam bahasa yang lebih dekat kepada Sabda tanpa menyebutnya. Kesimpulan utamanya tegas: fondasi martabat dan telos yang hanya bertumpu pada kapasitas, evolusi, atau kontrak tidak mampu menjamin martabat penuh bagi mereka yang paling lemah tanpa tergelincir ke kompromi halus. Hanya Sabda yang menyatakan martabat, bukan merundingkannya, yang dapat menahan seluruh bangunan ini. Dengan demikian, pisau kedua mengafirmasi Sabda sebagai fondasi normatif martabat dan telos, seraya mengikatnya kembali ke The Cohesive Tetrad agar fondasi itu operasional, bukan sekadar deklarasi.

Pisau ketiga, artikel Sabda, Public Reason, and Plural Societies: The Cohesive Tetrad as an Architecture for Democratic Truth Governance, bergerak ke ranah politik dan nalar publik. Di sini medan pertempurannya lain: bagaimana Sabda dapat hadir di ruang demokrasi yang majemuk tanpa berubah menjadi alat penindasan. Tradisi Rawls dan Habermas menawarkan resep public reason yang, untuk melindungi keadilan prosedural, cenderung mendorong alasan religius ke ranah privat. Warga dipersilakan memiliki Sabda di hati, tetapi ketika berbicara di forum publik mereka diminta menerjemahkan alasan itu ke dalam bahasa yang dianggap netral.

Artikel ini menunjukkan paradoks yang lahir dari resep tersebut. Ketika Sabda diprivatisasi, ruang publik tidak menjadi kosong. Ia segera diisi oleh kekuatan lain: negara, pasar, opini mayoritas, dan wacana teknokratis. Nilai tertentu naik takhta tetapi tidak mau mengakui dirinya sebagai horizon normatif. Demokrasi tetap memakai kata martabat, keadilan, dan kebebasan, namun kata-kata ini menjadi rentan dibengkokkan karena kehilangan titik jangkar di luar permainan kekuasaan. Pisau ketiga mengusulkan konsepsi nalar publik multi register yang memungkinkan Sabda hadir sebagai Sabda tanpa mematikan dialog rasional. Warga boleh menyebut Sabda sebagai sumber terdalam komitmennya, dengan syarat komitmen itu siap diuji oleh logika, dibandingkan dengan pengalaman korban, dan dibaca jejaknya melalui Intention-Trace Alignment. Dengan demikian, pisau ketiga tidak mengajak demokrasi mundur ke teokrasi, tetapi mengajak demokrasi mengakui bahwa netralitas penuh terhadap horizon transenden adalah ilusi.

Pisau keempat, artikel Sabda, Logic, and Truth Governance: The Cohesive Tetrad for Law and Artificial Intelligence, mengambil langkah terakhir ke garis depan zaman data. Di sini hukum positif dan kecerdasan buatan bertemu. Konteksnya bukan lagi hanya debat teoritis, tetapi kasus konkret: sistem penilaian risiko dalam peradilan pidana, algoritma pemeringkatan kredit, model deteksi kecurangan, dan berbagai bentuk kecerdasan buatan yang mulai menyentuh hak dasar manusia. Artikel ini membongkar bagaimana data historis yang bias dan kebijakan masa lalu yang timpang dapat dibungkus ulang menjadi skor risiko yang tampak netral. Hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan yang mengandalkan skor ini merasa terlindungi oleh “obyektivitas sistem”, padahal yang terjadi adalah reproduksi ketidakadilan dengan wajah teknis.

Pisau keempat mengarahkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka audit. Sabda menolak reduksi manusia menjadi angka dan menegaskan bahwa bahkan yang bersalah sekalipun tetap

membawa martabat yang tidak boleh dihapus. Logika diminta jujur tentang konstruksi model dan pemilihan variabel. Qualia mereka yang terdampak - rasa dipastikan bersalah, rasa kehilangan kesempatan, rasa dicap - ikut duduk di meja evaluasi. Mistika mengaitkan keputusan teknis dengan riwayat spiritual pengambil keputusan. Akhlak menuntut keberanian untuk menyimpang dari rekomendasi algoritma ketika nurani yang tunduk kepada Sabda berkata lain. Intention-Trace Alignment lalu memeriksa klaim “kecerdasan buatan untuk keadilan”: apakah jejak yang ditinggalkan sistem ini selaras dengan niat yang diumumkan. Dengan cara ini, pisau keempat memperlihatkan bahwa Sabda-Logika bukan hanya cara membaca teks atau teori, tetapi kerangka yang dapat menyentuh kode, server, dan ruang sidang.

Jika keempat artikel ini ditempatkan berdampingan, kita melihat satu pola yang konsisten. Pisau pertama mengikis supremasi logika di tingkat epistemik. Pisau kedua mengembalikan martabat dan telos ke pangkuan Sabda. Pisau ketiga membuka ruang bagi Sabda di tengah demokrasi yang majemuk tanpa mematikan rasionalitas publik. Pisau keempat memperingatkan bahwa tanpa Sabda-Logika, hukum dan kecerdasan buatan dapat berubah menjadi mesin yang mengeras kan ketidakadilan. Keempatnya bersama-sama menegaskan bahwa krisis zaman data bukan sekadar soal informasi yang salah, melainkan soal arsitektur otoritas: siapa yang berhak menjadi sumber normatif tertinggi.

Traktat ini mengambil hasil kerja keempat pisau itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Ia tidak mengulang seluruh argumentasi teknis yang telah disusun dengan disiplin di jurnal - itu tetap wilayah artikel ilmiah yang berfungsi di dalam ekosistem. Yang traktat lakukan adalah menggerakkan hasil bedah tersebut ke ruang yang lebih luas, menghubungkan serpihan-serpihan bedah menjadi narasi yang dapat diikuti oleh pembaca di luar lingkaran spesialis. Karena itu, ketika di bagian-bagian berikut muncul nama Aisyah, Rafi, mahasiswa, ibu yang ditolak di loket, atau universitas yang terpecah antara reputasi dan amanah, sebenarnya mereka semua sedang berdiri di atas lantai konseptual yang telah dicor lebih dulu melalui buku dan artikel-artikel The Cohesive Tetrad.

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa traktat Sabda-Logika lahir bukan sebagai karangan bebas, tetapi sebagai destilasi dan perluasan. Destilasi, karena ia mengambil inti gagasan yang berulang kali muncul dalam buku dan empat artikel, lalu memadatkannya dalam bentuk tesis-tesis yang lebih mudah diingat. Perluasan, karena ia membawa gagasan itu berjalan melampaui ruang akademik formal, menyentuh keluarga, ruang kerja, ruang digital, kampus, dan institusi hukum dengan bahasa yang sedikit lebih dekat dengan telinga sehari-hari.

Setelah memahami peran empat artikel jurnal sebagai empat pisau bedah, kita siap masuk ke medan pertama yang paling sensitif: martabat manusia dan telos hidup. Sebab sekuat apa pun arsitektur epistemik dan politik yang kita bangun, semuanya akan runtuh bila tidak sanggup menjawab dengan jujur pertanyaan paling sederhana dan paling berat ini: mengapa manusia, terutama yang paling lemah dan paling sulit “menguntungkan sistem”, tetap harus dihormati secara penuh.

Jurnal yang jujur bukan gudang sitasi, melainkan ruang bedah di mana ambisi logika diperiksa oleh martabat.

Bagian III - Martabat, Telos, dan Kegagalan Fondasi Non-Sabda

Setiap kali kita menyebut kata martabat, seharusnya yang terbayang bukan hanya pasal konstitusi atau slogan lembaga internasional, tetapi wajah-wajah yang tidak punya kemampuan membela diri. Anak yang tidak pernah bisa duduk tanpa bantuan. Lansia yang tidak lagi mengenali anaknya sendiri. Perempuan yang tinggal di kursi roda di ujung gang sempit dan hanya bisa melihat dunia sejauh pintu rumah terbuka. Pengungsi yang berdiri di depan loket negara tanpa satu pun dokumen yang diakui.

Di hadapan mereka, semua teori martabat diuji tanpa ampun. Jika konsep martabat hanya terdengar kokoh di seminar tetapi mulai goyah begitu kita berdiri di samping ranjang rumah sakit atau di depan tenda pengungsian, berarti ada sesuatu yang keliru di fondasinya.

Artikel jurnal Sabda, Human Dignity, and Telos: Reframing Moral Foundations Beyond Pure Logic mengerjakan bedah yang teliti atas fondasi-fondasi itu. Traktat ini mengambil hasil bedah tersebut lalu mengembangkannya dengan bahasa yang lebih mengalir, tanpa melepaskan ketegangan intelektual yang sudah dikerjakan di ranah jurnal.

3.1 Kapasitas: ketika martabat digantung pada kemampuan yang tidak dimiliki semua orang

Pendekatan kapasitas biasanya berangkat dari intuisi yang tampak kuat. Manusia dianggap bernilai istimewa karena memiliki kemampuan tertentu: rasionalitas, otonomi, kesanggupan menyusun rencana hidup, kesadaran diri, kemampuan bertindak berdasarkan alasan. Dari sini kemudian ditarik langkah normatif: karena semua manusia (secara ideal) memiliki kapasitas-kapasitas ini, semua manusia layak dihormati sebagai pribadi bermartabat.

Di atas kertas, rangkaian ini tampak rapi. Ia sejalan dengan tradisi filsafat moral yang menempatkan “rasional nature” sebagai dasar nilai manusia. Namun begitu kita membawa kerangka ini ke hadapan Aisyah, seorang anak yang sejak lahir tidak mampu berbicara, tidak mampu berdiri, dan seluruh kebutuhan dasarnya harus dipenuhi oleh orang lain, struktur itu mulai retak.

Pertama, pendekatan kapasitas selalu tergoda membuat dua lapis martabat. Ada martabat “penuh” bagi mereka yang kapasitasnya utuh, dan martabat “dengan catatan” bagi mereka yang sangat terbatas. Untuk menghindari kesan kejam, teori kemudian mulai berbicara tentang kapasitas potensial, kapasitas yang diwakilkan keluarga, atau kapasitas yang tersebar di dalam jaringan relasi perawatan. Namun istilah-istilah ini hanya menunda masalah. Pada titik tertentu, logika kapasitas tetap menempatkan sebagian manusia sebagai kasus tepi yang harus dijelaskan belakangan.

Kedua, pendekatan kapasitas cenderung menggambar manusia ideal lalu memaksa semua orang mendekat ke gambar itu. Orang yang tidak bisa memenuhi standar ideal ini, entah karena disabilitas berat atau karena kondisi sosial yang sangat menekan, selalu berada di posisi defensif. Mereka harus “dibuktikan” bernilai. Martabat tidak lagi dinyatakan, tetapi dinegosiasikan berdasarkan seberapa dekat seseorang dengan model rasional otonom yang dijadikan acuan.

Ketiga, secara diam-diam pendekatan kapasitas menyelundupkan sesuatu yang tidak pernah diakui. Ia mengandaikan bahwa kapasitas tertentu memiliki nilai yang tak ternilai dan karena

itu melahirkan kewajiban menghormati. Namun dari mana nilai istimewa kapasitas ini datang tidak pernah sungguh dijelaskan. Apakah dari fakta biologis. Apakah dari intuisi moral yang dianggap “self evident”. Ataukah dari tradisi religius yang tidak diucapkan. Di titik ini, artikel jurnal menunjukkan bahwa pendekatan kapasitas sering bergantung pada horizon makna yang sangat dekat dengan Sabda, tetapi menolak menyebutnya.

Traktat ini tidak hendak meremehkan seluruh tradisi kapasitas. Ia mengakui bahwa menjaga ruang bagi rasionalitas dan otonomi itu penting. Tetapi ia menegaskan satu hal: selama martabat digantungkan pada kapasitas, mereka yang paling lemah akan selalu berada di ambang pintu, menunggu justifikasi tambahan agar boleh masuk.

3.2 Evolusi: ketika kisah asal-usul diminta menanggung kewajiban moral

Pendekatan kedua menempuh jalan lain. Ia tidak langsung berbicara tentang kapasitas sekarang, tetapi tentang perjalanan panjang spesies manusia. Dalam kisah ini, manusia dianggap istimewa karena merupakan hasil proses evolusi yang melahirkan bahasa, kebudayaan, teknologi, dan kompleksitas sosial. Martabat kemudian dipahami sebagai penghormatan terhadap posisi manusia dalam jaringan kehidupan.

Sebagai penjelasan ilmiah, narasi evolusi membantu kita melihat bahwa manusia tidak jatuh dari langit sebagai makhluk yang sudah jadi. Kita muncul melalui proses panjang, penuh kontingensi, penuh kerentanan. Namun ketika narasi ini diminta menanggung beban normatif martabat, kontradiksi tak terhindarkan.

Seleksi alam tidak memiliki konsep kewajiban moral. Ia mengenal adaptasi, reproduksi, keberlangsungan spesies, tetapi tidak mengenal perintah “jagalah yang lemah dan jangan tinggalkan mereka”. Jika martabat diletakkan di atas narasi ini, kita terpaksa menyelundupkan nilai yang tidak pernah diberikan oleh seleksi alam itu sendiri.

Ada upaya untuk keluar dari masalah ini, misalnya dengan mengatakan bahwa justru karena kita adalah satu-satunya spesies yang memahami proses evolusi, kita memikul tanggung jawab moral. Namun dari mana tanggung jawab itu muncul. Evolusi hanya menjelaskan bagaimana kita sampai di sini, bukan mengapa kita wajib memperlakukan yang lemah dengan hormat. Begitu pernyataan “kita wajib melindungi yang rentan” keluar, kita sebenarnya sudah melampaui ranah evolusi dan masuk ke wilayah normatif yang lain.

Artikel jurnal yang menjadi dasar traktat ini menyimpulkan secara tajam: narasi evolusi sangat penting sebagai penjelasan “bagaimana”. Tetapi begitu kita memintanya menjawab “mengapa setiap individu, termasuk yang paling lemah, wajib dihormati”, narasi itu kehabisan bahasa. Pada titik ini, kita kembali membutuhkan Sabda yang berkata bahwa manusia dimuliakan bukan karena lintasan evolusinya, tetapi karena dipanggil dan disapa oleh Tuhan.

3.3 Kontrak sosial: ketika martabat digantung pada status keanggotaan

Pendekatan ketiga muncul dari tradisi kontrak sosial dan teori politik modern. Di sini martabat dikaitkan dengan posisi manusia sebagai pihak yang setara dalam perjanjian. Warga digambarkan duduk di meja kontrak, nyata atau hipotetis, dan menyepakati prinsip dasar hidup bersama. Martabat kemudian dihubungkan dengan hak-hak yang dijamin oleh struktur kontrak tersebut.

Pendekatan ini berhasil menjelaskan banyak hal penting: mengapa kekuasaan negara harus dibatasi, mengapa hak minoritas perlu dilindungi, mengapa kebebasan dasar tidak boleh dikorbankan sepenuhnya untuk kepentingan mayoritas. Namun ketika kita bertanya tentang mereka yang tidak pernah sungguh duduk di meja kontrak, masalah serius muncul.

Pengungsi tanpa kewarganegaraan, buruh migran yang diselundupkan, komunitas adat yang tidak diakui negara, anak kecil yang belum memiliki kapasitas legal, semua ini tidak pernah secara realistis hadir sebagai pihak yang setara di meja perundingan. Bila martabat mereka bergantung pada status keanggotaan dalam kontrak, mereka akan selalu dalam posisi paling rapuh.

Sebagian teori mencoba memperbaiki ini dengan berbicara tentang “hypothetical consent”. Seolah-olah, andaikan mereka berada di posisi setara, mereka akan setuju dengan prinsip-prinsip keadilan tertentu. Namun di sini The Cohesive Tetrad menyoroti sesuatu: semakin jauh kita bergerak ke wilayah hipotetik, semakin besar jarak antara martabat yang diucapkan dan martabat yang sungguh dialami.

Dalam praktik kebijakan, warga yang di luar kontrak konkret sering diperlakukan sebagai residu. Mereka diselesaikan melalui toleransi administratif, bukan diakui sebagai pemegang martabat penuh. Artikel jurnal menunjukkan bahwa jika kontrak masih dianggap sumber tertinggi martabat, fondasi normatif keadilan akan selalu condong kepada mereka yang sudah “masuk sistem” dan meninggalkan mereka yang tidak memiliki kursi di meja.

3.4 Struktur tersembunyi: martabat sebagai fungsi, bukan sebagai sabda

Di balik tiga pendekatan tadi, sebenarnya ada satu pola struktural yang sama, meskipun kosakatanya berbeda. Kita bisa menyederhanakannya ke dalam bentuk berikut:

1. Cari satu sifat atau keadaan yang dianggap istimewa: kapasitas rasional, posisi dalam evolusi, keanggotaan dalam kontrak.
2. Nyatakan bahwa sifat itu dimiliki semua manusia atau setidaknya dimiliki secara cukup oleh kebanyakan manusia.
3. Dari situ, turunkan kewajiban moral untuk menghormati semua manusia.

Struktur ini tampak logis. Tetapi ia menjadikan martabat sebagai fungsi dari sesuatu yang lain. Martabat bukan lagi titik berangkat, melainkan hasil perhitungan. Ia harus dibuktikan melalui $F(x)$, entah F itu kapasitas, evolusi, atau kontrak.

Masalahnya, setiap kali kita bertemu manusia yang tidak sesuai dengan F yang dirancang, kita terpaksa menulis catatan kaki. Anak yang tidak punya kapasitas rasional “sepenuhnya”, kelompok yang secara evolutif dianggap “kurang berkontribusi”, atau warga yang secara legal tidak diakui, semua ini menjadi kasus batas.

Artikel jurnal menunjukkan bahwa di sinilah fondasi non-Sabda gagal. Kegagalan itu bukan karena kurang pintar atau kurang halus. Ia bersifat struktural. Selama martabat dipahami sebagai fungsi dari sesuatu yang lain, akan selalu ada ruang untuk menegosiasikan siapa yang layak dihormati sepenuhnya dan siapa yang boleh dikurangi.

3.5 Sabda: martabat dinyatakan, bukan dihitung

Di titik inilah Sabda kembali muncul bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai koreksi radikal. Dalam arsitektur *The Cohesive Tetrad*, Sabda dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos.

Artinya, martabat manusia bukan kesimpulan, tetapi deklarasi. Ia tidak muncul setelah analisis kapasitas, tidak lahir dari pembacaan historis atas evolusi, dan tidak bergantung pada keanggotaan dalam kontrak. Martabat dinyatakan oleh Sabda sebelum semua itu. Manusia dimuliakan karena ia diseru, dipanggil, dan diminta bertanggung jawab di hadapan Tuhan.

Konsekuensinya sangat konkret. Aisyah, yang tidak akan pernah bisa menandatangani kontrak atau mengikuti ujian rasionalitas, berdiri di hadapan Sabda sebagai pribadi yang martabatnya penuh, tidak bisa dinegosiasikan. Pengungsi tanpa dokumen memiliki martabat yang sama dengan warga yang memegang paspor diplomatik. Lansia yang tidak lagi ingat namanya sendiri tidak turun derajat martabatnya hanya karena memori kognitifnya memudar.

Sabda juga mengubah cara kita memahami telos hidup manusia. Jika telos ditentukan oleh kapasitas atau kontrak, hidup yang baik mudah direduksi menjadi hidup yang paling banyak mencapai potensi, paling tinggi produktivitas, atau paling luas pilihan. Dalam horizon Sabda, telos adalah jawaban terhadap panggilan.

Seorang ibu yang menghabiskan hidupnya merawat anak sakit mungkin tidak pernah tampil di panggung prestasi dunia. Namun dalam horizon Sabda, ia bisa lebih dekat kepada telos hidup manusia dibanding mereka yang namanya muncul di banyak laporan, tetapi berdiri di atas korban yang tak terlihat.

3.6 Dari fondasi ke arsitektur: peran *The Cohesive Tetrad*

Fondasi Sabda saja sudah cukup untuk meruntuhkan klaim supremasi kapasitas, evolusi, dan kontrak sebagai dasar terakhir martabat. Tetapi agar fondasi ini tidak membeku menjadi slogan, *The Cohesive Tetrad* mengembangkannya menjadi arsitektur hidup yang dapat diaudit. Enam pilar menjadi saling terkait: Sabda, logika, qualia, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace.

Sabda menyatakan martabat dan telos. Logika memastikan bahwa tafsir atas Sabda dan kebijakan yang mengatasnamakan martabat tidak jatuh ke dalam kontradiksi dan tidak menyalahgunakan teks. Qualia mengangkat pengalaman mereka yang terdampak sebagai data moral: rasa dipermalukan, rasa tidak dianggap, rasa dihargai.

Mistika, yang didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengikat seluruh proses ini pada kesadaran bahwa setiap keputusan yang menyentuh martabat manusia adalah bagian dari perjalanan spiritual, bukan hanya keputusan teknis. Akhlak terlihat dalam kebiasaan konkret: cara dokter menyapa pasien yang tidak bisa menjawab, cara pejabat menyusun antrian bantuan, cara guru memperlakukan murid yang lambat.

Akhirnya, Intention-Trace Alignment menjadi mekanisme audit yang tidak memberi ruang bagi kemunafikan struktural. Negara, lembaga, dan individu boleh mengklaim bahwa mereka

menjunjung martabat. Namun beberapa tahun kemudian, yang diperiksa adalah jejak yang tertinggal. Apakah anak-anak dengan disabilitas hidup lebih terjamin. Apakah pengungsi lebih terlindungi. Apakah lansia tidak lagi diperlakukan sebagai beban. Jika jejaknya berlawanan dengan niat yang diucapkan, maka dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, martabat hanya dipakai sebagai kata, bukan dijalankan sebagai kewajiban.

Dengan demikian, ketika traktat ini menyatakan bahwa fondasi non-Sabda gagal menopang martabat dan telos, itu bukan serangan sentimental terhadap modernitas. Itu kesimpulan setelah menelusuri secara metodis kelemahan struktur kapasitas, evolusi, dan kontrak, lalu menguji mereka di hadapan kehidupan orang-orang yang paling lemah.

Sabda tidak membatalkan ilmu, tidak menolak logika, dan tidak mengabaikan data. Sabda justru menempatkan semuanya pada posisi yang semestinya: sebagai alat yang harus tunduk kepada martabat yang sudah dinyatakan sejak awal. Dari titik ini, kita siap melangkah ke medan berikutnya: bagaimana fondasi Sabda atas martabat dan telos ini berhadapan dengan demokrasi, public reason, dan ruang publik yang mengaku netral, tetapi diam-diam digerakkan oleh kekuatan lain.

Martabat tidak lahir dari kapasitas, evolusi, atau kontrak; martabat hanya sah ketika Sabda mengucapkannya sebagai titah.

**

Bagian IV - Demokrasi, Public Reason, dan Ruang bagi Sabda

Begitu kita menerima bahwa martabat dan telos manusia tidak dapat ditopang oleh kapasitas, evolusi, atau kontrak sosial saja, sebuah pertanyaan segera muncul: jika Sabda sungguh menjadi fondasi martabat, bagaimana Sabda hidup di ruang politik yang majemuk. Di sana orang yang beriman duduk bersama mereka yang tidak beriman, tradisi saling berjumpa, kepentingan saling bertabrakan. Di ruang ini, setiap klaim normatif tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi menjadi hukum yang mengatur semua orang.

Bayangkan sebuah sidang parlemen yang sedang membahas rancangan undang-undang tentang perlindungan keluarga dan anak. Di dalam ruangan, seorang anggota dewan yang beriman ingin berkata terus terang: bahwa dalam keyakinannya, Sabda Tuhan memerintahkan menjaga anak sebagai amanah dan memperlakukan keluarga bukan sebagai kontrak yang dapat dibatalkan semaunya. Namun sebelum kalimat itu keluar, ia teringat peringatan tidak tertulis: alasan religius dianggap tidak sah di ruang publik. Jika ia ingin mempengaruhi isi undang-undang, ia sebaiknya berbicara dalam bahasa "netral": stabilitas sosial, efisiensi anggaran, beban negara. Sabda akhirnya hanya bergema dalam hati, tidak diberi hak bicara di mikrofon.

Inilah salah satu wajah dari apa yang disebut public reason. Untuk mencegah satu agama atau satu tafsir Sabda menguasai negara, tradisi filsafat politik modern merancang aturan main yang ketat. John Rawls mengusulkan bahwa ketika warga membahas prinsip dasar tatanan politik, mereka seharusnya memakai alasan yang dapat diterima oleh semua warga sebagai warga, tanpa bergantung pada doktrin komprehensif tertentu. Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi lahir dari proses diskursif yang bebas paksaan, di mana klaim normatif dapat diuji oleh mereka yang terdampak. Di belakang gagasan-gagasan ini ada ketakutan yang dapat dimengerti: ketakutan terhadap teokrasi yang memaksa, terhadap fanatisme yang tidak mau mendengar alasan, terhadap negara yang merampas kebebasan hati nurani.

The Cohesive Tetrad menghormati ketakutan itu. Sejarah mengajarkan bahwa Sabda yang dipakai tanpa akhlak dan tanpa logika dapat berubah menjadi alat kekerasan. Namun artikel Sabda, Public Reason, and Plural Societies: The Cohesive Tetrad as an Architecture for Democratic Truth Governance menunjukkan bahwa resep yang menyingkirkan Sabda dari ruang publik menciptakan paradoks yang tidak kecil.

Ketika alasan religius didorong ke ranah privat, ruang publik tidak menjadi kosong. Ia segera diisi oleh otoritas lain yang tidak mengaku sebagai doktrin, tetapi bertindak seperti itu. Logika pasar, kepentingan negara, statistik mayoritas, dan wacana teknokratis perlahan mengambil alih posisi Sabda. Bahasa yang dipakai tetap mulia: martabat, keadilan, hak asasi, kebebasan. Namun isi kata-kata ini menjadi lentur. Tanpa horizon transenden yang stabil, "martabat" dapat berarti perlindungan mereka yang kuat, "kebebasan" dapat berarti pelepasan dari semua tanggung jawab, "keadilan" dapat direduksi menjadi keseimbangan angka dalam grafik.

Di titik ini, masalah bukan lagi hanya hubungan antara agama dan negara, tetapi arsitektur otoritas kebenaran dalam demokrasi. Bila Sabda tidak boleh berbicara sebagai Sabda di ruang publik, siapa yang sebenarnya menentukan telos peradaban.

1. Demokrasi tanpa Sabda: prosedur yang bisa dibajak

Dengan kacamata The Cohesive Tetrad, demokrasi modern sering bergerak di atas dua lapisan. Di permukaan, ada prosedur: pemilu, representasi, pembagian kekuasaan, kebebasan berpendapat. Di lapisan bawah, ada horizon nilai yang jarang diperiksa: apa yang dianggap sebagai tujuan hidup bersama, siapa yang dianggap prioritas, sejauh mana pengorbanan boleh dituntut.

Ketika Sabda diprivatisasi, lapisan bawah ini cenderung diisi oleh tiga kekuatan utama.

Pertama, negara yang ingin menjaga stabilitas. Demi stabilitas, negara mudah tergoda mengorbankan kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban, sekalipun mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Kedua, pasar yang mengejar pertumbuhan. Demi pertumbuhan, pasar dapat mendorong pola konsumsi dan kerja yang merusak relasi, kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, opini mayoritas yang ingin merasa nyaman. Demi kenyamanan, mayoritas dapat menolak mendengar jeritan minoritas yang terluka oleh keputusan politik.

Prosedur demokratis tetap berjalan, namun dalam banyak kasus prosedur itu hanya merapikan proses pengambilan keputusan yang substansinya sudah ditentukan oleh tiga kekuatan tadi. Dalam situasi ini, memprivatisasi Sabda bukanlah cara melindungi demokrasi, melainkan cara pelan-pelan mengosongkan jiwanya.

2. Kebutuhan akan nalar publik yang multi register

Artikel tentang Sabda dan public reason tidak mengajak kita membuang demokrasi atau mencurigai semua gagasan netral. Yang dilakukan adalah menawarkan arsitektur lain tentang bagaimana nalar publik seharusnya bekerja dalam masyarakat yang majemuk.

Kuncinya adalah menerima bahwa dalam ruang demokrasi, alasan yang dibawa warga memang akan datang dari berbagai "register": ada yang berangkat dari Sabda, ada yang berangkat dari filsafat sekuler, ada yang berangkat dari sains, ada yang berangkat dari pengalaman personal sebagai korban. Upaya untuk memaksa semua register ini disederhanakan menjadi bahasa yang tampak netral justru menghilangkan kejujuran.

Sebagai gantinya, The Cohesive Tetrad mengusulkan model nalar publik multi register. Dalam model ini, seorang warga beriman tidak dilarang menyebut Sabda sebagai sumber terdalam posisi politiknya. Ia boleh berkata di forum publik: "Saya menolak kebijakan ini karena Sabda yang saya imani memerintahkan melindungi yang lemah dan melarang normalisasi bentuk kekerasan ini." Warga lain yang tidak berbagi iman berhak menanggapi dengan pertanyaan yang sah: apa yang disebut kekerasan, siapa yang dihormati, bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi kelompok rentan.

Sabda tidak otomatis menang hanya karena disebut. Ia harus bersedia masuk ke dalam percakapan dengan logika, qualia korban, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace.

Dalam model multi register, ada beberapa syarat penting.

Pertama, setiap alasan yang dibawa ke ruang publik, baik bersumber dari Sabda maupun tidak, harus siap diuji oleh logika. Klaim bahwa "Sabda memerintahkan X" tidak boleh menjadi penutup percakapan. Ia adalah awal percakapan yang kemudian diperiksa konsistensinya, implikasinya, dan apakah tafsir terhadap Sabda itu sendiri sejalan dengan keseluruhan ajaran, bukan pemilihan ayat yang menguntungkan kelompok tertentu.

Kedua, qualia mereka yang paling terdampak harus menjadi salah satu hakim. Kebijakan tentang hukuman, misalnya, harus mendengar suara korban kejahatan, tetapi juga suara keluarga pelaku, terutama anak-anak yang akan menanggung akibat sosial dan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka ini, suara korban bukan sekadar ilustrasi emosional, tetapi sumber pengetahuan tentang bagaimana sebuah keputusan terasa di tubuh dan jiwa manusia.

Ketiga, Mistika, yang didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengingatkan bahwa setiap aktor politik akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan atas keputusan yang didukungnya. Anggota parlemen yang menyetujui undang-undang tidak hanya menandatangani naskah hukum, tetapi juga menulis satu baris baru dalam riwayat spiritualnya sendiri.

Keempat, akhlak harus tampak dalam cara tokoh publik berbicara dan bertindak. Debat keras tidak boleh menjadi alasan untuk penghinaan dan kebohongan. Sabda yang dijadikan senjata untuk menghina lawan politik sebenarnya sedang dikhianati.

Kelima, Intention-Trace Alignment menguji klaim niat baik di dunia politik. Pemerintah dapat menyatakan bahwa undang-undang tertentu dibuat untuk melindungi martabat keluarga. Namun jika setelah lima atau sepuluh tahun data dan kesaksian menunjukkan bahwa undang-undang itu justru memperbanyak kekerasan dalam rumah tangga, memperparah diskriminasi ekonomi, atau mempersulit akses bantuan bagi mereka yang paling rentan, maka klaim niat baik itu runtuh. Di sini audit tidak boleh berhenti pada "sesuai prosedur", tetapi harus bertanya: jejak moral apa yang ditinggalkan kebijakan ini.

3. Contoh konkret: kebebasan berekspresi dan penertiban "kebencian"

Untuk melihat bagaimana arsitektur ini bekerja, bayangkan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur ujaran kebencian di ruang digital. Pemerintah beralasan bahwa regulasi baru ini diperlukan untuk menghentikan penyebaran kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan. Banyak warga setuju, apalagi setelah melihat beberapa insiden kekerasan yang dipicu provokasi di media sosial.

Namun rancangan itu menyimpan dua klausul yang samar: definisi "kebencian" dibiarkan sangat luas, dan kewenangan untuk menentukan konten mana yang harus diturunkan diberikan nyaris sepenuhnya kepada satu badan eksekutif. Di permukaan, ini tampak seperti langkah wajar. Di bawah permukaan, ada risiko bahwa regulasi ini dipakai untuk membungkam kritik terhadap negara atau kelompok mayoritas, dengan alasan menjaga ketertiban.

Dalam nalar publik yang memprivatisasi Sabda, perdebatan mungkin berhenti pada ketegangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Di satu sisi, aktivis hak asasi manusia mengingatkan bahaya pembungkaman. Di sisi lain, pemerintah mengingatkan bahaya disintegrasi.

Dalam kerangka Sabda-Logika, pembacaan menjadi lebih tajam. Sabda bertanya: apakah negara boleh mengangkat dirinya sebagai penafsir tunggal tentang apa yang termasuk kebencian dan apa yang merupakan kritik yang sah. Sejarah mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak mau dikoreksi cenderung melahirkan kezhaliman. Qualia kelompok minoritas yang pernah mengalami pembungkaman menjadi bukti penting: rasa takut ketika berbicara, rasa selalu diawasi, rasa tidak aman di ruang publik.

Logika kemudian memeriksa desain undang-undang: apakah ada mekanisme banding yang independen, apakah definisi kebencian cukup ketat, apakah prosedur penurunan konten transparan dan dapat diuji di pengadilan. Mistika mengingatkan para legislator bahwa perlindungan dari ujaran kebencian tidak boleh dijadikan selimut untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan. Akhlak tampak dalam keberanian untuk menolak klausul yang terlalu longgar sekalipun itu menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa.

Intention-Trace Alignment akan memeriksa undang-undang ini setelah beberapa tahun berjalan: apakah ia benar-benar mengurangi kekerasan berbasis kebencian, atau justru memperbanyak kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang mengkritik kebijakan. Jika jejaknya yang muncul justru yang kedua, maka undang-undang itu, betapa pun indah judulnya, seharusnya direvisi atau dicabut.

4. Sabda di ruang publik: antara kejujuran dan bahaya

Membuka ruang bagi Sabda di ruang publik tidak tanpa risiko. Ada bahaya nyata bahwa kelompok yang mengklaim berbicara atas nama Sabda menggunakan posisi itu untuk menindas kelompok lain. Ada sejarah kelam ketika Sabda dipakai untuk membenarkan perbudakan, penindasan perempuan, marginalisasi kelompok minoritas.

Di sinilah pentingnya The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur, bukan hanya slogan. Sabda yang dihadirkan di ruang publik harus selalu melewati empat penjaga lain: logika, qualia, Mistika, dan akhlak, serta diuji melalui Intention-Trace Alignment. Tafsir Sabda yang melahirkan pola penghinaan sistematis terhadap kelompok tertentu, mengabaikan jeritan korban, dan dikerjakan tanpa kesediaan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dapat dikenali sebagai penyalahgunaan.

Model ini menolak dua ekstrem sekaligus. Di satu sisi, menolak teokrasi yang memaksa semua warga tunduk pada satu tafsir Sabda tanpa ruang dialog. Di sisi lain, menolak sekularisme kosong yang memaksa semua warga menyembunyikan Sabda mereka ketika masuk ke ruang publik.

The Cohesive Tetrad menyodorkan jalan tengah yang sebenarnya bukan kompromi, tetapi penataan ulang otoritas. Sabda tetap diakui sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Namun Sabda tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ia mengundang logika untuk menguji koherensi, qualia untuk mengingatkan pengalaman nyata, Mistika untuk menjaga niat, akhlak untuk menjaga karakter, dan Intention-Trace Alignment untuk memastikan bahwa jejak keputusan sejalan dengan niat dan norma yang diklaim.

5. Jembatan menuju hukum dan kecerdasan buatan

Dari sini, wajar jika traktat bergerak ke medan yang lebih konkret dan teknis, yaitu pertemuan antara hukum, data, dan kecerdasan buatan. Di sana klaim netralitas logika mencapai

puncaknya. Algoritma menilai risiko seseorang melakukan kejahatan lagi, memutuskan siapa yang layak mendapat kredit, menentukan tingkat pengawasan terhadap suatu wilayah, bahkan membantu hakim dalam menjatuhkan vonis.

Jika di ruang politik saja Sabda sering diminta menyingkir, di ruang teknis seperti hukum dan kecerdasan buatan Sabda dianggap nyaris tidak relevan. Di sana yang berbicara adalah model, metrik, dan batas kepercayaan.

Bagian berikut akan menunjukkan bahwa pembuangan Sabda dari ruang ini bukan hanya kesalahan teoretis, tetapi juga sumber kerusakan praktis. Ketika logika statistik dan prosedur hukum berjalan tanpa horizon Sabda, tanpa qualia korban, tanpa Mistika, tanpa akhlak, dan tanpa Intention-Trace Alignment, mereka dapat mengeras kan ketidakadilan dengan wajah yang tampak sangat rasional.

Di situlah pertempuran Sabda dan logika akan memasuki babak yang paling dingin sekaligus paling menentukan: apakah manusia di hadapan hukum dan algoritma tetap dilihat sebagai subjek bermartabat yang dipanggil oleh Sabda, atau hanya sebagai titik data dalam matriks risiko yang harus dikelola seefisien mungkin.

Demokrasi yang mengusir Sabda dari wacana publik hanya mengganti tirani teologi dengan tirani prosedur.



Bagian V - Hukum, Kecerdasan Buatan, dan Tata Kelola Kebenaran

Jika ada ruang di mana logika merasa paling berkuasa, itu adalah ruang hukum dan ruang teknologi. Di sana, kata yang paling sering diucapkan adalah prosedur, aturan main, metrik kinerja, dan validasi model. Putusan hakim dijelaskan dengan silogisme. Putusan algoritma dijelaskan dengan statistik. Di antara keduanya, hidup dan mati manusia digantungkan pada sesuatu yang tampak sangat rapi dan rasional.

Namun justru di titik inilah pertarungan antara Sabda dan logika menjadi paling tajam. Sebab hukum dan kecerdasan buatan bukan hanya alat administratif. Keduanya adalah mesin tata kelola kebenaran: menentukan siapa yang dianggap bersalah, siapa yang boleh dipercaya, siapa yang berhak mendapat kesempatan kedua, dan siapa yang pelan-pelan didorong ke pinggir.

5.1 Hukum sebagai mesin logika normatif

Secara ideal, hukum adalah upaya manusia untuk menata hidup bersama berdasarkan norma yang eksplisit. Aturan dirumuskan, prosedur disusun, bukti diatur, dan kewenangan dibatasi. Di ruang sidang, tampak seolah semua berjalan dalam kerangka logika yang jelas: premis berupa fakta, premis berupa aturan, kesimpulan berupa putusan.

Namun siapa pun yang pernah dekat dengan praktik hukum tahu bahwa ini hanya separuh cerita.

Pertama, hukum selalu lahir dari pilihan normatif: apa yang dianggap kejahatan, apa yang dianggap pelanggaran kecil, siapa yang dilindungi secara khusus. Pilihan ini tidak pernah netral. Ia dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, kepentingan, dan kadang prasangka. Ketika undang-undang rampung, logika memang masuk bekerja, tetapi ia bekerja di atas fondasi nilai yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kedua, di ruang praktik, logika hukum sering bersekutu dengan logika kelembagaan. Pengadilan ingin efisiensi. Jaksa ingin angka keberhasilan perkara. Polisi ingin “angka kejahatan terlihat turun”. Di balik putusan formal yang tampak jernih, ada tekanan struktur yang sulit dibaca dari teks undang-undang.

Ketiga, di banyak sistem, kelompok tertentu secara historis diposisikan sebagai “berisiko” atau “rawan melanggar hukum”. Wilayah miskin, komunitas tertentu, atau profesi tertentu, lebih sering menjadi sasaran patroli dan razia. Akibatnya, data perkara yang tercatat menjadi timpang: kelompok yang lebih sering diawasi akan lebih sering tertangkap.

Semua ini kemudian dikumpulkan menjadi data historis. Sampai di sini, kita belum bicara kecerdasan buatan sama sekali. Kita baru melihat bagaimana hukum, sebagai mesin logika normatif, sudah membawa bias yang diselimuti bahasa prosedur.

5.2 Kecerdasan buatan sebagai perpanjangan tangan logika

Masuklah kecerdasan buatan. Ia menjanjikan sesuatu yang menggoda: kemampuan membaca pola yang tak bisa dilihat manusia, konsistensi dalam pengambilan keputusan, efisiensi dalam mengelola perkara. Sistem penilaian risiko dibangun untuk membantu hakim menentukan

apakah terdakwa layak dibebaskan atau harus ditahan. Model prediksi dipakai untuk memetakan “titik panas” kriminalitas. Skor kepercayaan dipakai untuk memutuskan siapa yang layak mendapat kredit, akses layanan, atau pengawasan lebih ketat.

Di permukaan, semua tampak lebih objektif. Model dilatih dengan data besar. Validasi dilakukan dengan metrik akurasi. Laporan ditulis dengan bahasa ilmiah. Tetapi The Cohesive Tetrad mengingatkan: logika algoritmik bekerja di dalam horizon nilai yang sama dengan hukum yang melahirkannya, hanya saja bias lama kini dikemas dengan cara baru.

Data historis yang dipakai melatih model adalah cermin dari praktik masa lalu: praktik patroli, praktik penangkapan, praktik penuntutan. Jika praktik itu bias, model hanya akan mempelajari pola bias dan mengemasnya dalam bentuk skor. Ketika hakim melihat skor risiko tinggi untuk terdakwa dari wilayah tertentu, ia mungkin merasa telah menjadi “lebih adil” karena tidak lagi mengandalkan intuisi pribadi. Padahal ia sedang mengandalkan intuisi masa lalu yang diubah menjadi angka.

Artikel Sabda, Logic, and Truth Governance: The Cohesive Tetrad for Law and Artificial Intelligence mengurai mekanisme ini secara teknis. Traktat ini mengambil intinya: kecerdasan buatan, tanpa arsitektur Sabda-Logika, cenderung menjadi akselerator dari apa pun yang sudah salah di dalam sistem.

5.3 Ilusi netralitas dan lahirnya “dogma statistik”

Di masa lalu, dogma keagamaan kadang dipakai untuk menutup diskusi: “ini sudah kehendak Tuhan”, titik. Di zaman data, risiko serupa muncul dalam bentuk lain. Data, model, dan metrik dapat berubah menjadi “dogma statistik” yang kebal kritik.

Kalimat seperti “model ini sudah divalidasi”, “akurasi sangat tinggi”, “hasilnya signifikan secara statistik” digunakan untuk menutup pertanyaan moral: adil bagi siapa, merugikan siapa, memuliakan siapa, dan mengorbankan siapa.

Padahal validasi statistik hanya menjawab satu hal: seberapa baik model mereproduksi pola di data masa lalu. Ia tidak menjawab apakah pola masa lalu tersebut adil. Jika masa lalu penuh diskriminasi, model yang sangat akurat dalam meniru masa lalu berarti sangat akurat dalam meniru diskriminasi.

Di sinilah The Cohesive Tetrad membaca pergeseran otoritas secara tajam. Sabda, yang seharusnya menjadi Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, dipaksa mundur atas nama netralitas. Posisi itu lalu diambil alih oleh kombinasi formalitas hukum dan data. Yang satu berkata “sesuai prosedur”, yang lain berkata “sesuai model”. Di tengah keduanya, manusia yang hidupnya ditentukan oleh prosedur dan model sering tidak diberi ruang untuk berbicara sebagai manusia.

5.4 Sabda mengubah cara kita melihat pelaku, korban, dan sistem

Masalah ini menjadi sangat konkret jika kita kembali ke kisah sederhana.

Bayangkan seorang pemuda dari lingkungan yang selama bertahun-tahun distigma sebagai “zona merah”. Ia terlibat perkelahian kecil dan masuk ke sistem peradilan. Tidak ada luka berat,

tidak ada riwayat kriminal serius. Namun sistem penilaian risiko, yang dilatih dengan data perkara puluhan tahun, memberi skor “risiko tinggi” hanya karena ia berasal dari kode pos tertentu, punya pekerjaan tidak tetap, dan lingkungannya sering razia.

Dalam paradigma hukum-AI tanpa Sabda, ini dianggap wajar. Ia ditempatkan sebagai entitas berisiko. Menjaganya di balik jeruji dipandang sebagai cara melindungi masyarakat.

Dalam horizon Sabda, gambarannya berubah. Sabda menyatakan bahwa pemuda itu, sekali pun salah, tetap membawa martabat yang tidak dapat dinegosiasikan. Ia bukan sekadar “risk factor”. Ia seorang manusia yang akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Hukuman mungkin tetap diperlukan, tetapi hukuman tidak boleh diatur hanya oleh logika pengelolaan risiko.

Sabda menolak reduksi ini. Sabda mengingatkan bahwa:

- pelaku tetap manusia yang dipanggil kepada pertobatan,
- korban tetap manusia yang berhak mendapat keadilan,
- dan sistem tetap bagian dari lingkaran tanggung jawab moral.

Dengan demikian, Sabda tidak menghapus hukum, tetapi mengubah orientasinya: dari sekadar mengelola risiko menjadi memperbaiki manusia dan struktur.

5.5 Enam pilar The Cohesive Tetrad sebagai kerangka audit hukum-AI

Agar perubahan orientasi ini tidak berhenti sebagai seruan moral, The Cohesive Tetrad menawarkan enam pilar sebagai kerangka audit.

1. Sabda
Sabda, sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menyatakan bahwa setiap manusia bermartabat dan bahwa tujuan hukum adalah keadilan yang melindungi yang lemah, bukan sekadar ketertiban. Setiap rancangan undang-undang, protokol peradilan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan harus diajukan pertanyaan ini: sejauh mana ia sejalan dengan pengakuan martabat itu, terutama martabat mereka yang paling mudah dikorbankan oleh sistem.
2. Logika
Logika tidak disingkirkan, justru dipanggil untuk bekerja lebih jujur. Ia memeriksa apakah konstruksi aturan dan model konsisten. Apakah variabel yang dijadikan penentu skor risiko secara normatif relevan, atau hanya mudah diukur. Apakah kita keliru menyamakan korelasi dengan sebab akibat. Apakah prosedur penggunaan model di ruang sidang sejalan dengan prinsip due process.
3. Qualia
Qualia mengangkat pengalaman batin mereka yang terdampak sebagai bagian dari pengetahuan. Bukan sekadar ilustrasi, tetapi data moral. Rasa takut ketika menghadapi sistem, rasa dipastikan bersalah sebelum didengar, rasa tidak dimanusiakan di loket layanan, adalah indikator apakah hukum dan kecerdasan buatan benar-benar menghormati martabat. Tanpa qualia, kita hanya melihat angka perkara, bukan luka yang tertinggal.
4. Mistika
Mistika, yang didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengingatkan bahwa

hakim, jaksa, polisi, pembuat kebijakan, dan pengembang model semua berada dalam perjalanan spiritual. Mereka tidak sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi sedang menulis riwayat di hadapan Tuhan. Memutuskan nasib manusia hanya dengan mengikuti skor risiko tanpa keberanian untuk bertanya “apakah ini benar di hadapan Tuhan” adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab spiritual.

5. Akhlak

Akhlak terlihat di permukaan: cara aparat memperlakukan orang yang ditangkap, cara hakim menjelaskan putusan, cara petugas menjawab pertanyaan warga yang bingung, cara pengembang sistem merespons laporan dampak negatif. Budaya melecehkan, memaki, dan merendahkan tidak bisa diselamatkan oleh betapa canggihnya model atau betapa lengkapnya prosedur.

6. Intention-Trace Alignment

Inilah prinsip yang mengikat semuanya: Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace. Sistem peradilan dan lembaga teknologi dapat mengklaim niat yang sangat baik: demi keamanan, demi keadilan, demi efisiensi. Namun beberapa tahun kemudian, pertanyaannya sederhana: jejak moral apa yang tertinggal.

- Apakah kelompok yang dulu termarginalkan kini lebih terlindungi.
- Apakah tingkat kekerasan benar-benar turun tanpa menggandakan luka.
- Apakah kepercayaan warga terhadap keadilan meningkat.

Jika jawaban jujur negatif, maka dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, sistem itu gagal, betapa pun canggih datanya dan rapi prosedurnya.

5.6 Implikasi praktis: dari desain, ke pemakaian, ke revisi sistem

Kerangka ini tidak dimaksudkan hanya sebagai renungan. Ia membawa konsekuensi praktis yang dapat dirinci dalam tiga tahap.

1. Tahap desain

- Setiap proyek kecerdasan buatan di bidang hukum harus memulai dengan deklarasi normatif yang jelas: apa telos moral sistem ini.
- Sabda, logika, qualia, Mistika, dan akhlak harus hadir di meja desain. Bukan hanya insinyur dan ekonom, tetapi juga ahli hukum, teolog yang memahami Sabda, pakar etika, dan wakil komunitas terdampak.

2. Tahap pemakaian

- Skor, rekomendasi, dan prediksi tidak boleh diperlakukan sebagai vonis, tetapi sebagai bahan pertimbangan.
- Hakim dan pejabat harus diberi ruang dan dilatih untuk berani menyimpang dari rekomendasi model ketika hati nurani yang tunduk pada Sabda, ditopang logika dan qualia, menunjukkan adanya ketidakadilan.

3. Tahap revisi dan pertobatan kelembagaan

- Evaluasi sistem harus dilakukan secara berkala, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi jejak moral.
- Ketika ditemukan pola ketidakadilan, keberanian untuk mengakui salah dan mengubah sistem adalah bagian dari akhlak kelembagaan. Di sini, bahasa agama tentang taubat menemukan terjemahan struktural: bukan hanya taubat individu, tetapi taubat institusi.

5.7 Dari ruang sidang dan server, kembali ke wajah manusia

Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang hukum dan kecerdasan buatan ini akan kembali ke wajah-wajah yang tadi kita sebut. Wajah pemuda yang pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan. Wajah anak yang lahir di lingkungan yang selalu dicurigai. Wajah ibu yang berdiri di depan loket bantuan dengan tatapan cemas.

Jika setelah semua reformasi hukum dan inovasi teknologi, wajah-wajah ini tetap menunduk, tetap merasa tidak dianggap, tetap hidup dalam ketakutan yang sama, maka kita harus jujur mengakui bahwa Sabda-Logika belum sungguh bekerja.

Karena itu, ketika traktat ini berbicara tentang kemenangan Sabda di medan logika, salah satu ukurannya justru ada di sini:

- apakah di ruang sidang, pelaku dan korban diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai kasus;
- apakah di ruang server, model diperlakukan sebagai alat yang boleh dikoreksi, bukan sebagai hakim tak terlihat;
- apakah di ruang kebijakan, angka statistik dibaca bersama dengan cerita hidup mereka yang mewakili angka itu.

Jika ya, maka Sabda tidak lagi menjadi tamu yang dibiarkan berdiri di luar gedung pengadilan dan pusat data. Sabda sudah masuk, duduk, dan memimpin percakapan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan arsitektur yang membuat logika, data, dan kekuasaan tunduk pada martabat manusia yang dinyatakannya.

Dari sini, wajar bila traktat lalu bergerak ke dua ruang yang tidak kalah strategis: universitas sebagai simpul ekosistem pengetahuan, dan epilog peradaban yang merangkum perjalanan dari jurnal, ke traktat, ke praksis. Di sanalah masa depan The Cohesive Tetrad akan ditentukan, bukan hanya oleh kekuatan argumennya, tetapi oleh kesediaan manusia dan institusi untuk hidup di bawah aturan rasa yang dibentuk oleh Sabda-Logika.

Hukum di era data sangat mahir menghitung risiko, tetapi baru adil ketika berani melihat wajah di balik setiap skor.



Bagian VI - Kehidupan Sehari-hari, Ruang Digital, dan Latihan Sabda-Logika

Sampai titik ini, Sabda-Logika mungkin masih terdengar seperti sesuatu yang bekerja di ruang tinggi: epistemologi, teori martabat, public reason, hukum, dan kecerdasan buatan. Namun bila ia hanya bergerak di sana, ia akan menjadi kerangka yang anggun di langit, tetapi tidak pernah menginjak tanah. Padahal keputusan yang paling sering melukai martabat manusia bukan hanya keputusan besar di pengadilan atau parlemen, melainkan keputusan kecil sehari-hari yang diambil tanpa sadar: cara kita berbicara di rumah, cara kita menyebarkan informasi, cara kita menilai orang lain di tempat kerja.

Maka traktat ini perlu turun satu tangga lagi. Bukan untuk meremehkan ranah tinggi, tetapi untuk mengakui bahwa latihan Sabda-Logika yang paling jujur justru terjadi di tempat yang tampak biasa.

1. Keluarga sebagai sekolah pertama tata kelola kebenaran

Bayangkan sebuah keluarga sederhana. Seorang ayah pulang kerja dengan wajah lelah. Di meja makan, ia mendengar berita bahwa anaknya dituduh mencontek di sekolah. Guru mengirim pesan singkat: ada bukti bahwa jawaban anaknya sangat mirip dengan jawaban teman sebelah.

Refleks pertama sang ayah mungkin adalah marah. Ia ingin menegur keras, bahkan mungkin mengucapkan kalimat yang menusuk: "Kamu memalukan, kamu pembohong." Dalam detik-detik seperti ini, tata kelola kebenaran sedang diuji, bukan di ruang sidang, tetapi di ruang paling intim.

Jika Sabda dilupakan, ayah akan menggunakan logika sederhana: mencontek adalah salah, anak saya mencontek, maka anak saya adalah pembohong. Hukuman diputuskan dengan cepat. Namun bila Sabda diingat sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, scene ini bisa berubah. Sabda mengajarkan bahwa manusia dapat bersalah tanpa kehilangan martabat, bahwa kesalahan perlu diakui tetapi juga perlu diarahkan menuju perbaikan, bukan penghancuran.

Ayah itu bisa berhenti sejenak dan bertanya, dengan logika yang lebih sabar: apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengundang anaknya bercerita. Mungkin anaknya benar-benar mencontek, mungkin juga ia menjadi korban sistem penilaian yang tidak jelas. Qualia sang anak, rasa takut, rasa malu, rasa ingin membela diri, menjadi bagian dari pengetahuan keluarga, bukan sesuatu yang disingkirkan.

Mistika, yang dipahami sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengingatkan ayah bahwa cara ia menangani peristiwa ini adalah bagian dari perjalanan rohaninya sendiri. Ia tidak sekadar "mendidik anak", tetapi sedang diuji: apakah ia mempergunakan posisi kuasanya dengan amanah atau dengan kemarahan.

Akhlaq tampak dalam pilihan konkretnya. Ia bisa berkata dengan nada yang memuliakan, sekaligus tegas: menjelaskan mengapa mencontek salah, tetapi juga membuka jalan bagi anak untuk mengakui kesalahan tanpa dihancurkan. Ia mengajari anak bahwa menjadi jujur lebih penting daripada kelihatan pintar.

Di akhir, Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, akan menguji niat sang ayah. Bila ia berkata bahwa ia menghukum demi kebaikan anak, jejak beberapa tahun ke depan akan menunjukkan, apakah anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih jujur dan percaya diri, atau justru menjadi penakut yang terbiasa berbohong untuk menghindari hukuman.

Keluarga seperti ini, tanpa disadari, sedang menjadi sekolah pertama The Cohesive Tetrad. Di sana Sabda dihormati, logika dipakai, qualia anak didengar, Mistika mewarnai niat orang tua, akhlak tampak dalam tindakan, dan Intention-Trace Alignment memeriksa hasil jangka panjang.

2. Tempat kerja: kebenaran di antara target dan reputasi

Pindah ke ruang lain: sebuah kantor yang sibuk. Seorang manajer menerima laporan bahwa timnya gagal mencapai target penjualan. Di waktu yang sama, ia tahu bahwa ada proyek yang dilaporkan "sukses" padahal keberhasilannya banyak dibantu manipulasi kecil: klaim yang dilebihkan, janji yang tidak realistis, penggunaan data yang dipilih-pilih.

Dalam budaya kerja yang hanya diatur oleh logika target, manajer akan cenderung menutup mata pada manipulasi selama angka tampak bagus. Kebenaran menjadi sesuatu yang lentur, selama reputasi perusahaan tampak terjaga.

Latihan Sabda-Logika menempatkan situasi ini di bawah cahaya lain. Sabda menyatakan bahwa kejujuran bukan aksesori, tetapi perintah. Menipu pelanggan, memelintir data, atau menjanjikan sesuatu yang tidak akan dipenuhi adalah bentuk kezhaliman, meski sulit dibuktikan di pengadilan.

Logika kemudian dipaksa untuk jujur tentang struktur kerja. Apakah sistem bonus dan pengakuan yang dibangun perusahaan secara diam-diam mendorong manipulasi. Apakah cara menilai kinerja membuat orang merasa harus mengorbankan kebenaran demi angka.

Qualia pegawai juga menjadi sumber pengetahuan. Rasa tertekan, rasa harus terus mengenakan topeng, rasa takut membantah atasan, semua itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam tata kelola kebenaran organisasi.

Mistika mengingatkan bahwa ruang kerja bukan zona netral. Setiap pilihan manajer, dari cara ia menyusun laporan sampai cara ia menegur tim, menjadi bagian dari amal yang akan menyertainya. Ia tidak bisa berlindung di balik kalimat "ini hanya bisnis". Di hadapan Tuhan, itu tetap bagian dari hidupnya.

Akhlak tampak dalam keberanian untuk berkata cukup. Mungkin ia harus mengakui kepada atasan bahwa beberapa angka yang tampak baik sebenarnya bertumpu pada praktik yang tidak benar. Mungkin ia harus merancang ulang sistem penilaian agar kejujuran dihargai, bukan dihukum.

Intention-Trace Alignment kemudian memeriksa niat yang ia klaim. Bila manajer mengatakan bahwa ia ingin membangun tim yang sehat dan berintegritas, tetapi jejak beberapa tahun ke depan menunjukkan budaya yang penuh ketakutan dan manipulasi, maka niat itu perlu dipertanyakan.

Di sini The Cohesive Tetrad membantu kita melihat bahwa "krisis kebenaran" bukan hanya soal berita bohong di internet atau putusan hukum yang bias, tetapi juga soal cara kita menata kerja sehari-hari.

3. Ruang digital: antara algoritma, ego, dan Sabda

Sekarang kita masuk ke arena yang semakin dominan dalam hidup modern: ruang digital. Di sini kebenaran, perhatian, dan emosi diperdagangkan dalam skala besar. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan. Konten yang memicu kemarahan dan rasa ingin tahu sering menyebar lebih cepat daripada konten yang tenang dan reflektif.

Seorang remaja bisa menghabiskan berjam-jam di depan layar, melompat dari satu video ke video lain. Algoritma belajar dari setiap detik yang ia tonton, dari jeda kecil sebelum ia menggulir, dari video apa yang ia ulang. Perlahan, feed-nya dipenuhi satu pola tertentu: hiburan yang dangkal, perdebatan keras, atau narasi ekstrem. Di permukaan, ia merasa bebas memilih. Di bawah permukaan, pilihannya telah dibentuk.

Di ruang seperti ini, latihan Sabda-Logika menjadi sangat konkret. Sabda bertanya: apa yang engkau lakukan dengan waktu hidupmu, dengan pandanganmu, dengan perhatianmu. Sabda mengingatkan bahwa hati dapat mengeras atau melunak tergantung apa yang ia konsumsi.

Logika mencoba memahami mekanisme. Bagaimana algoritma bekerja, mengapa konten tertentu muncul berulang kali, siapa yang diuntungkan. Tanpa pemahaman ini, kita mudah menyalahkan individu tanpa melihat struktur.

Qualia pengguna ruang digital adalah alarm penting. Rasa kosong setelah scroll panjang, rasa cemas ketika melihat hidup orang lain yang tampak sempurna, rasa marah yang terus disulut oleh konten kontroversial. Qualia ini memberi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang.

Mistika hadir ketika seseorang memutuskan berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: apa yang sedang algoritma ini lakukan pada jiwaku. Ia mungkin memilih untuk mengatur ulang kebiasaannya, membatasi jenis konten tertentu, atau mengambil masa jeda digital sebagai bagian dari perjalanannya menuju perjumpaan dengan Tuhan.

Akhlah tampak dalam cara seseorang berperilaku sebagai produsen maupun konsumen konten. Apakah ia menyebarkan informasi yang belum diperiksa, hanya karena ingin menjadi yang tercepat. Apakah ia menulis komentar yang merendahkan orang lain hanya karena dirinya tidak terlihat. Apakah ia memanfaatkan algoritma untuk menyebarkan kebaikan atau hanya untuk membesarkan ego.

Intention-Trace Alignment menjadi cermin. Seorang konten kreator dapat berkata bahwa ia ingin menginspirasi, tetapi jejak yang terlihat adalah peningkatan kecanduan, polarisasi, dan kultus terhadap dirinya sendiri. Seorang aktivis dapat berkata bahwa ia berjuang demi keadilan, tetapi jejak yang tertinggal adalah kebencian membabi buta yang membakar jembatan dialog.

Dalam kerangka The Cohesive Tetrad, ruang digital bukan musuh, tetapi ladang. Di sana Sabda-Logika dapat dilatih dengan cara yang sangat praktis: dalam pilihan follow dan unfollow, dalam keputusan untuk menahan diri tidak menulis komentar yang melukai, dalam kebiasaan memeriksa sumber sebelum membagikan sesuatu.

4. Universitas dan ekosistem pengetahuan: dari pabrik artikel ke rumah pencarian kebenaran

Ada satu ruang lagi yang sangat penting bagi tata kelola kebenaran: universitas. Di sana pengetahuan diproduksi, diukur, dan dibagikan. Di banyak tempat, universitas bangga dengan jumlah artikel, peringkat internasional, dan indeks sitasi. Namun di balik kebanggaan itu, terdapat dilema.

Seorang mahasiswa bisa datang dengan tema skripsi yang ia temukan di lapangan, misalnya penggusuran warga miskin kota yang telah tinggal puluhan tahun di satu kawasan. Data yang ia kumpulkan penuh kisah: kehilangan rumah, hilangnya mata pencaharian, keretakan keluarga. Namun ketika ia berkonsultasi, ia mendengar saran halus: "Topik ini berat dan rawan konflik, lebih baik pilih tema yang aman dan mudah masuk jurnal."

Di titik ini, universitas sedang berada pada persimpangan antara menjadi pabrik artikel dan rumah pencarian kebenaran.

Sabda mengingatkan bahwa ilmu bukan hanya untuk peringkat, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memuliakan manusia. Pengetahuan yang menutup mata terhadap luka sosial tetapi sibuk mengotak-atik variabel yang aman sedang melupakan panggilan ini.

Logika tentu tetap diperlukan. Tidak semua tema emotif cocok untuk ditangani dalam satu tugas akhir. Namun logika tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menyingkirkan mereka yang paling lemah dari agenda penelitian.

Qualia warga yang tergusur, air mata mereka, rasa kehilangan, rasa tidak didengar, semua itu adalah bagian dari pengetahuan tentang dampak kebijakan. Jika universitas menutup telinga terhadap suara ini demi mengejar tema yang "lebih mudah dipublikasikan", maka sebenarnya ia sedang memutus hubungan dengan realitas.

Mistika bekerja di dalam hati dosen dan mahasiswa yang jujur. Mereka tahu bahwa pilihan tema, cara mereka menulis, dan keberanian mereka untuk menyebut kezhaliman dengan nama yang tepat adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka.

Akhlah tampak dalam budaya akademik sehari-hari: cara dosen memperlakukan mahasiswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung, cara kampus merespon laporan pelecehan, cara pimpinan memilih antara dana riset yang bersih dan kerja sama yang kompromistis.

Intention-Trace Alignment memeriksa klaim universitas yang menyebut dirinya "rumah kebenaran". Bila setelah bertahun-tahun, kampus menghasilkan banyak artikel tetapi sedikit keberanian bersuara terhadap ketidakadilan yang nyata di sekitarnya, maka klaim itu perlu dikaji ulang.

Melalui lensa The Cohesive Tetrad, universitas dipanggil untuk kembali kepada misinya yang terdalam. Literatur, laboratorium, dan indeks sitasi tetap penting. Namun semua itu harus tunduk kepada telos yang dinyatakan Sabda: mengabdikan kepada kebenaran, memuliakan manusia, dan menolak menjadi alat bagi kekuasaan yang menindas.

5. Latihan kecil yang akan menentukan yang besar

Mungkin semua ini terdengar berat. Tetapi latihan Sabda-Logika tidak harus selalu mengambil bentuk kampanye besar atau kebijakan publik. Ia dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Cara kita berbicara kepada orang tua, cara kita merespon berita, cara kita bekerja, cara kita menggunakan media sosial, cara kita belajar.

Di setiap titik kecil itu, enam pilar The Cohesive Tetrad dapat hadir secara sederhana. Sabda, sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diingat dalam doa, dalam bacaan, dalam renungan. Logika dipakai untuk memeriksa klaim yang datang, agar kita tidak mudah tertipu. Qualia orang-orang di sekitar didengar, bukan diabaikan. Mistika mengingatkan bahwa tidak ada ruang netral di hadapan Tuhan. Akhlak dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang jujur dan lembut. Intention-Trace Alignment menjadi kebiasaan mengingat, beberapa waktu kemudian, apakah jejak hidup kita selaras dengan niat yang kita ucapkan.

Bila latihan kecil ini diabaikan, kita tidak boleh terkejut ketika pada saat harus mengambil keputusan besar, kita gagal. Hukum, kecerdasan buatan, kebijakan negara, dan arah peradaban digerakkan oleh manusia yang telah dibiasakan oleh latihan-latihan kecil ini.

Karena itu, sebelum menutup traktat dengan tesis-tesis ringkas dan epilog peradaban, perlu ada satu langkah pengikat: merumuskan secara eksplisit apa saja tesis kunci Sabda-Logika yang dapat dijadikan pegangan lintas konteks. Tesis-tesis ini bukan pengganti latihan, tetapi kompas singkat yang membantu kita mengingat arah di tengah kompleksitas. Itu akan menjadi tugas Bagian berikutnya.

Pertempuran antara Sabda dan logika tidak dimulai di pengadilan, tetapi di cara kita menjawab pesan, menggulir layar, dan memilih untuk peduli.

*
**

Bagian VII - Universitas, Ilmu, dan Ekosistem Pengetahuan

7.1 Universitas di persimpangan

Universitas selalu menyebut dirinya rumah ilmu dan penjaga kebenaran. Di brosur, visi dan misi terdengar mulia: mencerdaskan, memanusiakan, mengembangkan ilmu untuk kesejahteraan. Namun bila kita berjalan pelan di lorong birokrat akademik, ritme yang terdengar sering lain: target publikasi, akreditasi, peringkat, insentif, klaster, dan indeks sitasi.

Di titik ini, universitas hidup di dua dunia sekaligus. Di permukaan, ia memakai bahasa kebenaran dan martabat. Di lapisan operasional, ia cenderung memakai bahasa produksi dan kinerja. Ruang riset diukur dengan kuantitas artikel. Ruang pengajaran diukur dengan kepatuhan administrasi. Ruang pengabdian sering direduksi menjadi laporan kegiatan.

The Cohesive Tetrad tidak menolak pentingnya indikator, manajemen, dan pengorganisasian. Namun kerangka ini memaksa kita bertanya: universitas sedang melayani siapa. Bila universitas menjadi simpul utama tata kelola kebenaran dalam suatu masyarakat, ia tidak boleh puas menjadi pabrik artikel yang rapi. Ia harus bersedia diukur dengan pertanyaan yang lebih berat:

- apakah ia sungguh menjaga martabat manusia dalam cara ia memproduksi dan menyebarkan pengetahuan,
- apakah ia menata ekosistem ilmu yang memuliakan yang lemah, bukan hanya memperkaya yang sudah kuat,
- apakah ia berani menegakkan kebenaran ketika kebenaran itu mengganggu kenyamanan sponsor, pasar, atau negara.

Di sinilah The Cohesive Tetrad menawarkan alat bedah: universitas perlu dibaca ulang sebagai simpul truth governance yang tunduk kepada Sabda, logika, qualia, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

7.2 Universitas sebagai simpul truth governance

Ketika kita menyebut universitas sebagai simpul tata kelola kebenaran, kita sedang mengatakan bahwa universitas tidak hanya menghasilkan data dan teori. Ia ikut mengatur bagaimana suatu masyarakat memutuskan apa yang:

- dianggap ilmiah,
- dianggap sah sebagai dasar kebijakan,
- dianggap layak masuk buku teks dan kurikulum,
- dan dianggap pantas diajarkan kepada generasi berikutnya.

Dengan kata lain, universitas adalah salah satu tempat di mana otoritas epistemik dirakit dan didistribusikan. Orang mempercayai universitas ketika ingin tahu apakah suatu obat aman, apakah suatu kebijakan masuk akal, apakah suatu angka statistik dapat dipercaya.

Dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, posisi ini tidak netral. Sabda, sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menuntut agar universitas tidak sekadar

memproduksi pengetahuan yang “benar secara teknis”, tetapi juga setia pada telos: memuliakan martabat manusia, menjaga keadilan, dan menghindari kezhaliman.

Ini berarti universitas harus berani mengajukan tiga pertanyaan kepada dirinya sendiri:

1. Apa telos pengetahuan yang ia hasilkan.
Apakah riset diarahkan terutama untuk menambah angka sitasi, atau untuk menyentuh persoalan nyata yang melukai manusia dan bumi.
2. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dibebani oleh pengetahuan itu.
Apakah hasil kajian membantu memperkuat kelompok rentan, atau justru memperhalus bahasa eksploitasi.
3. Di hadapan siapa semua ini dipertanggungjawabkan.
Apakah universitas hanya merasa wajib melapor kepada lembaga akreditasi dan sponsor, atau juga sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Tuhan yang mengawasi cara kebenaran diperlakukan.

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke kerja audit: riset, kurikulum, dan budaya akademik perlu diperiksa dengan lensa *The Cohesive Tetrad*, bukan hanya dengan check list administratif.

7.3 Audit riset dengan The Cohesive Tetrad

Riset adalah kebanggaan universitas. Tetapi riset juga dapat menjadi sumber distorsi ketika metrik menggeser makna. Audit riset dengan kerangka *The Cohesive Tetrad* bergerak melalui enam pilar.

Pertama, Sabda bertanya: tema apa yang diutamakan dan apa telos riset ini. Bila sebagian besar riset diarahkan pada topik yang aman, yang menguntungkan pasar, tetapi menghindari masalah ketidakadilan yang paling menyakitkan di masyarakat, Sabda akan menyorot ketidakseimbangan itu. Sabda mengingatkan bahwa ilmu tanpa keberanian menghadap luka sosial sedang menjauh dari panggilannya.

Kedua, logika memeriksa struktur argumen dan metodologi. Ia menuntut kejujuran epistemik: apakah premis yang dipakai jelas, apakah data yang diambil relevan, apakah kesimpulan tidak melampaui apa yang didukung bukti. Di banyak tempat, logika ini dikorbankan demi kecepatan publikasi. Artikel disusun seperti produk pabrik, bukan hasil pergumulan intelektual yang serius.

Ketiga, qualia menggeser sorotan ke mereka yang diteliti. Bagaimana rasanya menjadi subjek penelitian. Warga yang diwawancarai. Pasien yang dijadikan data klinis. Komunitas lokal yang menjadi lokasi pengumpulan sampel. Qualia mereka, rasa dihargai atau dieksploitasi, rasa dilibatkan atau dimanipulasi, adalah bagian dari audit moral riset. Penelitian yang secara metodologis sah tetapi meninggalkan jejak rasa diperalat di kalangan responden sedang melukai martabat, betapa pun tinggi nilai indeks jurnalnya.

Keempat, Mistika, yang didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menyoroti niat terdalam peneliti. Mengapa riset ini dilakukan. Apakah karena keinginan sungguh-sungguh memahami kebenaran dan melayani kehidupan, atau hanya demi kenaikan pangkat, insentif, dan

pengakuan. Mistika tidak bisa diukur dengan angka, tetapi dapat dirasakan dalam cara peneliti memperlakukan data, mengakui keterbatasan, dan berbagi kredit.

Kelima, akhlak tampak dalam etos kerja sehari-hari. Apakah data disimpan dan dipakai dengan jujur. Apakah penulis enggan mencantumkan nama kolega yang ikut bekerja. Apakah pimpinan laboratorium memanfaatkan mahasiswa sebagai tenaga murah tanpa bimbingan yang layak. Di sini akhlak menjadi cermin: riset yang menghasilkan temuan cemerlang tetapi lahir dari budaya yang menindas generasi muda sedang mengirim sinyal bahaya.

Keenam, Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, mengikat semuanya. Riset diklaim dilakukan demi lingkungan, demi kemanusiaan, demi keadilan. Namun beberapa tahun kemudian, apa jejaknya.

- Apakah komunitas yang menjadi lokasi penelitian mengalami perbaikan hidup.
- Apakah kebijakan berubah ke arah yang lebih adil.
- Ataukah hasil riset hanya menambah daftar publikasi, sementara struktur ketidakadilan tetap utuh.

Jika jejak tidak selaras dengan niat yang diklaim, The Cohesive Tetrad memaksa kita mengakui bahwa ada kegagalan, bukan hanya di level strategi, tetapi di level amanah.

7.4 Audit kurikulum dan pedagogi: dari transmisi ke pembentukan

Kurikulum sering dibahas sebagai daftar mata kuliah dan capaian pembelajaran. Namun dari perspektif Sabda-Logika, kurikulum adalah desain pembentukan manusia.

Sabda bertanya: manusia seperti apa yang ingin kita bentuk. Bila tujuan akhirnya hanya “kompeten di pasar kerja”, maka kurikulum akan diarahkan untuk menajamkan keterampilan teknis, tetapi bisa melupakan martabat, keadilan, dan telos hidup. Dalam horizon Sabda, tujuan pendidikan lebih dalam: melahirkan manusia yang sanggup memikul amanah kebenaran dan tanggung jawab sosial.

Logika memeriksa apakah urutan mata kuliah, struktur tugas, dan cara evaluasi membantu mahasiswa berpikir runtut, kritis, dan jujur terhadap bukti. Atau apakah kurikulum secara diam-diam mendorong strategi bertahan hidup: belajar untuk ujian, menghafal teori tanpa mengerti konteks, menulis tugas hanya untuk lulus.

Qualia mahasiswa menjadi indikator penting. Bagaimana rasanya menjadi mahasiswa di kurikulum ini. Apakah mereka merasa didampingi atau ditinggalkan. Apakah mereka mengalami kelas sebagai ruang pencarian kebenaran, atau hanya sebagai jalur administratif. Rasa lelah, sinis, dan terasing yang meluas di kalangan mahasiswa adalah tanda bahwa kurikulum mungkin sah di atas kertas, tetapi gagal di tubuh dan jiwa.

Mistika menyentuh dimensi yang sering absen dalam desain pendidikan modern: kesadaran bahwa belajar adalah bagian dari perjalanan spiritual. Seorang mahasiswa yang menulis skripsi tentang pengusiran paksa, misalnya, tidak hanya mengumpulkan data. Ia sedang belajar merasakan derita korban dan menata respons moral terhadapnya. Bila pendidikan mengabaikan dimensi ini, kampus akan menghasilkan lulusan yang pandai menghitung, tetapi mati rasa di hadapan ketidakadilan.

Akhlak tampak dalam cara dosen dan institusi memperlakukan mahasiswa. Apakah ruang kelas menjadi tempat aman untuk bertanya dan mengakui ketidaktahuan, atau tempat di mana otoritas tidak boleh dipertanyakan. Cara universitas menangani plagiarisme, kecurangan ujian, dan konflik di kelas menjadi cermin nyata apakah akhlak benar-benar diajarkan atau hanya dihias di brosur.

Intention-Trace Alignment kembali menjadi ujian. Kurikulum dapat mengklaim bahwa ia membentuk lulusan berintegritas, kritis, dan berjiwa sosial. Tapi dua puluh tahun kemudian, lulusan yang sama muncul sebagai elite yang korup, teknokrat yang dingin, dan profesional yang siap berkompromi demi keuntungan. Bila itu yang terjadi, klaim pendidikan bermartabat perlu diakui sebagai gagal. Bukan karena kurang modul etika, tetapi karena struktur pembelajaran tidak pernah sungguh mengintegrasikan Sabda, logika, qualia, Mistika, dan akhlak dalam pengalaman belajar.

7.5 Budaya akademik: dari pabrik artikel ke rumah amanah kebenaran

Istilah “pabrik artikel” muncul ketika ritme universitas sepenuhnya diatur oleh logika output: berapa banyak publikasi, berapa banyak sitasi, berapa banyak hibah. Sekali lagi, publikasi dan sitasi tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika metrik ini naik pangkat menjadi telos.

Dalam budaya seperti itu, dosen dan peneliti dinilai hampir semata-mata dari deret publikasinya. Topik yang kaya secara moral tetapi sulit diterbitkan di jurnal bergengsi perlahan ditinggalkan. Kajian yang menyentuh luka komunitas sekitar kampus dianggap terlalu berisiko. Ranah pengabdian diubah menjadi formalitas.

Rumah amanah kebenaran bergerak dengan logika lain. Di sana, publikasi tetap dihargai, tetapi dijaga agar tetap tunduk sabar pada telos yang dinyatakan Sabda. Kebenaran tidak diukur hanya dengan “terindeks atau tidak”, tetapi dengan pertanyaan: apakah pengetahuan ini membawa perbaikan bagi hidup manusia, terutama mereka yang selama ini tidak punya suara.

Budaya ini menuntut perubahan di banyak level. Rapat senat tidak lagi hanya berputar di sekitar peringkat dan borang. Percakapan tentang keadilan, martabat, dan arah ilmu diberi ruang yang serius. Penghargaan struktural tidak hanya diberikan kepada mereka yang paling produktif menulis, tetapi juga kepada mereka yang paling tekun membimbing, paling jujur menolak hibah yang bermasalah, dan paling konsisten membela integritas akademik ketika sedang tidak dilihat.

Di sini, The Cohesive Tetrad bekerja sebagai struktur rasa. Sabda mengingatkan universitas bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas cara ia memperlakukan kebenaran. Logika membantu merancang kebijakan yang konsisten dengan visi itu. Qualia warga kampus menunjukkan apakah kebijakan itu menumbuhkan atau menghancurkan. Mistika menjaga agar ambisi lembaga tidak menelan niat dasar. Akhlak menjelma dalam kebiasaan keseharian. Intention-Trace Alignment memastikan bahwa slogan “unggul dan berkarakter” betul-betul tampak dalam jejak para lulusan dan dampak kampus terhadap lingkungan sekitar.

7.6 Ekosistem pengetahuan melampaui kampus

Universitas tidak hidup dalam ruang hampa. Ia terhubung dengan pemerintah, industri, media, komunitas lokal, dan ekosistem digital. Cara universitas berdialog dengan jaringan ini menentukan apakah ia menjadi “otak” yang dingin atau “hati nurani” yang hidup.

Dalam ekosistem pengetahuan yang sehat, universitas tidak memonopoli kebenaran. Ia mengakui bahwa ada pengetahuan yang hidup di komunitas adat, di organisasi akar rumput, di pengalaman korban kebijakan yang keliru. The Cohesive Tetrad mengundang universitas untuk mendengarkan idiom kebenaran yang lain tanpa kehilangan Sabda sebagai kompas.

Misalnya, ketika merancang penelitian tentang dampak tambang, universitas tidak hanya mengundang perusahaan dan kementerian, tetapi juga warga yang kehilangan tanah. Ketika membahas rancangan kebijakan, universitas tidak hanya mengandalkan data survei, tetapi juga kesaksian mereka yang paling terdampak.

Dalam hubungan dengan industri dan negara, The Cohesive Tetrad menuntut satu hal: jangan menjual kebenaran. Kerja sama boleh, pendanaan boleh, tetapi Sabda, logika, qualia, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment harus tetap menjadi filter. Bila riset yang diminta jelas-jelas mengarah pada penguatan eksploitasi, universitas yang menjadi rumah amanah kebenaran akan berani berkata tidak, sekalipun itu berarti kehilangan hibah besar.

7.7 Jalan transisi: dari retorika ke pembiasaan

Menggeser universitas dari pabrik artikel menjadi rumah amanah kebenaran bukan pekerjaan satu hari. Itu adalah proses transisi yang panjang, sering melelahkan, dan kadang tidak populer.

Namun transisi ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang konkret dan dapat diulang. Misalnya, satu fakultas memutuskan melakukan audit Sabda-Logika terhadap satu program studi, jujur melihat di mana kurikulum mengabaikan martabat dan telos. Satu lembaga penelitian memutuskan memasukkan indikator qualia dan jejak sosial dalam evaluasi riset. Satu rektorat memutuskan memberi penghargaan khusus bagi karya yang berdampak pada kelompok rentan, meskipun tidak terbit di jurnal berperingkat tertinggi.

Setiap langkah kecil ini, bila diulang dan dituliskan, akan membentuk kebiasaan baru. Lama-lama, aturan rasa di kampus berubah. Orang mulai merasa bahwa memanipulasi data demi publikasi tidak hanya salah, tetapi memalukan. Menolak hibah yang problematik tidak dianggap bodoh, tetapi terhormat. Mengajar dengan hati, meneliti dengan keberanian, dan mengelola universitas dengan kesadaran spiritual tidak lagi terdengar naif, tetapi kembali dianggap sebagai inti tugas akademik.

Di titik itulah universitas benar-benar menjadi simpul truth governance. Bukan karena ia memiliki gedung terbesar atau jurnal terbanyak, tetapi karena ia menjaga kebenaran dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Sabda, di hadapan manusia, dan di hadapan sejarah. The Cohesive Tetrad tidak lagi hanya menjadi nama sebuah buku atau kerangka teoritis, tetapi menjadi pola hidup yang menembus riset, kurikulum, budaya, dan ekosistem pengetahuan.

Universitas yang lupa bahwa ia rumah amanah kebenaran akan berubah menjadi pabrik gelar dan pabrik artikel yang sunyi dari nurani.

Bagian VIII - Dua Belas Tesis Sabda-Logika

Bagian ini merangkum seluruh traktat ke dalam dua belas tesis kunci. Setiap tesis dirumuskan dengan bahasa yang dapat dicerna lintas disiplin, tetapi tetap menjaga ketegangan intelektual yang lahir dari buku *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* dan empat artikel jurnal yang menyertainya. Tesis-tesis ini bukan pengganti argumentasi panjang di bagian sebelumnya, melainkan simpul yang mengikatnya.

Tesis 1

Krisis utama zaman data bukan kekurangan informasi, tetapi salah menaruh otoritas kebenaran.

Kita tidak sedang hidup dalam masa kekurangan data, melainkan kelebihan data yang tidak terarah. Masalah terbesar bukan hoaks di permukaan, tetapi keyakinan diam-diam bahwa logika dan data dapat menggantikan peran kompas normatif. Ketika grafik, skor, dan model statistik naik ke takhta sebagai penentu apa yang benar dan apa yang baik, sementara Sabda dipaksa mundur ke ruang privat, arsitektur kebenaran bergeser. Di atas pergeseran inilah berbagai bentuk ketidakadilan yang tampak rapi tumbuh dengan subur.

Tesis 2

Logika tidak pernah netral dan tidak pernah cukup untuk menentukan telos.

Logika sangat berharga, tetapi ia selalu bekerja di dalam horizon nilai yang sudah lebih dulu ada. Pemilihan premis, definisi, dan apa yang dianggap relevan tidak lahir dari logika itu sendiri. Karena itu, klaim bahwa pure logic dapat mengatur seluruh tata kelola kebenaran adalah ilusi. Logika wajib dipakai sebagai penjaga koherensi dan ketelitian, tetapi ia tidak berhak menentukan sendiri untuk apa manusia hidup dan siapa yang wajib dihormati tanpa syarat. Begitu logika diangkat menjadi penentu telos, ia berubah dari alat menjadi berhala.

Tesis 3

Martabat manusia tidak dapat ditopang secara konsisten oleh kapasitas, evolusi, atau kontrak sosial saja.

Pendekatan kapasitas, evolusi, dan kontrak sosial memberi kontribusi penting dalam memahami manusia. Namun ketika diminta menanggung beban martabat yang penuh bagi mereka yang paling lemah, ketiganya goyah. Anak dengan disabilitas berat, lansia demensia, pengungsi tanpa dokumen, dan komunitas yang tidak diakui menyingkap batas pendekatan ini. Bila martabat bergantung pada kapasitas, mereka akan selalu berada di pinggir. Bila martabat diturunkan dari evolusi, seleksi alam tidak memiliki bahasa kewajiban moral. Bila

martabat digantungkan pada kontrak, mereka yang berada di luar meja kontrak akan mengambang.

Tesis 4

Sabda adalah satu-satunya fondasi yang cukup kuat untuk martabat dan telos manusia.

Dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, Sabda dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Martabat manusia tidak lahir dari kapasitas, spesies, atau kesepakatan, tetapi dinyatakan oleh Sabda. Karena itu, martabat tidak bisa dikurangi oleh kelemahan fisik, ketertinggalan mental, atau status administratif. Telos hidup manusia bukan kejaran abstrak atas prestasi, tetapi jawaban terhadap panggilan Sabda. Seorang ibu yang merawat anak sakit sepanjang hidupnya dapat lebih dekat kepada telos ini daripada mereka yang berjaya di panggung publik namun meninggalkan korban di belakang.

Tesis 5

The Cohesive Tetrad mengubah Sabda dari slogan religius menjadi arsitektur hidup enam pilar.

Sabda saja, tanpa arsitektur, mudah direduksi menjadi slogan. The Cohesive Tetrad menjahit Sabda bersama lima pilar lain: logika, qualia, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace.

- Sabda menetapkan norma dan telos.
- Logika menjaga koherensi tafsir dan kebijakan.
- Qualia mengangkat pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan.
- Mistika, yaitu Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengikat niat kepada horizon perjumpaan dengan Tuhan.
- Akhlak memunculkan karakter yang terlihat dalam kebiasaan.
- Intention-Trace Alignment menguji keselarasan antara niat dan jejak moral yang tertinggal.

Dengan demikian, Sabda-Logika menjadi cara hidup yang dapat diaudit, bukan sekadar pengakuan lisan.

Tesis 6

Demokrasi yang memprivatisasi Sabda meninggalkan ruang kosong yang segera diisi negara, pasar, dan mayoritas.

Ketika alasan religius dilarang muncul sebagai dirinya sendiri di ruang publik, demokrasi tidak menjadi netral. Ruang nilai akan segera diisi oleh logika stabilitas negara, logika keuntungan pasar, dan logika kenyamanan mayoritas. Bahasa yang dipakai mungkin tetap mulia: martabat, keadilan, kebebasan, tetapi isi kata-kata itu menjadi lentur karena tidak tertambat pada horizon transenden yang stabil. Demokrasi tanpa Sabda mudah berubah menjadi prosedur yang rapi untuk mengesahkan keputusan yang ditentukan oleh tiga kekuatan tersebut.

Tesis 7

Nalar publik yang sehat bersifat multi register, bukan netral palsu terhadap Sabda.

Dalam masyarakat majemuk, warga membawa alasan dari berbagai sumber: Sabda, filsafat sekuler, sains, pengalaman korban. Memaksa semuanya menjadi bahasa "netral" membuat percakapan publik kehilangan kejujuran dan kedalaman. Nalar publik yang sehat mengizinkan Sabda hadir sebagai Sabda, dengan syarat ia siap diuji oleh logika, dibandingkan dengan qualia mereka yang terdampak, dibaca niatnya dalam terang Mistika, diukur akhlakunya, dan diaudit melalui Intention-Trace Alignment. Model ini menolak teokrasi yang memaksa, tetapi juga menolak sekularisme kosong yang mengusir Sabda dari meja pembahasan.

Tesis 8

Hukum dan kecerdasan buatan yang berjalan tanpa Sabda-Logika cenderung mengeras kan ketidakadilan dengan wajah rasional.

Data historis yang bias, bila diubah menjadi model risiko dan skor, mudah diperlakukan sebagai kebenaran yang netral. Ketika hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan berlindung di balik kalimat "sistem telah divalidasi", mereka berisiko mereproduksi ketimpangan lama dalam bentuk baru. Tanpa Sabda yang menegaskan martabat pelaku dan korban, tanpa qualia mereka yang terdampak, tanpa Mistika yang mengingatkan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, tanpa akhlak yang berani melawan rekomendasi model yang keliru, dan tanpa Intention-Trace Alignment yang membaca jejak jangka panjang, hukum dan kecerdasan buatan akan cenderung lebih setia kepada pola masa lalu daripada kepada keadilan.

Tesis 9

Latihan Sabda-Logika yang paling menentukan justru terjadi dalam keputusan kecil sehari-hari.

Cara orang tua menegur anak, cara manajer menyusun laporan, cara mahasiswa memilih topik penelitian, cara seseorang menulis komentar di media sosial, semua itu adalah titik-titik latihan tata kelola kebenaran. Jika di titik-titik kecil ini Sabda diingat, logika dipakai dengan jujur, qualia didengar, Mistika mengawasi niat, akhlak dibiasakan, dan Intention-Trace Alignment

disadari, maka ketika tiba saatnya mengambil keputusan besar, struktur batin sudah siap. Sebaliknya, bila dalam kehidupan sehari-hari kebenaran terus dinegosiasikan demi kenyamanan, tidak realistis berharap bahwa kita akan tiba-tiba tegak lurus ketika memegang kekuasaan yang lebih besar.

Tesis 10

Universitas dan ekosistem pengetahuan hanya layak disebut rumah kebenaran jika tunduk pada Sabda-Logika, bukan pada pemeringkatan semata.

Artikel, indeks sitasi, dan peringkat kampus adalah sarana, bukan telos. Universitas yang mendorong mahasiswa menjauhi tema yang menyentuh luka sosial demi keamanan publikasi sedang mengkhianati fungsi terdalamnya. Bila penelitian hanya mengejar variabel yang aman, sementara qualia korban kebijakan diabaikan, maka kampus sedang memproduksi pengetahuan yang rapi tetapi miskin keberanian. Universitas yang tunduk pada Sabda-Logika akan tetap menghargai metodologi dan standar ilmiah, tetapi ia berani memusatkan perhatian pada mereka yang paling lemah, menjadikan Sabda sebagai kompas, dan membiarkan Intention-Trace Alignment memeriksa jejak sosial dari pengetahuan yang ia hasilkan.

Tesis 11

Intention-Trace Alignment adalah bentuk minimal kejujuran moral di era data.

Di zaman ketika niat dapat dipoles dengan bahasa yang indah dan laporan dapat disusun dengan infografik yang memukau, mudah sekali bagi lembaga maupun individu untuk menyatakan bahwa mereka bekerja "demi martabat", "demi keadilan", "demi rakyat". Intention-Trace Alignment memaksa satu pertanyaan sederhana tetapi keras: setelah beberapa tahun, apa yang terjadi pada mereka yang paling lemah. Jika program bantuan sosial, kebijakan hukum, desain algoritma, kurikulum kampus, dan kebiasaan keluarga tidak menghasilkan peningkatan rasa aman, rasa dihormati, dan peluang hidup yang lebih baik, maka niat yang diklaim perlu diakui sebagai gagal. Prinsip ini mengikat Sabda dengan realitas, dan mencegah Sabda dipakai sebagai tameng untuk menutupi jejak buruk.

Tesis 12

Kemenangan Sabda di medan logika bukan berarti mematikan logika, tetapi menempatkan logika kembali pada posisinya sebagai alat yang patuh.

Pertarungan yang melandasi seluruh buku *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* dan empat jurnal bukan perang untuk mengusir logika, melainkan perang untuk mengembalikannya ke posisi yang benar. Kemenangan Sabda di medan logika berarti pengakuan bahwa logika yang paling jujur pun membutuhkan kompas normatif, dan bahwa kompas itu bukan produk logika itu sendiri. Ketika Sabda kembali duduk di pusat sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, logika tidak hilang, justru menjadi lebih mulia: ia berhenti mengklaim takhta, dan mulai menjalankan fungsi mulianya sebagai penjaga kejelasan, ketelitian, dan konsistensi dalam pengabdian kepada kebenaran yang lebih tinggi.

*Di balik dua belas tesis ini hanya ada satu kalimat: kembalikan kebenaran ke orbit martabat
di bawah cahaya Sabda.*

Bagian IX - Epilog Peradaban: Kemenangan Sabda di Medan Logika

1. Dari jurnal, ke traktat, ke praksis

Perjalanan The Cohesive Tetrad tidak dimulai dari traktat ini. Ia berakar pada sebuah buku yang lahir dari pergulatan panjang, *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*, lalu diuji di medan yang paling keras melalui empat artikel jurnal. Di sana Sabda dipertemukan dengan epistemologi modern, teori martabat, nalar publik demokratis, hukum, dan kecerdasan buatan. Setiap artikel bekerja seperti pisau bedah: memotong ilusi, membongkar kelemahan fondasi non Sabda, dan memeriksa koherensi klaim logika murni ketika ia diminta mengatur kebenaran sendirian.

Traktat Sabda-Logika ini berdiri di atas laboratorium ilmiah itu. Ia tidak mengulang seluruh argumen teknis, tidak mengutip semua catatan kaki, tetapi ia tidak melompat keluar dari korpus. Tugas traktat adalah mengalihkan arsitektur yang sudah diuji dalam format jurnal ke bahasa yang lebih mengalir, lebih naratif, dan lebih dekat dengan pembaca lintas disiplin. Dari jurnal ke traktat berarti dari bentuk formal yang ketat ke bentuk esai panjang yang tetap setia pada kedalaman, tetapi lebih mudah dihirup oleh mereka yang tidak hidup setiap hari di dalam dunia.

Langkah berikutnya tidak bisa berhenti di traktat. Seluruh bangunan The Cohesive Tetrad akan kehilangan makna jika ia berhenti sebagai buku, artikel, dan naskah tebal yang hanya beredar di antara kalangan terbatas. Sebab sejak awal, porosnya bukan hanya kebenaran dalam teks, tetapi tata kelola kebenaran dalam hidup. Dari traktat, arsitektur Sabda-Logika dipanggil turun ke praksis: ke meja rapat kebijakan, *ke* ruang sidang, ke server yang menjalankan kecerdasan buatan, ke ruang kelas universitas, ke dapur keluarga, ke lini masa media sosial, ke tubuh dan jiwa orang yang paling lemah, yang selama ini paling sering menjadi korban logika tanpa Sabda.

Perjalanan itu kini lengkap: dari buku ke jurnal, dari jurnal ke traktat, dari traktat ke praksis. Epilog ini berdiri di ujung rangkaian itu, bukan sebagai penutup yang menenangkan, tetapi sebagai penanda bahwa perjalanan utama justru dimulai setelah halaman terakhir ini selesai dibaca.

2. Sabda-Logika dan masa depan The Cohesive Tetrad di hukum, kecerdasan buatan, dan tatanan sosial

Apa yang sebenarnya dipertaruhkan di masa depan The Cohesive Tetrad. Bukan sekadar apakah ia akan banyak dikutip, dijadikan referensi, atau diundang ke konferensi. Yang dipertaruhkan adalah apakah arsitektur Sabda-Logika akan sungguh mengubah cara kita menata lembaga dan sistem yang memegang hidup orang banyak.

Di ranah hukum, masa depan The Cohesive Tetrad adalah masa depan di mana putusan tidak lagi dianggap sah hanya karena sesuai prosedur dan selaras dengan model statistik. Sabda, sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, harus berani disebut ketika hakim dan pembuat undang-undang merumuskan apa yang adil. Logika tetap bekerja, memeriksa konsistensi aturan dan argumen, tetapi logika tidak diizinkan menghapus martabat terdakwa, korban, dan komunitas terdampak. Qualia mereka, rasa dipermalukan atau

dihormati, rasa aman atau terancam, menjadi bagian dari bukti. Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, mengingatkan bahwa setiap vonis akan kembali kepada mereka yang menjatuhkannya. Akhlak menuntut keberanian untuk membela yang lemah sekalipun tidak populer. Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace memeriksa apakah klaim “demi keadilan” sungguh tercermin dalam jejak kehidupan mereka yang paling rentan setelah hukum dijalankan bertahun-tahun.

Di ranah kecerdasan buatan, masa depan The Cohesive Tetrad adalah masa depan di mana model dan algoritma tidak lagi diperlakukan sebagai hakim tak terlihat. Sabda bertanya: bolehkah manusia diubah menjadi titik data tanpa horizon telos yang memuliakan. Logika memaksa transparansi: variabel apa yang dipakai, pola historis mana yang diulang, bias apa yang diperkuat. Qualia pengguna dan korban sistem diangkat sebagai pengetahuan tentang dampak: rasa diawasi, rasa tidak dipercaya, rasa tertutup jalannya. Mistika menuntut pengembang model untuk mengingat bahwa kode yang mereka tulis adalah bagian dari perjalanan mereka menuju Tuhan. Akhlak tampak ketika perusahaan teknologi dan lembaga negara berani menolak proyek yang jelas akan merendahkan martabat, walaupun sangat menguntungkan. Intention-Trace Alignment mengaudit klaim “AI untuk kemanusiaan”, tidak di level slogan, tetapi di level jejak statistik penderitaan dan pemulihan.

Di tatanan sosial yang lebih luas, masa depan The Cohesive Tetrad adalah masa depan di mana demokrasi berhenti memaksa Sabda untuk bersembunyi. Nalar publik multi register yang diusulkan tidak lagi memaksa semua orang berbicara dalam bahasa yang tampak netral, padahal diam-diam tunduk kepada logika negara, pasar, atau mayoritas. Warga boleh mengatakan bahwa komitmen mereka lahir dari Sabda, dengan syarat mereka bersedia diuji oleh logika, oleh pengalaman korban, oleh horizon Mistika, oleh akhlak, dan oleh jejak moral yang tertinggal. Di ruang seperti itu, Sabda bukan alat pemukul lawan, melainkan sumber keberanian untuk mengoreksi diri sendiri dan struktur yang menguntungkan diri sendiri.

The Cohesive Tetrad tidak menawarkan utopia yang rapi. Ia menawarkan arsitektur yang keras terhadap diri sendiri sebelum keras terhadap orang lain. Ia memaksa setiap klaim normatif melewati enam gerbang: Sabda, logika, qualia, Mistika, akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Bila satu gerbang saja sengaja dilewati, bangunan kebenaran yang dibangun akan miring sekalipun tampak megah.

3. Manifesto singkat: apa yang harus diubah, apa yang harus dijaga, dan peran The Cohesive Tetrad ke depan

Epilog ini juga harus menjadi semacam manifesto, tidak dalam arti slogan megah, tetapi dalam arti penegasan yang jujur: apa yang harus diubah, apa yang harus dijaga, dan apa peran The Cohesive Tetrad ke depan.

Pertama, apa yang harus diubah.

Ada tiga kebiasaan besar yang, jika tidak dikoreksi, akan terus merusak tata kelola kebenaran.

1. Kebiasaan memutlakkan logika dan data seolah-olah keduanya dapat menggantikan kompas normatif. Ini harus dihentikan. Logika dan data wajib ditempatkan kembali sebagai alat yang sangat berharga, tetapi bukan penentu telos.

2. Kebiasaan memprivatisasi Sabda sehingga ia hanya berani berbicara di ruang ibadah, tetapi diam di ruang sidang, ruang rapat, dan ruang server. Ini harus dikoreksi. Sabda berhak hadir dalam percakapan publik, dengan cara yang bertanggung jawab, siap diuji, dan siap dipertanggungjawabkan.
3. Kebiasaan mengukur keberhasilan lembaga hanya dengan indikator teknis, sementara qualia mereka yang paling lemah diabaikan. Ini harus diganti dengan budaya yang selalu bertanya: bagaimana rasanya hidup di bawah kebijakan dan sistem yang kita buat.

Kedua, apa yang harus dijaga.

Ada tiga hal yang tidak boleh dikorbankan ketika kita memperbaiki tatanan.

1. Martabat manusia paling lemah. Mereka adalah batu ujian paling jujur dari setiap sistem. Bila anak yang tidak dapat berbicara, penghuni panti, korban penggusuran, dan warga yang tidak tercatat di dokumen merasa semakin terhimpit, maka semua pembicaraan tentang kebenaran dan keadilan sedang kehilangan pusatnya.
2. Kejujuran intelektual. The Cohesive Tetrad lahir dari pergulatan yang tidak memanjakan diri sendiri. Ia membaca Rawls, Habermas, Kittay, Nussbaum, teori kontrak, teori evolusi, dan seluruh tradisi modern dengan hormat sekaligus kritis. Sikap ini harus dijaga: berani mengoreksi, tetapi juga berani mengakui kontribusi mereka yang berbeda pandang.
3. Kerendahan hati di hadapan misteri. Sabda mengajak manusia masuk ke wilayah yang tidak pernah bisa sepenuhnya dikunci oleh definisi dan model. Mistika mengingatkan bahwa ada jarak antara apa yang kita rancang dan apa yang Tuhan kehendaki. Kerendahan hati ini harus tetap hidup, agar The Cohesive Tetrad tidak berubah menjadi dogma kaku yang mengulang kesalahan yang sama dalam wajah baru.

Ketiga, apa peran The Cohesive Tetrad ke depan.

Perannya bukan menjadi agama baru, bukan menjadi ideologi baru, dan bukan menjadi merek dagang baru. Perannya lebih sederhana sekaligus lebih berat: menjadi arsitektur terbuka untuk menyusun, mengaudit, dan mengoreksi tata kelola kebenaran di berbagai bidang.

Di hukum, The Cohesive Tetrad dapat dipakai sebagai kerangka audit moral dan epistemik putusan. Di kecerdasan buatan, ia dapat menjadi protokol evaluasi yang mengikat niat, model, dan dampak. Di universitas, ia dapat menjadi cermin untuk menilai apakah riset dan kurikulum sungguh melayani kebenaran dan martabat. Di kebijakan publik, ia dapat menjadi peta untuk memastikan bahwa mereka yang paling lemah selalu diperhitungkan, bukan menjadi angka sisa. Di kehidupan sehari-hari, ia dapat menjadi aturan rasa yang membantu orang tua, guru, pemimpin komunitas, dan pekerja biasa mengambil keputusan kecil dengan kesadaran bahwa setiap keputusan membawa jejak.

Bila semua ini terdengar berat, mungkin memang demikian adanya. Namun justru karena itu The Cohesive Tetrad tidak boleh diperlakukan sebagai mode intelektual sesaat. Ia hanya akan berarti jika dijalankan secara sabar, pelan, dan konsisten, mulai dari ruang yang paling kecil.

Pada titik ini, epilog peradaban yang singkat ini sampai pada simpul terakhirnya. Kemenangan Sabda di medan logika bukanlah deklarasi bahwa pertempuran telah selesai. Ia adalah pengakuan bahwa kita telah cukup jauh melihat kerusakan yang muncul ketika logika dipaksa memerintah sendiri, dan bahwa kita telah menemukan kembali kompas yang layak memimpin:

Sabda, yang memanggil logika untuk kembali berkhidmat, mengundang qualia untuk bersuara, menyalakan Mistika dalam niat, membentuk akhlak dalam kebiasaan, dan mengikat semuanya dalam Intention-Trace Alignment, agar jejak yang kita tinggalkan di bumi ini selaras dengan kebenaran yang kita akui di lisan dan di lembar kajian ilmiah.

Peradaban runtuh bukan ketika mesin mulai berpikir, tetapi ketika manusia berhenti merasa perlu mempertanggungjawabkan pikirannya di hadapan Sabda.

**

Penutup

Pada akhirnya, seluruh perjalanan dalam *The Cohesive Tetrad: Traktat tentang Martabat Manusia dan Hukum di Era Data* bermuara pada satu pertanyaan yang sederhana dan berat sekaligus: di zaman ketika kebenaran diukur dengan statistik dan manusia dipadatkan menjadi data, apakah kita masih berani menempatkan martabat sebagai poros dan Sabda sebagai sumber normatif tertinggi. Seluruh analisis yang telah dibentangkan sebelumnya, mulai dari bedah fondasi martabat, kritik atas kapasitas, evolusi, dan kontrak sosial, hingga kajian atas hukum yang bersinggungan dengan infrastruktur data dan kecerdasan buatan, sebenarnya hanya berusaha menjawab pertanyaan ini dari berbagai sisi.

Kerangka *The Cohesive Tetrad* menegaskan bahwa Sabda harus dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, bukan sebagai hiasan di pinggir argumentasi. Tanpa Sabda, martabat manusia mudah terjatuh dalam rumus yang berubah-ubah, bergantung pada apa yang sedang dianggap penting oleh teori atau pasar. Dengan Sabda, martabat kembali menjadi deklarasi yang tidak dapat dinegosiasikan, titik berangkat yang mendahului perhitungan apa pun. Di atas fondasi itu, logika diminta bekerja dengan jujur untuk menjaga koherensi hukum, bukan untuk memutihkan manipulasi. Qualia mengingatkan bahwa rasa dipermalukan, rasa aman, dan rasa dipercaya adalah bagian dari lanskap kebenaran yang tidak boleh dihapus. Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menarik kembali seluruh proses ini ke dalam horizon pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Akhlak memastikan bahwa semua itu tampak dalam kebiasaan yang dapat dilihat. Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, memaksa kita membaca jejak historis hukum di era data dan bertanya dengan jujur apakah niat luhur benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka yang paling lemah.

Dengan cara pandang ini, hukum di era data tidak mungkin lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme pengaturan perilaku. Ia harus dibaca sebagai salah satu simpul utama *truth governance* yang paling keras, tempat klaim kebenaran diterjemahkan ke dalam putusan, prosedur, dan sanksi. Ketika perangkat hukum bersandar pada basis data yang timpang, pada model statistik yang memfotokopi bias masa lalu, atau pada skor risiko yang tidak memandang wajah manusia, maka hukum berisiko berubah menjadi alat pelipatgandaan ketidakadilan yang rapi. Traktat ini mengusulkan bahwa satu-satunya cara keluar yang sah bukanlah meninggalkan teknologi, melainkan menundukkan seluruh arsitektur data dan algoritma ke dalam orbit Sabda, logika yang jujur, dan audit Intention-Trace Alignment yang konsisten.

Tentu, naskah ini bukan jawaban terakhir. Ia adalah simpul dalam rangkaian yang lebih panjang. Di atasnya berdiri buku induk *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* sebagai sumber arsitektur, dan di bawahnya masih terbuka ruang bagi karya-karya turunan lain yang akan menggarap dimensi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan dengan lebih rinci. Namun traktat ini berusaha mengunci satu pesan: bila di medan hukum dan era data Sabda dibiarkan diam, maka logika, data, dan algoritma akan menulis sejarah sendiri tanpa koreksi. Bila di medan ini Sabda kembali diberi hak bicara dan ditempatkan di pusat arsitektur, maka hukum masih mungkin menjadi sarana pemulihan martabat, bukan hanya sarana pengelolaan risiko.

Karena itu, penutup ini tidak dimaksudkan sebagai titik akhir, melainkan sebagai undangan. Undangan bagi para hakim, legislator, akademisi, pengembang sistem, dan warga yang peduli untuk membaca kembali praktik hukum di era data dengan kacamata *The Cohesive Tetrad*.

Undangan bagi peneliti dan mahasiswa untuk menjadikan kerangka ini sebagai salah satu alat baca dalam tesis, disertasi, dan riset kebijakan. Undangan bagi komunitas yang selama ini menjadi objek keputusan hukum untuk menyadari bahwa suara dan pengalaman mereka, qualia mereka, adalah bagian sah dari pengetahuan moral yang harus didengar.

Jika ada yang patut diharapkan dari traktat ini, maka harapan itu sederhana: agar setelah menutup halaman terakhir, pembaca tidak hanya membawa tambahan konsep, tetapi juga perubahan cara merasa dan cara menimbang. Merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika data berjalan mulus tetapi manusia yang paling rentan tetap terluka. Menimbang bahwa martabat tidak boleh digadaikan atas nama efisiensi. Dan di atas semua itu, menyadari bahwa dalam setiap keputusan tentang hukum di era data, kita sesungguhnya sedang berdiri di titik pertemuan antara Sabda dan logika, antara niat dan jejak, antara klaim kebenaran dan nasib manusia yang hidup di bawahnya. Dari titik pertemuan itulah peradaban yang lebih adil dapat mulai ditata kembali.

Jika setelah membaca traktat ini kita hanya lebih pandai berargumen, tetapi tidak lebih takut melukai martabat, maka Sabda belum benar-benar kita dengarkan.

Empat artikel jurnal yang dihimpun dalam lampiran ini membentuk korpus utama dari mana Traktat 1 tentang Logika Sabda tumbuh. Masing-masing artikel pada awalnya digagas dan ditulis sebagai naskah jurnal yang berdiri sendiri, dengan struktur internal, abstrak, dan bibliografinya masing-masing. Artikel-artikel tersebut telah, atau sedang, dibagikan secara individual melalui repositori akses terbuka dan platform ilmiah, di mana artikel-artikel tersebut dapat dibaca, disitasi, dan ditelaah menurut kaidahnya sendiri.

Penghimpunan keempat artikel di sini tidak mengubah statusnya sebagai karya penelitian yang independen. Sebaliknya, langkah ini memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana artikel-artikel tersebut saling terjalin di latar belakang traktat ini. Traktat 1 menawarkan sebuah alur terintegrasi yang bergerak dari era data dan singgasana logika murni menuju Twelve Theses of Sabda logic dan sebuah epilog peradaban. Keempat artikel tersebut mendekati arsitektur yang sama dari sudut-sudut yang berbeda. Artikel pertama menjernihkan mengapa logika murni tidak dapat mengatur kebenaran secara mandiri dan mengapa tata kelola kebenaran memerlukan Sabda. Artikel kedua mengkaji martabat manusia dan telos melampaui kapasitas, evolusi, dan kontrak sosial sebagai landasan terakhir. Artikel ketiga mempertimbangkan masyarakat majemuk, public reason, dan tata kelola kebenaran yang demokratis. Artikel keempat menerapkan The Cohesive Tetrad pada hukum, praktik institusional, dan kecerdasan artifisial.

Versi-versi yang direproduksi di sini memprioritaskan muatan argumentatif utama. Untuk menjaga fokus pada arsitektur dan menghindari pengulangan yang tidak perlu, daftar referensi rinci tidak disajikan secara lengkap. Pembaca yang ingin menelusuri setiap sitiran, menelaah khazanah literatur yang lebih luas, atau merujuk pada pengenalan dan metadata yang stabil dianjurkan untuk merujuk pada versi-versi mandiri dari naskah-naskah ini di repositori dan platform relevan tempat naskah-naskah tersebut diunggah.

Baik traktat maupun korpus jurnal disajikan sebagai ikhtiar yang bersifat sementara, bukan sebagai kata akhir. Keduanya berutang pada banyak arus pemikiran dan praktik, dan tetap terbuka bagi koreksi, pemurnian, dan pendalaman. Apabila halaman-halaman ini dapat, secara sederhana, membantu melindungi martabat manusia dalam era data dan menjernihkan tempat Sabda dan logika dalam tata kelola kebenaran, berarti ia telah menjalankan tujuan bagi mana ia ditulis.

*
**

Sabda, Logika Murni, dan Arsitektur Tata Kelola Kebenaran: Mengapa Logika Tidak Dapat Memerintah Sendirian dan Mengapa Tata Kelola Kebenaran Memerlukan Sabda

Abstrak

Artikel ini berargumen bahwa klaim-klaim kontemporer tentang kedaulatan logika murni dalam sains, hukum, dan teknologi tidak dapat dipertahankan begitu struktur internalnya dibuat eksplisit. Berangkat dari genealogi dari positivisme hingga saintisme kontemporer, artikel ini merekonstruksi logika murni sebagai sebuah arsitektur yang ditandai oleh empat tesis struktural: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat fakta–nilai, serta penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat manusia. Artikel ini kemudian menunjukkan bahwa arsitektur tersebut menghadapi tiga kegagalan struktural. Pertama, norma-norma dasar praksis rasional, seperti kejujuran, keterbukaan terhadap kritik, dan orientasi pada kebenaran, tidak dapat diberi landasan oleh prosedur-prosedur yang justru mereka mungkin tanpa jatuh ke dalam regres, sirkularitas, atau stipulasi. Kedua, pembedaan ketat antara fakta dan nilai runtuh ketika ditelaah dalam praktik nyata penyelidikan dan pengambilan keputusan, di mana penilaian nilai dan konsep-konsep padat (*thick concepts*) seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan martabat tertanam dalam pemilihan masalah, pembentukan konsep, dan standar evidensi. Ketiga, penjelasan tentang martabat dan telos yang berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian tidak mampu membenarkan bahasa tanpa syarat tentang nilai yang inheren dan tak dapat dicabut serta batas-batas yang tak boleh dilanggar, yang terus digunakan oleh kerangka hukum dan etika. Untuk menjawabnya, artikel ini mengajukan *The Cohesive Tetrad* (TCT) sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran. Dalam arsitektur ini, Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word*, the authoritative source of norm and telos, bersifat primer, sementara logika, *Qualia*, Mistika, Akhlak, dan *Intention-Trace Alignment* diberi peran-peran yang berbeda namun saling bergantung. Artikel ini menunjukkan bagaimana arsitektur tersebut dapat membingkai ulang perdebatan tentang rasionalitas, martabat manusia, dan desain institusional dalam hukum dan kecerdasan buatan, serta berargumen bahwa arsitektur ini menyediakan penjelasan yang lebih koheren atas norma-norma yang sebenarnya sudah dipraanggapkan oleh rezim-rezim kebenaran kontemporer.

Kata kunci: *tata kelola kebenaran; martabat manusia; Sabda; logika; rasionalitas hukum; tata kelola kecerdasan buatan; Qualia; Mistika; Akhlak; Intention-Trace Alignment; The Cohesive Tetrad.*

1. Pendahuluan

1.1 Otoritas rasional, martabat, dan ketergantungan yang tak terlihat

Institusi modern berbicara dengan dua suara. Dengan suara pertama, mereka menampilkan diri sebagai entitas yang diatur oleh evidensi, netralitas, dan prosedur formal. Komunitas ilmiah menggambarkan otoritas mereka dalam istilah metode dan telaah sejawat. Pengadilan dan badan regulasi meletakkan legitimasi mereka pada penalaran dari fakta dan hukum. Komunitas teknis membingkai pekerjaan mereka sebagai perancangan alat yang netral nilai dan dapat melayani setiap tujuan yang wajar (Haack, 2003; Douglas, 2009; Rea, 2018). Suara ini menyiratkan bahwa logika murni, dipadukan dengan investigasi empiris, sudah cukup untuk mengatur praksis rasional dalam masyarakat majemuk.

Dengan suara kedua, institusi yang sama bergantung pada kosakata martabat manusia, hak-hak dasar, batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan kebaikan-kebaikan yang tak dapat dinegosiasikan. Instrumen hak asasi manusia menegaskan martabat setiap orang yang inheren dan tak dapat dicabut (UN, 1948; Waldron, 2012). Etika kedokteran dan penelitian menuntut bahwa pribadi tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana, bahkan bila perlakuan demikian akan menghasilkan manfaat yang besar (Kant, 1996; Beauchamp and Childress, 2019). Pengadilan mengerahkan konsep-konsep seperti perlakuan yang merendahkan martabat, diskriminasi, dan perlindungan yang setara, yang melampaui sekadar efisiensi atau preferensi. Perdebatan tentang kecerdasan buatan kini secara rutin merujuk pada keadilan (fairness), akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip-prinsip penuntun (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Diambil secara terpisah, masing-masing suara memiliki kelayakan sendiri. Namun bersama-sama, keduanya menimbulkan ketegangan. Jika otoritas rasional sepenuhnya diletakkan pada prosedur yang memenuhi tuntutan logika murni, tidak jelas bagaimana nada tanpa syarat dari bahasa yang berpusat pada martabat dapat dibenarkan. Jika martabat dan telos lebih dari sekadar ringkasan pragmatis dari keberhasilan koordinasi, maka logika murni yang beroperasi dalam sebuah horizon naturalistik tampaknya secara diam-diam bergantung pada suatu sumber norma dan tujuan yang tidak diakuinya. Artikel ini mengekspos ketegangan tersebut dan berargumen bahwa ketegangan itu tidak dapat diselesaikan tanpa mengonfigurasi ulang arsitektur dasar tata kelola kebenaran.

1.2 Dari teknik ke arsitektur: merekonstruksi logika murni

Langkah pertama adalah berpindah dari memandang logika sebagai sekumpulan teknik ke memandangnya sebagai bagian dari sebuah arsitektur. Dengan arsitektur tata kelola kebenaran saya maksudkan sebuah pola praanggapan tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan, bagaimana alasan-alasan seharusnya ditimbang, dan di mana otoritas normatif ditempatkan. Logika murni, dalam pengertian yang relevan di sini, bukan sekadar validitas deduktif atau koherensi probabilistik. Ia adalah sebuah himpunan komitmen yang muncul secara historis dari positivisme, empirisme, dan berbagai bentuk naturalisme, yang kini membentuk cara institusi memahami diri mereka.

Dengan menumpu pada genealogi ini, saya merekonstruksi logika murni sebagai sesuatu yang diorganisasikan oleh empat tesis struktural. Pertama adalah saintisme, pandangan bahwa sains

alam merupakan rute paling serius, dan mungkin satu-satunya rute serius, menuju pengetahuan tentang realitas, dan bahwa ranah lain paling jauh hanya menghasilkan ekspresi atau interpretasi (Stenmark, 2001; Haack, 2003). Kedua adalah evidensialisme keras, menurutnya suatu keyakinan hanya dapat diterima secara rasional bila didukung oleh evidensi yang secara prinsip dapat diakses dan dinilai oleh setiap penyelidik yang kompeten (Clifford, 1877; Conee and Feldman, 2004). Ketiga adalah pemisahan ketat fakta–nilai yang menempatkan fakta pada sains dan nilai pada politik, budaya, atau keyakinan privat (Hume, 1978; Putnam, 2002). Keempat adalah penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat, yang berusaha menafsirkan kedua gagasan ini dalam istilah kapasitas, sejarah evolusioner, atau kesepakatan rasional, tanpa merujuk pada norma tataran lebih tinggi apa pun (Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Tesis-tesis ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, dan tidak semua pembela rasionalitas menganutnya dalam bentuk identik. Namun, bila diambil bersama, tesis-tesis itu menggambarkan suatu gambaran yang dapat dikenali yang memengaruhi bagaimana banyak pelaku kontemporer berbicara tentang evidensi, netralitas, dan nalar publik. Bagian 2 mengembangkan rekonstruksi ini secara lebih rinci, menunjukkan bagaimana komitmen-komitmen tersebut saling menopang dan mengapa tampak menarik sebagai cara melindungi penyelidikan dari dogma dan kehidupan publik dari konflik sektarian.

1.3 Tiga kegagalan struktural logika murni

Begitu logika murni diperlakukan sebagai sebuah arsitektur alih-alih sebagai kumpulan longgar kebajikan, menjadi mungkin untuk menanyakan apakah arsitektur ini dapat memenuhi tuntutan yang ia bebankan pada dirinya sendiri. Klaim sentral artikel ini adalah bahwa ia tidak dapat melakukannya. Tiga kegagalan struktural terutama penting.

Kegagalan pertama menyangkut pemendasaran diri (self-grounding). Logika murni bergantung pada norma dasar praksis rasional, termasuk kewajiban untuk menghindari penipuan, menghormati evidensi, dan tetap terbuka terhadap koreksi. Namun ketika ia mencoba membenarkan norma-norma ini hanya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya sendiri, ia berhadapan dengan trilema yang sudah dikenal: regres, sirkularitas, atau stipulasi (BonJour, 1985; Klein, 1998). Entah setiap norma harus didukung oleh norma lebih lanjut tanpa akhir, atau praksis dibenarkan oleh keberhasilannya dengan cara yang sudah mempraanggapkan norma-norma yang diperselisihkan, atau sebagian norma harus sekadar dinyatakan sebagai dasar. Perdebatan dalam epistemologi kebajikan (virtue epistemology) menegaskan bahwa disposisi karakter seperti kejujuran intelektual dan kecintaan pada kebenaran tidak dapat diturunkan dari prosedur netral, melainkan merupakan prasyarat bagi penyelidikan yang sungguh-sungguh (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011; Roberts and Wood, 2007). Bagian 3 berargumen bahwa logika murni, pada istilah-istilahnya sendiri, tidak dapat menyediakan jenis pemendasaran yang secara implisit dijanjikannya.

Kegagalan kedua menyangkut distingsi fakta–nilai. Filsuf sains dan epistemolog sosial telah menunjukkan bahwa nilai memasuki penelitian pada banyak tingkatan, mulai dari pemilihan masalah hingga spesifikasi konsep dan standar evidensi (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009). Konsep-konsep padat (thick concepts) seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan martabat, yang sentral dalam hukum dan etika, memadukan deskripsi dan evaluasi dengan cara yang menolak pemisahan (Williams, 1985; MacIntyre,

1988). Bagian 4 berargumen bahwa normativitas bukan tambahan opsional, melainkan terbenam dalam praksis yang oleh logika murni digambarkan sebagai faktual dan bebas nilai.

Kegagalan ketiga menyangkut martabat dan telos. Penjelasan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian menangkap aspek penting kehidupan moral kita, tetapi tidak satu pun menopang klaim kuat tentang martabat yang inheren dan tak dapat dicabut serta batas-batas yang tak boleh dilanggar yang digunakan dalam bahasa hak asasi manusia dan banyak putusan hukum (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Ketika ditelaah secara cermat, penjelasan-penjelasan ini cenderung merelatifkan atau memperlemah aksioma yang ingin mereka benarkan. Bagian 5 merumuskan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang sudah tersirat dalam praktik dan menunjukkan bahwa aksioma-aksioma tersebut menunjuk melampaui horizon yang sepenuhnya naturalistik.

1.4 Sabda dan The Cohesive Tetrad

Jika norma-norma praksis rasional dan aksioma martabat manusia minimal lebih dari sekadar konvensi lokal, maka harus ada suatu sumber yang meletakkan dasar bagi norma-norma tersebut dan menyapa pelaku rasional dengan daya ikat. Dalam artikel ini, saya menamai sumber itu Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Menyebut Sabda berarti mengklaim bahwa manusia bukan pembawa kebetulan dari hasrat akan kebenaran dan keadilan, melainkan makhluk yang dipanggil dan dikenal oleh suatu realitas yang mendahului dan melampaui mereka. Itu berarti menegaskan bahwa ada cara memperlakukan pribadi yang pada dirinya sendiri tidak pantas, bukan sekadar suboptimal relatif terhadap tujuan yang berubah-ubah.

Penghadiran Sabda tidak dimaksudkan untuk menutup pertanyaan. Sebaliknya, ia menyiapkan panggung bagi sebuah arsitektur yang lebih kompleks di mana logika dibebaskan dari tugas mustahil untuk memendasarkan dirinya sendiri, tetapi tetap diberi mandat untuk menguji respons-respons manusia terhadap Sabda dari segi koherensi dan kejujuran. The Cohesive Tetrad (TCT) adalah nama yang saya berikan kepada arsitektur tersebut. Di samping Sabda dan logika, arsitektur ini mengakui Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment sebagai ranah-ranah kebenaran yang berbeda yang harus diintegrasikan dalam setiap rezim pengetahuan yang bertanggung jawab.

Bagian 6 memaparkan arsitektur ini secara rinci. Sabda menempati puncak sebagai sumber norma dan telos. Logika berfungsi sebagai organ disipliner klarifikasi dan kritik. Qualia menangkap bagaimana pengaturan kelembagaan dialami dari dalam. Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menyangkut orientasi niat epistemik. Akhlak menggambarkan konfigurasi moral para pelaku pengetahuan. Intention–Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace dalam praksis institusional, mengukur derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik dalam praktik kelembagaan. Bagian 6 juga mengisyaratkan bagaimana arsitektur ini dapat dipakai untuk membaca ulang perdebatan dalam hukum dan kecerdasan buatan, dua ranah di mana batas-batas logika murni dan urgensi perhatian terhadap martabat tampak secara khusus (Habermas, 1996; Dworkin, 1986; Fricker, 2007; Medina, 2013; Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; UNESCO, 2021).

Bagian terakhir mengaitkan kritik atas logika murni dengan usulan The Cohesive Tetrad, dan menunjukkan bagaimana pengakuan eksplisit atas Sabda dapat berdampingan dengan, dan

bahkan menguatkan, praksis logis dan empiris yang ketat dalam institusi-institusi yang bercita-cita menghormati sekaligus kebenaran dan martabat manusia.

2. Merekonstruksi ideologi logika murni

Jika kritik yang dikembangkan dalam artikel ini hendak adil, ia tidak boleh dimulai dari sebuah karikatur. Logika murni terlebih dahulu harus dipresentasikan dalam bentuk terkuat yang secara wajar dapat ia klaim. Hanya dengan demikian batas-batasnya dapat dibuka tanpa ketidakadilan. Karena itu, bagian ini merekonstruksi ideologi logika murni sebagai sebuah proyek yang serius dan koheren secara internal, yang muncul dari suatu genealogi intelektual yang dapat dikenali dan yang terus membentuk pemahaman diri institusi-institusi kontemporer.

Saya menggunakan istilah ideologi di sini dalam makna deskriptif. Tujuannya bukan menuduh para pendukungnya bersikap tidak tulus, melainkan menyoroti bahwa logika murni berfungsi sebagai sebuah arsitektur praanggapan tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan, bagaimana alasan-alasan seharusnya ditimbang, dan di mana otoritas ditempatkan. Banyak dari apa yang ditegaskan ideologi ini merupakan capaian nyata. Justru karena itu, pertanyaan tentang batas-batasnya menjadi penting.

2.1 Genealogi dan pemahaman diri logika murni

Aspirasi yang saya sebut logika murni berdiri dalam kesinambungan dengan beberapa arus besar dalam pemikiran modern. Kaum positivis awal seperti Auguste Comte berpendapat bahwa umat manusia seharusnya melampaui tahap teologis dan metafisis dan memasuki tahap positif, di mana pengetahuan yang sejati diletakkan pada observasi dan keteraturan yang bersifat hukum, alih-alih pada wahyu atau spekulasi (Comte, 1974). Kaum positivis logis meradikalkan dorongan ini dengan mengikat makna kognitif secara ketat pada verifikasi atau relasi-relasi formal di antara proposisi, sehingga banyak klaim metafisis dan teologis tradisional dinyatakan secara harfiah tidak bermakna alih-alih sekadar salah (Ayer, 1936; Carnap, 1937).

Meskipun positivisme logis klasik kehilangan banyak dominasinya setelah pertengahan abad, intuisi sentralnya bertahan dalam bentuk-bentuk empirisme dan naturalisme yang lebih lentur. Saintisme, khususnya, dapat dipahami sebagai keturunan positivisme yang tidak lagi bersikeras pada prinsip verifikasi yang ketat, tetapi tetap memandang sains alam sebagai cara paling serius, dan mungkin satu-satunya cara serius, untuk mengetahui realitas (Stenmark, 2001; Haack, 2003). Klaim-klaim yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam suatu gambaran yang secara luas ilmiah didelegasikan ke ranah preferensi, latar pengasuhan, atau identitas.

Pada saat yang sama, filsafat analitik bahasa dan pikiran mengembangkan penjelasan yang kian canggih tentang makna, referensi, dan rasionalitas, yang kerap menguatkan, bukan melemahkan, daya tarik sebuah pandangan yang secara luas saintistik. Metafisika naturalistik berupaya membangun ontologi yang tidak melampaui apa yang tampak dituntut oleh sains yang mapan (Rea, 2018). Di banyak kalangan, pembicaraan tentang wahyu, perintah sakral, dan norma transenden diperlakukan, paling jauh, sebagai cara simbolik untuk mengisyaratkan keprihatinan-keprihatinan manusia yang mungkin pada akhirnya dapat dideskripsikan ulang dalam istilah naturalistik.

Latar filosofis ini mengalir langsung ke dalam deskripsi diri institusional kontemporer. Organisasi ilmiah menggambarkan pekerjaan mereka sebagai berbasis evidensi dan netral secara metodologis terhadap nilai-nilai terakhir. Pengadilan dan badan regulasi menampilkan diri sebagai terikat oleh fakta dan hukum, bukan oleh keyakinan komunitas tertentu. Komunitas teknis berbicara tentang alat bebas nilai yang dapat melayani tujuan apa pun yang wajar. Bahkan keterlibatan kritis dengan institusi-institusi ini kerap berbagi praanggapan dasar bahwa yang pada akhirnya penting adalah apakah evidensi dan logika telah dihormati dengan layak.

Tentu saja, tidak ada ilmuwan atau hakim yang bekerja dengan seperangkat tesis positivis lengkap di benaknya. Kebanyakan akan menolak klaim-klaim terkuat verifikasiisme awal. Namun sebuah gambaran umum tentang otoritas rasional tetap bertahan. Dalam gambaran ini, pengetahuan sejati adalah produk metode-metode yang bersifat publik, empiris, dan didisiplinkan secara logis. Komitmen normatif dan metafisis mungkin berperan dalam motivasi individual, tetapi tidak dihitung sebagai pengetahuan dalam pengertian keras yang sama. Dengan cara ini, logika murni berfungsi sebagai cita-cita regulatif yang membentuk argumen mana yang tampak sah secara intelektual dan mana yang disisihkan sebagai privat atau sektarian.

Dilihat dari dalam genealogi ini, logika murni bukan preferensi sewenang-wenang. Ia adalah upaya yang dapat dipahami secara historis untuk melindungi penyelidikan dari penyalahgunaan dogmatis, untuk memastikan bahwa otoritas tunduk pada pengujian, dan untuk menciptakan ruang bersama di mana orang dengan keyakinan berbeda dapat bernalar bersama. Setiap arsitektur alternatif tata kelola kebenaran yang mengabaikan motif-motif ini akan bersikap tidak bertanggung jawab. Tugasnya adalah melihat di mana cita-cita ini memperjelas dan di mana ia melampaui batas.

2.2 Empat tesis struktural logika murni

Di bawah keragaman posisi yang merujuk pada logika murni, dapat dikenali suatu gugus tesis struktural yang cenderung berjalan bersama. Tesis-tesis ini tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, tetapi dapat diekstraksi dari cara rasionalitas, evidensi, dan otoritas digambarkan. Untuk kepentingan artikel ini, empat tesis semacam itu bersifat sentral.

Tesis pertama adalah saintisme. Dalam bentuk kuatnya, saintisme mengklaim bahwa sains alam merupakan, dan mungkin satu-satunya, jalan otoritatif menuju pengetahuan tentang realitas (Stenmark, 2001). Ranah lain, seperti etika, teologi, atau estetika, mungkin menyediakan makna atau ekspresi, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan dalam pengertian kokoh yang sama. Dalam bentuk-bentuk yang lebih lemah, saintisme memperlakukan metode ilmiah sebagai model baku bagi semua penyelidikan serius, bahkan ketika metode itu harus diadaptasi. Dalam kedua versi, apa yang dihitung sebagai real erat kaitannya dengan apa yang dapat diselidiki dengan konsep dan instrumen sains (Haack, 2003; Rea, 2018).

Tesis kedua adalah evidensialisme keras. Dalam semboyan klasik yang terkait dengan W. K. Clifford, adalah salah untuk mempercayai apa pun berdasarkan evidensi yang tidak memadai (Clifford, 1877). Para evidensialis kontemporer kerap memurnikannya menjadi klaim bahwa suatu keyakinan dibenarkan secara epistemik hanya jika didukung oleh keseluruhan evidensi yang tersedia, dipahami dalam istilah yang secara prinsip dapat diakses secara intersubjektif dan terbuka untuk dinilai oleh pihak lain (Conee and Feldman, 2004). Sementara sedikit orang yang akan menyangkal bahwa evidensi itu penting, evidensialisme keras melangkah lebih jauh

dengan memperlakukan rujukan pada wahyu, tradisi, atau otoritas sebagai sesuatu yang secara epistemik mencurigakan kecuali bila dapat diterjemahkan ke dalam istilah evidensial yang memenuhi standarnya.

Tesis ketiga adalah pemisahan ketat antara fakta dan nilai. Dalam pandangan ini, fakta menggambarkan bagaimana dunia apa adanya, sedangkan nilai mengekspresikan bagaimana dunia seharusnya atau apa yang layak dikejar. Fakta, dikatakan, adalah ranah sah sains dan dapat diselidiki terlepas dari komitmen nilai tertentu. Nilai muncul dari preferensi, emosi, atau konvensi sosial dan karenanya harus ditangani oleh politik, budaya, atau pilihan privat. Pembelahan tajam ini berpengaruh setidaknya sejak distingsi terkenal Hume antara *is* dan *ought*, dan ia terus membentuk cara wacana publik diorganisasikan (Hume, 1978; Putnam, 2002). Bagi ideologi logika murni, keuntungannya jelas. Dengan membatasi otoritas rasional pada pertanyaan faktual, menjadi mungkin untuk mengklaim netralitas di antara sistem nilai yang saling bersaing.

Tesis keempat adalah penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat. Ketika logika murni tidak dapat menghindari pembicaraan tentang tujuan dan harga diri (*worth*), ia berupaya menafsirkan keduanya sedemikian rupa sehingga cocok dengan gambaran dunia yang imanen dan naturalistik. Telos, atau tujuan, ditafsirkan ulang sebagai pola yang muncul dari proses evolusioner, sebagai keluaran pilihan rasional di bawah kendala tertentu, atau sebagai produk kontrak sosial di antara pelaku yang bebas dan setara (Rawls, 1999; Habermas, 1996). Martabat manusia ditafsirkan ulang sebagai singkatan bagi seperangkat perlindungan yang secara sosial berguna untuk menopang kerja sama dan stabilitas jangka panjang, atau sebagai komitmen yang telah mengakar secara kultural yang otoritasnya bersumber dari sejarah bersama alih-alih dari norma tataran lebih tinggi mana pun (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Dalam pandangan semacam ini, bahasa tentang martabat yang inheren dan tak dapat dicabut dalam instrumen hak asasi manusia dipertahankan, tetapi bobot metafisisnya dialihkan kepada narasi evolusioner, model kontraktual, atau penjelasan fungsionalis.

Keempat tesis ini secara konseptual berbeda, namun saling memperkuat. Saintisme dan evidensialisme keras mendorong pemisahan fakta–nilai yang ketat, karena hanya apa yang dapat dibawa ke bawah kriteria evidensial yang dihitung sebagai sepenuhnya rasional. Pemisahan fakta–nilai, pada gilirannya, memberi tekanan pada penjelasan telos dan martabat untuk bersifat naturalistik, sebab setiap rujukan pada norma tataran lebih tinggi akan melanggar batas yang telah dinyatakan. Begitu telos dan martabat dinaturalkan, saintisme tampak kian dibenarkan, karena tidak ada lagi yang tersisa di luar ruang yang dapat, secara prinsip, dijangkau oleh metode ilmiah dan quasi-ilmiah.

Dalam praktik, banyak filsuf dan praktisi menganut versi lunak atau hibrida dari tesis-tesis ini. Sebagian membela saintisme moderat sambil menolak evidensialisme keras. Yang lain mengkritik dikotomi fakta–nilai sambil tetap menegaskan semacam naturalisme tentang normativitas (Putnam, 2002). Tujuan di sini bukan mengeruntuhkan semua posisi menjadi satu slogan, melainkan mengidentifikasi suatu konfigurasi yang dapat dikenali dalam pemahaman diri institusi yang menganggap diri mereka terutama diatur oleh logika murni. Konfigurasi itulah, bukan satu tesis tunggal, yang diperlakukan artikel ini sebagai sebuah arsitektur tata kelola kebenaran.

2.3 Logika murni sebagai arsitektur tata kelola kebenaran

Begitu tesis-tesis struktural ini berada pada tempatnya, logika murni menjadi lebih dari sekadar kebijakan epistemik. Ia berfungsi sebagai arsitektur yang mengurutkan pertanyaan, mengalokasikan otoritas, dan membentuk antropologi implisit institusi.

Dalam hal pengurutan pertanyaan, pemisahan fakta–nilai mendorong suatu model dua tingkat. Pertama, pertanyaan faktual diselesaikan oleh sains, analisis pakar, atau prosedur berbasis evidensi lainnya. Hanya setelah fakta-fakta diperoleh menjadi pantas untuk menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam banyak konteks kebijakan dan hukum, hal ini tercermin dalam retorika berurutan. Para pakar diberi tugas menemukan apa yang ada, sementara pejabat terpilih atau pemangku kepentingan diminta berunding tentang nilai. Logika dihadirkan sebagai penengah di kedua tahap, memastikan bahwa kesimpulan mengikuti fakta pada tingkat pertama dan mengikuti tujuan yang dinyatakan pada tingkat kedua (Douglas, 2009; Anderson, 2004).

Dalam hal alokasi otoritas, saintisme dan evidensialisme keras mendorong institusi untuk membingkai legitimasi mereka dalam istilah prosedur, bukan pribadi atau teks. Komunitas ilmiah, pengadilan, lembaga regulasi, dan bahkan badan penetap standar teknis menggambarkan diri sebagai pelayan metode impersonal. Kepercayaan publik diupayakan dengan menekankan kepatuhan pada protokol pengumpulan data, telaah sejawat, dan penalaran yuridis, alih-alih dengan merujuk kepada kebijaksanaan, karakter, atau wahyu. Rujukan pada Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diperlakukan sebagai motivasi privat yang mungkin dihormati tetapi tidak dapat dihitung sebagai alasan publik dalam public reason Habermasian atau overlapping consensus Rawlsian (Rawls, 1999; Habermas, 1996).

Dalam hal antropologi, arsitektur logika murni cenderung memandang manusia terutama sebagai pembawa kapasitas kognitif dan kepentingan. Individu adalah agen yang membentuk keyakinan, memperbarui kadar kepercayaan (credences), memaksimalkan utilitas, dan merundingkan kesepakatan. Dimensi moral dan spiritual mereka, bila diakui, ditafsirkan ulang sebagai faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku. Manusia perlu dilindungi sejauh perlindungan tersebut dituntut oleh kerja sama yang stabil, oleh kesepakatan rasional di bawah kondisi yang adil, atau oleh evidensi empiris tentang kesejahteraan (Dworkin, 1986; Nussbaum, 2006). Ketika martabat manusia dirujuk dalam hukum dan kebijakan, ia kerap ditafsirkan dalam terang ini, sebagai ringkasan tingkat tinggi dari alasan-alasan fungsional alih-alih sebagai respons langsung terhadap Sabda.

Arsitektur ini melakukan kerja nyata. Dalam filsafat sains, ia mendorong fokus pada kriteria demarkasi dan pada pengaturan nilai dalam penyelidikan, bukan pada pertanyaan tentang tujuan terakhir (Douglas, 2009; Putnam, 2002). Dalam hukum, ia menopang visi proseduralis tentang legitimasi, di mana kesetiaan pada aturan dan keadilan proses dipandang utama (Habermas, 1996; Dworkin, 1986). Dalam tata kelola teknologi, khususnya etika kecerdasan buatan, ia menjadi dasar upaya mendefinisikan keadilan (fairness), akuntabilitas, dan transparansi dalam istilah yang meminimalkan ketergantungan pada tradisi etis atau religius tertentu (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Bagi banyak praktisi, konfigurasi ini memiliki keunggulan moral karena tampak kurang berbahaya dibanding alternatifnya. Ia seolah-olah menawarkan cara hidup bersama dalam

masyarakat majemuk tanpa perlu bersepakat tentang hal-hal terakhir. Ia menjanjikan pengekangan terhadap seruan otoritarian atas nama wahyu dan pendisiplinan penggunaan kekuasaan melalui prosedur yang dapat diperiksa secara publik. Karena itulah logika murni sering dialami sebagai kekuatan yang melindungi, dan kritik terhadapnya pada pandangan pertama dapat tampak seperti ancaman terhadap capaian yang diperoleh dengan susah payah.

Pertanyaan yang dikejar dalam sisa artikel ini adalah apakah arsitektur ini dapat memenuhi apa yang secara implisit dijanjikannya. Dapatkah ia membenarkan norma-norma yang mendefinisikan praksis rasional tanpa merujuk pada sumber norma dan telos yang lebih tinggi. Dapatkah ia mempertahankan pembedaan kokoh antara fakta dan nilai dalam konteks nyata penyelidikan dan pengambilan keputusan. Dapatkah ia memendasarkan klaim kuat tentang martabat manusia dan batas-batas yang tak boleh dilanggar yang terus ditegaskan kerangka hukum dan etis. Ataukah, terlepas dari pengakuan netralitas, ia bergantung pada suatu tatanan realitas yang tidak diakuinya. Bagian-bagian berikut akan berargumen bahwa yang terakhir inilah yang terjadi, dan bahwa setiap rezim tata kelola kebenaran yang berkelanjutan membutuhkan arsitektur yang lebih mirip dengan yang diajukan oleh The Cohesive Tetrad, di mana Sabda dan logika diintegrasikan alih-alih dipertentangkan.

3. Regres membenaran dan batas-batas pemendasaran diri

Jika logika murni hendak berfungsi sebagai arsitektur berdaulat bagi tata kelola kebenaran, ia harus melakukan lebih dari sekadar menawarkan seperangkat alat yang berguna. Ia harus sanggup membenarkan norma-norma dasar yang mendefinisikan praktik rasional. Jika tidak, klaimnya atas otoritas epistemik akan bertumpu pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat ia pertahankan berdasarkan standarnya sendiri. Pertanyaan intinya mudah dirumuskan namun sulit dijawab: dapatkah norma-norma yang justru membuat penyelidikan rasional menjadi mungkin dipendaskan oleh prosedur-prosedur yang mereka sendiri mungkin.

Bagian ini berargumen bahwa, bila diambil menurut istilah-istilahnya sendiri, logika murni tidak dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Ketika ia mencoba membenarkan norma-norma dasarnya, ia berhadapan dengan trilema yang sudah dikenal. Entah ia meluncur ke dalam regres tak berhingga dari alasan-alasan yang kian dasar, atau ia bergerak dalam lingkaran yang mengandaikan apa yang ingin dibuktikan, atau ia berhenti pada sebuah stipulasi yang sekadar menyatakan bahwa norma tertentu bersifat dasar. Perdebatan dalam epistemologi tentang problem regres menunjukkan bahwa suatu bentuk komitmen dasar tidak terhindarkan (BonJour, 1985; Klein, 1998; Audi, 1993). Yang khas dalam konteks ini adalah bahwa komitmen-komitmen yang dimaksud bukan menyangkut keyakinan-keyakinan partikular tentang dunia, melainkan norma-norma kejujuran, keterbukaan, dan responsivitas terhadap evidensi itu sendiri yang membuat praktik penyelidikan menjadi mungkin. Begitu hal ini terlihat, arsitektur logika murni mulai tampak kurang mandiri dibanding citranya sendiri.

3.1 Norma dasar dalam praktik rasional

Setiap praktik penalaran yang konkret sudah bertumpu pada norma-norma yang bukan hasil dari potongan penalaran tertentu. Ilmuwan mengandaikan lebih dari sekadar instrumen dan persamaan. Mereka mengandaikan bahwa kecurangan itu salah, bahwa penggunaan selektif atas data merupakan keburukan intelektual, bahwa keberatan serius layak mendapat jawaban, dan bahwa kritik bukan penghinaan melainkan disiplin yang perlu. Hakim dan pengacara mengandaikan lebih dari sekadar undang-undang dan yurisprudensi. Mereka mengandaikan

bahwa perkara yang serupa harus diperlakukan serupa, bahwa para pihak harus didengar, dan bahwa manipulasi evidensi tidak kompatibel dengan panggilan profesi hukum.

Norma-norma ini bukan ideal pilihan yang menghiasi suatu praktik yang pada dasarnya netral. Ia konstitutif bagi apa artinya sungguh-sungguh menganggap kebenaran itu penting. Tanpa norma-norma tersebut, penalaran mungkin berlanjut dalam arti teknis, tetapi ia berhenti menjadi penyelidikan dalam makna penuh yang dibayangkan para epistemolog dan filsuf sains ketika mereka berbicara tentang pengetahuan dan pemahaman (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007).

Para epistemolog kebajikan berargumen bahwa sifat-sifat karakter intelektual seperti kejujuran, keberanian intelektual, dan cinta kebenaran bukan tambahan moral eksternal pada suatu prosedur rasional yang sudah mandiri, melainkan bagian internal dari praktik penalaran yang baik itu sendiri (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011). Jika sebuah komunitas meninggalkan sifat-sifat ini, metode-metodenya mungkin tetap ada, tetapi otoritasnya kosong. Poin ini dapat diekspresikan dalam bahasa prosedural, tetapi substansinya tetap sama. Rasionalitas menuntut seperangkat komitmen praktis dan disposisional yang tidak dapat direduksi menjadi relasi formal antarklaim.

Dari sudut pandang logika murni, namun demikian, komitmen-komitmen ini sendiri harus terbuka terhadap tuntutan pembenaran. Jika hanya apa yang dapat ditunjukkan melalui evidensi dan argumen yang dihitung sebagai wajib secara rasional, maka kewajiban untuk mengatakan yang benar, menghindari penipuan diri, dan tunduk pada kritik, secara prinsip, harus dapat ditopang oleh alasan-alasan lebih lanjut. Menjawab bahwa norma-norma ini sekadar jelas atau swabukti mungkin akurat secara psikologis bagi banyak pelaku, tetapi jawaban ini sulit diselaraskan dengan evidensialisme keras yang kerap menyertai ideologi logika murni (Clifford, 1877; Conee and Feldman, 2004).

Akibatnya adalah sebuah ketegangan. Logika murni bergantung pada norma-norma dasar praktik rasional, namun standar-standarnya sendiri tampak melarang penerimaan norma-norma tersebut tanpa alasan dari jenis yang tepat. Subbagian berikut mempertimbangkan tiga strategi untuk menyelesaikan ketegangan ini dan berargumen bahwa masing-masing gagal menyediakan bentuk pemendasaran diri yang dijanjikan secara implisit oleh logika murni.

3.2 Regres, sirkularitas, dan stipulasi

Strategi pertama adalah menerima suatu regres tak berhingga dari pembenaran. Dalam pandangan ini, setiap norma dapat dan seharusnya didukung oleh norma yang lebih dasar. Kewajiban untuk melaporkan data secara jujur dibenarkan oleh kewajiban yang lebih umum untuk menghindari penipuan. Kewajiban itu dibenarkan lagi oleh komitmen yang lebih dasar untuk menghormati pribadi, dan seterusnya tanpa akhir. Secara prinsip, selalu ada alasan yang lebih dalam untuk dicari.

Para epistemolog telah lama mencatat bahwa regres semacam ini bukan, dengan sendirinya, bantahan terhadap rasionalitas, tetapi ia menimbulkan kekhawatiran serius tentang penutupan dan kelayakhunian (BonJour, 1985; Klein, 1998). Dalam istilah praktis, tidak ada penyelidik yang dapat melacak rantai semacam itu hingga tak berhingga. Dalam istilah arsitektural, sebuah sistem yang tak pernah mencapai tingkat di mana alasan berujung pada sesuatu yang bukan sekadar alasan lebih lanjut berisiko merongrong otoritasnya sendiri. Jika logika murni

bersikeras bahwa tak satu pun norma boleh diperlakukan sebagai mengikat kecuali didukung oleh rantai alasan yang benar-benar terartikulasikan, ia menjadikan praktik penyelidikan mustahil. Jika ia melonggarkan tuntutan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya ia sudah mengakui bahwa beberapa norma harus diperlakukan sebagai dasar dalam arti yang lain.

Strategi kedua adalah merangkul suatu bentuk sirkularitas. Di sini, norma-norma praktik rasional dikatakan dibenarkan oleh keberhasilan praktik yang mereka topang. Argumennya mengambil bentuk yang sudah dikenal. Karena metode yang menghargai evidensi, kejujuran, dan keterbukaan terhadap kritik telah menghasilkan pengetahuan yang andal dan kekuatan teknologi, kita punya alasan yang baik untuk mempercayai norma-norma yang memandunya. Praktik itu memvalidasi kaidahnya sendiri melalui buah-buahannya.

Garis ini memiliki daya tarik intuitif, dan epistemologi pragmatis telah mengembangkan versinya yang canggih (Dewey, 1938; Putnam, 2002). Namun bila logika murni mengambil standar-standarnya sendiri secara serius, lingkaran ini bermasalah. Penilaian tentang apa yang dihitung sebagai keberhasilan, praktik mana yang sungguh andal, dan buah mana yang penting sendiri dipandu oleh norma-norma yang sedang dipersoalkan. Tanpa komitmen awal terhadap kebenaran sebagai kebaikan yang sungguh, terhadap keterpahaman dunia, dan terhadap ketakbolehterimaan moral penipuan, fakta mentah bahwa prosedur tertentu menghasilkan prediksi atau kendali terbuka bagi penafsiran yang sangat berbeda, termasuk penafsiran instrumental murni yang memutus keberhasilan dari kebenaran (Rea, 2018). Sirkularitas ini dapat bersifat bajik dalam pengertian equilibrium reflektif yang rendah hati (Rawls, 1999), tetapi ia tidak menyediakan jenis pembenaran linear yang tampak dituntut evidensialisme keras.

Strategi ketiga adalah stipulasi. Di sini, pembela logika murni menyatakan bahwa norma-norma tertentu sekadar mendefinisikan apa artinya bernalar. Menolak kejujuran, koherensi, atau responsivitas terhadap evidensi berarti melangkah keluar dari komunitas agen rasional. Dalam epistemologi kontemporer, langkah ini muncul dalam pembicaraan tentang komitmen dasar atau hinge commitments yang bukan produk inferensi, tetapi telah diprasangkaikan oleh setiap upaya meragukan atau bernalar sama sekali (Wittgenstein, 1969; Pritchard, 2016). Dalam register ini, seseorang dapat mengatakan bahwa kewajiban menghindari kontradiksi diri atau peduli pada kebenaran bukan bahan perdebatan. Ia bersifat konstitutif.

Ada sebuah wawasan penting di sini. Banyak upaya untuk membenarkan norma-norma dasar dengan merujuk pada alasan yang lebih dasar adalah keliru, karena tindakan mencari alasan itu sendiri sudah mengandaikan norma-norma tersebut. Namun, jika ideologi logika murni mengakui hal ini, ia juga harus mengakui bahwa standar pembenarannya sendiri memiliki batas. Setidaknya beberapa norma diterima bukan karena memenuhi kriteria evidensial dengan cara yang sama seperti klaim empiris biasa, melainkan karena norma-norma itu merupakan bagian dari bentuk hidup yang di dalamnya kriteria tersebut memiliki makna. Begitu ini diakui, gambaran logika murni sebagai arsitektur rasionalitas yang memendasarkan diri mulai larut.

Trilema ini bukan permainan kata. Ia mencatat sebuah kesulitan struktural. Entah logika murni menuntut pembenaran atas setiap norma dan dengan demikian menghancurkan kondisi-kondisi kemungkinannya sendiri, atau ia menerima sebagian norma sebagai dasar dan mengakui bahwa metode-metodenya sendiri tidak menjelaskan mengapa norma-norma itu mengikat. Rujukan pada regres tak berhingga, pada keberhasilan praktis, atau pada stipulasi masing-masing melunakkan pukulan dengan cara yang berbeda, tetapi tidak satu pun menyediakan bentuk kuat pemendasaran diri yang dibutuhkan oleh arsitektur rasionalitas yang berdaulat.

3.3 Kepercayaan, keterpahaman, dan kemunculan awal Sabda

Pendekatan lain adalah mundur selangkah dari tuntutan bahwa setiap komitmen harus ditopang oleh alasan lebih lanjut. Sejumlah filsuf abad kedua puluh menyarankan bahwa praktik rasional bertumpu pada dasar kepercayaan atau iman yang bukan irasional, tetapi juga bukan hasil argumen dalam pengertian biasa (Wittgenstein, 1969; Polanyi, 1958; Zagzebski, 2012). Menyelidiki sama sekali berarti hidup seolah-olah dunia itu dipahami, seolah-olah kebenaran adalah kebaikan yang sejati, seolah-olah orang lain adalah calon pengetahu alih-alih sekadar penghalang, dan seolah-olah penipuan diri adalah pengkhianatan terhadap sesuatu yang lebih dari sekadar preferensi pribadi.

Ini bukan hipotesis empiris tentang bagaimana dunia kebetulan berperilaku. Praanggapan-praanggapan ini membentuk apa yang dihitung sebagai evidensi dan bagaimana evidensi harus ditafsirkan sejak awal. Mereka bukan pilihan bagi siapa pun yang sungguh-sungguh ingin mengetahui. Bahkan penjelasan rasionalitas yang paling deflasionis sekali pun harus mengandaikan semacam kepercayaan pengarah seperti ini, jika tidak, rasionalitas runtuh menjadi permainan instrumental murni yang manipulatif.

Dilihat dari dalam kerangka logika murni, kepercayaan semacam itu dapat diakui secara deskriptif. Ia dapat dipaparkan sebagai prasyarat psikologis atau kultural bagi penyelidikan, barangkali dijelaskan melalui mekanisme evolusioner atau sosial yang mendukung kerja sama dan standar bersama (Kitcher, 1993; Sterelny, 2012). Namun jenis penjelasan ini menggeser pokok persoalan. Ia menuturkan kisah tentang bagaimana disposisi tertentu mungkin muncul dan menyebar. Ia tidak menjawab pertanyaan normatif apakah disposisi tersebut merupakan respons yang pantas terhadap bagaimana realitas sebenarnya.

Argumen artikel ini adalah bahwa pada titik ini kosakata yang berbeda menjadi perlu. Kepercayaan-kepercayaan dasar yang menopang praktik rasional lebih baik dipahami sebagai respons terhadap sebuah panggilan ketimbang sebagai kebiasaan beruntung. Kepercayaan-kepercayaan itu, betapapun tidak sempurna, mengungkapkan bahwa realitas tidak bersikap acuh terhadap kebenaran dan bahwa manusia bukan pembawa acak dari dorongan tak dijelaskan untuk mengetahui. Kepercayaan-kepercayaan itu mengisyaratkan bahwa dunia ditata sedemikian rupa sehingga mencari kebenaran dan menghormati pribadi bukan hanya berguna secara lokal, tetapi patut (*fitting*).

Nama Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diajukan sebagai cara menandai dimensi ini. Pada tahap ini, klaimnya berskala terbatas namun berimplikasi kuat. Jika norma-norma praktik rasional dan aksioma-aksioma minimal martabat manusia lebih dari sekadar konvensi lokal, maka harus ada suatu sumber yang sekaligus mendasari dan menyapa norma-norma tersebut. Logika murni, yang terikat oleh kendala naturalistik dan evidensialnya sendiri, tidak dapat secara meyakinkan menduduki peran itu. Ia tidak dapat sekaligus menjadi ciptaan dari norma-norma ini dan pencipta terakhirnya.

Menyadari hal ini tidak menuntut penelantaran logika atau pelemahan standar argumen. Sebaliknya, kesadaran ini memperjelas kondisi di mana logika dapat berfungsi sebagai logika. Begitu ketergantungan praktik rasional pada suatu sumber yang lebih dalam dari norma dan telos diakui, beban yang ditanggung logika murni menjadi lebih ringan. Logika tidak lagi harus mencoba mengangkat dirinya sendiri dari lumpur dengan menarik tali sepatunya. Ia dapat

beroperasi sebagai organ disipliner bagi kritik dan klarifikasi di dalam sebuah arsitektur yang lebih luas.

Bagian berikutnya mengambil satu pilar lain dari ideologi logika murni, yakni pemisahan fakta dan nilai, dan menunjukkan bagaimana bahkan di sana normativitas yang terbenam menunjuk melampaui deskripsi diri logika murni. Ketika batas antara apa yang ada dan apa yang seharusnya diperiksa dalam konteks institusional yang konkret, batas itu ternyata jauh lebih berpori daripada yang diakui ideologi. Hal ini pun akan mempersiapkan jalan bagi peran Sabda yang lebih eksplisit dan bagi arsitektur alternatif yang diajukan di bagian-bagian selanjutnya.

4. Fakta, nilai, dan normativitas yang terbenam

Ideologi logika murni sangat bergantung pada perbedaan yang percaya diri antara fakta dan nilai. Fakta menggambarkan bagaimana dunia adanya. Nilai mengekspresikan bagaimana dunia seharusnya atau apa yang layak dikejar. Dalam gambaran ini, sains dan praktik berbasis evidensi lainnya menangani fakta, sementara pertanyaan tentang tujuan dan prioritas diserahkan kepada politik, kebudayaan, atau keyakinan privat. Daya tarik konseptual dari pembagian ini mudah dipahami. Ia seolah melindungi penyelidikan dari kontroversi moral dan religius, serta melindungi warga dari pemaksaan doktrin komprehensif dalam kehidupan publik.

Bagian ini berargumen bahwa pemisahan fakta–nilai yang ketat, sebagaimana dituntut oleh logika murni, tidak dapat dipertahankan dalam praktik penyelidikan dan pengambilan keputusan yang nyata. Begitu kita memeriksa bagaimana agenda riset ditetapkan, bagaimana konsep hukum dan kebijakan berfungsi, dan bagaimana institusi berbicara tentang martabat dan kerugian, menjadi jelas bahwa normativitas bukan lapisan tambahan yang opsional. Ia hadir dalam seleksi fakta, dalam bahasa deskripsi, dan dalam standar kecukupan. Alih-alih sebuah batas yang bersih, kita menemukan apa yang disebut Hilary Putnam sebagai keterjeratan fakta dan nilai pada berbagai tingkat kognisi dan praktik (Putnam, 2002). Saya menggambarkan keterjeratan ini di bawah tiga subjudul: batas berpori antara fakta dan nilai dalam praktik, peran konsep tebal dan kosakata hibrida, serta normativitas sunyi dalam bahasa institusional modern.

4.1 Batas berpori dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan yang nyata

Dalam diskusi abstrak, menggoda untuk membayangkan penyelidikan sebagai proses dua langkah. Pertama, kita menemukan fakta dengan metode bebas nilai. Kedua, kita berembuk tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta tersebut. Dalam kerja riset dan kebijakan yang nyata, proses ini jauh lebih berjaln. Jauh sebelum data dikumpulkan, penilaian nilai sudah membentuk struktur penyelidikan itu sendiri.

Dalam sains, pilihan harus dibuat tentang fenomena mana yang layak diselidiki, pertanyaan mana yang mendesak, variabel mana yang diukur, dan keluaran mana yang dihitung signifikan. Pilihan-pilihan ini dipandu oleh penilaian tentang kepentingan, risiko, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Pilihan-pilihan tersebut tidak didikte alam secara netral. Para filsuf sains telah menunjukkan secara rinci bagaimana nilai latar membimbing pemilihan masalah, perumusan hipotesis, dan adopsi standar evidensi, terutama dalam konteks di mana kesalahan memiliki biaya moral yang asimetris (Anderson, 2004; Douglas, 2009).

Hal yang sama berlaku dalam kebijakan publik dan hukum. Ketika pemerintah mengevaluasi suatu intervensi kesehatan, mereka tidak hanya bertanya apakah suatu terapi menurunkan biomarker tertentu. Mereka harus memutuskan apa yang dihitung sebagai manfaat, bagaimana menimbang efek samping, bagaimana menyeimbangkan kepentingan kelompok yang berbeda, dan horizon waktu mana yang relevan. Ketika pengadilan menafsirkan standar seperti kewajaran (*reasonableness*) atau proporsionalitas, mereka tidak dapat menghindari penilaian tentang kepentingan mana yang patut diberi bobot lebih besar dan bentuk risiko mana yang dapat diterima secara sosial (Dworkin, 1986; Habermas, 1996). Ini bukan sekadar persoalan faktual. Semua ini mengandaikan suatu pandangan tentang apa yang baik bagi manusia dan bagaimana beban serta manfaat seharusnya didistribusikan.

Bahkan pada tingkat pilihan yang tampak teknis, seperti penetapan ambang signifikansi dalam statistika atau fungsi kerugian (*loss function*) dalam pembelajaran mesin, pertimbangan normatif meresap ke dalam desain. Pilihan antara meminimalkan *false positive* atau *false negative* bukan hanya soal kenyamanan matematis. Dalam diagnosis medis, peradilan pidana, atau penilaian kelayakan kredit, bobot relatif atas dua jenis kesalahan itu mencerminkan penilaian tentang kepentingan siapa yang lebih penting dan bentuk ketidakadilan mana yang lebih berat (Douglas, 2009; Jobin, Ienca, and Vayena, 2019).

Para pembela dikotomi fakta–nilai kadang mengakui bahwa nilai membentuk konteks penemuan dan konteks penerapan, tetapi tetap mempertahankan bahwa masih ada satu “konteks pembenaran” inti yang bebas nilai. Setelah pertanyaan ditetapkan dan metode dipilih, demikian klaim mereka, penilaian atas evidensi dan penarikan kesimpulan dapat berlangsung tanpa masukan normatif lebih lanjut.

Namun, sebagaimana telah diperdebatkan Putnam dan para pemikir lain, bahkan klaim yang lebih moderat ini sulit dipertahankan (Putnam, 2002; Anderson, 2004). Model mana yang dinilai cukup sederhana, analogi mana yang dipandang relevan, sumber mana yang dihitung kredibel, dan evidensi mana yang dianggap sebagai pembatal (*defeater*) semuanya dipengaruhi oleh penilaian nilai latar. Pembedaan antara sinyal dan derau, atau antara outlier dan anomali yang bermakna, tidak ditentukan oleh data saja. Pembedaan ini mencerminkan asumsi tentang apa yang penting dan risiko macam apa yang layak diterima.

Kesimpulannya bukan bahwa “apa saja boleh” atau bahwa fakta hanyalah proyeksi nilai. Kesimpulannya adalah bahwa praktik faktual sudah distrukturkan oleh pertimbangan normatif sejak awal. Aspirasi untuk mempertahankan sebuah zona yang murni faktual, terisolasi dari nilai, tidak menggambarkan penyelidikan yang nyata. Aspirasi itu menggambarkan sebuah idealisasi yang, jika diperlakukan sebagai cerminan harfiah, justru mengaburkan cara pengetahuan sebenarnya diproduksi dan digunakan.

4.2 Konsep tebal dan kosakata hibrida

Tekanan kedua terhadap pemisahan fakta–nilai yang ketat berasal dari analisis atas konsep tebal (*thick concepts*). Bernard Williams dan yang lain menyoroti istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari dan bahasa institusional yang sekaligus mendeskripsikan dan mengevaluasi, seperti kejam, berani, adil, korup, eksploitatif, atau merendahkan martabat (*degrading*) (Williams, 1985; Putnam, 2002). Ketika kita menyebut suatu tindakan kejam, kita bukan pertama-tama melaporkan pola perilaku netral lalu menambahkan penilaian nilai secara terpisah. Deskripsi

dan evaluasi menyatu. Memahami istilah semacam ini berarti, antara lain, menangkap titik evaluatifnya.

Wacana moral dan hukum modern sangat bergantung pada konsep tebal. Sistem hukum berbicara tentang due process, diskriminasi, perlakuan yang merendahkan martabat (degrading treatment), dan itikad baik (good faith). Kode etik profesi berbicara tentang kelalaian, integritas, penghormatan, dan penyalahgunaan. Instrumen hak asasi manusia internasional melarang perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, bahasa yang sekaligus memiliki daya deskriptif dan evaluatif (UN, 1948; Waldron, 2012). Dalam perdebatan tentang teknologi dan kecerdasan buatan, istilah seperti manipulasi, pengawasan (surveillance), pemberdayaan (empowerment), dan eksklusi memainkan peran serupa (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; UNESCO, 2021).

Jika logika murni bersikeras pada pemisahan fakta–nilai yang tajam, ia menghadapi dilema. Entah ia harus mencoba merekonstruksi konsep tebal sebagai kombinasi deskripsi faktual “tipis” plus sikap nilai yang berdiri sendiri, atau ia harus memperlakukan konsep tebal sebagai ekspresi non kognitif atas persetujuan dan penolakan. Keduanya tidak memuaskan.

Opsi rekonstruktif cenderung mengupas kedalaman konsep tebal. Misalnya, seseorang dapat mencoba mendefinisikan kekejaman semata-mata sebagai penimpaan penderitaan berat tanpa pembenaran. Namun apa yang dihitung sebagai “berat”, “tanpa pembenaran”, dan “respon yang pantas” sendiri dibentuk oleh pemahaman evaluatif. Menganalisis korupsi semata sebagai pelanggaran norma hukum atau deviasi dari aturan eksplisit mengabaikan pengertian bahwa korupsi menyangkut pengkhianatan terhadap ekspektasi yang sah dan penyalahgunaan amanah kekuasaan. Konten evaluatif bukan tambahan eksternal. Ia konstitutif bagi makna istilah-istilah ini dalam praktik yang memberinya kehidupan (Williams, 1985; MacIntyre, 1988).

Opsi non kognitif, yang diasosiasikan dengan bentuk-bentuk emotivisme dan ekspresivisme tertentu, memperlakukan konsep tebal sebagai cara ter elaborasi untuk mengekspresikan sikap. Dalam pandangan ini, menyebut suatu rezim korup atau suatu praktik merendahkan martabat bukan menyatakan fakta tentang dunia, melainkan mengungkapkan sebuah posisi terhadapnya. Meskipun para ekspresivis kontemporer telah mengembangkan uraian canggih tentang bagaimana sikap-sikap semacam itu dapat tertanam dalam praktik normatif, pendekatan ini sukar dipadukan dengan cara konsep tebal digunakan dalam hukum dan kebijakan. Tuduhan korupsi, eksploitasi, atau ketidakadilan umumnya tidak diajukan sebagai sekadar ekspresi perasaan. Tuduhan-tuduhan itu dikemukakan sebagai klaim yang dapat diperdebatkan, didukung oleh evidensi, dan disanggah sebagai keliru (MacIntyre, 1988; Putnam, 2002).

Dengan demikian, konsep tebal menyingkap suatu ranah di mana perbedaan fakta–nilai runtuh pada tingkat bahasa itu sendiri. Perangkat konseptual kita dipenuhi istilah yang aspek deskriptif dan evaluatifnya tidak dapat dipisahkan secara rapi tanpa distorsi. Ini tidak membuktikan bahwa semua fakta sarat nilai, tetapi melemahkan gagasan bahwa kategori-kategori paling penting dalam hukum, etika, dan kebijakan dapat dibagi bersih menjadi “inti netral” dan elemen nilai yang dapat dilepaskan.

4.3 Normativitas sunyi dalam bahasa institusional

Indikasi ketiga bahwa normativitas terbenam, alih-alih absen, datang dari bahasa resmi institusi modern. Deklarasi hak asasi manusia, pembukaan konstitusi, kode etik kedokteran, dan laporan

tata kelola global secara berulang memakai istilah-istilah seperti martabat, kesetaraan, integritas, otonomi, dan kebebasan. Istilah-istilah ini tidak dikenalkan sebagai slogan belaka. Istilah-istilah ini diperlakukan sebagai gagasan dasar yang mengarahkan dan membatasi desain kerangka hukum dan kebijakan (Dworkin, 1986; Waldron, 2012; Nussbaum, 2006).

Dari dalam kerangka naturalistik dan logika murni, ada dua strategi utama untuk menangani bahasa semacam itu. Strategi pertama bersifat deflasionis: menafsirkan istilah seperti martabat dan kesetaraan sebagai nama singkat yang berguna bagi gugus kepentingan, kapabilitas, atau perlindungan yang disepakati secara kontraktual. Dalam pandangan ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menggambarkan suatu tatanan norma yang bersifat kontingen secara historis tetapi berguna secara pragmatis untuk menopang kerja sama internasional dan keamanan dasar (Rawls, 1999; Nussbaum, 2006). Strategi kedua bersifat genealogis: menjelaskan bahasa dignitarian sebagai residu tradisi religius dan metafisis yang dahulu memberinya isi yang lebih tebal. Dalam konteks sekuler, istilah-istilah tersebut bertahan karena inersia, meski justifikasi aslinya tak lagi diterima (Habermas, 2008; Taylor, 2007).

Kedua strategi ini memiliki daya jelaskan tertentu, tetapi keduanya sulit dipadukan dengan cara bahasa dignitarian sebenarnya berfungsi. Ketika instrumen hukum menyatakan bahwa semua manusia memiliki martabat dan nilai yang melekat serta setara, pernyataan ini tidak dipresentasikan sebagai kompromi sementara atau sebagai fakta historis belaka. Pernyataan itu dikemukakan sebagai kebenaran yang menuntut kesetiaan dan yang tidak seharusnya dinegosiasikan ulang ketika keadaan berubah. Ketika etika kedokteran menegaskan bahwa pasien tidak boleh diperlakukan semata sebagai alat, ia mengartikulasikan sebuah kendala yang dimaksudkan untuk tetap berlaku bahkan ketika pelanggaran tampak menghasilkan manfaat agregat yang lebih besar (Kant, 1996; Beauchamp and Childress, 2019).

Lebih jauh, para pelaku institusional sering bergantung pada kekuatan istilah-istilah ini untuk mengkritik hukum dan kebijakan yang ada. Rujukan kepada martabat dan kesetaraan dasar menjadi pusat perjuangan melawan perbudakan, apartheid, dan diskriminasi sistematis. Dalam konteks ini, martabat bukan ringkasan konvensi yang ada. Ia adalah standar untuk menilai dan kadang mengutuk konvensi (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Menjelaskan peran ini sepenuhnya dalam istilah naturalistik atau genealogis berisiko menyepelekan daya moral yang dibawa bahasa tersebut dalam praktik.

Ketegangan ini terasa dalam disonansi antara retorika institusional dan pengalaman hidup. Ketika individu diberi tahu bahwa mereka menikmati martabat yang tak dapat dicabut, tetapi berhadapan dengan sistem yang memperlakukan mereka sebagai titik data, sebagai tenaga kerja yang dapat dibuang, atau sebagai risiko keamanan, mereka merasakan bukan sekadar kegagalan instrumental, melainkan pelanggaran atas sesuatu yang lebih dalam. Pelanggaran itu tidak tertangkap oleh kategori deskriptif semata. Ia terdaftar dalam *Qualia* penghinaan, eksklusif, dan luka moral, dan memanggil penilaian yang diungkapkan dengan istilah evaluatif yang tebal.

Dari sudut pandang logika murni, pengalaman dan penilaian semacam ini dapat diakui sebagai fakta sosiologis tentang bagaimana orang merespons institusi. Pengalaman dan penilaian itu dapat diukur, dimodelkan, dan barangkali dikelola. Yang lebih sulit, mengingat kendala saintisme, evidensialisme keras, dan pemisahan fakta–nilai yang ketat, adalah memperlakukannya sebagai sesuatu yang relevan bagi kebenaran tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada.

Jika digabungkan, ketiga garis analisis ini menunjukkan bahwa normativitas bukan suplemen opsional yang bisa ditambahkan pada sebuah gambaran faktual tentang penyelidikan dan kehidupan institusional yang pada dasarnya bebas nilai. Norma-norma justru membentuk struktur pertanyaan yang diajukan, kategori yang digunakan, dan apa yang dihitung sebagai keberhasilan. Norma-norma itu tertanam dalam bahasa yang dipakai institusi untuk mengartikulasikan misi dan membenarkan tindakan. Upaya untuk mempertahankan pemisahan fakta–nilai yang ketat sebagai tulang punggung arsitektur tata kelola kebenaran karenanya tidak stabil.

Dalam kerangka artikel ini, ketidakstabilan ini tidak dibaca sebagai alasan untuk meninggalkan standar rasional atau terjerumus ke relativisme. Ketidakstabilan ini dibaca sebagai tanda bahwa setiap arsitektur tata kelola kebenaran yang realistis dan jujur harus mencakup suatu penjelasan tentang sumber dan otoritas norma-norma yang telah diprasangkakan oleh praktik faktual. Jika bahasa kita tentang kekejaman, korupsi, martabat, dan kesetaraan lebih dari sekadar derau ekspresif, maka harus ada suatu tatanan realitas yang kepadanya bahasa itu secara jawab-layan (answerable) merujuk. Bagian berikutnya berargumen bahwa upaya untuk menempatkan tatanan ini sepenuhnya dalam horizon naturalistik, sambil mempertahankan nada tanpa syarat dari martabat manusia dan telos, gagal menurut istilahnya sendiri. Kegagalan itu, pada gilirannya, membuka jalan bagi reintroduksi Sabda sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas, dengan cara yang tidak meniadakan logika, melainkan justru memungkinkan logika beroperasi dengan kesadaran penuh akan ketergantungannya.

5. Martabat, telos, dan keniscayaan Sabda

Bahasa tentang martabat manusia dan tujuan hidup (purpose, telos) telah menjadi pusat dalam hukum, etika, dan kebijakan kontemporer. Instrumen hak asasi manusia internasional menggambarkan martabat sebagai sesuatu yang melekat (inherent) dan tak dapat dicabut (inalienable). Konstitusi nasional dan kode etik kedokteran merujuk pada martabat untuk menandai batas yang tidak boleh dilampaui, bahkan demi mengejar tujuan-tujuan yang tampak diinginkan (UN, 1948; Beauchamp and Childress, 2019). Filsuf moral dan politik semakin menjadikan martabat dan kapabilitas sebagai fondasi lembaga-lembaga yang adil (Kant, 1996; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Pada saat yang sama, ideologi logika murni berupaya memahami istilah-istilah ini dalam horizon naturalistik yang hanya mengakui fakta empiris, kesepakatan rasional, dan praktik sosial yang muncul (emergent) dari proses sejarah.

Bagian ini berargumen bahwa terdapat ketegangan struktural antara cara institusi kontemporer menggunakan bahasa martabat dan telos, dan sumber daya konseptual yang tersedia dalam logika murni untuk membenarkan bahasa tersebut. Ketika martabat dan telos diperlakukan sebagai produk kapasitas, sejarah evolusioner, atau kontrak rasional, nada tanpa syarat yang menyertai keduanya menjadi sulit dipertahankan. Aksioma-aksioma minimal tentang martabat manusia yang diprasangkakan oleh hukum dan etika justru menunjuk pada suatu sumber normatif dan telos yang berdiri di atas proses-proses alam maupun kesepakatan manusia. Sabda, dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menamai sumber tersebut.

5.1 Aksioma-aksioma minimal martabat manusia

Untuk memperjelas apa yang dipertaruhkan, berguna merumuskan seperangkat kecil aksioma minimal tentang martabat manusia yang sudah tersirat dalam banyak kerangka hukum dan etis.

Aksioma-aksioma ini tidak berpretensi menyelesaikan semua perdebatan tentang teori moral. Aksioma-aksioma tersebut justru menangkap komitmen inti yang diekspresikan dalam bahasa hak asasi manusia dan norma-norma profesional yang banyak dianut.

Aksioma pertama adalah nilai yang melekat (*inherent worth*). Setiap manusia diperlakukan memiliki suatu nilai yang tidak habis dibatasi oleh kegunaan, produktivitas, atau status sosial. Nilai ini bukan fungsi dari harga pasar, bakat, atau kontribusi. Nilai itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh, diperdagangkan, atau hilang secara proporsional dengan kinerja. Dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara eksplisit menegaskan bahwa martabat dimiliki oleh semua manusia semata-mata sebagai manusia (UN, 1948; Waldron, 2012).

Aksioma kedua adalah ketakintersentuhan (*inviolability*). Ada bentuk-bentuk perlakuan yang dipandang salah pada dirinya sendiri, bukan sekadar tidak diinginkan dalam sebagian besar keadaan. Penyiksaan, penghinaan yang merendahkan martabat, dan reduksi manusia menjadi sekadar alat diperlakukan sebagai larangan kategoris, bukan sebagai opsi yang boleh ditimbang terhadap potensi manfaat. Penegasan Kant bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai sarana, tetapi selalu juga sebagai tujuan pada dirinya sendiri, adalah artikulasi berpengaruh atas aksioma ini (Kant, 1996). Kode etik modern di bidang kedokteran dan riset membangunnya dengan melarang praktik-praktik yang memperlakukan manusia sebagai sumber daya sekali pakai demi keuntungan ilmiah atau sosial (Beauchamp and Childress, 2019).

Aksioma ketiga adalah kesetaraan dasar (*basic equality*). Dalam arti yang paling fundamental, klaim moral setiap orang memiliki kedudukan yang setara. Ini tidak berarti bahwa setiap preferensi memiliki bobot yang sama, tetapi bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan seakan-akan penderitaannya tidak dihitung sama sekali. Bahasa tentang kepedulian dan penghormatan yang setara dalam filsafat politik, serta bahasa tentang hak-hak dasar yang setara dalam hukum, mengekspresikan aksioma ini (Dworkin, 1986; Rawls, 1999).

Aksioma keempat menyangkut telos. Hidup manusia diasumsikan terarah kepada kebaikan-kebaikan yang lebih dari sekadar ketertarikan privat. Kebenaran, keadilan, kesetiaan (*fidelity*), dan kepedulian diperlakukan sebagai kebaikan yang mengajukan klaim atas diri kita, bukan sekadar opsi di antara banyak pilihan. Menyebut seseorang sebagai rusak (*corrupted*), terdegradasi, atau tidak dimanusiakan mengandaikan bahwa ada cara hidup yang tidak pantas bagi makhluk dari jenis tertentu. Pendekatan kapabilitas dalam filsafat politik, misalnya, menafsirkan keberkembangan manusia (*human flourishing*) dalam istilah peluang untuk merealisasikan “fungsi-fungsi” (*functionings*) yang dipandang layak dipilih dan sentral bagi hidup bermartabat (Nussbaum, 2006).

Aksioma-aksioma ini bukan marjinal. Aksioma-aksioma tersebut justru menyusun struktur perdebatan tentang bioetika, peradilan pidana, kebijakan sosial, dan hukum internasional. Pertanyaannya adalah apakah arsitektur logika murni, yang berkomitmen pada saintisme, evidensialisme keras, pemisahan fakta–nilai yang ketat, dan penjelasan naturalistik tentang normativitas, mampu memberikan landasan yang sepadan dengan kekuatan klaim yang sebenarnya dibuat oleh institusi.

5.2 Penjelasan naturalistik tentang martabat dan telos

Di dalam horizon naturalistik, sejumlah strategi telah dikembangkan untuk menjelaskan martabat dan telos tanpa merujuk pada norma orde lebih tinggi apa pun. Masing-masing menyimpan wawasan penting, tetapi masing-masing pula menemui kesulitan ketika diminta menopang aksioma-aksioma minimal yang baru saja diuraikan.

Strategi pertama mendasarkan martabat pada kapasitas, seperti rasionalitas, kesadaran diri, atau otonomi. Dalam pandangan ini, mengatakan bahwa manusia memiliki martabat berarti mengatakan bahwa mereka adalah jenis makhluk yang dapat menentukan tujuan bagi dirinya sendiri, merefleksikan pilihan-pilihannya, dan berpartisipasi dalam pengakuan timbal balik (Kant, 1996; Korsgaard, 1996). Status khusus manusia dengan demikian berakar pada ciri-ciri yang membedakannya dari hewan lain.

Pendekatan ini menangkap intuisi bahwa kapasitas rasional dan reflektif memang penting. Namun pendekatan ini tersandung pada batas-batasnya. Bayi, mereka yang mengalami gangguan kognitif berat, dan orang-orang dalam kondisi demensia lanjut mungkin tidak memiliki kapasitas yang dikatakan sebagai dasar martabat. Jika martabat bergantung pada kepemilikan aktual atas kapasitas semacam itu, maka klaim mereka yang paling rentan tampak lebih lemah justru di titik di mana banyak kerangka moral dan hukum menegaskan bahwa perlindungan harus paling kuat. Upaya merespons dengan merujuk pada kapasitas potensial, keanggotaan spesies, atau kapasitas tipikal memperkenalkan elemen-elemen yang sukar diuraikan tanpa mengundang pemahaman yang lebih tebal tentang “untuk apa” (what for) manusia itu ada (Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Strategi kedua memperlakukan martabat sebagai konstruksi sosial yang berevolusi. Norma melawan kekejaman dan perendahan martabat dijelaskan sebagai respons adaptif yang meningkatkan kerja sama, kepercayaan, dan keberlangsungan kelompok jangka panjang. Bahasa martabat dan hak kemudian ditafsirkan sebagai kristalisasi kultural dari strategi koordinasi yang berhasil. Menyebut seseorang sebagai pembawa martabat, dalam pandangan ini, berarti mengekspresikan komitmen terhadap norma-norma yang terbukti menguntungkan dalam kondisi tertentu (Kitcher, 1993; Sterelny, 2012).

Kisah ini dapat menjelaskan bagaimana praktik tertentu muncul dan bertahan. Kisah ini dapat menjelaskan mengapa banyak masyarakat berkonvergensi pada pembatasan terhadap kekerasan ekstrem. Namun kisah ini tidak dengan mudah membenarkan nada tanpa syarat dari bahasa martabat modern. Jika otoritas norma martabat sepenuhnya bergantung pada kontribusinya terhadap stabilitas atau kemaslahatan kelompok, maka, secara prinsip, norma-norma tersebut dapat ditinjau ulang ketika kondisi berubah. Dalam situasi di mana pelanggaran atas norma martabat dapat secara signifikan meningkatkan prospek kelangsungan hidup, tidak ada sesuatu pun di dalam kisah evolusioner itu sendiri yang melarang pelanggaran tersebut. Gagasan tentang ketakintersentuhan pada terbaiknya menjadi konvensi kuat yang selalu dapat direvisi.

Strategi ketiga menempatkan telos dan martabat dalam kesepakatan rasional. Pendekatan kontraktarian dan deliberatif berpendapat bahwa apa yang dihitung sebagai hak dasar, distribusi yang adil, atau pembatasan kekuasaan yang sah bergantung pada apa yang dapat atau akan disepakati oleh agen bebas dan setara dalam kondisi yang tepat. Manusia memiliki martabat karena mereka harus diperlakukan sebagai calon peserta dalam kontrak rasional

semacam itu. Telos didefinisikan oleh prinsip-prinsip yang akan disetujui di bawah prosedur yang adil atau di balik “tirai ketidaktahuan” (veil of ignorance) (Rawls, 1999; Habermas, 1996).

Kerangka ini menangkap ciri-ciri kunci kesadaran moral modern. Kerangka ini menonjolkan pentingnya pembenaran timbal balik dan alasan publik. Namun kerangka ini juga menghadapi tekanan dari aksioma-aksioma yang berupaya ia landasi. Jika isi martabat dan telos sepenuhnya ditentukan oleh apa yang akan disepakati agen di bawah kondisi tertentu, maka perbedaan tentang kondisi yang sah dapat menghasilkan gambaran yang sangat berbeda tentang apa yang dituntut martabat. Lebih jauh, bila suatu kesepakatan yang secara rasional dapat diterima justru mengesahkan praktik yang oleh banyak orang dipandang merendahkan atau tidak adil, tidak ada standar independen di dalam teori tersebut untuk menyatakan bahwa kesepakatan itu salah. Para penentang yang menolak menerima hasil demikian dengan alasan bahwa hasil itu melanggar suatu norma lebih dalam tentang apa itu manusia menjadi sukar ditempatkan dalam arsitektur ini (Dworkin, 1986; Waldron, 2012).

Dalam setiap kasus, strategi naturalistik dapat menjelaskan sesuatu yang penting tentang praktik moral kita. Pendekatan berbasis kapasitas menyoroti aspek krusial kepribadian. Narasi evolusioner menjelaskan bagaimana kerja sama dan pengekangan dapat muncul. Pendekatan kontraktarian merumuskan ideal keadilan dan resiprositas. Masalahnya bukan bahwa semua pendekatan ini sepenuhnya keliru. Masalahnya adalah bahwa, bila diambil sendiri-sendiri, pendekatan tersebut tidak menopang dimensi tanpa syarat dari martabat dan telos yang tetap diprasangkakan oleh institusi modern.

Jika martabat selalu digandengkan secara ketat dengan kapasitas, maka secara prinsip, sebagian nyawa lebih kurang tak tersentuh daripada yang lain. Jika martabat adalah konstruksi sosial yang berhasil, maka otoritasnya tergantung pada kalkulasi manfaat di masa depan. Jika martabat dan telos adalah produk kontrak, maka keduanya tidak memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada prosedur dan asumsi yang melahirkannya. Dalam setiap kasus, aksioma-aksioma minimal yang diakui oleh hukum dan etika secara diam-diam dilemahkan.

5.3 Sabda sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas

Kesulitannya bukan sekadar teoritis. Kesulitan itu muncul setiap kali individu dan komunitas mengerahkan bahasa martabat dan telos untuk mengkritik hukum dan praktik yang secara formal rasional dan empiris efisien, tetapi dialami sebagai dehumanisasi. Korban penyiksaan, rasisme struktural, atau hubungan kerja yang eksploitatif tidak sekadar mengatakan bahwa tatanan yang ada tidak optimal. Mereka mengatakan bahwa sesuatu telah dilakukan terhadap diri mereka yang tidak selaras dengan apa mereka itu adanya; bahwa mereka diperlakukan dengan cara yang tidak boleh dialami siapa pun. Protes mereka memprasangkakan lebih dari sekadar konvensi lokal atau kontrak kontingen. Protes itu memprasangkakan bahwa ada suatu kebenaran tentang apa manusia itu dan untuk apa manusia ada, yang berdiri menghakimi institusi.

Dari dalam kendala logika murni, protes ini dapat dideskripsikan dan mungkin disimpatikan. Protes ini dapat dimodelkan sebagai reaksi psikologis atau sebagai gerakan sosial. Yang jauh lebih sukar adalah menegaskan bahwa protes tersebut bersentuhan dengan suatu tatanan moral yang nyata, yang bukan sekadar proyeksi preferensi atau sejarah. Untuk melakukan itu, kita

perlu mengakui suatu sumber normatif dan telos yang tidak dapat direduksi menjadi fakta empiris atau kesepakatan rasional.

Sabda, yang di sini dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menamai sumber demikian. Menginvokasi Sabda berarti menegaskan bahwa manusia bukan pembawa nilai moral secara kebetulan, melainkan makhluk yang disapa, yang martabatnya dianugerahkan oleh suatu realitas yang mendahului dan melampaui mereka. Ini berarti mengatakan bahwa ada cara-cara memperlakukan manusia yang secara intrinsik tidak pantas, bukan karena konsekuensi empirisnya, tetapi karena cara-cara itu bertentangan dengan makna apa itu manusia dalam terang sapaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan martabat, Sabda mendasari klaim bahwa setiap manusia memiliki nilai yang melekat, setara dalam bentuk dasarnya, dan tidak dapat hilang. Nilai ini tidak bergantung pada kapasitas yang dapat melemah, pada kontribusi yang dapat absen, atau pada keanggotaan dalam suatu tatanan politis tertentu. Nilai ini merupakan fungsi dari fakta bahwa manusia dipanggil dan diakui oleh sumber normatif dan telos tersebut. Dalam tradisi teologis, hal ini kerap diungkapkan dengan bahasa penciptaan, pencitraan (image bearing), atau panggilan ilahi. Dalam argumen ini, tekanannya terletak pada peran struktural klaim tersebut, bukan pada perumusan doktrinal spesifiknya.

Dalam kaitannya dengan telos, Sabda mendasari keyakinan bahwa hidup manusia terarah kepada kebaikan-kebaikan yang tidak diciptakan oleh individu atau kolektif. Berbicara tentang panggilan kepada kebenaran, keadilan, dan kesetiaan berarti menegaskan bahwa kebaikan-kebaikan ini layak bagi makhluk seperti kita, bukan sekadar dipilih oleh kita. Ini berarti mengatakan bahwa pola-pola hidup tertentu, betapapun memuaskan secara subjektif, bersifat rusak atau tidak memanusiakan karena menyimpang dari norma yang tertanam dalam realitas tercipta. Tanpa suatu pemahaman telos semacam ini, bahasa tentang korupsi, pengkhianatan, dan dehumanisasi berisiko runtuh menjadi ekspresi frustrasi atas kegagalan proyek, alih-alih menjadi penilaian tentang kehidupan yang tidak pantas.

Dari sudut pandang logika murni, Sabda mungkin tampak sebagai reintroduksi metafisika yang problematik atau otoritas sektarian. Argumen yang dikembangkan dalam artikel ini bergerak ke arah sebaliknya. Logika murni, ketika diambil sebagai arsitektur berdaulat, sudah memprasangkakan norma-norma dan aksioma-aksioma yang tidak dapat dihasilkannya dari komitmen naturalistiknya sendiri. Logika murni bergantung pada kepercayaan-kepercayaan dasar tentang keterterangan (intelligibility) dan kebenaran, dan pada klaim-klaim kuat tentang martabat dan ketakintersentuhan, yang justru menunjuk melampaui batas-batas resminya. Sabda bukan ornamen opsional yang ditambahkan dari luar. Sabda adalah nama bagi tatanan realitas yang harus ada jika norma-norma praktik rasional dan aksioma-aksioma martabat hendak dimaknai lebih dari sekadar kebiasaan lokal.

Mengatakan bahwa Sabda niscaya bukan berarti mengatakan bahwa isi Sabda transparan atau bebas kontroversi. Tafsir atas Sabda dimediasi oleh tradisi, teks, dan komunitas, dan senantiasa rentan terhadap salah baca dan penyalahgunaan. Tepat di sinilah logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment menjadi tak tergantikan. Logika menguji klaim tentang Sabda untuk koherensi dan konsistensi. Qualia merekam pengalaman hidup yang mengalir dari berbagai tafsir. Mistika memperhatikan intensi dan orientasi spiritual dari mereka yang mengklaim berbicara atas nama Sabda, sebagaimana didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Akhlak mengevaluasi konfigurasi karakter para penafsir. Intention-Trace Alignment, the

degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, mengaudit jejak moral jangka panjang yang ditinggalkan oleh institusi yang menginvokasi Sabda.

Dalam arsitektur yang diusulkan di bagian-bagian selanjutnya, Sabda mempertahankan primasinya sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas, sementara logika dan domain-domain lain diberikan peran yang sungguh-sungguh, bukan dekoratif, dalam proses penyingkapan dan penilaian kebenaran. Kegagalan logika murni untuk meletakkan dasar bagi martabat dan telos tanpa kontradiksi dengan demikian menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih kompleks dan jujur tentang tata kelola kebenaran. Sabda tidak dihadirkan untuk membungkam pertanyaan, tetapi untuk menjelaskan mengapa pertanyaan-pertanyaan itu, khususnya tentang nilai dan tujuan manusia, begitu mendesak.

Bagian berikut mengembangkan usulan positif ini dengan memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur di mana Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment ditenun ke dalam suatu tatanan yang koheren. Dalam arsitektur itu, logika tidak didemonisasi dan tidak pula didewakan. Logika justru dikembalikan ke tempatnya yang semestinya sebagai instrumen yang kuat tetapi derivatif, dalam pelayanan kepada suatu kebenaran yang sumber akhirnya terletak pada Sabda.

6. The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran

Jika argumen sejauh ini tepat, logika murni tidak lagi dapat diperlakukan sebagai arsitektur berdaulat dalam tata kelola kebenaran. Logika murni tetap berharga sebagai himpunan teknik, disiplin, dan kebiasaan intelektual, tetapi ia tidak mampu menjamin norma-norma dasarnya sendiri, tidak dapat mempertahankan pemisahan fakta–nilai yang ketat di tataran praktik, dan tidak mampu meletakkan dasar yang memadai bagi klaim kuat tentang martabat manusia dan telos. Bagian ini memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif yang secara eksplisit mengakui primasi Sabda dan, pada saat yang sama, menetapkan peran yang tepat dan akuntabel bagi logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

Tujuannya bukan mengganti satu ideologi dengan ideologi lain, melainkan merumuskan sebuah kerangka yang cukup jelas untuk diuji dengan standar rasionalitas yang ketat. The Cohesive Tetrad berangkat dari keyakinan bahwa domain-domain kebenaran yang selama ini dipisahkan secara artifisial atau disembunyikan di balik bahasa netral harus dinamai, ditata, dan dihubungkan dalam sebuah struktur yang koheren.

6.1 Penamaan dan pelokasian domain

The Cohesive Tetrad dimulai dengan menamai secara eksplisit domain-domain yang selama ini laten dalam analisis terdahulu.

Sabda adalah Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Sabda menandai klaim bahwa ada sumber norma dan tujuan yang tidak diciptakan oleh kehendak manusia, baik individual maupun kolektif. Tradisi teologis menggambarkan Sabda dengan bahasa wahyu, perintah, atau tuturan normatif. Dalam kerangka ini, penekanan jatuh pada struktur: norma dan telos datang sebagai sapaan, bukan sebagai produk kecelakaan evolusioner, kontrak sosial, atau preferensi mayoritas.

Logika adalah domain inferensi, struktur argumen, dan uji koherensi. Di sini termasuk teori-teori justifikasi, probabilitas, dan penalaran kausal. Logika menghubungkan premis dengan kesimpulan, menguji konsistensi, dan mengelola relasi antara bukti dan keyakinan (BonJour, 1985; Conee and Feldman, 2004). Dalam arsitektur yang diusulkan, logika tidak lagi diperlakukan sebagai sumber normativitas tertinggi. Logika berfungsi sebagai instrumen disipliner untuk klarifikasi dan kritik.

Qualia menunjuk cara realitas kelembagaan dialami dari dalam: apakah hukum dirasakan sebagai pengakuan atau penghapusan, apakah kebijakan melahirkan rasa aman atau ancaman, apakah teknologi mengkomunikasikan penghormatan atau objektifikasi. Kajian tentang ketidakadilan epistemik dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa dimensi ini bukan sekadar “noise” subjektif, melainkan suatu modus di mana dunia tersingkap bagi subjek moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Qualia merekam dampak konkret tata kelola kebenaran atas kehidupan manusia.

Mistika adalah Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Mistika menyangkut orientasi terdalam kehendak epistemik: apakah pengetahuan dicari demi kebenaran atau demi gengsi, apakah kekuasaan dijalankan untuk melayani atau untuk mendominasi. Dalam bahasa epistemologi kebajikan, Mistika berkelindan erat dengan cinta pada kebenaran dan disposisi untuk menempatkan diri di bawah realitas, bukan membengkokkan realitas agar tunduk pada keinginan sendiri (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011).

Akhlah merujuk pada konfigurasi relatif stabil dari disposisi moral dalam diri individu dan komunitas: kejujuran, kerendahan hati intelektual, kecermatan, keberanian, dan kebajikan-kebajikan sejenis. Kajian tentang kebajikan intelektual berargumen bahwa kebajikan-kebajikan ini bukan hiasan moral eksternal yang ditempelkan pada rasionalitas yang pada dasarnya sudah selesai, melainkan syarat internal bagi pencarian kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan sekadar permainan argumen (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007). Akhlak membentuk bagaimana Sabda dibaca, bagaimana logika digunakan, dan seberapa serius Qualia serta Mistika diindahkan.

Intention-Trace Alignment adalah derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral, yaitu antara tujuan epistemik yang dideklarasikan secara publik dan bukti moral jangka panjang yang ditinggalkan praktik kelembagaan. Riset tentang ketidakadilan epistemik, kepercayaan terhadap sains, dan peran sosial kepakaran menegaskan perlunya mengaudit bukan hanya niat yang dinyatakan, tetapi juga pola-pola kerugian dan pengecualian dalam distribusi manfaat dan beban epistemik (Fricker, 2007; Medina, 2013; Douglas, 2009).

Menamai enam domain ini tidak serta merta “menciptakan” entitas baru. Penamaan ini sekadar mengakui secara lebih jujur dimensi-dimensi yang sudah bekerja di dalam sains, hukum, dan teknologi, tetapi kerap disembunyikan di balik kosakata netral atau direduksi ke satu domain dominan, biasanya logika.

6.2 Tata urut vertikal dan horizontal

Arsitektur bukan hanya daftar komponen. Arsitektur menyangkut bagaimana komponen-komponen itu ditata secara vertikal dan horizontal. Perbedaan tegas antara The Cohesive Tetrad dan ideologi logika murni terletak pada tata urut ini.

Secara vertikal, Sabda menempati puncak sebagai sumber norm dan telos. Klaim bahwa manusia memiliki martabat yang tidak boleh dinegosiasikan dan bahwa bentuk-bentuk perlakuan tertentu salah secara intrinsik dipahami sebagai respons terhadap Sabda, bukan sebagai produk evolusi, kontrak, atau konsensus semata (Kant, 1996; Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Penempatan ini tidak menghapus kebutuhan akan tafsir dan uji kritik, tetapi menegaskan bahwa ada sumber normatif yang tidak berasal dari prosedur rasional.

Logika berada pada lapis berikutnya sebagai organ klarifikasi dan kritik. Logika menilai koherensi klaim tentang Sabda, menguji argumen tentang martabat dan telos, dan memeriksa klaim empiris tentang dunia. Dalam arsitektur ini, logika tidak lagi dibebani tugas mustahil untuk menciptakan norma-norma yang ia perlukan agar bisa berfungsi. Tekanan regres, sirkularitas, dan stipulasi yang sebelumnya dikemukakan tidak lagi beroperasi sebagai ancaman terhadap rasionalitas, karena norma-norma dasar diterima sebagai pemberian, bukan dihasilkan dari dalam sistem itu sendiri (BonJour, 1985; Klein, 1998). Logika ditugasi menjaga agar respons manusia terhadap Sabda dan klaim tentang dunia tidak terjerumus ke dalam inkonsistensi dan manipulasi, bukan memvalidasi eksistensinya sendiri.

Qualia dan Mistika membentuk lapisan perantara yang menghubungkan komitmen struktural dengan kehidupan batin dan pengalaman. Qualia mencatat apakah sebuah arsitektur tata kelola kebenaran menghasilkan rasa aman, keadilan, dan penghormatan, atau sebaliknya rasa penghinaan dan ketaknampakan, sejalan dengan temuan kajian ketidakadilan epistemik dan cedera moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Mistika mengevaluasi apakah niat epistemik benar-benar terarah kepada kebenaran dan keadilan, atau diam-diam telah ditangkap oleh motif lain.

Akhlahk dan Intention-Trace Alignment menempati lapisan evaluasi jangka panjang. Akhlahk meneliti karakter agen dan komunitas yang beroperasi di bawah suatu arsitektur. Intention-Trace Alignment membandingkan niat epistemik yang dideklarasikan dengan jejak moral nyata dari kebijakan, teknologi, dan putusan sepanjang waktu (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007; Douglas, 2009). Bersama-sama, keduanya mencegah arsitektur dinilai hanya dari keanggunan proseduralnya, tanpa mengindahkan konsekuensi kemanusiaan yang bertahan.

Secara horizontal, setiap domain memiliki peran korektif terhadap domain lain ketika domain-domain tersebut menyimpang. Sabda, sebagai kategori, tidak berfungsi sebagai lisensi bagi klaim otoritas apa pun untuk kebal dari uji logika, Qualia, Mistika, Akhlahk, dan Intention-Trace Alignment. Klaim yang menginvokasi Sabda tetapi secara persisten menghasilkan jejak penghinaan dan pengabaian sistematis terhadap aksioma minimal martabat manusia adalah, secara prima facie, patut dicurigai sebagai kesalahtafsiran atau instrumentalisasi Sabda (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Demikian pula, logika yang menolak memperhatikan Qualia dan Mistika rawan mengeras menjadi legalisme dingin atau teknokrasi. Qualia yang menolak uji logis berisiko terjebak dalam sentimentalisme. Mistika yang tidak diaudit oleh Akhlahk dan Intention-Trace Alignment dapat merosot menjadi pencarian kenyamanan spiritual yang menutup mata terhadap ketidakadilan.

The Cohesive Tetrad dengan demikian menghindari dua distorsi yang lazim: monisme, ketika satu domain (lazimnya logika) mengklaim kedaulatan penuh, dan fragmentasi, ketika domain-domain kebenaran beroperasi terpisah tanpa ketegangan terstruktur dan koreksi timbal balik. Arsitektur ini mengakui ketegangan sebagai ciri sehat dalam tata kelola kebenaran, bukan sebagai cacat.

6.3 Menjawab kegagalan struktural logika murni

Dalam kerangka ini, kita dapat kembali meninjau tiga kegagalan struktural logika murni: masalah dasar pembenaran (self grounding), keruntuhan pemisahan fakta–nilai, dan kegagalan meletakkan dasar bagi martabat dan telos.

Pertama, masalah dasar pembenaran. Dalam *The Cohesive Tetrad*, norma-norma dasar praktik rasional seperti kejujuran intelektual, keterbukaan terhadap koreksi, dan orientasi kepada kebenaran dipahami sebagai respons terhadap Sabda, bukan sebagai produk prosedur yang justru mereka mungkin. Hal ini selaras dengan gagasan sejumlah pemikir abad kedua puluh bahwa praktik rasional bertumpu pada bentuk-bentuk kepercayaan (trust) yang tidak lahir dari argumen biasa, tetapi menjadi syarat bagi argumen untuk bermakna (Wittgenstein, 1969; Polanyi, 1958; Zagzebski, 2012). Dengan mengakui Sabda sebagai sumber normatif, arsitektur ini mengakhiri regres pembenaran pada titik yang bukan sewenang-wenang, melainkan secara struktural tepat: di luar sistem inferensial, pada tatanan yang mendasari dan menyapa sistem tersebut.

Logika tidak lagi diminta membuktikan norma-norma yang memungkinkannya berfungsi. Tugasnya adalah memastikan bahwa tafsir manusia atas Sabda dan klaim empiris tentang dunia tetap koheren secara internal dan tanggap terhadap bukti (Haack, 2003; Douglas, 2009). Dalam pengertian ini, logika tidak dikecilkan, melainkan dibebaskan dari peran yang tidak bisa dipenuhinya.

Kedua, fakta dan nilai. *The Cohesive Tetrad* tidak berupaya mengembalikan dikotomi fakta–nilai yang ketat. Sebaliknya, arsitektur ini menafsirkan fakta sebagai unsur dari tatanan tercipta yang sarat normatif. Analisis Putnam, Anderson, dan Douglas tentang peran nilai dalam sains menunjukkan bahwa penilaian nilai membentuk pemilihan masalah, pembentukan konsep, dan standar bukti (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009). Dalam arsitektur yang diusulkan, kehadiran nilai semacam itu tidak diperlakukan sebagai kontaminasi, tetapi sebagai sesuatu yang harus diakui, ditata, dan dimintai pertanggungjawaban.

Qualia dan Mistika diberi peran formal untuk mencatat bagaimana nilai menyusup ke pengalaman dan niat. Logika membantu menjernihkan relasi di antara dimensi-dimensi ini, bukan mencoba memisahkannya secara artifisial. Sabda menyediakan horizon di mana realitas lebih dari sekadar kumpulan fakta netral, melainkan suatu tatanan yang bermakna dan bertujuan. Integrasi fakta dan nilai dengan demikian berlangsung dalam struktur yang eksplisit, bukan melalui penyelundupan tersembunyi.

Ketiga, martabat dan telos. Analisis sebelumnya atas pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian menunjukkan bahwa, dalam horizon naturalistik murni, sulit mempertahankan isi kuat dari klaim tentang martabat yang melekat, tak dapat dicabut, dan batas-batas yang tak boleh dilewati (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). *The Cohesive Tetrad* memulihkan kekuatan klaim-klaim ini dengan menyajikannya sebagai konsekuensi dari Sabda: manusia dipahami sebagai mereka yang dipanggil dan diakui oleh sumber normatif tertinggi. Aksioma-aksioma minimal martabat manusia diperlakukan sebagai artikulasi eksplisit dari panggilan tersebut.

Akhlah dan Intention-Trace Alignment menjadi instrumen untuk mengaudit sejauh mana sistem hukum, kebijakan, dan teknologi sungguh-sungguh menghormati martabat itu. Ketika

terdapat jarak antara niat yang dinyatakan dan jejak moral yang tampak, jarak ini tidak lagi dibaca semata sebagai inefisiensi teknis, tetapi sebagai gangguan arsitektural dalam relasi terhadap Sabda dan telos yang ia tetapkan (Fricker, 2007; Medina, 2013; UNESCO, 2021).

Dalam semua ini, kedudukan logika tidak diturunkan, melainkan dikonfigurasi ulang. Logika tetap tak tergantikan untuk:

- menguji konsistensi tafsir atas Sabda,
- merinci implikasi praktis aksioma martabat,
- menilai klaim empiris tentang dampak kelembagaan, dan
- menghubungkan data dengan norma dalam cara yang dapat dipertanggungjawabkan di forum publik.

Yang berubah adalah bahwa logika tidak lagi memainkan peran ganda sebagai sekaligus ciptaan dan pencipta norma. Logika beroperasi sebagai organ disipliner di dalam sebuah arsitektur yang mengakui adanya sumber normatif di luar dirinya.

6.4 Trajektori bagi hukum dan kecerdasan buatan

Argumen sejauh ini dikembangkan di tataran filosofis dan konseptual. Sebuah arsitektur tata kelola kebenaran hanya layak mendapat perhatian serius bila ia sanggup membuat perbedaan di medan kelembagaan konkret. The Cohesive Tetrad mulai diuji di dua arena yang sangat peka terhadap klaim rasionalitas dan martabat: hukum dan kecerdasan buatan.

Dalam hukum, sejumlah kajian terbaru menyoroti interaksi persisten antara bahasa hak, martabat, dan keadilan prosedural, serta pertanyaan-pertanyaan dasar tentang sumber otoritas normatif dan batas-batas legitimasi prosedural murni (Habermas, 1996; Dworkin, 1986; Waldron, 2012). The Cohesive Tetrad dapat digunakan untuk:

- membaca ulang peran Sabda dalam tradisi hukum yang eksplisit religius maupun yang telah tersektularisasi,
- memetakan bagaimana logika hukum beroperasi dalam relasinya dengan Qualia para pihak yang terdampak,
- mengevaluasi Mistika dan Akhlak para aktor hukum, dan
- mengaudit Intention-Trace Alignment pengadilan dan lembaga terhadap aksioma martabat yang mereka klaim junjung.

Di bidang kecerdasan buatan, laporan-laporan global tentang etika AI mengakui pentingnya prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun kerap kesulitan memberi uraian mendalam mengapa manusia harus diperlakukan dengan cara tertentu di luar pertimbangan manajemen risiko dan kepercayaan publik (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021). The Cohesive Tetrad menyediakan kerangka untuk:

- menafsirkan prinsip-prinsip tersebut sebagai ekspresi parsial dari panggilan Sabda kepada martabat dan telos,
- menempatkan logika algoritmik di bawah pengawasan ganda Akhlak dan Intention-Trace Alignment, dan

- mengintegrasikan Qualia para pengguna serta Mistika para perancang ke dalam analisis tata kelola, bukan sebagai “noise”, melainkan sebagai data yang relevan secara epistemik.

Pengembangan rinci atas aplikasi-aplikasi ini menjadi tugas kajian terpisah. Untuk keperluan artikel ini, cukup dicatat bahwa The Cohesive Tetrad bukan sekadar skema abstrak. Ia telah berfungsi sebagai lensa dan alat desain di bidang-bidang di mana keterbatasan logika murni kian tampak. Dengan demikian, The Cohesive Tetrad menolak pilihan palsu antara menyerah sepenuhnya kepada ideologi logika murni, yang tidak dapat membenarkan norma-normanya sendiri, dan kembali kepada bentuk-bentuk seruan otoritarian atas wahyu yang menolak audit logis dan moral.

Bagian terakhir artikel ini akan mengikat seluruh jalinan argumen, merangkum bagaimana kritik terhadap logika murni dan usulan The Cohesive Tetrad saling terkait, serta mengisyaratkan bagaimana pergeseran arsitektural ini dapat membentuk ulang perdebatan tentang tata kelola kebenaran dalam hukum, teknologi, dan nalar publik.

7. Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari sebuah ketegangan yang tertanam dalam-dalam di dalam institusi kontemporer. Di satu sisi, aktor-aktor ilmiah, hukum, dan teknologi menggambarkan diri mereka sebagai tunduk pada bukti, kenetralan, dan rasionalitas prosedural. Di sisi lain, aktor-aktor yang sama bergantung pada kosakata tentang martabat manusia, hak-hak dasar, batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kosakata pertama menyiratkan bahwa logika murni dapat memerintah sendirian. Kosakata kedua mengandaikan adanya sumber norm dan telos yang tidak dapat dihasilkan oleh logika yang beroperasi di dalam horizon naturalistik semata.

Tugas pertama adalah merekonstruksi logika murni, bukan sebagai sosok karikatural, melainkan sebagai arsitektur tata kelola kebenaran yang serius. Dengan bertumpu pada genealogi dari positivisme hingga saintisme kontemporer, dan pada perdebatan dalam epistemologi serta filsafat sains, saya mengidentifikasi empat tesis struktural yang bersama-sama mendefinisikan ideologi logika murni: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat fakta–nilai, dan pemahaman naturalistik tentang telos dan martabat (Comte, 1974; Ayer, 1936; Haack, 2003; Putnam, 2002; Rea, 2018). Dalam bentuk terkuatnya, konfigurasi ini menjanjikan sebuah citra otoritas rasional yang terlepas dari wahyu dan tradisi, dan yang dapat mengatur kehidupan publik dalam masyarakat majemuk tanpa merujuk pada doktrin-doktrin komprehensif.

Tugas kedua adalah menunjukkan bahwa arsitektur ini tidak dapat menanggung bobot yang secara implisit ia klaim. Tiga kegagalan struktural muncul. Pertama, logika murni tidak dapat meletakkan dasar bagi norma-norma dasar praktik rasional tanpa jatuh ke dalam regres, sirkularitas, atau stipulasi. Kewajiban untuk mencari kebenaran, menghindari penipuan, dan tunduk pada bukti sudah diprasuposisikan oleh setiap upaya pembenaran yang sungguh-sungguh. Kewajiban-kewajiban ini tidak dapat diturunkan dari prosedur yang justru mereka mungkin (BonJour, 1985; Klein, 1998; Zagzebski, 1996). Kedua, perbedaan ketat fakta–nilai larut di dalam praktik inkuiri dan pengambilan keputusan yang konkret. Mulai dari pemilihan masalah hingga standar bukti, penilaian nilai membentuk produksi dan interpretasi fakta, dan konsep-konsep tebal seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan

menyatukan deskripsi dan evaluasi dengan cara yang menolak pemisahan bersih (Williams, 1985; Anderson, 2004; Douglas, 2009; Putnam, 2002). Ketiga, pemahaman naturalistik tentang martabat dan telos gagal menopang aksioma minimal yang diasumsikan oleh hukum dan etika kontemporer. Strategi-strategi berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian masing-masing menangkap wawasan penting, tetapi tidak satu pun yang mengamankan watak tanpa syarat dari harkat melekat, inviolabilitas, dan kesetaraan dasar yang terus dinyatakan dalam bahasa hak asasi manusia (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Kegagalan-kegagalan ini tidak berarti bahwa logika adalah musuh kebenaran. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa logika, ketika diperlakukan sebagai arsitektur berdaulat, sedang diminta melakukan kerja yang tidak dapat ia penuhi tanpa meminjam dari sumber-sumber yang secara resmi ia tolak. Kepercayaan-kepercayaan dasar yang menopang praktik rasional, dan klaim-klaim kuat tentang martabat manusia yang diinvokasi oleh institusi, mengarah melampaui diri mereka sendiri kepada suatu tatanan realitas di mana kebenaran, harga diri, dan tujuan bukanlah kebetulan atau sekadar konstruksi. Nama Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, diperkenalkan sebagai cara untuk menandai tatanan tersebut.

Bertolak dari sini, artikel ini mengusulkan *The Cohesive Tetrad* sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran. Alih-alih memperlakukan logika sebagai asal normativitas, arsitektur ini menempatkan Sabda di puncak tata urutan vertikal dan kemudian mengatur logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan *Intention-Trace Alignment* dalam peran yang berbeda namun saling bergantung. Logika mempertahankan otoritas kritis dan klarifikatifnya. Logika menguji klaim tentang Sabda dari sisi koherensi, memeriksa pernyataan empiris tentang dunia, dan menghubungkan bukti dengan kebijakan dalam bentuk-bentuk yang dapat diaudit (Haack, 2003; Douglas, 2009). Qualia memberi suara pada pengalaman hidup orang dan komunitas di bawah rezim-rezim kebenaran tertentu, termasuk pengalaman ketidakadilan epistemik dan cedera moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Mistika, yaitu Mistika, *the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*, menyangkut kedalaman dan arah niat epistemik. Akhlak mencerminkan peran kebajikan intelektual dalam menopang inkuiri yang jujur, dan *Intention-Trace Alignment* mengukur derajat keselarasan antara niat epistemik yang dinyatakan dan jejak epistemik-moral jangka panjang dari praktik kelembagaan (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007).

Kontribusi teoretis artikel ini dapat diringkas dalam tiga gerakan. Pertama, artikel ini membingkai ulang konflik klasik antara rasio dan wahyu sebagai persoalan desain arsitektural. Isunya bukan apakah logika berharga, melainkan apakah logika dapat secara kredibel mengklaim kedaulatan atas norm dan telos. Kedua, artikel ini merumuskan kritik struktural terhadap logika murni yang bersifat internal terhadap keprihatinan-keprihatinannya sendiri. Argumen bergantung pada problem regres dalam pembenaran, pada kajian rinci dalam filsafat sains tentang keterjeratan fakta dan nilai, serta pada pendekatan martabat dan kapabilitas dalam hukum dan etika, bukan pada apel yang sama sekali tak kasat mata dari dalam bidang-bidang tersebut (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Ketiga, artikel ini memperkenalkan *The Cohesive Tetrad* sebagai kandidat arsitektur positif di mana Sabda dan logika bukan pesaing, melainkan mitra, masing-masing dengan peran dan batas yang terdefinisi.

Ini bukan akhir argumen, melainkan titik awalnya. Sejumlah lintasan kerja lanjutan segera tampak. Salah satunya menyangkut pengembangan rumusan yang lebih presisi tentang aksioma-aksioma minimal martabat manusia dan relasinya dengan beragam tradisi keagamaan

dan filosofis yang mengklaim memediasi Sabda. Lintasan lain menyangkut elaborasi Akhlak dan Intention–Trace Alignment menjadi instrumen operasional untuk mengaudit institusi dalam sains, hukum, dan teknologi. Lintasan ketiga menyangkut penerapan rinci The Cohesive Tetrad pada domain seperti kecerdasan buatan, di mana bahasa tentang kenetralan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sudah berada dalam tekanan (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Jika analisis yang ditawarkan di sini secara garis besar tepat, masyarakat kontemporer menghadapi sebuah pilihan yang tidak dapat ditunda tanpa batas. Masyarakat dapat terus berbicara seolah-olah logika murni sudah memadai, sambil diam-diam bergantung pada klaim moral dan dignitarian yang tidak dapat ia benarkan. Kesenjangan antara metafisika resmi dan praktik aktual kemudian akan melebar, dengan risiko melahirkan sinisme terhadap sains maupun hukum. Atau, masyarakat dapat mengakui bahwa logika bukan sumber otoritasnya sendiri, bahwa norma-norma yang mengatur inkuiri yang sungguh-sungguh dan aksioma-aksioma martabat manusia memerlukan dasar yang lebih dalam. The Cohesive Tetrad ditawarkan sebagai salah satu upaya untuk memikirkan seperti apa arsitektur tata kelola kebenaran semacam itu: sebuah arsitektur di mana Sabda memasok norm dan telos, logika berfungsi sebagai bahasa disipliner kritik dan klarifikasi, Qualia dan Mistika menjaga agar institusi tetap peka terhadap realitas hidup dan niat, Akhlak membentuk karakter para pencari tahu, dan Intention–Trace Alignment memastikan bahwa biaya moral dari proses mengetahui tidak pernah disingkirkan dari pandangan.

References

1. Anderson, E. (2004). Uses of value judgments in science. *Hypatia*, 19(1), 1-24.
2. Audi, R. (1993). *The structure of justification*. Cambridge University Press.
3. Ayer, A. J. (1936). *Language, truth and logic*. Gollancz.
4. Baehr, J. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology*. Oxford University Press.
5. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
6. Bonjour, L. (1985). *The structure of empirical knowledge*. Harvard University Press.
7. Carnap, R. (1937). *The logical syntax of language*. Routledge & Kegan Paul.
8. Clifford, W. K. (1877). The ethics of belief. In W. K. Clifford, *Lectures and essays* (Vol. 2, pp. 177-211). Macmillan.
9. Comte, A. (1974). *The positive philosophy of Auguste Comte* (H. Martineau, Trans.). University Press of America.
10. Conee, E., & Feldman, R. (2004). Evidentialism. In E. Conee & R. Feldman, *Evidentialism: Essays in epistemology* (pp. 83-107). Oxford University Press.
11. Dewey, J. (1938). *Logic: The theory of inquiry*. Henry Holt.
12. Douglas, H. (2009). *Science, policy, and the value-free ideal*. University of Pittsburgh Press.
13. Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
14. Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
15. Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
16. Haack, S. (2003). *Defending science within reason: Between scientism and cynicism*. Prometheus Books.
17. Hume, D. (1978). *A treatise of human nature* (L. A. Selby-Bigge & P. H. Nidditch, Eds.). Oxford University Press.
18. Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399.
19. Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
20. Kitcher, P. (1993). *The advancement of science: Science without legend, objectivity without illusions*. Oxford University Press.
21. Klein, P. (1998). Foundationalism and the infinite regress of reasons. *Philosophy and Phenomenological Research*, 58(4), 919-925.
22. Korsgaard, C. M. (1996). *The sources of normativity*. Cambridge University Press.
23. MacIntyre, A. (1988). *Whose justice? Which rationality?* University of Notre Dame Press.

24. Medina, J. (2013). *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and the social imagination*. Oxford University Press.
25. Mutaqin, A. Z. (2025a). The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
26. Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
27. Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Harvard University Press.
28. OECD. (2019). *Recommendation of the Council on artificial intelligence*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
29. Polanyi, M. (1958). *Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy*. Routledge.
30. Pritchard, D. (2016). *Epistemic angst: Radical skepticism and the grounds of knowledge*. Princeton University Press.
31. Putnam, H. (2002). *The collapse of the fact value dichotomy and other essays*. Harvard University Press.
32. Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (rev. ed.). Harvard University Press.
33. Rea, M. C. (2018). *World without design: The ontological consequences of naturalism*. Oxford University Press.
34. Roberts, R. C., & Wood, W. J. (2007). *Intellectual virtues: An essay in regulative epistemology*. Oxford University Press.
35. Sterelny, K. (2012). *The evolved apprentice: How evolution made humans unique*. MIT Press.
36. Stenmark, M. (2001). *Scientism: Science, ethics and religion*. Ashgate.
37. Taylor, C. (2007). *A secular age*. Harvard University Press.
38. United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. United Nations.
39. UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
40. Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights*. Oxford University Press.
41. Williams, B. (1985). *Ethics and the limits of philosophy*. Harvard University Press.
42. Wittgenstein, L. (1969). *On certainty* (G. E. M. Anscombe & G. H. von Wright, Eds.). Blackwell.
43. Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge*. Cambridge University Press.
44. Zagzebski, L. T. (2012). *Epistemic authority: A theory of trust, authority, and autonomy in belief*. Oxford University Press.

*
**

Abstrak

Perdebatan kontemporer dalam hukum, bioetika, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan sangat bergantung pada bahasa martabat manusia dan *telos* manusia untuk mengecam penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, penghinaan sistemik, dan penggunaan manusia secara instrumental, namun fondasi dominan yang digerakkan untuk membenarkan klaim-klaim ini tetap pada dasarnya bersifat naturalistik dan prosedural, dengan menambahkan normativitas pada kapasitas manusia, sejarah evolusioner, atau konstruksi kontraktarian di bawah asumsi kedaulatan logika murni. Artikel ini berargumen bahwa konstelasi tersebut secara struktural tidak stabil. Pertama, artikel ini merekonstruksi pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian dalam bentuknya yang paling kuat dan mengujinya dengan seperangkat aksioma martabat manusia minimal dalam kasus-kasus sulit seperti bayi, orang dengan gangguan kognitif berat, tanggungan yang secara ekonomi membebani, populasi yang secara struktural dibungkam, dan generasi mendatang, dengan menunjukkan bahwa kerangka-kerangka tersebut entah mengencerkan isi martabat atau secara terselubung mengimpor premis-premis yang lebih tebal secara normatif yang tidak dapat mereka hasilkan dari dalam arsitektur mereka sendiri. Kedua, artikel ini mengembangkan sebuah diagnosis transendental dengan berargumen bahwa wacana martabat yang kuat secara implisit mengandaikan adanya suatu sumber yang berjangkar secara vertikal, pemberi norma, dan pengungkap *telos* yang mendahului kapasitas, evolusi, dan kontrak, yang dalam artikel ini dinamai sebagai Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, dan ditempatkan di dalam The Cohesive Tetrad, sebuah arsitektur epistemik-etis yang mengintegrasikan Sabda dengan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Ketiga, artikel ini mengajukan kritik metalogis atas logika murni dengan menunjukkan bahwa logika tidak dapat meletakkan dasar bagi aksioma-aksiomanya sendiri, tidak dapat menghasilkan “*ought*” epistemik yang membuat validitas bersifat mengikat, dan buta terhadap *telos* dan isi, sehingga bahkan otoritas logika pada akhirnya bergantung pada suatu horizon norma dan tujuan yang lebih tepat ditangkap oleh Sabda. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mendukung klaim sentral bahwa jika kita mengambil secara serius penggunaan paling kuat atas martabat dan *telos*, maka fondasi moral harus dirangka ulang melampaui logika murni dengan mengakui prioritas epistemik Sabda dan mengintegrasikannya ke dalam arsitektur tata kelola kebenaran yang terdisiplin bagi hukum, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan.

Kata kunci: *telos; Sabda; logika murni; tata kelola kebenaran; naturaslisme; kontraktarianisme; The Cohesive Tetrad; kecerdasan buatan; nalar publik.*



1. Pendahuluan

Pada hari ini, sulit menulis tentang hukum, bioetika, kebijakan publik, atau kecerdasan buatan tanpa hampir seketika berhadapan dengan bahasa tentang martabat manusia. Mahkamah konstitusi merujuk pada martabat ketika mereka melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Badan-badan internasional menginvokasinya ketika mereka mengecam penghinaan sistemik, penahanan tanpa batas waktu, dan kekerasan yang dirasialisasi. Para perancang dan regulator sistem AI kini berbicara, kadang agak tergesa-gesa, tentang teknologi yang berpusat pada manusia atau yang menjaga martabat dalam pedoman dan dokumen strategis. Dalam semua konteks ini, martabat diharapkan melakukan sesuatu yang sangat spesifik: ia menamai suatu status yang tidak dapat diperdagangkan dan menandai sebuah garis yang bahkan lembaga-lembaga kuat pun tidak diizinkan untuk melampauinya.

Pada saat yang sama, gambar latar yang membimbing banyak teori kontemporer sangatlah bersahaja. Klaim moral dan hukum diharapkan dibangun di dalam bingkai yang naturalistik dan prosedural. Dalam praktik, ini biasanya berarti tiga hal. Pertama, kita mencari fondasi dalam kapasitas manusia seperti agensi rasional, otonomi, atau daftar kapabilitas sentral (*Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011*). Kedua, kita menceritakan kisah-kisah evolusioner tentang bagaimana norma dan praktik tertentu muncul karena mereka menstabilkan kerja sama dan meningkatkan *fitness* kelompok (*Darwin, 1871; Ruse and Wilson, 1986*). Ketiga, kita bergantung pada model-model kontraktarian dan kontraktualis di mana orang-orang yang bebas dan setara, atau para wakil mereka yang diidealkan, memilih prinsip-prinsip di bawah kondisi yang adil yang mengkodekan pembenaran timbal balik (*Rawls, 1971; Scanlon, 1998*). Berjalan dengan tenang di latar belakang adalah keyakinan yang bahkan lebih dalam: bahwa logika murni, yang dipahami sebagai suatu usaha formal yang tidak perlu menjawab otoritas yang lebih tinggi mana pun, dapat menjadi penengah di antara klaim-klaim yang saling bersaing dan menjaga agar ambisi normatif kita tetap terkendali.

Kombinasi antara bahasa panggung depan yang kuat dan komitmen panggung belakang yang bersahaja ini menciptakan suatu ketegangan yang dapat dirasakan tetapi jarang dinamai. Ketika kita mengatakan bahwa setiap manusia memiliki suatu nilai yang melekat yang tidak bergantung pada performa atau pengakuan sosial, bahwa nilai ini setara lintas pribadi, dan bahwa beberapa bentuk perlakuan sama sekali dilarang bahkan jika perlakuan tersebut akan menguntungkan banyak orang lain, kita seolah-olah sedang menyatakan sesuatu yang sangat menuntut. Ketika kita kemudian mencoba meletakkan dasar bagi klaim-klaim ini pada kapasitas, evolusi, kontrak, dan logika murni, tanah tempat kita berpijak mulai bergeser. Semakin serius kita mengambil penggunaan martabat yang paling kuat, semakin kecil kemungkinan fondasi-fondasi ini memadai sendirian.

Intuisi di balik artikel ini dapat dinyatakan secara lugas. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan ketika kita menginvokasi martabat manusia dan *telos* manusia dalam pengertian mereka yang paling kuat, maka fondasi-fondasi yang lazim kita gunakan tidaklah memadai. Pendekatan berbasis kapasitas cenderung mengecualikan justru mereka yang paling membutuhkan perlindungan, atau diam-diam menyelundupkan pandangan yang lebih tebal tentang natur dan tujuan manusia daripada yang secara resmi diakui. Narasi evolusioner dapat menjelaskan mengapa norma martabat muncul dan menjadi stabil, tetapi tidak dapat mengubah fakta-fakta tentang keberhasilan adaptif menjadi klaim tanpa syarat tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apa pun. Konstruksi kontraktarian melakukan kerja yang lebih baik dalam mengekspresikan kesetaraan dan pembenaran publik, tetapi pada akhirnya mengandaikan, alih-alih menghasilkan, penilaian tentang siapa yang harus

dihitung sebagai pemikul klaim. Logika murni, akhirnya, sekalipun tak tergantikan, ternyata tidak mampu membenarkan otoritas normatifnya sendiri atau memutuskan tujuan-tujuan apa yang seharusnya dilayani oleh daya inferensialnya.

Proyek artikel ini adalah menjadikan ketegangan tersebut persis dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah usulan positif. Saya mulai dengan merekonstruksi tiga keluarga fondasi kontemporer bagi martabat dan *telos*-berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian-dengan cara yang secharitable mungkin, bukan sebagai orang-orangan jerami. Saya kemudian memperkenalkan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang menangkap paling sedikit hal-hal yang tampaknya kita komit ketika berbicara tentang martabat di dalam hukum, bioetika, dan kebijakan publik. Aksioma-aksioma ini digunakan sebagai uji tekan dalam kasus-kasus sulit: bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapabilitas-kapabilitas sentral, orang dengan gangguan kognitif berat, tanggungan yang secara ekonomi membebani, kelompok yang secara struktural dibungkam, dan generasi mendatang. Hasil pertama bersifat negatif tetapi penting: ketiga keluarga pendekatan tersebut tidak dapat, menurut ukuran mereka sendiri, memenuhi aksioma-aksioma ini tanpa entah mengurangi isi martabat atau meminjam dari suatu sumber normatif yang lebih tebal yang tidak mereka akui.

Argumen kemudian mengambil satu langkah lebih lanjut. Alih-alih memperlakukan logika murni sebagai penengah yang netral dan swacukup yang berdiri di atas perbedaan moral, saya menelaah pembatasan dirinya sendiri. Saya berargumen bahwa logika tidak dapat membenarkan aksioma-aksiomanya sendiri tanpa bersandar pada sirkularitas, tidak dapat menghasilkan “*ought*” epistemik dasar yang membuat konsekuensi logis bersifat mengikat alih-alih sekadar menarik, dan buta terhadap *telos* dan kualitas moral dari isi yang dihubungkannya. Logika tetap tak tergantikan, tetapi otoritasnya bersifat derivatif. Ia bergantung pada suatu horizon norma dan tujuan yang mendahuluinya dan yang tidak diciptakannya. Hal ini tampak sangat jelas ketika kita mempertimbangkan bagaimana sistem logis dan berbasis data, termasuk AI kontemporer, dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang secara formal tak bercacat namun secara substantif tidak adil jika dibiarkan tanpa standar eksternal tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia itu.

Ketika horizon itu dibawa ke permukaan, sebuah gambaran lain muncul. Saya berargumen bahwa komitmen-komitmen kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* manusia secara implisit mengandaikan sesuatu seperti sebuah Sabda yang berbicara dengan otoritas tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia itu. Saya menamai sumber ini Sabda, yang dipahami secara terdisiplin sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, dan saya menanamkannya ke dalam The Cohesive Tetrad, sebuah arsitektur epistemik-etis yang mengintegrasikan Sabda dengan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Di dalam arsitektur ini, klaim-klaim yang diajukan atas nama Sabda tidak diisolasi dari kritik; klaim-klaim tersebut diuji secara konseptual, eksperimental, spiritual, praktis, dan historis.

Taruhan artikel ini adalah bahwa langkah ini tidak melemahkan rasionalitas, tetapi justru mengambil secara serius apa yang sudah diasumsikan oleh wacana martabat kita dan apa yang tidak dapat diamankan oleh logika murni sendirian.

1.1 Tesis dan kontribusi

Tuntutan terhadap sebuah artikel level Q1 sangatlah tinggi. Tidak cukup untuk menyatakan ulang posisi-posisi yang sudah dikenal atau menawarkan sintesis yang sedikit diperbaiki. Karya ini harus menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, dan harus melakukannya dengan ketelitian metodologis dan kejernihan argumentatif. Dalam semangat itu, tesis sentral dan kontribusi artikel ini dapat dinyatakan secara ringkas.

Tesis sentral.

Jika kita mengambil secara apa adanya klaim-klaim kontemporer kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* manusia, termasuk penerapannya pada mereka yang paling rentan dan yang belum lahir, maka tidak satu pun dari fondasi berbasis kapasitas, evolusioner, maupun kontraktarian, bahkan ketika didukung oleh logika murni, dapat memikul sepenuhnya bobot normatif yang diminta untuk mereka bawa. Koherensi dari klaim-klaim semacam itu memerlukan suatu sumber yang berjangkar secara vertikal, pemberi norma, dan pengungkap *telos* yang mendahului kapasitas, sejarah, dan kesepakatan manusia. Saya menamai sumber ini Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, dan saya berargumen bahwa Sabda harus berdiri dalam posisi prioritas epistemik bahkan terhadap logika murni, yang tidak dapat meletakkan dasar bagi normativitasnya sendiri.

Kontribusi orisinal.

1. **Diagnostik terpadu atas kegagalan di tiga keluarga fondasi utama.**
Alih-alih mengkritik pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian secara terpisah, artikel ini menunjukkan bahwa ketiganya berbagi satu problem struktural yang sama ketika diuji terhadap aksioma martabat minimal dalam kasus-kasus sulit. Hal ini menghasilkan satu diagnosis yang koheren tentang mengapa fondasi-fondasi yang naturalistik dan prosedural lebih lemah daripada yang sering diasumsikan oleh para pendukungnya.
2. **Sekumpulan aksioma martabat manusia minimal yang dipertajam sebagai alat metodologis.**
Artikel ini merumuskan aksioma-aksioma tentang nilai melekat, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan koreksi diri yang dapat dipertanggungjawabkan bukan sebagai teori baru tentang pribadi, tetapi sebagai rekonstruksi eksplisit atas apa yang sudah diasumsikan oleh praktik hukum, bioetika, dan kebijakan kontemporer ketika mereka menginvokasi martabat manusia. Aksioma-aksioma ini berfungsi sebagai uji tekan portabel yang dapat digunakan melampaui argumen yang diajukan di sini.
3. **Kritik metalogis terhadap klaim logika murni atas otoritas tertinggi.**
Artikel ini mengajukan analisis terfokus atas batas-batas logika murni, dengan menunjukkan bahwa logika tidak dapat membenarkan aksioma-aksiomanya sendiri, tidak dapat menghasilkan “*ought*” epistemik fundamental untuk peduli pada kebenaran dan koherensi, dan tidak dapat menentukan *telos* atau valensi moral dari inferensi yang diizinkan. Kritik metalogis ini diintegrasikan secara langsung ke dalam perdebatan martabat, alih-alih diperlakukan sebagai isu teknis yang terpisah.
4. **Pengenalan Sabda sebagai sumber norma dan *telos* yang dispesifikasikan secara struktural.**

Sabda tidak diajukan sebagai seruan religius yang kabur, tetapi sebagai jenis Sabda yang secara logis dibutuhkan jika komitmen martabat kita yang paling kuat hendak dibuat koheren: bersifat universal dalam sapaannya, tidak kontingen dalam penilaiannya, pemberi orientasi terhadap *telos* manusia, dan mampu menghakimi bahkan tatanan yang stabil dan populer.

5. **Pengembangan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur tata kelola kebenaran.**

Dengan menanamkan Sabda ke dalam arsitektur enam serangkai yang mencakup Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment, artikel ini menawarkan sebuah model konkret tentang bagaimana suatu Sabda yang memberi norma dan *telos* dapat direspons dan dimintai pertanggungjawaban dalam hukum, kebijakan publik, dan tata kelola AI. Hal ini melampaui dikotomi lazim antara proseduralisme sekuler dan seruan religius yang tak diperiksa, dengan menempatkan semua klaim, termasuk klaim tentang Sabda, di bawah telaah multi-register.

Secara keseluruhan, kontribusi-kontribusi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menambahkan satu suara lagi ke dalam literatur tentang martabat, tetapi untuk menggeser term-term perdebatan. Klaim intinya adalah bahwa selama kita berbicara secara sungguh-sungguh tentang martabat manusia dan *telos* manusia, kita tidak dapat menghindari pertanyaan tentang Sabda. Kita dapat terus-menerus meminjam secara diam-diam dari suatu Sabda yang kita enggan namai, atau kita dapat membawa Sabda itu ke ruang terbuka dan menempatkan seluruh rujukan kita kepadanya di bawah telaah yang terdisiplin dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang sesuai bagi hukum, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan kontemporer.

2. *Fondasi kontemporer martabat manusia dan telos*

Wacana kontemporer tentang martabat manusia dan *telos* manusia tidak muncul dalam kevakuman konseptual. Ia berdiri di atas beberapa tradisi kuat yang berusaha menjawab satu pertanyaan dasar: mengapa, jika memang demikian, manusia memiliki status khusus, dan untuk apa manusia itu ada. Dalam bagian ini, saya memfokuskan pada tiga keluarga jawaban yang mendominasi perdebatan mutakhir dalam filsafat moral dan hukum: pendekatan berbasis kapasitas, narasi evolusioner, dan konstruksi kontraktarian. Tiga keluarga ini bukan satu-satunya yang tersedia, tetapi cukup berpengaruh dan cukup representatif secara struktural untuk dijadikan kasus uji bagi proyek yang lebih luas, yakni proyek yang naturalistik dan prosedural.

Alih-alih memperlakukan mereka sebagai lawan yang mudah, saya merekonstruksi masing-masing dalam bentuk yang dapat dikenali oleh para pembelanya yang paling kuat. Tujuannya bukan untuk memenangkan kemenangan cepat, tetapi untuk melihat apa yang terjadi ketika pendekatan-pendekatan ini diminta memikul seluruh bobot wacana martabat kontemporer, terutama dalam kasus-kasus sulit.

2.1 *Pendekatan berbasis kapasitas: martabat sebagai berakar pada apa yang dapat dilakukan atau dapat menjadi oleh manusia*

Pendekatan berbasis kapasitas berangkat dari satu intuisi sederhana. Ada sesuatu yang khas tentang apa yang dapat dilakukan atau dapat menjadi oleh manusia, dan kekhasan ini menjadi dasar status khusus. Martabat bukanlah suatu substansi misterius; ia adalah bayangan moral dari seperangkat kapasitas. Dua versi khususnya menonjol dalam literatur.

2.1.1 Agensi rasional dan otonomi

Dalam garis pertama yang lebih Kantian, martabat diikatkan pada agensi rasional dan otonomi. Manusia bukan sekadar titik temu dari dorongan dan respons. Mereka dapat membentuk maksim, menangkap alasan, berelaborasi tentang prinsip, mengadopsi hukum bagi diri mereka sendiri, dan saling menuntut pertanggungjawaban di bawah hukum-hukum tersebut (*Kant, 1996 [1785]*). Memiliki martabat berarti termasuk dalam kelas makhluk yang mampu mengambil sudut pandang praktis atas hidup mereka sendiri sebagai pengarang hukum, bukan sekadar sebagai subjek dari kecenderungan. Karya-karya kontemporer tentang identitas praktis dan otoritas alasan mengembangkan garis ini dengan berargumen bahwa kapasitas kita untuk mengikat diri sendiri melalui pengesahan reflektif adalah sumber suatu bentuk nilai khusus yang tidak dapat dipertukarkan dengan barang-barang lainnya (*Korsgaard, 1996*).

Struktur intinya sudah dikenal:

- (P1) Makhluk yang mampu agensi rasional yang memerintah diri memiliki suatu nilai khusus yang tidak dapat dibandingkan dengan harga.
- (P2) Manusia, sebagai spesies, memiliki kapasitas untuk agensi rasional yang memerintah diri.
- (C) Oleh karena itu, manusia memiliki suatu nilai khusus, martabat, yang menjadi dasar kewajiban-kewajiban hormat yang ketat.

Dalam pandangan ini, *telos* dibaca dari kapasitas. Tujuan yang patut bagi makhluk rasional adalah hidup sesuai dengan hukum yang diberikan sendiri dan dalam pengakuan timbal balik sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*Kant, 1996 [1785]*). Martabat menamai status yang berkaitan dengan tujuan ini.

Gambaran ini memiliki beberapa kekuatan. Ia menjelaskan mengapa martabat tidak dapat diuangkan dalam istilah pasar, mengapa pelanggaran-pelanggaran terasa lebih dari sekadar kebijakan buruk, dan mengapa hormat terhadap pribadi menempati posisi sentral dalam etika deontologis. Ia juga menawarkan jembatan yang rapi antara metafisika agensi dan bahasa hak dalam teori hukum dan politik kontemporer.

2.1.2 Pendekatan kapabilitas dan keberkembangan manusia

Arus kedua, yang dipengaruhi oleh pendekatan kapabilitas, menggeser fokus dari satu daya inti ke seperangkat kapabilitas sentral yang jamak. Di sini, martabat tidak digantungkan pada satu kapasitas seperti agensi rasional, melainkan pada daftar terstruktur dari *functionings* yang membuat kehidupan manusia berjalan dengan baik: integritas tubuh, nalar praktis, afiliasi, kontrol atas lingkungan, dan seterusnya (*Nussbaum, 2000; Nussbaum, 2011*). Martabat dilanggar ketika seseorang dirampas dari peluang substantif untuk melaksanakan kapabilitas-kapabilitas ini.

Pola dasarnya tampak sebagai berikut:

- (P1) Ada pluralitas *functionings* yang menyusun suatu kehidupan yang layak bagi manusia.

- (P2) *Functionings* ini dapat ditangkap, pada tingkat yang lebih abstrak, sebagai kapabilitas-kapabilitas sentral, yaitu peluang nyata untuk menjadi dan melakukan hal-hal tertentu.
- (P3) Lembaga-lembaga politik dan hukum memiliki kewajiban untuk menjamin setidaknya suatu tingkat ambang dari kapabilitas-kapabilitas ini bagi setiap orang.
- (C) Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia mengharuskan bahwa tidak seorang pun didorong jatuh di bawah ambang kapabilitas sentral (Nussbaum, 2000).

Dalam keluarga ini, *telos* dipahami sebagai ruang keberkembangan, bukan sebagai satu tujuan metafisis tunggal. Martabat menandai klaim yang dimiliki setiap orang untuk menghuni ruang tersebut di atas satu tingkat minimum. Pelanggaran martabat tampak, secara sangat konkret, sebagai perampasan kapabilitas yang lembaga-lembaga berkewajiban untuk memperbaikinya (Nussbaum, 2011).

Kebajikan pendekatan ini jelas. Ia membuat martabat menjadi operasional, mengikatkannya pada kewajiban lembaga, dan menghindari reduksi segala sesuatu ke satu kapasitas utama seperti rasionalitas. Ia juga lebih ramah terhadap pluralisme kultural, karena masyarakat yang berbeda dapat menspesifikasi dan memperkaya daftar tersebut sembari tetap mengafirmasi suatu inti yang dibagi bersama.

2.1.3 Penilaian sementara

Di seberang variasi-variasi ini, pendekatan berbasis kapasitas berbagi satu aksioma krusial: (CA) Martabat mensupervensi atas kepemilikan, atau keanggotaan dalam, suatu jenis yang secara esensial ditentukan oleh kapasitas atau kapabilitas tertentu (Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011).

Dengan kata lain, manusia memiliki martabat karena mereka secara aktual memiliki, atau adalah jenis makhluk yang memiliki, daya-daya atau peluang-peluang yang relevan. Arah penjelasan berjalan dari kapasitas, melalui martabat, menuju kewajiban. Seluruh kisah ini dimaksudkan untuk tetap berada dalam horizon dari apa yang dapat dideskripsikan dan dibenarkan dalam istilah-istilah yang naturalistik atau setidaknya intra-duniawi, sekalipun ketika ia memanfaatkan uraian-uraian normativitas dan identitas praktis yang canggih (Korsgaard, 1996).

Aksioma ini akan penting di kemudian hari. Tepat inilah yang menimbulkan kesulitan ketika kita bergerak ke kasus-kasus sulit dan bertanya apakah martabat manusia dapat sekaligus bersifat melekat dan setara lintas semua manusia, termasuk mereka yang kapasitasnya minimal, belum berkembang, atau secara permanen tidak ada.

2.2 Narasi evolusioner: martabat dan telos sebagai artefak adaptif

Keluarga kedua mendekati martabat dan *telos* melalui narasi evolusioner. Gagasan intinya adalah bahwa norma moral kita, termasuk rasa bahwa beberapa makhluk memiliki status khusus, tidak turun begitu saja dari langit. Ia merupakan hasil dari proses seleksi jangka panjang yang kompleks di mana disposisi psikologis dan praktik sosial tertentu terbukti adaptif (Darwin, 1871; Ruse and Wilson, 1986).

Secara skematis, kisah ini dapat diceritakan sebagai berikut:

- (P1) Manusia adalah hasil dari proses evolusi jangka panjang yang dibentuk oleh tekanan seleksi.
- (P2) Sifat-sifat kognitif, emosional, dan sosial yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi cenderung diseleksi.
- (P3) Norma-norma yang memperlakukan individu tertentu sebagai dilindungi, atau sebagai memiliki kedudukan khusus, dapat menstabilkan kerja sama dan mengurangi konflik destruktif.
- (C1) Oleh karena itu, norma-norma hormat, kepribadian, dan bahkan martabat dapat dipahami sebagai artefak evolusioner (*Ruse and Wilson, 1986*).
- (C2) Sejauh norma-norma ini masih berkontribusi pada keberkembangan dan stabilitas, kita memiliki alasan-turunan tetapi nyata-untuk mengafirmasi dan menyempurnakannya.

Dalam keluarga ini, *telos* ditafsirkan secara fungsional. Jantung “bertujuan” memompa darah; lebah “bertujuan” melakukan penyerbukan dalam pengertian tipis; manusia “bertujuan” melakukan gugus aktivitas dan relasi yang membantu mereka bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan nenek moyang (*Darwin, 1871*). Martabat menjadi perangkat kognitif tingkat tinggi yang menjaga anggota tertentu dari kelompok tetap berada di luar jangkauan bahaya sewenang-wenang dan dengan demikian menopang kerja sama serta kepercayaan jangka panjang.

Pendekatan ini memiliki daya tarik yang jelas. Ia menjanjikan kesatuan antara biologi dan etika, mengempiskan patos metafisis di sekeliling martabat, dan menyarankan cara untuk mengkritik dan memperbarui norma moral dalam terang temuan empiris tentang psikologi dan evolusi sosial manusia. Karya-karya mutakhir menggunakan pertimbangan-pertimbangan evolusioner untuk menantang realisme moral yang kuat dan untuk mempertanyakan apakah klaim moral yang kuat dapat dibenarkan mengingat genealogi mereka (*Street, 2006*).

Pertanyaan yang relevan bagi tujuan kita, bagaimanapun, bukanlah apakah narasi evolusioner dapat menjelaskan bagaimana wacana martabat muncul, melainkan apakah narasi tersebut dapat membenarkan klaim-klaim kuat yang sebenarnya kita ajukan ketika kita mengajukannya.

2.3 Konstruksi kontraktarian: martabat dan telos dari kesepakatan yang adil

Keluarga ketiga meletakkan akar martabat dan *telos* pada kesepakatan yang adil di antara orang-orang yang bebas dan setara. Dalam pandangan ini, yang pada akhirnya penting bukanlah status metafisis yang mendasari atau fungsi evolusioner, melainkan apakah prinsip-prinsip yang menata kehidupan bersama kita dapat dibenarkan dalam istilah-istilah yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh siapa pun. Teori-teori kontraktarian dan kontraktualis menjadikan gagasan ini eksplisit dengan membangun model-model pilihan yang adil atau pembenaran timbal balik (*Rawls, 1971; Rawls, 1993; Scanlon, 1998*).

Skema dasarnya adalah sebagai berikut:

- (P1) Norma dan lembaga adalah sah ketika dapat dibenarkan kepada setiap orang atas dasar alasan yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh siapa pun (*Scanlon, 1998*).

- (P2) Suatu situasi kontraktual yang adil memodelkan pembenaran semacam itu dengan menyetarakan kekuasaan dan informasi, misalnya melalui *veil of ignorance*, diskursus ideal, atau perangkat serupa (Rawls, 1971; Habermas, 1996).
- (P3) Di bawah kondisi tersebut, para agen akan memilih prinsip-prinsip yang memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang bebas dan setara, melindungi kebebasan-kebebasan dasar, dan menjamin peluang yang adil (Rawls, 1971; Rawls, 1993).
- (C) Oleh karena itu, manusia memiliki martabat sebagai pribadi yang bebas dan setara yang harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan dipilih dalam kesepakatan yang adil dan yang dapat bertahan dari pembenaran publik.

Di sini, *telos* tidak diberikan sejak awal sebagai suatu doktrin metafisis substantif. Ia muncul dari struktur pembenaran yang adil itu sendiri. Kehidupan yang layak bagi seorang pribadi adalah kehidupan yang dapat dijalani di bawah lembaga-lembaga yang dapat diendos oleh semua sebagai pribadi yang bebas dan setara, setidaknya dalam kondisi diskursus yang diidealkan (Habermas, 1996). Martabat adalah nama bagi status sebagai pihak yang berhak atas pembenaran semacam itu dan bagi kedudukan yang dimiliki setiap orang sebagai sumber klaim dalam proses pembenaran.

Gambaran ini kuat dalam masyarakat majemuk. Ia menjanjikan perlindungan bagi setiap orang tanpa harus merujuk pada teologi tertentu atau metafisika komprehensif apa pun, dan ia mengintegrasikan martabat dengan nalar publik, deliberasi, dan legitimasi demokratis (Rawls, 1993; Habermas, 1996).

2.4 Ambisi bersama dan kerentanan struktural

Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara mereka, tiga keluarga yang baru saja disurvei berbagi tiga ambisi. Pertama, mereka mencari landasan yang sekuler dan intra-duniawi bagi martabat dan *telos* manusia, suatu landasan yang tidak bergantung pada Sabda otoritatif yang berbicara dari luar alam dan sejarah. Kedua, mereka berupaya mempertahankan unsur-unsur terkuat dari wacana martabat kontemporer: klaim nilai yang melekat, kesetaraan dasar, dan kendala-kendala ketat terhadap perlakuan yang merendahkan (Rawls, 1971; Nussbaum, 2011). Ketiga, mereka bercita-cita untuk cukup swacukup secara arsitektural. Kapasitas, proses evolusioner, atau kontrak seharusnya sudah cukup untuk melakukan kerja peletakan dasar. Logika, yang diasumsikan murni dan netral, kemudian mengadili apakah argumen-argumen di dalam bingkai ini valid.

Untuk keperluan artikel ini, aspirasi bersama mereka dapat ditangkap dalam satu kondisional: (N) Jika martabat dan *telos* dapat diletakkan dasarnya pada kapasitas, evolusi, atau kontrak saja, maka kita dapat mempertahankan klaim moral dan hukum kita yang paling kuat tentang martabat manusia tanpa merujuk pada sumber otoritatif apa pun di luar nalar dan alam manusia.

Langkah berikutnya adalah menguji kondisional ini terhadap apa yang sebenarnya sudah dipresuposisikan oleh praktik martabat saat ini. Sisa argumen dimulai dengan bertanya apakah (N) dapat bertahan ketika berhadapan langsung dengan aksioma-aksioma yang sudah membimbing penggunaan bahasa martabat kita.

3. Aksioma minimal martabat manusia dan kasus-kasus sulit

Jika wacana tentang martabat bersifat moderat, fondasi yang naturalistik dan prosedural mungkin sudah memadai. Namun martabat bukanlah konsep yang moderat. Ketika pengadilan, instrumen internasional, dan gerakan politik mengajukan martabat manusia, mereka biasanya berusaha mengatakan sesuatu yang sangat kuat: bahwa kehidupan tertentu tidak pernah boleh dijadikan tumbal, bahwa perlakuan tertentu secara mutlak dilarang, dan bahwa sejumlah ketimpangan tidak dapat dinormalisasi sekalipun ketimpangan itu efisien atau populer (*United Nations, 1948; Waldron, 2012; Rosen, 2012*). Untuk menguji apakah kapasitas, evolusi, dan kontrak mampu menopang klaim sekuat ini, kita perlu menyingkap apa yang sudah dipresuposisikan oleh wacana martabat, bahkan ketika hal itu tidak diucapkan secara eksplisit.

3.1 Aksioma minimal martabat manusia

Aksioma-aksioma berikut tidak dimaksudkan sebagai teori baru tentang pribadi manusia. Aksioma ini adalah rekonstruksi dari batas minimal komitmen yang tampaknya kita pegang ketika menggunakan bahasa martabat dalam hukum, bioetika, dan kebijakan publik, sebagaimana tercermin dalam teks konstitusional, piagam hak asasi manusia, dan panduan bioetik (*United Nations, 1948; Andorno, 2009*). Aksioma-aksioma tersebut berfungsi sebagai semacam tulang punggung normatif di balik retorika.

- **(A1) Nilai yang melekat.**
Setiap manusia memiliki suatu nilai sebagai manusia yang tidak merupakan fungsi dari kinerja saat ini, nilai ekonomi, pengakuan sosial, atau kegunaan instrumental. Kehilangan pekerjaan, peran, atau seperangkat kemampuan tidak berarti kehilangan nilai. Inilah intuisi di balik seruan bahwa martabat adalah sesuatu yang dimiliki oleh pribadi sebelum dan terlepas dari status sosialnya (*Rosen, 2012*).
- **(A2) Kesetaraan dasar.**
Ada suatu kesetaraan dasar dari nilai ini lintas seluruh manusia yang tidak dapat digugurkan oleh perbedaan bakat, pencapaian, peran sosial, atau rekam jejak moral. Betapapun tidak setaranya kita dalam dimensi lain, kita tidak membentuk hierarki manusia yang lebih dan kurang bermartabat. Inilah gagasan bahwa semua manusia memiliki martabat, bukan bahwa sebagian memiliki derajat lebih tinggi yang melisensikan dominasi (*Waldron, 2012*).
- **(A3) Non-reduksi dan non-instrumentalisasi.**
Manusia tidak boleh direduksi menjadi, atau diperlakukan semata-mata sebagai, instrumen, titik data, atau pembawa fungsi, bahkan ketika reduksi semacam itu akan meningkatkan kebaikan agregat, menstabilkan lembaga, atau melayani mayoritas. Inilah inti dari larangan yang lazim terhadap penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan komodifikasi pribadi dalam hukum hak asasi manusia maupun kode bioetik (*United Nations, 1948; Andorno, 2009*).
- **(A4) Integritas lintas waktu dan kerentanan.**
Nilai yang dilekatkan pada seorang manusia meluas melintasi seluruh rentang kehidupan dan mencakup kondisi kerentanan radikal: sejak masa gestasi, bayi, disabilitas berat, penurunan kognitif, hingga sakit terminal. Menjadi rapuh, bergantung, atau membebani secara biaya tidak menurunkan klaim atas perlakuan yang bermartabat. Aksioma ini sangat menonjol dalam perdebatan tentang disabilitas, perawatan, dan status moral mereka yang secara mendalam bergantung pada orang lain (*Kittay, 1999*).

- **(A5) Koherensi, koreksi diri, dan akuntabilitas.**

Setiap tatanan kelembagaan yang mengklaim menghormati martabat harus:

1. mampu menyatakan apa arti komitmen tersebut dalam bahasa yang dapat diakses publik,
2. memiliki mekanisme untuk mengenali dan mengoreksi pelanggaran dari waktu ke waktu, dan
3. membuka diri terhadap akuntabilitas oleh mereka yang terdampak dan oleh para pengamat kritis, menurut standar yang diakuinya sendiri.

Hal ini tersirat dalam cara pengadilan berbicara tentang martabat sebagai prinsip konstitusional yang dapat diajukan oleh para penggugat dan sebagai standar untuk meninjau kebijakan maupun teknologi.

Aksioma-aksioma ini bukanlah tambahan utopis atas praktik yang ada. Aksioma ini didistilasi dari cara bahasa martabat sudah digunakan ketika pengadilan membatalkan sanksi yang merendahkan, ketika para bioetikus menuntut non-instrumentalisasi dalam riset, dan ketika gerakan sosial mengajukan klaim atas nilai yang belum diakui yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan kebijakan (*Waldron, 2012; Rosen, 2012*). Untuk sisa argumen, aksioma-aksioma ini akan berfungsi sebagai standar minimal: setiap fondasi yang diajukan bagi martabat yang tidak mampu memenuhi A1 hingga A5, terutama dalam kasus-kasus sulit, tidak cukup kuat untuk menopang cara kita sebenarnya menggunakan bahasa martabat.

3.2 Kasus-kasus sulit sebagai probe metodologis

Argumentasi abstrak dapat menyembunyikan banyak ketegangan. Untuk mengangkat ketegangan tersebut ke permukaan, berguna untuk melihat situasi di mana teori dan intuisi moral berada di bawah tekanan. Lima jenis kasus secara khusus mengemuka dalam perdebatan kontemporer tentang martabat, perawatan, dan kerentanan (*Kittay, 1999; Nussbaum, 2000*):

1. **Bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapasitas-kapasitas sentral.**
Bayi baru lahir, bayi anensefalik, dan individu yang, karena kondisi kongenital, tidak akan pernah mencapai agensi rasional atau pilihan otonom.
2. **Gangguan kognitif berat dan demensia lanjut.**
Pribadi yang kapasitasnya telah menurun secara radikal, kadang sampai titik di mana komunikasi timbal-balik mustahil, tetapi klaim mereka atas perawatan dan perlindungan secara intuitif dialami sebagai tidak berkurang oleh banyak pengasuh dan komunitas (*Kittay, 1999*).
3. **Kehidupan yang membebani secara ekonomi.**
Individu yang, dalam istilah ekonomi yang ketat, mengonsumsi sumber daya jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka hasilkan: sebagian orang yang sakit kronis, penyandang disabilitas berat, atau lansia, khususnya dalam sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya.
4. **Kelompok yang dibungkam secara struktural dan tak tampak secara institusional.**
Populasi yang suaranya secara efektif dikeluarkan dari pengambilan keputusan: migran tanpa dokumen, komunitas yang mengungsi di dalam negeri, dan minoritas yang distigmatisasi di bawah rezim otoriter atau majoritarian.

5. Generasi mendatang.

Mereka yang suatu hari akan ada dan kehidupannya akan dibentuk oleh pilihan kita sekarang, tetapi yang saat ini tidak dapat berkontrak, memilih, menggugat, atau memberi sinyal preferensi.

Dalam praktik moral dan hukum sehari-hari, kita enggan mengatakan bahwa kehidupan-kehidupan ini “lebih sedikit” nilainya. Kita cenderung mengafirmasi bahwa:

- mereka memiliki martabat penuh dalam arti A1 dan A2,
- mereka tidak boleh diperlakukan sebagai barang tumbal atau semata-mata instrumen, sejalan dengan A3,
- kerentanan atau ketidakhadiran mereka tidak mengurangi klaim mereka, sebagaimana ditekankan A4, dan
- lembaga-lembaga kita seharusnya menemukan cara untuk mewakili dan melindungi kepentingan mereka, dalam semangat A5.

Kasus-kasus sulit, dengan demikian, bukanlah anomali pinggiran. Kasus-kasus ini adalah probe metodologis. Kasus-kasus ini menunjukkan apakah fondasi yang kita gunakan dapat menopang komitmen paling serius kita, atau apakah komitmen tersebut diam-diam ditinggalkan ketika biayanya tinggi. Karya tentang ketergantungan dan *care ethics* telah lama menegaskan bahwa setiap kajian yang memadai tentang martabat harus melewati zona-zona kerentanan ekstrem ini alih-alih mengasumsikan agen-agen ideal yang independen sebagai paradigma (Kittay, 1999; Nussbaum, 2000). Pendekatan-pendekatan yang mengambil ketergantungan secara serius berargumen bahwa konsep-konsep moral dan politik kita harus berangkat dari fakta bahwa manusia adalah *dependent rational animals* yang hidupnya distrukturkan oleh relasi pengasuhan yang asimetris, bukan dari citra abstrak tentang pelaku pilihan yang terisolasi (MacIntyre, 1999; Tronto, 1993). Kajian disabilitas pun menantang kerangka yang memperlakukan mereka dengan hambatan signifikan sebagai kasus uji pinggiran alih-alih figur sentral untuk menalar tentang kesetaraan dan hak (Shakespeare, 2006). Jika fondasi yang berbasis kapasitas, evolusi, atau kontrak tidak dapat menangani kasus-kasus ini tanpa menurunkan status mereka yang paling rentan, maka fondasi tersebut tidak cukup kuat untuk menopang cara kita sebenarnya menggunakan bahasa martabat.

3.3 Pendekatan berbasis kapasitas di bawah aksioma

Dalam pembacaan ketat, pendekatan berbasis kapasitas menyatakan bahwa martabat diikatkan pada kepemilikan aktual atas kapasitas atau kapabilitas tertentu. Di bawah pembacaan semacam itu, pola berikut segera muncul ketika kita menghadapi lima kasus sulit:

- Bayi, mereka yang dalam koma permanen, dan sebagian pribadi dengan gangguan berat tidak memiliki kapasitas yang relevan dalam bentuk yang berkembang.
- Generasi mendatang belum memiliki kapasitas apa pun.
- Kelompok tertentu yang dibungkam secara struktural memiliki kapasitas, tetapi tidak memiliki kondisi yang adil untuk melaksanakan atau mengekspresikannya.

Ketegangan logis dapat diekspresikan secara sederhana:

- (P1) Martabat mensupervensi atas kepemilikan aktual kapasitas C.

- (P2) Sejumlah manusia tidak memiliki C atau tidak akan pernah mengembangkan C.
- (C) Sejumlah manusia tidak memiliki martabat, atau memiliki martabat dalam derajat yang lebih rendah.

Kesimpulan ini berkonflik secara langsung dengan A1, A2, dan A4. Ia menciptakan dua kelas manusia tepat di titik di mana wacana martabat bersikeras bahwa pengklasifikasian orang berdasarkan nilai adalah tidak sah. Ia juga bertentangan dengan intuisi-yang sentral dalam *care ethics*-bahwa ketergantungan yang mendalam bukan melemahkan, melainkan justru menajamkan klaim pihak yang bergantung atas komunitas moral (Kittay, 1999).

Untuk menghindari implikasi eksklusif ini, para penganut teori kapasitas sering merujuk pada potensi atau keanggotaan jenis. Mereka menyatakan, kurang lebih, bahwa sekalipun X secara individual tidak memanifestasikan kapasitas C saat ini, X termasuk ke dalam suatu jenis yang anggota normalnya memiliki C, dan keanggotaan jenis inilah, bukan kinerja aktual, yang membawa martabat (Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011). Namun langkah ini diam-diam mengubah cerita. Martabat tidak lagi berakar langsung pada kapasitas aktual individu. Martabat kini bertumpu pada apa yang “diperuntukkan” bagi jenis makhluk ini menurut hakikatnya. Artinya, pendekatan tersebut bersandar pada pemahaman teleologis tentang manusia: ada suatu cara hidup manusia yang memang seharusnya berjalan, dan status “seharusnya” inilah yang melakukan kerja normatif tingkat pertama.

Pada titik ini, pendekatan berbasis kapasitas mendekati wilayah yang biasanya ingin dihindarinya. Pendekatan tersebut mulai bergantung pada pandangan teleologis tentang hakikat dan tujuan manusia yang tidak disuplai oleh deskripsi naturalistik murni tentang kapasitas. Dengan kata lain, pendekatan ini mulai berbicara, tanpa menyatakannya secara eksplisit, seolah-olah sudah ada suatu kata tentang apa itu manusia dan untuk apa ia ada yang telah berlaku dan mengikat.

Dalam kaitannya dengan A5, kinerja pendekatan berbasis kapasitas bersifat tidak merata. Pendekatan ini dapat mengilhami lembaga yang melacak dan mendukung pengembangan kapasitas dan kapabilitas kunci, dan ia memberi isi pada hak-hak sosial dan ekonomi yang dipahami sebagai ambang kapabilitas (Nussbaum, 2000). Namun jika martabat secara konseptual diikatkan pada kapasitas, lembaga-lembaga mungkin tergoda, di bawah tekanan, untuk memperlakukan mereka yang kapasitasnya minimal atau sangat membebani sebagai kandidat untuk perlindungan yang lebih rendah. Ketika itu terjadi, A3 dan A4 dikhianati dalam praktik sekalipun tetap diakui dalam retorika resmi.

3.4 Narasi evolusioner di bawah aksioma

Narasi evolusioner memiliki bentuk yang berbeda. Narasi ini biasanya tidak mengecualikan siapa pun dari pertimbangan moral sebagai soal desain konseptual. Kesulitannya terletak pada upaya menyelaraskan penjelasan fungsional yang kontingen dengan klaim normatif yang tak bersyarat.

Dari perspektif evolusioner, sepenuhnya dapat dimengerti bahwa suatu komunitas di bawah tekanan sumber daya parah akan mengadopsi norma-norma yang memprioritaskan atau mengorbankan anggota yang sangat mahal untuk dipertahankan dan kecil kemungkinannya untuk berkontribusi terhadap kelangsungan hidup. Hal ini tidak berarti bahwa norma-norma tersebut tak terelakkan atau dapat diterima secara moral. Hal itu hanya berarti bahwa, dalam

istilah evolusioner, norma seperti itu tidaklah incoherent. Studi-studi dalam etika evolusioner secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana disposisi terhadap keadilan, resiprositas, atau altruisme terbatas dapat muncul di bawah tekanan seleksi tanpa mengasumsikan adanya kebenaran moral independen (*Ruse and Wilson, 1986; Street, 2006*).

Namun ketika kita menyatakan bahwa, secara prinsip, salah untuk meninggalkan bayi dengan disabilitas berat, memperlakukan migran tanpa dokumen sebagai barang buangan, atau mengabaikan kepentingan generasi mendatang demi keuntungan kini, kita tidak sedang mengklaim bahwa praktik-praktik tersebut maladaptif atau tidak menstabilkan. Kita sedang mengatakan bahwa praktik-praktik itu melanggar suatu status yang tak dapat diganggu gugat, bahkan jika praktik tersebut dalam skenario tertentu dapat meningkatkan *fitness* atau stabilitas.

Secara skematis:

- Penjelasan evolusioner menghasilkan klaim-klaim berbentuk:
(E) Dalam lingkungan E, strategi S cenderung mengungguli strategi S' dalam hal *fitness* atau stabilitas.
- Aksioma martabat menuntut klaim-klaim berbentuk:
(D) Untuk lingkungan apa pun E, jika strategi S melanggar nilai yang melekat dan kesetaraan dasar, maka S tidak dapat dibenarkan, bahkan jika S mengungguli S'.

Ada celah yang jelas antara (E) dan (D). Seberapa jauh pun elaborasi evolusioner, elaborasi itu tidak akan menghasilkan (D) tanpa mengimpor premis normatif tentang apa yang tidak boleh dilakukan terhadap manusia, apa pun imbal hasil adaptifnya. Kasus-kasus sulit membuat celah ini mencolok. Secara lokal, dalam pengertian evolusioner tipis, bisa saja menguntungkan bagi suatu kelompok di bawah tekanan untuk “membuang” anggota yang membebani. Untuk menyatakan bahwa strategi semacam itu secara moral terlarang berarti keluar dari register evolusioner dan memasuki horizon normatif yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan A5, kerangka evolusioner dapat memodelkan umpan balik dan revisi norma: kelompok belajar dari konsekuensi jangka panjang praktik mereka dan menyesuaikan norma. Namun metrik untuk “lebih baik” tetap fungsional: stabilitas lebih besar, kohesi, atau keberhasilan reproduksi lebih tinggi. Tidak ada tempat yang secara inheren dialokasikan bagi suatu kata yang dapat menyatakan bahwa satu pola secara fundamental keliru karena apa dan siapa manusia itu, sekalipun pola tersebut adaptif secara lokal. Untuk sampai pada penilaian semacam itu berarti sudah bergerak melampaui kisah evolusioner murni.

3.5 Konstruksi kontraktarian di bawah aksioma

Konstruksi kontraktarian, pada pandangan pertama, tampak lebih menjanjikan. Konstruksi ini dirancang untuk mengekspresikan kesetaraan dan menghindari dominasi dengan menuntut bahwa prinsip-prinsip harus dapat dibenarkan kepada setiap orang sebagai pribadi yang bebas dan setara (*Rawls, 1971; Scanlon, 1998*). Namun ketika kita menghadirkan kasus-kasus sulit dan aksioma A1 hingga A5, pola yang sudah dikenal kembali muncul.

Dalam kontrak sosial, martabat biasanya dilekatkan pada pribadi sebagai pihak dalam kesepakatan yang adil atau sebagai mereka yang kepadanya alasan pembenaran harus ditujukan. Bayi, pribadi dengan gangguan kognitif yang sangat dalam, dan generasi mendatang bukanlah pihak dalam arti harfiah. Inklusi mereka bergantung pada langkah tambahan:

memberi mereka wakil, membangun perlindungan atas mereka ke dalam apa yang akan dipilih oleh para kontraktor rasional di balik *veil of ignorance*, atau merujuk pada intuisi moral terpisah tentang siapa yang harus diperhitungkan (Rawls, 1971; Habermas, 1996).

Dalam setiap kasus, kontrak mempresuposisikan, bukan menghasilkan, suatu penilaian terdahulu bahwa makhluk-makhluk ini berhak atas pembenaran sebagai soal prinsip. Penilaian ini secara fungsional ekuivalen dengan A1 dan A2. Penilaian tersebut menyatakan bahwa manusia tertentu tidak dapat dikeluarkan dari kedudukan moral sekalipun mereka tidak dapat memenuhi kriteria formal sebagai “pihak” kontrak. Ini bukan kelemahan kontraktarianisme sebagai suatu pendekatan; ini adalah tanda bahwa komitmen terdalamnya bersandar pada latar belakang yang lebih tebal tentang siapa manusia itu dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Kesulitan kedua berkaitan dengan A3. Misalkan ada suatu titik keseimbangan yang stabil di mana semua kontraktor aktual bersedia menerima prinsip-prinsip yang mengizinkan perlakuan keras terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan, sepanjang kepentingan mereka sendiri terjamin. Dari sudut pandang prosedural murni, keseimbangan semacam itu bisa sepenuhnya koheren. Untuk menolaknya sebagai tidak adil, teori harus merujuk pada satu kendala substantif: cara-cara tertentu dalam memperlakukan manusia melampaui batas, apa pun yang bersedia diterima oleh para kontraktor, bahkan dalam kondisi idealisasi (Scanlon, 1998; Habermas, 1996). Kendala ini tampak sangat mirip dengan suatu standar vertikal, bukan sekadar produk kontrak.

Akhirnya, dalam kaitannya dengan A5, teori kontraktarian menyediakan perangkat kaya untuk publisitas, pembenaran, dan revisibilitas. Yang tetap menjadi tantangan adalah posisi mereka yang belum atau tidak lagi dapat menjadi pihak, serta generasi mendatang yang belum dapat mengajukan klaim. Kewajiban kepada mereka pada akhirnya melampaui logika keterbebenaran mutual di antara agen-agen yang ada dan sekali lagi menunjuk pada suatu kata atau horizon terdahulu di dalamnya makhluk-makhluk tertentu harus dipandang sebagai pemegang klaim, terlepas dari status kontraktual mereka.

3.6 Kesimpulan sementara

Gambaran yang muncul mencolok seragam. Pendekatan berbasis kapasitas entah mengecualikan kasus-kasus sulit atau bertransformasi menjadi teori teleologis. Narasi evolusioner dapat menjelaskan bagaimana norma martabat muncul dan menstabil, tetapi tidak dapat, sendirian, menopang daya tak bersyaratnya. Konstruksi kontraktarian mengartikulasikan kesetaraan dan pembenaran, namun diam-diam bersandar pada penilaian terdahulu tentang siapa yang termasuk dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Kesimpulannya bukan bahwa pendekatan-pendekatan ini tak berguna. Pendekatan tersebut menangkap kebenaran penting tentang arti daya manusia, sejarah norma moral, dan sentralitas pembenaran dalam hukum serta politik modern. Namun sebagai fondasi bagi klaim martabat yang paling kuat yang kita ajukan, pendekatan-pendekatan itu tidak lengkap. Pendekatan-pendekatan tersebut hidup, sering kali tanpa disadari, dari suatu horizon normatif yang lebih tebal yang tidak mereka artikulasikan.

Gambaran yang muncul bukanlah mosaik dari kesulitan lokal kecil. Yang tampak adalah kontur dari suatu ketergantungan bersama pada horizon normatif yang lebih tebal, yang tidak ingin

dinamai oleh salah satu pendekatan ini. Pertanyaan mendesak, karenanya, adalah: jenis sumber seperti apa yang sudah harus dipresuposisikan agar aksioma A1 hingga A5 masuk akal sama sekali, dan bagaimana sumber tersebut dapat dihadirkan tanpa meninggalkan ketelitian logis. Dalam kelanjutan argumen, saya menamai sumber ini sebagai Sabda dan mulai menggariskan arsitektur di dalamnya Sabda dapat dihadapi.

4. Ketergantungan tersembunyi pada sumber normatif yang lebih tebal

Tiga keluarga pendekatan yang baru saja kita telaah tidak gagal di semua titik. Pendekatan-pendekatan tersebut menangkap wawasan yang sungguh-sungguh. Teori berbasis kapasitas mengingatkan kita bahwa daya pemahaman, pilihan, dan kehidupan relasional memang penting. Pendekatan evolusioner menjelaskan mengapa kepekaan moral tertentu muncul dan menjadi stabil. Pendekatan kontraktarian mendisiplinkan intuisi kita dengan menanyakan apa yang dapat dibenarkan kepada setiap orang. Masalahnya bukan bahwa kerangka-kerangka ini keliru dalam segala hal yang mereka katakan. Masalahnya adalah bahwa kerangka-kerangka tersebut diam-diam bersandar pada sesuatu yang secara resmi mereka tolak untuk memainkannya.

Alih-alih memandang hal ini sebagai sesuatu yang memalukan yang harus ditutupi dengan penyempurnaan teknis, kita dapat mengambilnya sebagai sebuah petunjuk. Kebutuhan berulang untuk meminjam dari horizon normatif yang lebih tebal mengisyaratkan adanya celah arsitektural yang mendasar, suatu lapisan yang hilang dalam gambaran tentang bagaimana martabat dan *telos* berlandaskan. Pertanyaannya bukan apakah kapasitas, evolusi, dan kontrak dapat “ditambal”, melainkan jenis sumber apa yang sudah mereka presuposisikan ketika mencoba untuk setia pada komitmen martabat kita yang paling kuat.

4.1 Dari tambalan-tambalan terpisah menuju diagnosis yang terpadu

Kita dapat melihat polanya dengan lebih jelas dengan menyusun berdampingan manuver-manuver perbaikan yang khas.

Pendekatan berbasis kapasitas, ketika didesak soal bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapasitas-kapasitas sentral, bergeser dari kinerja aktual menuju potensi atau keanggotaan jenis. Pendekatan ini mengatakan, kurang lebih, bahwa inilah jenis makhluk yang diarahkan menuju kehidupan rasional, sekalipun ia tidak akan pernah mewujudkannya. Itu adalah klaim teleologis. Klaim tersebut memperlakukan manusia sebagai memiliki orientasi intrinsik, suatu “demi apa”, yang bukan sekadar ringkasan dari fungsi-fungsi aktual.

Narasi evolusioner, ketika berhadapan dengan praktik-praktik yang adaptif tetapi secara moral menjijikkan, tidak berhenti pada deskripsi. Narasi itu menyatakan bahwa sekalipun praktik semacam itu mungkin menguntungkan secara lokal, praktik tersebut tetap keliru. Penilaian ini tetap tidak bersumber dari *fitness* evolusioner. Penilaian tersebut berasal dari suatu penghakiman bahwa ada cara-cara memperlakukan pribadi yang sekadar tidak diizinkan, apa pun yang dikatakan kalkulus adaptif.

Konstruksi kontraktarian, ketika berhadapan dengan kemungkinan bahwa suatu tatanan yang stabil dan konsensual mungkin merendahkan sebagian anggotanya, merespons dengan menegaskan bahwa sejumlah makhluk harus diperlakukan sebagai pembawa klaim sekalipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kontrak dengan syarat yang setara. Sekali lagi, *must*

ini tidak diproduksi oleh kontrak itu sendiri. Ia mengekspresikan keyakinan terdahulu tentang siapa yang termasuk dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Di seluruh kasus ini, gerak dasarnya serupa. Setiap teori bergerak dari kisah dasar resmi miliknyakapasitas, evolusi, atau kontrak-menuju sesuatu yang lain:

- suatu pandangan tentang apa itu manusia dan untuk apa mereka ada,
- suatu rasa bahwa praktik tertentu keliru pada dirinya sendiri,
- suatu keyakinan bahwa sejumlah makhluk tidak dapat dikeluarkan dari kedudukan moral.

“Hal-hal lain” ini jarang dikembangkan. Hal-hal tersebut muncul sebagai isyarat sepiintas, seolah-olah mereka hanya premis tambahan kecil. Namun peran logisnya jauh dari kecil. Justru hal itu yang memungkinkan teori berpura-pura dapat menopang aksioma A1 hingga A5 semata-mata di atas dasar yang naturalistis dan prosedural.

4.2 Membuat premis implisit menjadi eksplisit

Kini kita dapat menyatakan situasinya secara lebih langsung. Ketika teori-teori kontemporer bersikeras atas nilai yang melekat, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan koreksi diri yang akuntabel, teori-teori tersebut secara implisit berkomitmen pada sedikitnya tiga klaim.

Pertama, nilai yang “diberikan”. Manusia memiliki suatu nilai yang *diberikan* alih-alih dikonstruksi. Nilai ini tidak diproduksi oleh kapasitas, kontrak, atau sejarah evolusioner, sekalipun faktor-faktor tersebut membentuk bagaimana nilai itu dikenali dan dilindungi.

Kedua, kendala yang tidak dapat dinegosiasikan. Ada cara-cara memperlakukan manusia yang dilarang secara prinsip, sekalipun cara-cara itu fungsional, stabil, atau disukai oleh mayoritas. Dengan kata lain, ada suatu standar benar dan salah yang tidak dapat direduksi menjadi ekuilibrium kepentingan atau *fitness*.

Ketiga, prioritas atas pengakuan. Pengakuan, kesepakatan, dan status kelembagaan tidak menciptakan martabat. Hal-hal itu menjawab martabat. Suatu tatanan hukum karena itu dapat dinilai sebagai tidak adil, bukan sekadar tidak stabil, ketika tatanan tersebut secara sistematis salah mengenali nilai manusia.

Jika digabungkan, klaim-klaim ini menggambarkan suatu sumber norm dan *telos* dengan tiga ciri. Sumber ini memiliki prioritas atas kapasitas, sejarah, dan kesepakatan manusia. Sumber ini memiliki otoritas untuk mengikat pelaku dan lembaga bahkan berhadapan dengan kepentingan mereka sendiri. Sumber ini dapat diartikulasikan, dalam arti dapat diucapkan, ditafsirkan, dan dijadikan rujukan kritis.

Sebutlah ini sebagai *tier* yang hilang, *tier* di atas kapasitas, evolusi, dan kontrak yang membuat wacana martabat kita yang paling kuat menjadi dapat dipahami. Selama *tier* ini tetap implisit, teori-teori yang naturalistis dan prosedural akan berayun antara kesimpulan yang terlalu tidak ambisius dan retorika yang terlalu ambisius. Teori-teori tersebut akan enten merendahkan martabat agar pas dengan sumber daya yang dimiliki, atau melontarkan klaim yang tidak dapat

mereka pertahankan tanpa menyelundupkan persis jenis sumber normatif yang ingin mereka keluarkan.

4.3 Melampaui “nilai bersama” dan “kemanusiaan tipis”

Pada titik ini, mungkin menggoda untuk mengatakan bahwa *tier* yang hilang itu tidak lebih dari nilai-nilai bersama atau gagasan “kemanusiaan” yang tipis. Respons semacam itu, bagaimanapun, meremehkan kekuatan aksioma A1 hingga A4. Nilai-nilai bersama menjelaskan konvergensi dalam praktik; nilai-nilai tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan klaim bahwa sejumlah praktik keliru sekalipun setiap orang mendukungnya. Gagasan kemanusiaan yang tipis cenderung runtuh kembali ke kapasitas, keanggotaan spesies, atau pengakuan sosial, dan kita telah melihat betapa rapuhnya semua itu dalam kasus-kasus sulit.

Jenis sumber yang dapat memikul beban A1 hingga A4 harus memiliki profil yang lebih kuat. Sumber tersebut harus berbicara tentang seluruh manusia sebagai manusia, bukan sekadar anggota kelompok tertentu. Sumber tersebut harus berlaku dengan daya non-kontingen, sehingga putusan-utusannya tidak sekadar mengikuti keuntungan lokal. Sumber tersebut harus membawa orientasi, dalam arti tidak hanya menyatakan bahwa manusia itu penting, tetapi juga untuk apa manusia itu ada. Sumber tersebut harus mampu menghakimi bahkan tatanan yang mapan dan diterima luas.

Secara historis, ketika gerakan melawan perbudakan, kolonialisme, atau rasisme sistemik mengajukan seruan martabat, mereka berbicara seakan-akan terdapat suatu kata tentang manusia yang telah dikhianati oleh tatanan yang ada. Gerakan-gerakan tersebut tidak sekadar mengatakan bahwa kini kita lebih menyukai norma-norma yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan dulu selalu keliru, bahkan ketika hukum dan kebiasaan menyatakan sebaliknya. Itulah nada suatu kata yang memberi norm dan *telos*, bukan nada konsensus yang berubah-ubah.

4.4 Menamai sumber tersebut: *Sabda*

Argumen sejauh ini bersifat struktural. Argumen tersebut belum mengikat kita pada tradisi keagamaan atau doktrin tertentu. Argumen tersebut hanya menampilkan kontur sumber yang sudah dipresuposisikan oleh wacana martabat kontemporer.

Pada titik ini, sebuah nama dapat diajukan bagi sumber ini:

Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*.

Sabda di sini tidak berarti satu kalimat tunggal atau satu teks tunggal. Sabda menunjuk pada suatu modus pewahyuan, suatu “berbicara” yang tidak sekadar menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi menyatakan bagaimana keadaan seharusnya dan untuk apa keadaan tersebut. Sabda bersifat revelatoris dalam arti bahwa Sabda menyingkapkan sesuatu yang tidak tersedia dari kapasitas, sejarah evolusioner, atau kontrak semata, yakni bahwa manusia memiliki nilai yang diberikan, bahwa sejumlah perlakuan secara mutlak dilarang, dan bahwa terdapat suatu tujuan bagi kehidupan manusia yang tidak habis oleh peran-peran fungsional.

Yang penting, Sabda tidak diperkenalkan sebagai sisipan dogmatis sewenang-wenang ke dalam ruang yang sebelumnya netral. Sabda adalah penamaan eksplisit atas premis yang sudah diandalkan, secara fragmentaris dan tak diperiksa, oleh teori-teori kapasitas, evolusi, dan kontrak. Namun begitu Sabda dinamai, tugas lanjutan muncul. Klaim yang diajukan atas nama Sabda sendiri dapat diselewengkan, diinstrumentalisasi, atau dikapling oleh kuasa. Karena itu Sabda harus ditanamkan dalam suatu arsitektur yang sekaligus menghormati otoritasnya dan menundukkan tafsir-tafsir konkret atasnya pada pengujian yang disiplin.

Itulah peran The Cohesive Tetrad, yang akan kita tuju setelah membahas satu hambatan lagi, yakni keyakinan luas bahwa sekalipun moralitas membutuhkan Sabda, logika murni tidak.

5. Batas-diri logika murni dan prioritas epistemik Sabda

Sampai titik ini, tekanan terhadap fondasi yang naturalistik dan prosedural terutama datang dari sisi martabat dan *telos*. Kapasitas, evolusi, dan kontrak tidak dapat, secara mandiri, menopang aksioma A1 hingga A5 tanpa bersandar pada sumber normatif yang lebih tebal. Setelah Sabda dinamai sebagai sumber tersebut, muncul satu keberatan lanjutan. Sekalipun moralitas membutuhkan sesuatu seperti Sabda, kata sang penyanggah, logika tidak. Logika seharusnya merupakan suatu kegiatan formal yang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Logika mungkin membutuhkan aksioma, tetapi aksioma-aksioma itu sekadar “diberikan” di dalam sistem; aksioma tersebut tidak bergantung pada kata eksternal apa pun tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada.

Dalam bagian ini, saya berargumen bahwa keyakinan akan kecukupan diri logika murni tersebut keliru tempat. Tujuannya bukan untuk merongrong logika atau menyangkal keniscayaannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa bahkan logika, ketika sungguh-sungguh dipahami sebagai aktivitas makhluk yang bernalar dan peduli pada kebenaran dan koherensi, bergantung pada horizon norm dan *telos* yang mendahuluinya. Horizon inilah yang persis hendak dinamai oleh Sabda.

5.1 Logika tidak dapat membenarkan aksiomanya sendiri

Setiap sistem logika berawal dari suatu titik. Sistem tersebut memiliki hukum atau aksioma dasar, kaidah-kaidah inferensi, dan asumsi-asumsi latar tentang makna. Di dalam suatu sistem tertentu, banyak hal dapat dilakukan. Kita dapat membuktikan teorema, menurunkan konsekuensi, dan menunjukkan bahwa pola-pola inferensi tertentu itu valid. Yang tidak dapat dilakukan sistem, secara mandiri, adalah membenarkan titik pijakannya sendiri tanpa bersikap melingkar.

Jika kita bertanya mengapa kita harus menerima, misalnya, prinsip non-kontradiksi atau suatu kaidah seperti *modus ponens*, beberapa jenis jawaban tersedia. Kita dapat mengatakan bahwa prinsip-prinsip ini bersifat swabukti, bahwa prinsip-prinsip tersebut secara pragmatis tak tergantikan, bahwa prinsip-prinsip ini tertanam dalam konsep kita tentang asersi, atau bahwa prinsip-prinsip ini dibenarkan oleh keberhasilannya dalam mengorganisasi praktik ilmiah. Tidak satu pun dari jawaban ini merupakan derivasi yang sepenuhnya bersifat logis. Masing-masing merujuk pada sesuatu di luar relasi konsekuensi formal: pada intuisi, pada praktik, pada makna, atau pada keberhasilan empiris.

Hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tajam. Di dalam suatu logika tertentu *L*, kita tidak dapat membuktikan bahwa *L* itu “benar” tanpa mempresuposisikan suatu standar kebenaran yang setidaknya sama kuatnya dengan *L*. Upaya membuktikan keandalan *L* dengan menggunakan *L* semata hanya akan berputar pada ekornya sendiri. Beralih ke logika lain *L'* hanya mengulang pola yang sama pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam pengertian ini, logika bersifat parasit pada komitmen-komitmen ekstra-logis tentang apa yang dianggap sebagai alasan yang baik, kontradiksi yang sejati, atau representasi realitas yang berhasil.

Ini tidak berarti bahwa “apa saja boleh”. Tentu ada argumen yang lebih baik dan yang lebih buruk untuk mengadopsi satu kerangka logis ketimbang yang lain. Tetapi hal ini berarti bahwa otoritas logika sebagai logika tidak bersifat swaberlandasan. Otoritas tersebut membutuhkan horizon normatif yang lebih luas yang menyatakan mengapa cara-cara berinferensi ini, dan bukan yang lain, bersifat mengikat bagi makhluk seperti kita.

5.2 Logika tidak dapat menghasilkan “ought” epistemik

Batas kedua menyangkut normativitas. Logika menggambarkan transisi yang valid dari premis ke konklusi. Jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga harus benar. Namun langkah dari kondisi ini menuju klaim bahwa kita *seharusnya* peduli pada transisi semacam itu bukanlah, pada dirinya sendiri, sebuah potongan logika. Itu adalah klaim epistemik dan, dalam arti luas, etik.

Pertimbangkan inferensi sederhana: dari “semua manusia itu fana” dan “Sokrates adalah manusia” menuju “Sokrates itu fana”. Logika memberi tahu kita bahwa kalimat ketiga merupakan konsekuensi dari dua kalimat pertama. Logika tidak memberi tahu kita bahwa kita *wajib* mempercayai konklusinya, atau bahwa kita bersalah jika kita bersikukuh mengabaikannya. Untuk mengatakan bahwa kita harus menyelaraskan keyakinan dengan konsekuensi yang valid, atau bahwa tidak rasional untuk menegaskan premis sambil menyangkal konklusi, berarti kita sudah mengacu pada suatu standar tentang baik dan buruk dalam mempercayai.

Perdebatan tentang normativitas logika menyatakan poin ini dengan berbagai cara teknis, tetapi intuisi dasarnya lurus. Konsekuensi logis memiliki semacam kekuatan mengikat bagi pelaku yang memandang dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada kebenaran. Kekuatan mengikat ini tidak diciptakan oleh relasi formal antar kalimat. Kekuatan itu berasal dari fakta bahwa kita memandang diri berada di bawah kewajiban untuk merespons secara semestinya terhadap relasi-relasi tersebut jika kita peduli untuk memperoleh kebenaran.

Sekali lagi, ini bukan alasan untuk mencurigai logika. Ini adalah alasan untuk melihat bahwa logika mempresuposisikan suatu “ought” epistemik yang tidak dihasilkannya sendiri. Menjadi pelaku bernalar sama sekali, apalagi pelaku bernalar yang baik, berarti menempatkan diri di bawah norma-norma mempercayai, berinferensi, dan merevisi yang tidak dapat direduksi menjadi bentuk kaidah formal. Keputusan untuk memperlakukan konsekuensi yang valid sebagai sesuatu yang mengikat bukanlah teorema. Keputusan itu adalah komitmen tentang jenis makhluk seperti apa kita ini dan corak sikap seperti apa terhadap kebenaran yang dipanggil untuk kita adopsi.

5.3 Logika buta terhadap telos dan isi

Batas ketiga menyangkut *telos*. Logika bekerja pada tataran bentuk. Logika menyatakan bahwa jika premis-premis dengan bentuk tertentu itu benar, maka konklusi dengan bentuk terkait juga harus benar. Yang tidak dilakukan logika adalah mengevaluasi kualitas moral atau teleologis dari isi tersebut. Inferensi-inferensi yang valid dapat berangkat dari premis yang sangat tidak adil menuju konklusi yang sangat tidak adil tanpa pelanggaran terhadap hukum logika.

Kebutaan terhadap isi ini sekaligus kekuatan dan bahaya. Ia merupakan kekuatan karena memungkinkan logika digunakan lintas domain. Pola inferensi yang sama dapat diterapkan dalam matematika, fisika, hukum, dan penalaran sehari-hari. Ia merupakan bahaya karena dapat memberikan kesan palsu tentang netralitas moral terhadap sistem-sistem yang, sesungguhnya, sarat dengan asumsi-asumsi yang bernilai.

Dalam konteks kecerdasan buatan kontemporer, bahaya ini tampak sangat tajam. Sistem *machine learning* dan bentuk-bentuk penalaran terotomatisasi lainnya, pada dasarnya, adalah mesin ekstraksi pola dan inferensi skala besar. Sistem-sistem ini menerima masukan, menerapkan kaidah atau model yang dipelajari, dan menghasilkan keluaran yang dapat berdampak mendalam pada kehidupan manusia. Logika yang bekerja di dalam sistem-sistem ini, baik simbolik maupun statistik, tidak dengan sendirinya membedakan *telos*. Logika dapat digunakan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan kejahatan, menargetkan iklan, atau mengalokasikan manfaat kesejahteraan, bergantung pada fungsi objektif yang diberikan.

Jika objektifnya sendiri secara moral terdistorsi, fakta bahwa sistem tersebut bernalar dengan benar dari masukan menuju keluaran tidaklah menenteramkan. Sebaliknya, hal itu dapat memperbesar ketidakadilan. Sistem yang berinferensi tanpa cela dari data bias menuju keputusan bias justru lebih berbahaya, bukan kurang, karena membungkus kerusakannya dengan aura ketepatan teknis.

Inilah wajah praktis dari kebutaan isi logika. Validitas logis kompatibel dengan kegagalan moral yang mendalam. Untuk membedakan antara penggunaan kekuatan logis yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima, kita membutuhkan kriteria yang tidak disediakan oleh logika semata. Kita memerlukan standar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikejar, tentang siapa yang boleh dan tidak boleh diperlakukan dengan cara tertentu, dan tentang untuk apa kehidupan manusia itu ada.

5.4 Logika di bawah Sabda, bukan melawan Sabda

Jika logika tidak dapat membenarkan aksiomanya sendiri tanpa sikap melingkar, tidak dapat menghasilkan “*ought*” epistemik yang membuat validitas menjadi mengikat, dan tidak dapat melihat *telos* atau kualitas moral dari isi yang dihubungkannya, maka otoritasnya dalam arti tertentu bersifat turunan. Logika tak tergantikan untuk mengartikulasikan, menguji, dan menjernihkan klaim, termasuk klaim tentang martabat dan tentang Sabda. Namun keputusan untuk memperlakukan logika sebagai sesuatu yang mengikat, dan penentuan tujuan-tujuan apa yang selayaknya dilayani oleh kekuatan inferensial, sudah mempresuposisikan horizon norm dan tujuan yang mendahuluinya.

Sabda menamai horizon itu pada lapisan terdalam. Sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, Sabda dapat dipahami sebagai sumber yang:

- memanggil manusia untuk peduli pada kebenaran dan bukan pada kepalsuan,
- memerintahkan koherensi antara apa yang dikatakan, apa yang dipercayai, dan apa yang dilakukan,
- menyatakan bahwa sejumlah cara memperlakukan pribadi dilarang secara prinsip,
- mengarahkan *telos* penalaran kepada keadilan dan perlindungan bagi yang rentan, alih-alih kepada dominasi atau efisiensi semata.

Dipahami demikian, Sabda tidak bersaing dengan logika pada tataran yang sama. Sabda tidak meminta kita meninggalkan inferensi yang valid atau mengabaikan kontradiksi. Sabda menyatakan mengapa kita harus memperlakukan inferensi yang valid sebagai sesuatu yang mengikat sejak awal, dan bagaimana kita harus mengevaluasi penggunaan kekuatan inferensial tersebut. Sabda mengadili baik premis-premis maupun tujuan-tujuan kita, dan karenanya juga mengadili sistem penalaran yang menghubungkan keduanya.

Hal ini membawa dua implikasi bagi arsitektur tata kelola kebenaran. Pertama, Sabda harus memiliki prioritas epistemik atas logika murni. Ketika terdapat konflik antara inferensi yang secara teknis benar dan tuntutan nilai yang melekat, kesetaraan dasar, dan non-instrumentalisasi sebagaimana diwahyukan oleh Sabda, maka yang terakhir inilah yang harus diutamakan. Kedua, Sabda harus dibawa ke dalam relasi yang disiplin dengan logika, bukan dibiarkan sebagai latar yang kabur. Sabda harus diartikulasikan dengan cara yang dapat dinilai koherensinya, harus didengar dalam pengalaman mereka yang terdampak oleh sistem-sistem kita, dan harus dapat dilacak dalam konsekuensi moral jangka panjang dari keputusan-keputusan kita.

Langkah berikutnya, karena itu, bersifat arsitektural. Jika Sabda hendak mendasari martabat dan *telos* manusia tanpa berubah menjadi alat kekuasaan semena-mena, Sabda harus ditanamkan dalam suatu struktur yang menjaga logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter moral, dan jejak historis tetap berada dalam keterhubungan yang hidup. Itulah tugas The Cohesive Tetrad.

6. Sabda dalam The Cohesive Tetrad: sebuah arsitektur bagi martabat dan telos

Begitu Sabda tidak lagi dibiarkan berada dalam bayang-bayang, tetapi dinamai sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, sebuah kekhawatiran yang sudah dikenal segera muncul. Kata-kata yang mengklaim otoritas dapat dipersenjatai. Dalam sejarah hukum, politik, dan agama, rujukan kepada suatu Sabda yang lebih tinggi kadang justru melegitimasi jenis-jenis perendahan dan eksklusi yang hendak ditentang oleh bahasa martabat. Jika Sabda hendak sungguh-sungguh bekerja sebagai dasar bagi martabat manusia dan *telos*, Sabda tidak dapat sekadar ditempatkan di atas tumpuan dan diisolasi dari kritik. Sabda membutuhkan sebuah arsitektur yang menghormati keutamaannya sekaligus menundukkan klaim-klaim yang diajukan atas namanya kepada disiplin pengujian yang ketat.

Itulah peran The Cohesive Tetrad. The Cohesive Tetrad bukan sebuah bangunan metafisis baru yang ditumpuk di atas teori-teori yang sudah ada. The Cohesive Tetrad adalah cara mengorganisasi pengejaran dan tata kelola kebenaran agar Sabda, logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter moral, dan jejak historis tetap terikat satu sama lain, bukannya tercerai-berai.

6.1 Enam register The Cohesive Tetrad

Dalam bentuknya yang paling ringkas, The Cohesive Tetrad mencakup empat register inti dan dua dimensi diagnostik.

1. **Sabda.**

Sabda adalah *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Sabda berbicara bukan hanya tentang apa yang secara faktual terjadi, tetapi juga tentang apa yang seharusnya terjadi dan untuk apa manusia ada. Sabda menganugerahkan martabat, menamai batas-batas, dan menyingkapkan *telos* manusia.

2. **Logika.**

Logika adalah penggunaan inferensi dan analisis konseptual secara disiplin untuk menguji koherensi, menarik implikasi, dan menyingkap kontradiksi. Logika tidak menciptakan normativitas. Logika membantu kita melihat apakah klaim-klaim kita, termasuk klaim tentang Sabda, sungguh saling menopang.

3. **Qualia.**

Qualia adalah pengalaman hidup pribadi dan komunitas di bawah norma, institusi, dan teknologi tertentu. Register ini adalah ruang di mana mereka yang berada di bawah suatu rezim dapat berkata, “begini rasanya hidup di bawah hukum-hukum, kebijakan, dan kode Anda.” Qualia membawa ke permukaan rasa takut, penghinaan, keamanan, kepercayaan, dan kohesi sebagaimana sungguh-sungguh dialami.

4. **Mistika.**

Mistika adalah Mistika, dimensi intensional-spiritual dari peziarahan menuju perjumpaan langsung dengan Yang Transenden. Mistika menyangkut arah hati dan budi. Mistika bertanya apakah para pelaku dan komunitas sungguh-sungguh terarah kepada kebenaran dan akuntabilitas di hadapan suatu Sabda yang lebih tinggi, atau justru menggunakan bahasa moral dan religius untuk menutupi kepentingan diri.

5. **Akhlak.**

Akhlak adalah konfigurasi yang tampak dari disposisi-disposisi dan praktik moral, baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Akhlak adalah apa yang tampak ketika kita mengamati bagaimana orang sungguh bertindak, bukan hanya apa yang mereka katakan mereka yakini. Pola kejujuran atau manipulasi, belas kasih atau kekejaman, kesabaran atau kekerasan muncul di sini.

6. **Intention-Trace Alignment.**

Intention-Trace Alignment adalah derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral dari waktu ke waktu. Niat luhur saja tidak cukup. Kita harus bertanya apakah jejak jangka panjang dari keputusan, dokumen, anggaran, dan infrastruktur benar-benar selaras dengan apa yang dijanjikan.

Jika ditarik bersama, keenam register ini membentuk sebuah sirkuit epistemik-etis. Sabda menyediakan pusat normatif dan teleologis. Logika menyusun dan menguji artikulasi. Qualia dan Akhlak memperlihatkan bagaimana artikulasi tersebut mendarat dalam realitas hidup. Mistika menelisik orientasi mereka yang berbicara atas nama Sabda. Intention-Trace Alignment bertanya, berulang kali, apakah trajektori keseluruhan seorang pribadi, komunitas, atau institusi sedang bergerak mendekati atau menjauhi komitmen yang mereka nyatakan.

6.2 Cara Sabda mengamankan aksioma martabat manusia

Di dalam arsitektur ini, Sabda menjalankan seperangkat fungsi yang presisi bagi martabat manusia dan *telos*.

Pertama, Sabda memendasari martabat inheren dan kesetaraan dasar (A1 dan A2). Dalam bangunan yang dikembangkan di sini, martabat bukan ringkasan statistik dari kapasitas, kontribusi, atau pengakuan sosial. Martabat adalah status yang dianugerahkan oleh cara Sabda berbicara tentang manusia. Sabda menyapa setiap pribadi manusia sebagai pemikul martabat yang tidak diperoleh dan tidak dapat hilang karena kegagalan atau kerapuhan. Pada saat yang sama, Sabda melakukannya tanpa gradasi. Tidak ada “manusia yang lebih disapa” dan “yang kurang disapa”. Inilah makna kesetaraan dasar ketika diambil secara serius, bukan sekadar sebagai hiasan retorik.

Kedua, Sabda menjernihkan *telos* manusia dengan cara yang menopang A4. Dengan berbicara tentang untuk apa manusia ada, Sabda memungkinkan kita menafsirkan tahap-tahap kehidupan dan kondisi-kondisi yang tampak tidak produktif dari sudut pandang fungsional yang sempit. Masa kanak-kanak, disabilitas, sakit, dan ketergantungan bukanlah zona di mana martabat ditangguhkan. Itu semua adalah modus berada di bawah Sabda yang sama, dengan *telos* yang sama, meskipun cara *telos* itu diekspresikan berbeda dari masa sehat atau kuat.

Ketiga, Sabda menetapkan batas-batas yang tidak dapat dinegosiasikan (A3). Sabda menamai bentuk-bentuk perlakuan yang tidak selaras dengan apa itu manusia dan untuk apa manusia ada, betapapun besar manfaat yang mungkin dibawanya bagi pihak lain. Perbudakan, penyiksaan, penghinaan sistematis, dan penghapusan sengaja terhadap kelompok-kelompok tertentu dari kepedulian publik bukan sekadar maladaptif atau tidak stabil. Semua itu adalah pengkhianatan terhadap deskripsi Sabda tentang pribadi.

Keempat, Sabda menopang akuntabilitas dan kemampuan koreksi diri (A5). Karena Sabda adalah sebuah Word yang dapat dipanggil bukan hanya oleh penguasa, tetapi juga oleh mereka yang diperintah, Sabda menyediakan standar yang memungkinkan institusi diadili dari dalam horizon normatif mereka sendiri. Ketika suatu negara, pengadilan, atau korporasi mengklaim menghormati martabat manusia, Sabda berfungsi sebagai kriteria yang memungkinkan para korban dan saksi berkata, “Anda telah menamai Sabda ini, tetapi praktik Anda justru bertentangan dengannya.”

Singkatnya, Sabda melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh kapasitas, evolusi, dan kontrak. Sabda menganugerahkan martabat yang diberikan, menetapkan batas-batas yang tak dapat ditawar, dan mengarahkan kehidupan manusia menuju suatu *telos* yang tidak habis terjemaskan oleh keberhasilan adaptif atau kesepakatan timbal balik.

6.3 Register lain sebagai pengoreksi klaim tentang Sabda

Seandainya hanya sampai di sini, The Cohesive Tetrad masih rentan terhadap tuduhan otoritarianisme yang sudah dikenal. Siapa pun bisa mengklaim berbicara untuk Sabda dan menggunakan klaim itu untuk menutup perdebatan. Fitur krusial dari Tetrad adalah penolakannya untuk mensakralisasi setiap interpretasi manusiawi tertentu atas Sabda. Sebaliknya, Tetrad memaksa interpretasi-interpretasi semacam itu berinteraksi dengan register lain.

- Logika bertanya apakah suatu pembacaan atas Sabda koheren dengan seluruh apa yang dikatakan dan dilakukan. Sebuah “Sabda” yang diklaim sah, tetapi melegitimasi perlakuan merendahkan terhadap sebagian manusia, akan segera berkonflik dengan aksioma A1 hingga A4 dan dengan pernyataan-pernyataan lain tentang martabat dan kesetaraan. Analisis logis tidak memutuskan apakah Sabda itu benar. Analisis logis menguji apakah mereka yang menginvokasinya bersikap konsisten.
- Qualia membawa masuk suara dan pengalaman mereka yang berada di bawah norma-norma yang dibentuk oleh Sabda. Jika suatu komunitas menyatakan bahwa suatu tatanan hukum atau teknologi menghormati martabat manusia, tetapi mereka yang berada di bawahnya melaporkan rasa takut, penghinaan, atau keterhapusaan, maka terdapat celah antara pengakuan dan realitas yang tidak boleh diabaikan. Sabda tidak melayang di atas kesaksian semacam itu. Tidak jarang, justru dalam jerit mereka yang tertindas, penghakiman Sabda terdengar paling tajam.
- Mistika menelisik niat dan orientasi. Apakah para pemimpin dan institusi benar-benar berupaya untuk bertanggung jawab di hadapan Sabda yang lebih tinggi, ataukah mereka menggunakan bahasa Sabda untuk mengamankan posisi mereka sendiri. Ini bukan ornamen mistis. Ini adalah pengakuan bahwa normativitas dan kekuasaan selalu saling terkait, dan bahwa integritas rujukan kepada Sabda bergantung pada arah batin mereka yang mengucapkannya.
- Akhlak mengajukan pertanyaan diagnostik paling tua: karakter macam apa yang dihasilkan oleh ajaran ini. Jika rujukan berulang kepada Sabda secara praktis melahirkan kesombongan, dominasi, dan ketidakpedulian terhadap yang rentan, ada sesuatu yang salah. Sebaliknya, pola kesabaran, kerendahan hati, keberanian, dan belas kasih bukanlah bukti konklusif bahwa suatu interpretasi benar, tetapi juga sama sekali tidak remeh.
- Intention-Trace Alignment akhirnya memeriksa trajektori jangka panjang. Institusi, seperti halnya pribadi, dapat menuturkan kisah-kisah menarik tentang niat mereka. Tetrad menuntut uji yang lebih keras: apakah jejak historis, kebijakan yang dijalankan, anggaran yang dialokasikan, dan teknologi yang digelar selaras dengan komitmen terhadap martabat manusia di bawah Sabda yang dinyatakan, atau justru menyimpang darinya.

Melalui pengujian multi-register ini, The Cohesive Tetrad memegang dua hal sekaligus. Tetrad menegaskan keutamaan Sabda dalam menganugerahkan norm dan *telos*, dan Tetrad mengakui bahwa pembacaan manusia atas Sabda bersifat keliru dan terbatas. Kerangka ini dirancang bukan sebagai benteng bagi dogma, melainkan sebagai sirkuit penegasan ulang yang berkelanjutan di mana Sabda, logika, pengalaman, spirit, karakter, dan sejarah saling berhadapan tanpa henti.

6.4 Dari arsitektur ke praktik: hukum, kebijakan publik, dan AI

Bahasa tentang register dan *alignment* dapat terdengar abstrak. Karena itu penting untuk melihat bagaimana arsitektur The Cohesive Tetrad dapat bekerja dalam praktik.

Dalam hukum tata negara, sebuah mahkamah yang secara eksplisit mengakui Sabda sebagai dasar martabat tetap dapat tergoda untuk menafsirkan martabat secara sempit, berbasis kapasitas, atau mayoritarian. Di bawah Tetrad, mahkamah semacam itu diwajibkan untuk:

- mengartikulasikan pembacaan atas Sabda dan martabat dalam bentuk yang presisi dan dapat dianalisis secara logis,
- mendengarkan pengalaman hidup (Qualia) mereka yang berada di pinggiran yurisdiksinya,
- memeriksa budaya kelembagaan (Akhlak) badan peradilan, apakah budaya tersebut ditandai oleh kerendahan hati dan pelayanan atau oleh sikap melindungi diri,
- dan bertanya, lintas dekade, apakah putusan-putusan penting serta reformasi hukum, jejak dari kerja mereka, sungguh mengarah pada perlindungan yang lebih besar bagi yang paling rentan atau, secara halus, justru menariknya kembali.

Dalam kebijakan publik, khususnya di bawah keterbatasan sumber daya, arsitektur ini menahan kecenderungan untuk meluncur dari kalkulasi biaya–manfaat menuju normalisasi diam-diam atas kehidupan yang dapat dibuang. Arsitektur ini melakukan hal tersebut bukan dengan melarang analisis biaya–manfaat, tetapi dengan menegaskan bahwa analisis tersebut harus beroperasi di bawah batasan yang ditetapkan oleh deklarasi Sabda tentang siapa yang tidak boleh dikorbankan dan apa yang tidak boleh diperdagangkan. Kebijakan yang memperlakukan sebagian manusia sebagai dapat dibuang demi keuntungan agregat akan gagal dalam uji Sabda dan dalam uji Qualia, Akhlak, serta Intention-Trace Alignment.

Dalam tata kelola kecerdasan buatan, The Cohesive Tetrad menjadi sangat penting. Sistem AI merupakan perwujudan paradigmatis dari logika murni dan pemodelan berbasis data. Tanpa arsitektur seperti Tetrad, terdapat risiko nyata bahwa AI menjadi mekanisme paling efisien yang pernah diciptakan untuk memformalkan dan memperbesar ketidakadilan yang sudah ada. Di bawah Tetrad, pengembangan dan penerapan AI tunduk pada:

- batas-batas yang diinformasikan Sabda mengenai bagaimana pribadi boleh direpresentasikan dan diperlakukan,
- pemantauan berkelanjutan terhadap Qualia, dengan memperhatikan bagaimana mereka yang paling terdampak mengalami keputusan-keputusan yang dimediasi AI,
- pengujian Akhlak kelembagaan, dengan menelaah apakah organisasi yang menggelar AI menunjukkan kejujuran, kerendahan hati, dan daya tanggap,
- evaluasi Mistika para perancang dan regulator, dalam arti orientasi mereka yang sungguh-sungguh kepada kebenaran dan akuntabilitas,
- dan penilaian jangka panjang atas Intention-Trace Alignment, dengan memeriksa apakah jejak sosial dan moral aktual dari sistem-sistem AI selaras dengan komitmen berpusat-pada-manusia yang dinyatakan ketika sistem tersebut diluncurkan.

Dalam tiap domain ini, klaimnya bukan bahwa Sabda menggantikan hukum, kebijakan, atau keahlian teknis. Klaimnya adalah bahwa tanpa sesuatu seperti Sabda, yang terintegrasi dalam arsitektur tata kelola kebenaran yang lebih luas, bahasa kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* akan melayang di atas praktik-praktik yang, ketika berada di bawah tekanan, akan selalu tergoda untuk mengubah kembali manusia menjadi instrumen. The Cohesive Tetrad menawarkan satu cara untuk mencegah pergeseran tersebut dengan menempatkan Sabda di pusat sebuah sirkuit disiplin yang mengikat logika dan data pada suatu Sabda yang mendahului, yaitu Sabda tentang apa itu manusia dan apa yang tidak pernah boleh dilakukan terhadap mereka.

7. Implikasi dan kesimpulan

Argumen artikel ini berangkat dari suatu ketegangan dalam cara kita menggunakan bahasa martabat manusia dan *telos* manusia dewasa ini. Di permukaan, kita berbicara seolah-olah setiap pribadi manusia memiliki martabat yang inheren dan setara yang tidak dapat dihapus oleh kehilangan kapasitas atau status sosial, dan seolah-olah bentuk-bentuk perlakuan tertentu terhadap pribadi dilarang secara prinsip bahkan ketika perlakuan itu efisien atau populer. Namun di latar belakang, kita kerap bergantung pada fondasi yang naturalistik dan prosedural yang tidak mampu menopang klaim sekuat itu. Pendekatan berbasis kapasitas, narasi evolusioner, dan konstruksi kontraktarian, bahkan ketika telah diperhalus dan dikombinasikan, ternyata bersandar pada suatu sumber normatif yang lebih tebal yang tidak mereka tematiskan. Ketika ketergantungan ini dibuat eksplisit, gambaran tentang tata kelola kebenaran berubah.

7.1 Menata ulang fondasi martabat manusia dan *telos*

Implikasi pertama bersifat konseptual. Jika analisis dalam Bagian 2 sampai 4 bertahan, maka sebagian besar literatur mutakhir tentang martabat dan *telos* perlu merevisi cara ia menggambarkan dirinya sendiri. Teori berbasis kapasitas bukan hanya mengelaborasi signifikansi moral dari agensi rasional dan kapabilitas-kapabilitas sentral. Agar dapat memasukkan yang paling rentan tanpa mengencerkan klaim, teori-teori tersebut bergantung pada penilaian teleologis implisit tentang untuk apa manusia ada. Narasi evolusioner tidak sekadar menjelaskan kemunculan kepekaan moral. Ketika narasi tersebut mengecam praktik-praktik yang mungkin adaptif secara lokal namun merendahkan, ia mempresuposisikan suatu norma yang berdiri di atas keberhasilan adaptif. Konstruksi kontraktarian tidak hanya memodelkan kesepakatan yang adil. Ketika ia bersikeras bahwa sebagian makhluk harus diperlakukan sebagai pemegang klaim bahkan jika mereka tidak dapat menjadi pihak kontrak, ia menjangkau melampaui ruang kontrak itu sendiri.

Polanya seragam: ada gerak dari premis-premis yang relatif moderat menuju kesimpulan-kesimpulan yang kokoh, yang menuntut lebih daripada yang dapat disediakan oleh kapasitas, evolusi, atau kontrak secara mandiri. Aksioma martabat minimal A1 sampai A5 membuat gerak ini terlihat dengan meminta teori-teori tersebut menunjukkan bagaimana mereka menangani kasus-kasus paling sulit tanpa meninggalkan martabat inheren, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan kemampuan koreksi diri yang akuntabel. Ketika jawaban-jawaban itu bergantung pada premis-premis yang sangat mirip dengan suatu martabat yang diberikan dan suatu *telos* yang diberikan, tidak lagi jujur untuk menggambarkan kerangka kerja tersebut sebagai murni naturalistik atau prosedural.

Menamai Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* adalah salah satu cara untuk mengakui ketergantungan ini. Usulannya bukan bahwa setiap teori yang ada harus serta-merta mengafirmasi suatu tradisi kitab suci tertentu. Usulannya adalah bahwa sejauh kita ingin terus berbicara dalam register yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos*, kita harus mengakui bahwa bahasa kita mempresuposisikan sesuatu seperti sebuah Sabda yang menganugerahkan martabat, menyatakan batasan-batasan, dan mengarahkan kehidupan manusia. Pilihannya bukan antara netralitas sekuler dan intervensi religius. Pilihannya adalah antara terus-menerus meminjam secara diam-diam dari sebuah Sabda yang kita enggan namai dan, sebaliknya, membawa Sabda itu ke ruang argumen agar isi dan klaimnya dapat diperiksa.

7.2 Tata kelola kebenaran di bawah Sabda bagi hukum, kebijakan publik, dan AI

Implikasi kedua bersifat praktis. Memasukkan Sabda ke dalam fondasi martabat akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab jika langkah itu sekadar melegitimasi bentuk-bentuk baru dogmatisme. Tujuan The Cohesive Tetrad justru untuk mencegah hasil tersebut dengan menanamkan Sabda dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang juga mencakup Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

Dalam ranah hukum, arsitektur ini mengundang pengadilan untuk melampaui rujukan tipis terhadap martabat sebagai nilai residu. Sabda memberi isi pada martabat inheren dan kesetaraan dasar. Logika memaksa koherensi antara prinsip-prinsip konstitusional dan putusan konkret. Qualia dan Akhlak menyingkap bagaimana doktrin-doktrin hukum dialami di pinggiran dan jenis karakter kelembagaan seperti apa yang dibentuknya. Intention-Trace Alignment mencegah narasi swapujian dengan memaksa perhatian pada dampak jangka panjang putusan hukum terhadap mereka yang paling rentan. Dalam pengaturan seperti ini, bahasa martabat tidak lagi menjadi klausul ornamental. Bahasa itu menjadi cara yang terdisiplin untuk menundukkan tatanan hukum kepada sebuah Sabda yang secara publik mereka klaim hormati.

Dalam kebijakan publik, Tetrad menahan kecenderungan untuk bergeser dari penalaran biaya–manfaat menuju pengorbanan diam-diam atas kehidupan yang mahal. Sabda menetapkan batas luar bagi apa yang boleh dilakukan terhadap pribadi manusia. Logika membantu menjernihkan pertukaran (trade-off) di dalam batas tersebut. Qualia, Akhlak, dan Mistika mengungkap apakah kultur pengambilan kebijakan sungguh-sungguh terarah untuk melindungi yang rentan atau, sebaliknya, menyamarkan penderitaan mereka di balik indikator-indikator agregat. Intention-Trace Alignment memaksa pemerintah untuk menelusuri jejak moral sekaligus jejak ekonomis dari pilihan-pilihan mereka dari waktu ke waktu.

Dalam kecerdasan buatan, kebutuhan akan arsitektur semacam ini sangat mendesak. Sistem-sistem yang berbasis data dan tersusun secara logis dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang sekaligus tak bercela secara formal dan tidak adil secara substantif. Sabda menyediakan horizon yang tak dapat ditawarkan untuk menguji tujuan dan batasan sistem AI. Logika dan data kemudian ditempatkan dalam posisi melayani, bukan berada di atas, horizon tersebut. Qualia dan Akhlak membawa ke permukaan bagaimana keputusan-keputusan yang dimediasi AI dialami oleh mereka yang diklasifikasi, diperingkat, atau dikeluarkan. Mistika dan Intention-Trace Alignment bertanya apakah trajektori jangka panjang infrastruktur AI sedang bergerak menuju perlindungan yang lebih dalam bagi martabat manusia atau justru menuju pengelolaan yang lebih efisien atas kehidupan-keluaran (*expendable lives*). Tanpa kerangka seperti ini, bahasa tentang AI yang berpusat pada manusia dan yang menjaga martabat berisiko menjadi selubung retorik lain bagi bentuk-bentuk instrumentalisasi yang secara teknis canggih.

Pesan konseptual dan praktis berpaut pada satu titik. Jika martabat dan *telos* hendak tetap lebih dari sekadar dekorasi, Sabda harus memiliki prioritas epistemik atas logika murni dan atas institusionalisasi sistem-sistem logis dalam hukum, kebijakan, dan teknologi. Prioritas tersebut bukan lisensi untuk menolak logika. Prioritas tersebut adalah larangan untuk memuja logika sebagai otoritas tertinggi yang tidak menjawab kepada norma mana pun yang lebih tinggi.

7.3 Keterbatasan dan agenda lanjut

Argumen yang disajikan di sini sengaja bersifat programatik. Argumen ini menelusuri ketergantungan sejumlah fondasi dominan bagi martabat manusia dan *telos* pada suatu sumber normatif yang lebih tebal, mengajukan Sabda sebagai nama bagi sumber itu, dan menggariskan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur di mana Sabda dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola kebenaran tanpa runtuh menjadi kekuasaan sewenang-wenang. Sejumlah pertanyaan penting tetap terbuka.

Pertama, analisis ini dijalankan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Berbagai tradisi religius dan filosofis memahami Sabda, natur manusia, dan *telos* dengan cara yang beragam. Sebuah uraian yang utuh perlu menjajaki bagaimana Sabda, sebagaimana didefinisikan di sini, dapat diterima, ditafsirkan, dan diperdebatkan dalam konteks yang majemuk tanpa larut menjadi titik temu paling tipis, dan tanpa mengeras menjadi dogma eksklusif. Hal ini menuntut kerja berkelanjutan dalam teologi komparatif, filsafat politik, dan teori hukum.

Kedua, artikel ini belum menawarkan metodologi rinci untuk mengimplementasikan The Cohesive Tetrad dalam pengaturan kelembagaan yang spesifik. Menerjemahkan keenam register ke dalam prosedur konkret, indikator, dan mekanisme peninjauan di pengadilan, kementerian, badan regulator, dan laboratorium AI adalah tugas bagi penelitian lanjutan. Pekerjaan semacam itu perlu menghormati perbedaan antar domain sambil memelihara wawasan pokok bahwa Sabda, logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter, dan jejak sejarah harus tetap dipegang bersama.

Ketiga, diperlukan keterlibatan kritis dengan mereka yang menolak gagasan tentang suatu Sabda yang memberi norm dan *telos*. Sebagian mungkin berargumen bahwa bahasa martabat sebaiknya dilemahkan alih-alih disangga oleh Sabda, bahwa biaya mempertahankan klaim yang paling kuat terlalu tinggi. Yang lain mungkin mencoba mempertahankan bahasa martabat yang kuat di dalam suatu naturalisme yang direkonstruksi. Posisi-posisi tandingan ini bukan hanya dapat diperkirakan, melainkan juga perlu. Posisi-posisi itu akan membantu menjernihkan apakah ketergantungan yang didiagnosis dalam artikel ini sedalam yang tampak.

Terlepas dari keterbatasan ini, kesimpulan utamanya dapat dinyatakan secara sederhana. Jika kita bermaksud terus mengatakan bahwa setiap pribadi manusia memiliki martabat inheren dan setara, bahwa beberapa bentuk perlakuan terhadap pribadi dikecualikan secara absolut, dan bahwa institusi-institusi kita harus diadili berdasarkan bagaimana mereka melindungi yang paling rentan melintasi waktu, maka kita tidak dapat bertahan di dalam kenyamanan fondasi yang semata-mata naturalistik dan prosedural. Kita harus mengakui kehadiran suatu Sabda yang berbicara tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada, dan kita harus membangun struktur-struktur yang menautkan penalaran, teknologi, dan hukum kita kepada Sabda tersebut.

The Cohesive Tetrad adalah salah satu usulan bagi struktur semacam itu. Tetrad tidak menyelesaikan semua perbedaan pendapat tentang Sabda, martabat, atau *telos*. Namun Tetrad bersikeras bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dijalankan secara terbuka, dalam kondisi di mana klaim-klaim tentang martabat manusia diuji bukan hanya oleh koherensi internalnya, tetapi juga oleh kapasitas klaim-klaim tersebut untuk melindungi manusia nyata dari dikembalikan menjadi instrumen yang dapat dibuang di bawah permukaan logika dan data yang tampak mulus.

1. Andorno, R. (2009). Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics. *Journal of Medicine and Philosophy*, 34(3), 223–240. <https://doi.org/10.1093/jmp/jhp023>
2. Darwin, C. (1871). *The descent of man, and selection in relation to sex*. London: John Murray.
3. Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.; C. M. Korsgaard, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
5. Kittay, E. F. (1999). *Love's labor: Essays on women, equality, and dependency*. New York: Routledge.
6. Korsgaard, C. M. (1996). *The sources of normativity*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. MacIntyre, A. (1999). *Dependent rational animals: Why human beings need the virtues*. Chicago: Open Court.
8. Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
9. Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms*. OSF Preprints / PhilArchive. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
10. Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
12. Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
13. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
14. Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. New York: Columbia University Press.
15. Rosen, M. (2012). *Dignity: Its history and meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
16. Ruse, M., & Wilson, E. O. (1986). Moral philosophy as applied science. *Philosophy*, 61(236), 173–192. <https://doi.org/10.1017/S0031819100021057>
17. Scanlon, T. M. (1998). *What we owe to each other*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
18. Shakespeare, T. (2006). *Disability rights and wrongs*. London: Routledge.
19. Street, S. (2006). A Darwinian dilemma for realist theories of value. *Philosophical Studies*, 127(1), 109–166. <https://doi.org/10.1007/s11098-005-1726-6>
20. Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care*. New York: Routledge.
21. United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UN General Assembly Resolution 217 A (III))*. Paris: United Nations.
22. Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights*. Oxford: Oxford University Press.



Abstrak

Demokrasi-demokrasi kontemporer sangat bergantung pada bahasa martabat manusia, hak-hak, dan kebaikan publik ketika membenarkan hukum dan kebijakan, namun model-model dominan mereka tentang nalar publik dirancang untuk menjaga agar rujukan eksplisit kepada Sabda, yang di sini dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, tetap berjarak dari struktur pembenaran publik (Rawls 1993, 1997; Habermas 1996, 2006). Bertolak dari karya-karya sebelumnya yang mengembangkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka tata kelola kebenaran dan berargumen bahwa logika murni, kapasitas manusia, evolusi, dan kontrak sosial tidak memadai untuk mendasari klaim-klaim martabat yang paling kuat dalam hukum dan kebijakan (Mutaqin 2025a, 2025b; Waldron 2012; Nussbaum 2006), artikel ini melakukan tiga langkah. Pertama, artikel ini merekonstruksi model-model nalar publik Rawlsian, Habermasian, dan netralitas liberal serta menunjukkan bahwa, di bawah tekanan dari aksioma-aksioma martabat minimal, model-model tersebut cenderung bergeser baik menuju sekularisme kosong, di mana prosedur demokratis tetap ada tetapi cakrawala norma dan telos menjadi hampa, maupun menuju teokrasi penuh ketakutan, di mana satu penafsiran atas Sabda diangkat menjadi otoritas politik yang terlindungi dari koreksi (Taylor 2007; Forst 2012; Casanova 1994). Kedua, artikel ini mengartikulasikan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur enam register bagi tata kelola kebenaran demokratis yang dibangun di seputar Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment, yakni derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik, serta mendefinisikan ulang nalar publik sebagai praktik multi-register di mana semua klaim tentang hukum koersif harus melewati register-register ini di bawah kondisi universalitas pihak yang disapa, tidak adanya pemaksaan terhadap nurani, penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap perbedaan pendapat (Fraser 1990, 2008; Forst 2012; MacIntyre 1981). Ketiga, artikel ini menerapkan arsitektur tersebut pada kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola kecerdasan buatan, dengan membandingkan keluaran yang dihasilkannya dengan keluaran dari sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan (Kittay 1999; Fineman 2008; Pellegrino 1999; O’Neil 2016; Eubanks 2018). Hasilnya adalah sebuah model tata kelola kebenaran demokratis di bawah Sabda yang mempertahankan capaian-capaian inti liberal sekaligus menyediakan dasar yang lebih stabil bagi klaim-klaim martabat yang kuat dalam masyarakat majemuk serta mempersiapkan jalan bagi analisis lanjutan mengenai hukum dan kecerdasan buatan.

Kata kunci: *Sabda; martabat manusia; nalar publik; pluralisme; tata kelola kebenaran demokratis; The Cohesive Tetrad; kecerdasan buatan; sekularisme; teokrasi.*



1. Pendahuluan

Demokrasi-demokrasi kontemporer berbicara dengan fasih dalam bahasa martabat manusia, hak-hak, dan kebaikan publik. Konstitusi-konstitusi menyatakan harkat melekat setiap orang, pengadilan-pengadilan menginvokasi martabat untuk memutus kasus-kasus sukar, dan dokumen-dokumen kebijakan secara rutin membenarkan intervensi dengan merujuk pada perlindungan kehidupan yang rentan (*Waldron 2012; Andorno 2013; Nussbaum 2006*). Kosakata ini bukan sekadar hiasan. Ia memikul bobot normatif yang besar, terutama ketika masyarakat memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan di batas hidup dan mati, inklusi sosial, dan kendali teknologi.

Pada saat yang sama, di banyak demokrasi, energi moral terdalam yang menggerakkan pergulatan publik demi keadilan dan perlindungan yang rentan secara eksplisit berakar pada tradisi-tradisi keagamaan dan pada klaim akan suatu Sabda yang berbicara dengan kewibawaan tentang siapa manusia itu dan untuk apa mereka ada (*Casanova 1994; Taylor 2007*). Gerakan-gerakan yang membela kaum miskin, memprotes penghinaan, atau menentang bentuk-bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat sering kali bersandar pada kitab suci, liturgi, dan memori komunal yang secara eksplisit dirangkaikan sebagai respons terhadap suatu seruan pewahyuan. Namun model-model teoretis dominan yang mengatur apa yang dihitung sebagai pembenaran publik yang sah cenderung memandang sumber-sumber semacam itu hanya dapat diterima dalam register privat atau motivasional. Warga boleh digerakkan olehnya, tetapi pada suatu titik mereka diharapkan menerjemahkan alasan-alasan mereka ke dalam kosakata yang tidak bergantung pada sumber pewahyuan tertentu mana pun.

Hal ini menghasilkan teka-teki sentral yang menggerakkan artikel ini. Di satu sisi, khalayak demokratis sangat bersandar pada kosakata moral yang tebal tentang martabat manusia dan telos ketika mereka bertanya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pribadi-pribadi dalam ranah hukum, kebijakan, dan teknologi. Di sisi lain, teori-teori arus utama tentang nalar publik dirancang untuk menjaga agar klaim-klaim yang secara eksplisit menginvokasi suatu Sabda dengan kewibawaan atas norma dan telos tetap berjarak dari struktur pembenaran publik (*Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Audi and Wolterstorff 1997*). Dengan demikian, demokrasi-demokrasi bergantung pada bahasa moral yang, bagi banyak warganya, tak terpisahkan dari Sabda, sementara teori-teori resmi mereka tentang nalar publik ragu untuk mengakui Sabda sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sumber motivasi privat.

1.1 Dari logika murni ke martabat dan telos: lintasan *The Cohesive Tetrad*

Artikel ini merupakan langkah ketiga dalam sebuah proyek yang lebih luas yang mengembangkan *The Cohesive Tetrad* sebagai kerangka bagi tata kelola kebenaran (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Langkah pertama menelaah status logika murni dan rasionalitas intra-duniawi dalam tata kelola tersebut. Langkah itu berargumen bahwa logika, yang dipahami sebagai pengelolaan disiplin atas inferensi, konsistensi, dan kejernihan konseptual, bersifat niscaya namun tidak memadai untuk memainkan peran sebagai otoritas tertinggi. Logika dapat menguji dan memperjelas klaim. Ia dapat mengembangkan implikasi yang sudah tersirat dalam premis-premis. Namun logika tidak dapat, dengan sendirinya, menghasilkan norma dan telos yang memberitahu kita apa yang baik, apa yang terlarang, dan untuk apa kehidupan manusia itu.

Langkah kedua beralih ke wilayah martabat manusia dan telos. Langkah itu menanyakan apa yang dibutuhkan jika kita ingin secara serius menanggapi klaim-klaim terkuat yang diajukan

demokrasi-demokrasi kontemporer tentang harkat manusia. Langkah tersebut mengajukan seperangkat aksioma martabat minimal dan berargumen bahwa, diambil bersama-sama, aksioma-aksioma ini tidak dapat dibuat sepenuhnya koheren hanya dengan merujuk pada kapasitas-kapasitas manusia, sejarah evolusioner, atau kontrak-kontrak sosial (*Mutaqin 2025b; Waldron 2012; Nussbaum 2006; Sangiovanni 2017*). Ketiga kandidat ini menerangi aspek-aspek penting kehidupan moral, namun mereka tidak dapat, sendiri-sendiri maupun dalam kombinasi, menanggung seluruh bobot klaim tentang martabat yang melekat dan setara, non-instrumentalisasi, inklusi terhadap yang paling rentan, dan akuntabilitas institusional jangka panjang.

Atas dasar itu, karya sebelumnya memperkenalkan Sabda, yang didefinisikan sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, sebagai cakrawala yang niscaya agar aksioma-aksioma martabat minimal dapat dipahami (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Sabda tidak melayang sendirian. Sabda terbenam di dalam The Cohesive Tetrad, sebuah konfigurasi enam register yang bersama-sama membentuk arsitektur bagi tata kelola kebenaran: Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment. Sabda menetapkan cakrawala norma dan telos. Logika menguji koherensi dan implikasi. Qualia menamai pengalaman hidup individu dan komunitas di bawah rezim hukum, kebijakan, dan teknologi. Mistika didefinisikan sebagai *Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Akhlak berkaitan dengan karakter moral yang teramati dari pribadi-pribadi dan institusi-institusi. Intention–Trace Alignment didefinisikan sebagai *Intention–Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic moral trace across time*. Artikel ini mengambil definisi-definisi tersebut dan aksioma-aksioma martabat sebagai latar (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Artikel ini tidak berupaya mengajukan kembali argumen dasarnya. Sebaliknya, artikel ini menanyakan apa yang mengikuti ketika kerangka ini dibawa ke wilayah politik yang secara eksplisit berkaitan dengan nalar publik dalam masyarakat majemuk.

1.2 Beralih ke ranah politik: nalar publik dan pluralisme mendalam

Dengan latar itu, fokus artikel ketiga ini beralih dari pertanyaan-pertanyaan metafisik dan aksiologis tentang norma dan telos ke sebuah pertanyaan politik. Pertanyaannya adalah bagaimana klaim-klaim atas kebenaran, terutama yang berakar pada Sabda, seharusnya hadir dalam penalaran publik demokratis di bawah kondisi pluralisme mendalam (*Rawls 1993; Habermas 1996; Forst 2012*).

Pluralisme mendalam lebih dari sekadar keberagaman preferensi atau gaya hidup. Ia merujuk pada koeksistensi doktrin-doktrin komprehensif, pandangan dunia, dan otoritas epistemik yang tidak dapat direduksi satu sama lain dan tidak dapat begitu saja diperingkat dalam satu hierarki imanen. Dalam konteks semacam ini, institusi-institusi demokratis diharapkan membenarkan hukum dan kebijakan mereka kepada warga yang saling berbeda pendapat, terkadang secara sangat mendalam, tentang Tuhan, kitab suci, pewahyuan, dan struktur ultimate realitas.

Jawaban arus utama dalam teori politik adalah mengembangkan model-model nalar publik. Model-model ini, dalam cara mereka masing-masing, berbagi sebuah intuisi umum. Pembeneran politik yang sah bagi pokok-pokok konstitusional dan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan tidak boleh bergantung pada klaim-klaim yang hanya dapat secara wajar diterima oleh penganut satu doktrin komprehensif tertentu. Alasan-alasan religius boleh

memainkan peran dalam masyarakat sipil dan boleh memotivasi warga secara individual, tetapi pada suatu titik dalam proses pembenaran publik, alasan-alasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam alasan-alasan yang tidak mengandaikan otoritas Sabda tertentu mana pun (*Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Audi and Wolterstorff 1997*). Namun, begitu kita menerima kesimpulan dari artikel-artikel sebelumnya, sebuah pertanyaan menjadi tak terelakkan. Jika klaim-klaim terkuat kita tentang martabat manusia dan telos dalam kehidupan demokratis memerlukan Sabda sebagai cakrawala, dan jika Sabda didefinisikan justru sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, apa yang terjadi ketika model-model nalar publik bersikeras bahwa Sabda paling jauh hanya boleh menjadi latar motivasional privat, sementara pembenaran publik final harus tetap independen dari sumber pewahyuan mana pun (*Larmore 1996; Quong 2011; Mutaqin 2025b*)? Artikel ini menjadikan ketegangan tersebut sebagai objek analisis utamanya.

1.3 Tesis dan kontribusi

Tesis utama artikel ini dapat dinyatakan secara langsung. Jika kita menanggapi dengan serius baik komitmen-komitmen terkuat kita terhadap martabat manusia dan telos maupun realitas pluralisme mendalam, maka model-model nalar publik dominan yang memprivatisasi Sabda bersifat tidak stabil secara struktural. Model-model tersebut berosilasi antara sekularisme kosong, di mana sumber-sumber norma dan telos dibiarkan tanpa nama, dan sebuah sikap defensif yang tanpa sengaja menyuburkan proyek-proyek reaktif penangkapan teokratis (*Taylor 2007; Forst 2012*). Dengan mengintegrasikan Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, ke dalam arsitektur multi-register The Cohesive Tetrad, kita dapat merumuskan sebuah model tata kelola kebenaran demokratis di mana Sabda hadir secara publik di bawah kondisi-kondisi terdisiplin yang melindungi kebebasan-kebebasan dasar, akuntabilitas institusional, dan martabat para pihak yang berbeda pendapat (*Mutaqin 2025b; Rawls 1997; Habermas 2006; Forst 2012*).

Dari tesis ini mengalir empat kontribusi spesifik. Pertama, artikel ini menawarkan diagnosis sistematis atas model-model nalar publik Rawlsian, Habermasian, dan netral liberal dari sudut pandang aksioma-aksioma martabat dan peran Sabda yang dikembangkan dalam karya sebelumnya (*Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011*). Diagnosis ini bersifat rekonstruktif, bukan semata-mata eksternal. Kedua, artikel ini mengembangkan konsep tata kelola kebenaran demokratis sebagai sebuah arsitektur konkret, bukan sekadar metafora, dengan bertumpu pada The Cohesive Tetrad sebagaimana dirumuskan dalam karya sebelumnya (*Mutaqin 2025a, 2025b; Forst 2012*). Ketiga, artikel ini mendefinisikan ulang nalar publik sebagai sebuah proses multi-register, bukan kosakata satu register, dengan mengaitkannya pada perdebatan tentang pembenaran dan ruang publik (*Forst 2012; Fraser 1990, 2008*). Keempat, artikel ini menunjukkan daya pembeda arsitektur ini melalui kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola sistem digital dan kecerdasan buatan (*Pellegrino 1999; Fineman 2008; O'Neil 2016; Eubanks 2018; Cath 2018; Floridi and Cows 2019*), dan dengan cara ini mempersiapkan landasan bagi artikel keempat yang akan berfokus lebih khusus pada hukum dan kecerdasan buatan.

1.4 Peta jalan

Sisa artikel ini tersusun dalam enam langkah. Bagian 2 merekonstruksi model-model dominan tentang nalar publik dan agama dalam teori politik kontemporer, dengan menyoroti liberalisme politik Rawlsian, teori diskursus Habermasian, dan konfigurasi praktis netralitas liberal serta

sekularisme prosedural. Bagian 3 mengembangkan penilaian kritis atas model-model ini dengan menggunakan aksioma-aksioma martabat minimal dan memperkenalkan tipe-tipe ideal sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan. Bagian 4 memperkenalkan gagasan tata kelola kebenaran demokratis dan secara terfokus mengingatkan kembali posisi Sabda di dalam The Cohesive Tetrad. Bagian 5 menerjemahkan arsitektur ini ke dalam sebuah rancangan baru tentang nalar publik sebagai praktik multi-register. Bagian 6 menerapkan arsitektur ini pada kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola kecerdasan buatan. Bagian 7 menutup dengan menguraikan implikasi teoretis dan praktis serta menempatkan argumen ini dalam rangkaian yang lebih luas tentang The Cohesive Tetrad.

2. Model-model dominan nalar publik dan agama

Bagian ini merekonstruksi tiga cara berpikir berpengaruh tentang nalar publik dan agama dalam teori politik kontemporer. Tujuannya bukan untuk menolaknya secara polemis, melainkan untuk memahami apa yang berusaha mereka lindungi dan mengapa pendekatan-pendekatan ini menjadi menarik dalam demokrasi-demokrasi majemuk (*Rawls 1993; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011*). Hanya setelah rekonstruksi simpatik ini artikel akan menundukkan mereka pada uji yang diajukan oleh aksioma-aksioma martabat minimal dan peran Sabda.

Tiga konfigurasi yang dibahas di sini adalah: nalar publik Rawlsian dalam liberalisme politik, teori diskursus Habermasian dalam kunci pasca-sekuler, dan pola yang lebih longgar namun kuat dari netralitas liberal dan sekularisme prosedural yang membentuk banyak praktik demokratis. Ketiganya berupaya menjaga kebebasan dan kesetaraan di bawah kondisi pluralisme mendalam. Ketiganya juga berbagi keberatan untuk mengizinkan Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, tampil sebagai Sabda dalam struktur pembenaran hukum dan kebijakan.

2.1 Nalar publik Rawlsian: liberalisme politik dan the proviso

Liberalisme politik John Rawls merupakan salah satu upaya paling berpengaruh untuk menggambarkan bagaimana sebuah masyarakat demokratis dapat tetap stabil dan adil dari waktu ke waktu di bawah kondisi pluralisme yang wajar (*Rawls 1993*). Rawls berangkat dari fakta bahwa warga dalam demokrasi modern menganut beragam doktrin komprehensif. Ia berargumen bahwa akan bersifat tidak adil sekaligus tidak bijaksana jika negara mendasarkan prinsip-prinsip fundamentalnya pada kebenaran satu doktrin semacam itu. Sebagai gantinya, ia mengusulkan suatu konsepsi politik keadilan yang berdiri sendiri, yang dirumuskan dalam istilah politik alih-alih metafisik.

Dalam kerangka ini, Rawls memperkenalkan gagasan nalar publik. Nalar publik adalah jenis penalaran yang layak digunakan ketika warga dan pejabat membenarkan posisi mereka terkait pokok-pokok konstitusional dan persoalan-persoalan mendasar mengenai keadilan (*Rawls 1993, 1997*). Dalam konteks semacam ini, warga memiliki kewajiban kesantunan sipil. Kewajiban ini menuntut mereka untuk saling menawarkan alasan yang bersandar pada nilai-nilai politik yang dapat diterima warga lain yang wajar, meskipun mereka berbeda dalam doktrin komprehensif. Alasan-alasan religius tidak sepenuhnya dikeluarkan dari diskusi politik, tetapi tunduk pada sebuah *proviso*. Warga yang menginvokasi alasan-alasan semacam itu harus, pada waktunya, juga bersedia menopang posisi politik yang sama dengan alasan-

alasan publik yang tidak mengandaikan doktrin komprehensif mana pun (Rawls 1997; Audi and Wolterstorff 1997).

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, banyak yang patut diapresiasi dalam arsitektur Rawlsian ini. Ia menanggapi dengan serius bahaya mayoritarianisme religius dan pengesahan klaim kebenaran religius oleh negara, serta berupaya melindungi minoritas dari pemaksaan (Larmore 1996; Forst 2012). Pada saat yang sama, arsitektur ini memiliki implikasi yang jelas. Sekalipun warga secara pribadi boleh dimotivasi oleh Sabda, bahasa pembenaran resmi dalam hukum dan kebijakan harus menjadi independen dari Sabda ketika berbicara kepada komunitas sebagai keseluruhan. Sabda, paling jauh, berperan sebagai motivasi latar, bukan bagian dari struktur publik yang menjelaskan mengapa klaim-klaim tertentu tentang martabat manusia dan telos memiliki kewibawaan atas semua orang (Mutaqin 2025b).

2.2 Teori diskursus Habermasian: pembelajaran pasca-sekuler dan penerjemahan

Jürgen Habermas berbagi keprihatinan Rawls tentang legitimasi di bawah kondisi pluralisme, tetapi teori diskursusnya mengembangkan jalur yang berbeda. Bagi Habermas, legitimasi hukum dalam demokrasi konstitusional muncul dari prosedur di mana mereka yang terdampak oleh norma-norma hukum dapat berpartisipasi sebagai yang setara dalam per deliberasian rasional (Habermas 1996). Hukum berfungsi sebagai medium yang menerjemahkan daya komunikatif, yang dihasilkan dalam perdebatan publik, ke dalam daya administratif.

Dalam tulisan-tulisan kemudian tentang masyarakat pasca-sekuler, Habermas secara lebih eksplisit mengakui bahwa agama tetap menjadi sumber penting bagi wawasan dan motivasi moral. Ia berargumen bahwa masyarakat yang sekuler secara refleksif tidak semestinya memperlakukan kontribusi religius sekadar sebagai sisa-sisa tahap terdahulu, melainkan sebagai pembawa kebenaran yang mungkin (Habermas 2006, 2008). Hal ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, warga sekuler memiliki kewajiban keterbukaan; mereka hendaknya bersedia mendengarkan argumen religius dalam bahasanya sendiri dan ikut serta dalam upaya penerjemahan yang bersifat kooperatif. Kedua, Habermas membedakan antara ruang publik informal dan institusi formal. Dalam masyarakat sipil, warga bebas menggunakan bahasa religius, termasuk rujukan eksplisit pada kitab suci dan pewahyuan. Namun di parlemen, pengadilan, dan lembaga administratif, bahasa yang diperhitungkan dalam pembenaran hukum haruslah sekuler (Habermas 1996, 2006).

Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, ini merupakan kemajuan penting dibandingkan sekularisme kaku. Habermas mengakui status epistemik tradisi-tradisi religius dan memperlakukan tradisi-tradisi tersebut sebagai mitra dalam pembelajaran timbal balik (Casanova 1994; Taylor 2007). Namun peran struktural yang diberikan kepada alasan-alasan religius tetap terbatas. Hanya residu religius yang telah diterjemahkan secara sekuler yang dapat memasuki pembenaran final atas hukum. Otoritas Sabda sebagai Sabda, yakni sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, tidak diakui pada titik ketika norma-norma hukum diadopsi dan ditegakkan (Habermas 2006; Forst 2012; Mutaqin 2025b).

2.3 Netralitas liberal dan sekularisme prosedural dalam praktik

Di samping teori-teori eksplisit tersebut, banyak demokrasi beroperasi dengan seperangkat gagasan yang lebih menyebar yang sering disebut sebagai netralitas liberal dan sekularisme prosedural. Di sini penekanan kurang diberikan pada uraian filosofis yang sistematis dan lebih

pada pengaturan institusional serta budaya politik (*Larmore 1996; Quong 2011*). Ideal netralitas menyatakan bahwa negara tidak seharusnya mengadopsi doktrin komprehensif apa pun sebagai pandangan resmi tentang dunia. Sekularisme prosedural menerjemahkan ideal ini ke dalam praktik-praktik konkret yang memisahkan lembaga-lembaga keagamaan dari negara dan mendorong penggunaan alasan-alasan yang dianggap umum, rasional, atau ilmiah dalam hukum dan kebijakan (*Casanova 1994; Taylor 2007*).

Namun, seiring waktu, sebuah pergeseran kerap terjadi. Dalam ketiadaan artikulasi bersama tentang norma dan telos yang ultimat, penalaran publik dan perancangan kebijakan cenderung semakin bergantung pada rasionalitas teknokratis dan ekonomis (*Forst 2012; Galeotti 2015*). Keputusan-keputusan dibingkai dalam istilah efisiensi, efektivitas biaya, dan stabilitas sistem. Martabat manusia dan telos terus disebut, tetapi kriteria operasional untuk memilih di antara opsi-opsi terutama disediakan oleh model-model risiko, utilitas, dan pemeliharaan sistem. Hasilnya adalah konfigurasi yang kelak dalam artikel ini dinamai sekularisme kosong (*Taylor 2007; Mutaqin 2025b*).

2.4 Penilaian awal dari cakrawala martabat dan telos

Penilaian yang adil atas model-model ini harus dimulai dengan mengakui capaian-capaian mereka (*Rawls 1993; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011*). Model-model tersebut berupaya mencegah peleburan kekuasaan negara dengan satu doktrin religius atau anti-religius mana pun dan melindungi minoritas serta kebebasan nurani. Namun ketika dilihat dari cakrawala martabat dan telos, sebagaimana dijernihkan dalam karya sebelumnya, sebuah keterbatasan bersama menjadi tampak (*Waldron 2012; Nussbaum 2006*). Ketiga konfigurasi tersebut berusaha memegang bersama dua komitmen. Di satu sisi, mereka ingin menegaskan bahasa yang kuat tentang martabat manusia dan nilai moral yang setara. Di sisi lain, mereka enggan mengakui Sabda, atau sumber pewahyuan analog, sebagai otoritas publik terkait norma dan telos.

Aksioma-aksioma martabat minimal yang dikembangkan dalam karya sebelumnya mempertajam ketegangan ini (*Mutaqin 2025b; Sangiovanni 2017*). Jika kita mengklaim bahwa setiap manusia memiliki martabat melekat yang tidak dapat direduksi menjadi fungsi, bahwa martabat ini setara, bahwa tidak seorang pun boleh direduksi menjadi instrumen semata, bahwa keseluruhan spektrum kerentanan termasuk dalam lingkup kepedulian, dan bahwa institusi harus bertanggung jawab terhadap jejak historisnya sendiri, maka kita berutang sebuah penjelasan tentang apa itu manusia dan mengapa harkat mereka memiliki struktur seperti itu. Kapasitas, evolusi, dan kontrak, diambil sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak dapat sepenuhnya menjawab tuntutan tersebut. Sabda diperkenalkan sebagai cakrawala yang niscaya. Jika ini benar, maka model-model nalar publik yang menolak mengizinkan Sabda tampil dalam struktur pembenaran hukum dan kebijakan menghadapi sebuah pilihan. Entah mereka mengendurkan isi pembicaraan tentang martabat sehingga tidak lagi memikul seluruh bobot aksioma-aksioma tersebut, atau mereka diam-diam bergantung pada sumber norma dan telos yang enggan mereka sebutkan (*Taylor 2007; Forst 2012; Mutaqin 2025b*). Inilah yang menyiapkan panggung bagi analisis atas sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan.

3. Dua kegagalan: sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan

Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa model-model dominan nalar publik berupaya menstabilkan demokrasi di bawah pluralisme mendalam dengan menjaga Sabda tetap berjarak

dari struktur pembenaran hukum dan kebijakan (Taylor 2007; Forst 2012; Casanova 1994). Mereka melakukan itu dengan alasan yang tidak sepele. Namun begitu aksioma-aksioma martabat minimal dan peran Sabda ditanggapi dengan serius, model-model ini menghadapi ketegangan internal. Di bawah tekanan tersebut, praktik-praktik demokratis cenderung bergeser menuju dua konfigurasi yang cacat: sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan.

3.1 Sekularisme kosong: ketika prosedur bertahan dan telos menguap

Sekularisme kosong tidak identik dengan pemisahan prinsipil antara lembaga-lembaga keagamaan dan negara. Sekularisme kosong adalah sebuah kondisi struktural di mana cakrawala norma dan telos yang menopang pembenaran publik tidak lagi diartikulasikan, sekalipun bahasa martabat manusia dan hak-hak tetap digunakan (Taylor 2007). Pergeseran menuju sekularisme kosong dapat dimulai dari komitmen-komitmen yang wajar terhadap netralitas dan keteraksesan alasan, tetapi secara bertahap mengikis pengakuan publik atas sumber berwibawa mana pun bagi norma dan telos, termasuk Sabda (Larmore 1996; Quong 2011; Forst 2012; Galeotti 2015).

Ketika kita menguji konfigurasi ini terhadap aksioma-aksioma martabat minimal, kekurangannya menjadi tampak. Aksioma 1 dan Aksioma 2 dikompromikan ketika pribadi-pribadi dinilai terutama dalam istilah produktivitas, potensi penghasilan, atau profil risiko, sehingga merongrong martabat yang melekat dan setara (Nussbaum 2006; Waldron 2012; Fineman 2008). Aksioma 3 terancam ketika manusia diperlakukan sebagai variabel dalam persoalan optimasi, terutama di bawah rezim tata kelola berbasis data (Meilaender 2009; Jonas 1984). Aksioma 4 melemah ketika mereka yang berada di tepi kehidupan atau yang memiliki kebutuhan mahal secara sistematis dirugikan (Fineman 2008). Aksioma 5 dilemahkan oleh cakrawala waktu yang pendek dan rasa puas diri prosedural yang mengabaikan jejak historis eksklusif dan penghinaan (Jonas 1984; Forst 2012). Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, sekularisme kosong dapat digambarkan sebagai konfigurasi di mana Logika dan fragmen-fragmen Qualia digunakan tanpa diankrakan pada Sabda, Mistika, Akhlak, atau Intention–Trace Alignment (Mutaqin 2025a, 2025b).

3.2 Teokrasi penuh ketakutan: ketika satu tafsir atas Sabda membekukan sirkuit

Teokrasi penuh ketakutan adalah bayangan cermin dari sekularisme kosong. Ia muncul ketika komunitas-komunitas yang mengalami luka akibat normativitas kosong merespons dengan berupaya memasang kembali Sabda di pusat kekuasaan politik, namun melakukannya dengan cara yang menyamakan Sabda dengan satu tafsir historis tertentu dan melindungi tafsir tersebut dari koreksi (Casanova 1994; Taylor 2007; MacIntyre 1981). Sebuah monopoli atas penafsiran ditegaskan, deliberasi politik direduksi menjadi penalaran satu-arah berbasis Sabda, perbedaan pendapat didelegitimasi, dan Sabda berada dalam risiko diinstrumentalisasi bagi proyek-proyek identitas dan kendali.

Ketika diuji dengan aksioma-aksioma martabat, teokrasi penuh ketakutan juga gagal. Aksioma 1 dan Aksioma 2 dilanggar ketika para pihak yang berbeda pendapat atau minoritas diperlakukan bukan sebagai partisipan penuh dalam kehidupan publik, sekalipun status formal mereka sebagai warga tetap utuh (Nussbaum 2006; Kittay 1999). Aksioma 3 terancam ketika hidup dan tubuh diperlakukan sebagai bahan mentah bagi proyek-proyek pemurnian religius atau pemulihan kultural (Fineman 2008; Meilaender 2009). Aksioma 4 menderita ketika mereka yang paling rentan berasal dari kelompok yang sudah termarjinalkan, yang

penderitaannya dirasionalisasi sebagai biaya yang perlu untuk mempertahankan kemurnian atau ketertiban (*Fineman 2008*). Aksioma 5 dirongrong ketika institusi menampilkan diri sebagai perwujudan setia Sabda secara definisional, sehingga kritik atas rekam jejak historis mereka dialihkan menjadi seolah-olah serangan terhadap yang sakral (*Jonas 1984; Forst 2012*). Dilihat melalui The Cohesive Tetrad, teokrasi penuh ketakutan adalah konfigurasi di mana Sabda ditegaskan tanpa mengizinkan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment melakukan kerja sewajarnya untuk menguji dan memurnikan klaim-klaim yang diajukan atas nama Sabda (*Mutaqin 2025a, 2025b; MacIntyre 1981*).

3.3 Koneksi struktural dan pencarian konfigurasi ketiga

Sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan dapat tampak sebagai kebalikan satu sama lain. Namun pada tingkat struktural, keduanya saling terhubung. Keduanya muncul dari salah-penempatan Sabda di dalam arsitektur tata kelola kebenaran (*Taylor 2007; Forst 2012*). Sekularisme kosong salah-menempatkan Sabda dengan mengusirnya dari struktur pembenaran publik. Teokrasi penuh ketakutan salah-menempatkan Sabda dengan meruntuhkannya ke dalam satu tafsir yang ditempatkan di luar jangkauan koreksi. Dalam kedua kasus, relasi antara Sabda dan register-register lain dalam The Cohesive Tetrad menjadi terdistorsi (*Galeotti 2015; Sangiovanni 2017*).

Jika analisis karya-karya sebelumnya diterima, demokrasi-demokrasi yang ingin mempertahankan klaim-klaim kuat tentang martabat manusia dan telos tidak dapat bertahan tanpa batas dalam salah satu konfigurasi ini (*Mutaqin 2025b*). Mereka menghadapi sebuah trilema. Mereka dapat melemahkan wacana martabat sehingga tidak lagi menyatakan lebih dari yang dapat dijustifikasi oleh fondasi-fondasi sekuler mereka. Mereka dapat tergelincir ke, atau memeluk, teokrasi penuh ketakutan. Atau mereka dapat mencari sebuah konfigurasi ketiga di mana Sabda diakui secara publik sebagai cakrawala norma dan telos, sementara keseluruhan arsitektur The Cohesive Tetrad menstrukturkan cara klaim-klaim atas kebenaran, termasuk yang berakar pada Sabda, bergerak melalui institusi-institusi demokratis.

4. Sabda dan arsitektur tata kelola kebenaran demokratis

Analisis sejauh ini telah menunjukkan bahwa model-model dominan nalar publik entah mengosongkan cakrawala publik tentang norma dan telos atau justru mengundang upaya reaktif untuk mentakhtakan satu tafsir atas Sabda sebagai otoritas politik yang tak dapat digugat (*Mutaqin 2025b*). Jika aksioma-aksioma martabat minimal dan argumen-argumen sebelumnya tentang Sabda ditanggapi dengan serius, kedua keluaran ini tidak dapat diterima. Kita memerlukan sebuah konfigurasi di mana Sabda dapat memainkan peran normatifnya tanpa menghancurkan kebebasan demokratis, pluralisme, dan akuntabilitas institusional.

4.1 Posisi Sabda di dalam The Cohesive Tetrad

The Cohesive Tetrad adalah sebuah arsitektur enam register bagi tata kelola kebenaran. Arsitektur ini terdiri dari Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Sabda dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Logika merujuk pada praktik-praktik terdisiplin dalam melakukan inferensi dan pemeriksaan konsistensi. Qualia menamai pengalaman hidup di bawah rezim hukum, kebijakan, dan teknologi. Mistika adalah *Mistika, the intentional–*

spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Akhlak berkaitan dengan karakter moral yang dapat diamati. Intention–Trace Alignment berkaitan dengan derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik lintas waktu.

Di dalam arsitektur ini, Sabda menempati posisi sebagai otoritas penetap cakrawala. Register-register lain tidak bersaing dengan Sabda pada tingkat yang sama. Register-register tersebut bertindak sebagai kanal yang harus dilalui klaim-klaim yang berakar pada Sabda maupun klaim-klaim yang berakar pada keahlian sekuler agar dapat dipandang dapat dipercaya dalam kehidupan publik (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Menjaga Sabda dan register-register lainnya tetap terkait secara terdisiplin bersifat esensial untuk menahan baik sekularisme kosong maupun teokrasi penuh ketakutan.

4.2 Mendefinisikan tata kelola kebenaran demokratis

Tata kelola kebenaran demokratis, sebagaimana digunakan dalam artikel ini, tidak berarti bahwa pemerintah memiliki kebenaran dalam pengertian kepemilikan eksklusif. Istilah ini merujuk pada struktur dan praktik melalui mana klaim-klaim atas kebenaran, khususnya dalam urusan norma dan telos, dibawa ke dalam institusi demokratis, diuji, dan dikenai koreksi dari waktu ke waktu (*Forst 2012; Sangiovanni 2017*). Empat kondisi mendefinisikan tata kelola kebenaran demokratis dalam masyarakat majemuk: keterbukaan sumber, perlindungan martabat dan kebebasan nurani, mekanisme koreksi internal, dan integrasi berbagai register. Kondisi-kondisi ini menggaungkan sekaligus memperdalam aksioma-aksioma martabat (*Waldron 2012; Nussbaum 2006*) dan hak atas pembenaran dalam teori politik kontemporer (*Forst 2012*).

Dengan definisi ini, The Cohesive Tetrad merupakan sebuah kandidat arsitektur bagi tata kelola kebenaran demokratis. Arsitektur ini tidak meresepkan satu bentuk konstitusional tertentu. Ia menetapkan pola-pola normatif dan epistemik yang harus ditampilkan setiap tatanan demokratis jika ingin memperlakukan martabat dan telos secara berintegritas (*Mutaqin 2025a, 2025b*).

4.3 Peran normatif Sabda dalam demokrasi

Di dalam arsitektur ini, Sabda memainkan empat peran normatif yang tidak dapat sepenuhnya diambil alih oleh sumber-sumber lain. Pertama, Sabda mendasari martabat melekat dan setara dengan menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan, disapa, dan dinilai dengan cara yang tidak bergantung pada kapasitas, status, atau kontribusi (*Waldron 2012; Nussbaum 2006; Sangiovanni 2017*). Kedua, Sabda menetapkan non-instrumentalisasi sebagai batas yang mengikat dengan berbicara tentang manusia sebagai pemikul panggilan atau telos yang tidak dapat ditundukkan pada kalkulus instrumental semata (*Jonas 1984; Meilaender 2009*). Ketiga, Sabda mengintegrasikan seluruh spektrum kerentanan ke dalam cakrawala kepedulian dengan menyapa yang lemah dan yang tersisih dengan cara yang menolak eksklusi mereka (*Kittay 1999; Fineman 2008; Nussbaum 2006*). Keempat, Sabda menyediakan norma untuk mengevaluasi jejak historis institusi dengan menamai bentuk-bentuk penindasan dan memanggil pertobatan (*Jonas 1984; Forst 2012*).

Tidak satu pun dari peran-peran ini dapat diisi secara memadai hanya dengan merujuk pada kapasitas, evolusi, atau kontrak-kontrak yang saling menguntungkan. Rujukan-rujukan tersebut mungkin menyumbang wawasan parsial. Namun rujukan itu tidak cukup untuk

menstabilkan klaim-klaim kuat tentang martabat yang diajukan demokrasi dalam konstitusi dan putusan pengadilan mereka. Sabda diperlukan agar klaim-klaim tersebut menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar retorika yang diwarisi (*Mutaqin 2025b*).

4.4 Prioritas epistemik Sabda atas logika dan data

Mengakui peran normatif Sabda dalam demokrasi menimbulkan sebuah pertanyaan yang peka. Dalam pengertian apa kita dapat berbicara tentang prioritas Sabda atas logika dan data tanpa menyangkal legitimasi penyelidikan rasional dan bukti empiris. Artikel ini menjawabnya dengan membedakan tingkatan otoritas. Sabda memiliki prioritas pada tingkat norma dan telos, dengan menetapkan batas dan arah di dalamnya logika dan data beroperasi (*Mutaqin 2025b; Jonas 1984*). Logika dan data memiliki otoritas instrumental, bukan otoritas final, dalam urusan norma dan telos (*Forst 2012; Floridi and Cowls 2019*). Ketika muncul konflik antara sesuatu yang secara teknis tampak paling optimal dan sesuatu yang oleh Sabda dinyatakan tidak selaras dengan martabat manusia, Sabda memiliki prioritas pre-emptive (*Jonas 1984; MacIntyre 1981*). Pola ini menahan sekularisme kosong dengan menolak menjadikan logika dan data sebagai sumber senyap bagi norma dan telos, dan menahan teokrasi penuh ketakutan dengan menegaskan bahwa klaim-klaim tentang apa yang dituntut Sabda harus senantiasa diperiksa dalam terang logika dan pengetahuan empiris.

4.5 Mengintegrasikan Sabda ke dalam proses demokratis melalui Tetrad

Dengan pembedaan-pembedaan ini dalam pandangan, kita dapat menjelaskan secara lebih konkret bagaimana Sabda dan register-register lain dalam The Cohesive Tetrad dapat menstrukturkan pengambilan keputusan demokratis. Artikel ini menyajikan sebuah urutan skematis: perumusan klaim-klaim publik, pengujian logis dan konseptual, konfrontasi dengan pengalaman hidup, pemeriksaan orientasi intensional, evaluasi karakter moral dan pola-pola institusional, serta audit jangka panjang atas niat dan jejak (*Rawls 1993; Habermas 1996; Forst 2012; Kittay 1999; Fineman 2008; MacIntyre 1981; Nussbaum 2006; Jonas 1984; Mutaqin 2025b*). Dalam urutan ini, Sabda diintegrasikan ke dalam proses demokratis bukan sebagai latar privat yang opsional dan bukan sebagai kartu truf yang mengakhiri diskusi. Sabda berfungsi sebagai cakrawala norma dan telos di dalam arsitektur multi-register yang menuntut kejernihan logis, kepekaan terhadap pengalaman, pemeriksaan niat, pembinaan Akhlak, dan akuntabilitas jangka panjang.

5. The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur nalar publik

Jika tata kelola kebenaran demokratis menamai cara klaim-klaim atas norma dan telos seharusnya bergerak melalui institusi, nalar publik menamai cara warga dan pejabat seharusnya berbicara satu sama lain ketika mereka membenarkan hukum-hukum koersif. Bagian-bagian sebelumnya telah berargumen bahwa model-model dominan nalar publik bersifat tidak stabil secara struktural begitu aksioma-aksioma martabat dan kebutuhan akan Sabda sebagai cakrawala ditanggapi dengan serius (*Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Taylor 2007; Forst 2012; Galeotti 2015*). Bagian ini mengajukan sebuah alternatif. Bagian ini mengembangkan The Cohesive Tetrad bukan hanya sebagai kerangka bagi tata kelola kebenaran, tetapi sebagai arsitektur nalar publik yang sesuai bagi demokrasi majemuk.

5.1 Dari satu register ke nalar publik multi-register

Ideal-ideal nalar publik satu-register muncul sebagai respons terhadap bahaya-bahaya yang nyata: risiko bahwa warga membenarkan hukum dengan menginvokasi kebenaran doktrin komprehensif mereka sendiri, sehingga menempatkan yang lain dalam posisi inferior permanen (*Rawls 1993, 1997; Habermas 1996*). Model-model ini meminta warga untuk menawarkan alasan-alasan publik yang dirumuskan dalam kosakata yang tidak mengandaikan penerimaan atas pandangan tertentu tentang Tuhan, pewahyuan, atau metafisika, yang sering dirumuskan sebagai nilai-nilai politik atau prinsip-prinsip konstitusional (*Audi and Wolterstorff 1997; Larmore 1996; Quong 2011*). Namun, begitu kekuatan bahasa martabat dalam praktik konstitusional diakui, model-model satu-register entah mengikis kosakata bersama sedemikian rupa sehingga tidak lagi memikul klaim-klaim kuat, atau mereka secara implisit bergantung pada sumber-sumber norma dan telos yang tidak diakui. Dalam praktik, hal ini sering kali menghasilkan sekularisme kosong yang telah dijelaskan sebelumnya (*Taylor 2007; Forst 2012; Galeotti 2015*).

Alternatif yang diajukan di sini adalah memperlakukan nalar publik sebagai praktik multi-register yang distrukturkan oleh The Cohesive Tetrad. Nalar publik didefinisikan sebagai praktik di mana warga dan institusi dalam suatu demokrasi membawa klaim-klaim tentang hukum dan kebijakan koersif ke dalam disiplin bersama Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment, untuk sampai pada keputusan-keputusan yang dapat dibenarkan kepada semua pihak sebagai konsisten dengan martabat manusia dan telos di tengah perbedaan mendalam (*Mutaqin 2025b; Forst 2012; Fraser 1990, 2008*). Argumen-argumen berbasis Sabda tidak diwajibkan menghilang dari wacana publik (*Casanova 1994; Taylor 2007*). Argumen moral sekuler dan wawasan ilmiah tidak diturunkan derajatnya (*Forst 2012; Sangiovanni 2017*). Keteraksesan dicapai pada tingkat proses, bukan melalui homogenitas linguistik (*Fraser 1990, 2008; Galeotti 2015*).

5.2 Kondisi-kondisi normatif bagi kehadiran publik Sabda

Jika Sabda hendak diakui secara publik sebagai cakrawala norma dan telos, sejumlah kondisi harus dipenuhi untuk mencegah kemerosotan ke dalam teokrasi penuh ketakutan. Artikel ini merumuskan empat kondisi semacam itu: universalitas pihak yang disapa, tidak adanya pemaksaan terhadap nurani, penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap perbedaan pendapat. Universalitas pihak yang disapa menuntut agar Sabda, sebagaimana diinvokasi dalam ruang publik, dipahami sebagai berbicara tentang martabat dan telos semua manusia, bukan hanya penganut satu komunitas tertentu (*Nussbaum 2006; Waldron 2012; Sangiovanni 2017*). Tidak adanya pemaksaan terhadap nurani menegaskan kembali wawasan liberal bahwa negara tidak boleh memaksa keyakinan, bahkan ketika norma-norma dibenarkan dengan merujuk pada Sabda (*Audi and Wolterstorff 1997; Forst 2012*). Penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan menuntut agar klaim-klaim tentang apa yang dituntut Sabda terbuka terhadap penelaahan oleh Logika, Qualia, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment (*Forst 2012; MacIntyre 1981; Mutaqin 2025b*). Perlindungan terhadap perbedaan pendapat menjaga status warga yang berbeda pendapat dan para kritikus internal sebagai pemikul martabat sepenuhnya, serta mengakui perbedaan pendapat sebagai pembawa Qualia dan pemicu bagi audit keselarasan (*Fraser 1990, 2008; Galeotti 2015*).

5.3 Peran institusional dari enam register

Agar The Cohesive Tetrad dapat berfungsi sebagai arsitektur nalar publik, register-registernya harus menemukan ekspresi konkret dalam institusi. Dalam lembaga legislatif, hal ini mengimplikasikan bahwa argumen-argumen yang diinformasikan oleh Sabda dapat muncul secara eksplisit, bahwa penelaahan logis atas pembenaran menjadi bagian praktik yang diakui, bahwa perhatian yang terstruktur terhadap Qualia dilembagakan, dan bahwa lembaga legislatif berkomitmen pada evaluasi berkala atas dampak jangka panjang hukum, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan (*Casanova 1994; Taylor 2007; Rawls 1993; Forst 2012; Kittay 1999; Fineman 2008; Jonas 1984; Mutaqin 2025b*). Dalam pengadilan, hal ini berarti bahwa cakrawala Sabda dan martabat yang membentuk komitmen konstitusional diakui tanpa menjadikan para hakim sebagai teolog, bahwa konsistensi logis dan doktrinal menjadi pusat, bahwa masukan pengalaman dari pihak-pihak berperkara dan *amici curiae* diambil dengan serius, dan bahwa pengadilan tetap bersedia meninjau kembali preseden yang jejak historisnya telah menjadi tidak adil (*Habermas 1996; Waldron 2012; Nussbaum 2006; Kittay 1999; Fineman 2008; MacIntyre 1981; Jonas 1984; Mutaqin 2025b*).

Dalam lembaga eksekutif dan praktik birokratis, The Cohesive Tetrad membimbing baik perancangan kebijakan maupun implementasinya. Sabda dan aksioma-aksioma martabat membentuk cakrawala, sementara logika dan data digunakan untuk memahami relasi kausal dan mengantisipasi dampak tak terduga, dan Qualia diakses melalui proses-proses partisipatif (*Nussbaum 2006; Fineman 2008; Forst 2012*). Implementasi dibentuk oleh Mistika dalam pengertian akuntabilitas terhadap cakrawala transenden, oleh Akhlak dalam kultur organisasi, dan oleh Intention–Trace Alignment melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang melacak konsekuensi yang dialami, bukan hanya keluaran kuantitatif (*MacIntyre 1981; Jonas 1984*).

Akhirnya, dalam badan-badan etik dan regulator yang menangani bioteknologi dan kecerdasan buatan, The Cohesive Tetrad menyediakan templat untuk mengevaluasi sistem-sistem baru yang berdaya besar. Sabda mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal tentang praktik-praktik yang mungkin secara inheren tidak selaras dengan martabat dan telos, sekalipun efisien (*Jonas 1984; O’Neil 2016; Eubanks 2018*). Logika dan data digunakan untuk menelaah sifat-sifat teknis dan klaim-klaim tentang keamanan (*Cath 2018; Floridi and Cowls 2019*). Qualia memastikan bahwa keputusan regulatif diinformasikan oleh pengalaman mereka yang paling berdampak (*Eubanks 2018; Fineman 2008*). Mistika dan Akhlak menyinggung pembentukan moral para perancang, pelaksana, dan regulator (*MacIntyre 1981; Nussbaum 2006*). Intention–Trace Alignment mengamankan audit berkelanjutan atas penerapan AI (*O’Neil 2016; Jonas 1984; Mutaqin 2025b*).

6. Kasus-kasus stilistis: menerapkan arsitektur

Arsitektur yang diajukan sejauh ini masih berada pada tingkat abstraksi yang relatif tinggi. Untuk menguji koherensi dan daya pembedanya, arsitektur ini harus dibawa bersentuhan dengan situasi-situasi yang menyerupai jenis konflik yang benar-benar dihadapi demokrasi. Karena itu, artikel ini membahas tiga kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola digital.

6.1 Bioetika: kehidupan rapuh di ambang kematian

Kasus pertama menyangkut regulasi penghentian terapi penunjang hidup bagi pasien yang secara ireversibel tidak sadar, tanpa prospek pemulihan yang wajar, dan dengan kehendak awal yang ambigu. Di bawah sekularisme kosong, bahasa formal legislasi dan kebijakan bersifat sekuler dan tampak netral, dan komite etik membingkai persoalan dalam istilah efektivitas biaya dan *quality adjusted life years* (Pellegrino 1999; Nussbaum 2006). Martabat disebutkan tetapi didefinisikan secara fungsional melalui proksi seperti kesadaran dan kapasitas untuk preferensi. Mereka yang tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri berisiko diperlakukan terutama sebagai pusat biaya.

Sebaliknya, di bawah teokrasi penuh ketakutan, sebuah pembacaan Sabda yang diotorisasi menyatakan bahwa penghentian terapi penunjang hidup dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. Hukum mewajibkan kelanjutan semua intervensi sampai kematian biologis, tanpa memedulikan konteks, dan keluarga atau klinisi yang mempertanyakannya ditegur sebagai kurang iman (Meilaender 2009; Jonas 1984). Sabda terus-menerus diinvokasi, tetapi Logika, Qualia, dan Akhlak dibungkam. Pasien dan keluarga berisiko menjadi instrumen dalam proyek mempertahankan suatu tafsir.

Di bawah tata kelola kebenaran demokratis yang dibentuk oleh The Cohesive Tetrad, Sabda berbicara secara publik tentang harga setiap kehidupan manusia dan menyatakan bahwa kehidupan tersebut tidak dapat dibuang, namun penafsiran atas Sabda dikenai analisis logis dan pengujian pengalaman (Pellegrino 1999; Sulmasy 2002; Meilaender 2009; Kittay 1999; Fineman 2008; Mutaqin 2025b). Logika membedakan antara membunuh dan membiarkan mati, antara intervensi proporsional dan tidak proporsional. Qualia diakses melalui perjumpaan terstruktur dengan keluarga dan klinisi. Mistika dan Akhlak memeriksa motif dan kultur institusional. Intention–Trace Alignment mengikat polis untuk meninjau kembali regulasi dalam terang dampak historisnya. Hukum yang dihasilkan dapat melarang pengakhiran hidup secara aktif, menegaskan praduga kuat untuk perawatan dasar, dan mengizinkan penghentian intervensi yang sia-sia di bawah kriteria yang jelas. Hukum ini menghormati aksioma-aksioma martabat secara lebih setia dibanding alternatif-alternatifnya.

6.2 Kebijakan sosial: hidup yang mahal dan kesejahteraan warga difabel

Kasus kedua menyangkut dukungan jangka panjang bagi warga dengan disabilitas mendalam yang membutuhkan bantuan ekstensif dan kecil kemungkinannya memasuki pasar tenaga kerja. Di bawah sekularisme kosong, perdebatan dibingkai terutama dalam istilah keberlanjutan fiskal dan insentif. Warga difabel diakui sebagai pemikul hak, tetapi logika operasional menimbang biaya finansial dukungan komprehensif terhadap keuntungan kesejahteraan agregat (Nussbaum 2006; Fineman 2008). Mereka yang kebutuhannya paling mahal dan kontribusinya paling kecil terhadap produktivitas terukur ditempatkan dalam posisi tersangka.

Di bawah teokrasi penuh ketakutan, warga difabel dapat digambarkan sebagai pemikul berkah khusus atau ujian bagi iman komunitas, namun struktur konkret dukungan negara tetap tipis. Keluarga-keluarga didorong untuk menerima beban mereka sebagai panggilan ilahi, sementara permohonan bantuan lebih lanjut berisiko distigmatisasi (Kittay 1999; Meilaender 2009). Sabda digunakan untuk memberikan makna pada penderitaan, tetapi Logika, Qualia, dan Akhlak tidak cukup diaktifkan. Ketidakadilan struktural dispiritualkan.

Di bawah tata kelola kebenaran demokratis, Sabda membentuk cakrawala dengan berbicara tentang harga setara mereka yang lemah serta kewajiban untuk merawat mereka yang tidak dapat merawat dirinya sendiri (*Nussbaum 2006; Kittay 1999*). Logika menelaah bagaimana desain yang berbeda mendistribusikan beban dan peluang, dengan bertumpu pada teori egalitarian (*Anderson 1999; Fraser 1990, 2008*). Qualia dibawa ke pusat melalui proses partisipatif yang melibatkan warga difabel dan keluarga mereka sebagai ko-perancang sistem dukungan (*Kittay 1999; Fineman 2008*). Mistika dan Akhlak menanyakan apa yang sesungguhnya dicari otoritas publik dalam perdebatan ini dan mengungkap godaan untuk mempertahankan kenyamanan sambil memelihara citra diri moral (*MacIntyre 1981*). Intention–Trace Alignment menuntut agar program-program ditinjau dari waktu ke waktu untuk pola ketergantungan atau eksklusi yang tidak diinginkan (*Jonas 1984; Mutaqin 2025b*). Hasilnya adalah sebuah kebijakan sosial yang mengalokasikan sumber daya serius untuk memastikan bahwa bahkan warga dengan disabilitas mendalam dapat hidup dengan cara yang mengekspresikan telos mereka sebagai manusia.

6.3 Infrastruktur digital dan AI: mengskor, memilah, dan mengelola melalui data

Kasus ketiga menyangkut adopsi sistem kecerdasan buatan untuk tata kelola sosial, seperti sistem penskoran algoritmik untuk mengalokasikan manfaat kesejahteraan, memprediksi risiko kejahatan, atau memprioritaskan akses ke layanan publik. Di bawah sekularisme kosong, argumen untuk sistem semacam itu berfokus pada efisiensi, akurasi, dan pengurangan bias manusia (*O’Neil 2016; Eubanks 2018*). Martabat manusia diinvokasi sebagai alasan untuk menghapus diskriminasi eksplisit, tetapi pertanyaan yang lebih dalam tentang apakah bentuk-bentuk klasifikasi otomatis tertentu selaras dengan perlakuan terhadap warga sebagai pemikul telos jarang diajukan. Mereka yang menempati posisi marginal menjadi subjek pengawasan dan kendali yang diintensifkan, dipetakan melalui jejak data yang tidak mereka setuju untuk dihasilkan.

Di bawah teokrasi penuh ketakutan, Sabda diinvokasi untuk membenarkan sistem digital bagi pengawasan dan penegakan moral. Otoritas dapat mempresentasikan sistem penskoran sebagai alat untuk mengidentifikasi mereka yang menyimpang dari norma perilaku yang ditetapkan, termasuk norma religius, dan mengintegrasikan partisipasi dalam ibadah serta kepatuhan pada kode religius ke dalam skor komposit (*Jonas 1984; Taylor 2007*). Pembedaan antara penghakiman ilahi dan pemantauan manusia menjadi kabur, dan pertanyaan logis atau empiris tentang dampak merugikan sistem disingkirkan.

Di dalam arsitektur berbasis Tetrad, perdebatan tentang AI bagi tata kelola sosial mengambil bentuk yang berbeda. Sabda mengajukan pertanyaan awal tentang ranah-ranah di mana penskoran algoritmik secara inheren tidak selaras dengan martabat dan telos manusia dan harus dilarang sejak awal (*Jonas 1984; Forst 2012*). Logika dan data diaktifkan sepenuhnya tetapi diperlakukan sebagai instrumen, bukan otoritas final (*Cath 2018; Floridi and Cows 2019*). Qualia ditempatkan di garis depan melalui penilaian partisipatif atas komunitas yang kemungkinan akan menjadi target, yang pengalaman mereka dengan gelombang sebelumnya tata kelola berbasis data dianalisis sebagai bukti (*Eubanks 2018; Fineman 2008*). Mistika dan Akhlak menyinggung pembentukan moral para perancang dan regulator, dengan menyoroti godaan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada mesin (*MacIntyre 1981; Nussbaum 2006*). Intention–Trace Alignment mengamanatkan audit berkelanjutan atas penerapan, dengan kesediaan untuk membatasi atau merancang ulang sistem yang jejak historisnya mengungkap pola-pola baru diskriminasi atau eksklusi (*O’Neil 2016; Jonas 1984; Mutaqin 2025b*).

6.4 Pelajaran dari kasus-kasus

Secara bersama-sama, kasus-kasus stilistis ini menunjukkan bahwa The Cohesive Tetrad bukan hanya menawarkan kosakata untuk mengkritik sekularisme kosong dan teokrasi penuh ketakutan. The Cohesive Tetrad menyediakan sebuah cara bernalar terstruktur yang mempertahankan capaian autentik nalar publik sekuler, menyimpan kedalaman normatif yang disuplai oleh Sabda, dan melengkapi institusi demokratis untuk menguji dan mengoreksi klaim-klaim sekuler maupun religius dengan membawa klaim-klaim tersebut ke dalam disiplin bersama Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment (*Mutaqin 2025b; Forst 2012; Nussbaum 2006; O’Neil 2016; Eubanks 2018*).

7. Implikasi dan kesimpulan

Artikel ini menanyakan bagaimana Sabda, yang didefinisikan sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, dapat diintegrasikan ke dalam nalar publik demokratis di bawah kondisi pluralisme mendalam. Artikel ini berargumen bahwa model-model dominan nalar publik, sekalipun didorong oleh keprihatinan yang sah, bersifat tidak stabil secara struktural begitu kita secara serius menanggapi baik klaim-klaim kuat tentang martabat manusia maupun peran Sabda dalam mendasari klaim-klaim tersebut (*Mutaqin 2025a, 2025b; Rawls 1993, 1997; Habermas 1996; Larmore 1996; Quong 2011*). Artikel ini mengajukan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur bagi tata kelola kebenaran demokratis dan nalar publik serta menguji arsitektur tersebut melalui kasus-kasus stilistis dalam bioetika, kebijakan sosial, dan tata kelola AI.

Secara teoretis, usulan ini menantang asumsi bahwa penghormatan terhadap pluralisme niscaya menuntut privatisasi Sabda (*Taylor 2007; Casanova 1994; Mutaqin 2025b*). Jika aksioma-aksioma martabat itu benar, maka upaya mempertahankan klaim-klaim kuat tentang martabat sambil mengecualikan Sabda dari pembenaran publik bersifat tidak stabil. Usulan ini membingkai ulang nalar publik sebagai sebuah proses alih-alih satu bahasa tunggal, dengan menyiratkan bahwa keteraksesan dan resiprositas diamankan dengan mengekspos alasan-alasan pada register-register pemeriksaan bersama, bukan dengan memaksa alasan-alasan itu masuk ke dalam idiom yang diklaim netral (*Forst 2012; Fraser 1990, 2008*). Usulan ini juga memperjelas bahwa bahaya agama politis tidak melekat secara intrinsik pada kehadiran publik Sabda, melainkan pada cara-cara tertentu salah-menempatkan Sabda di dalam arsitektur tata kelola kebenaran (*Jonas 1984; MacIntyre 1981; Galeotti 2015*).

Secara praktis, arsitektur Tetrad mengundang peninjauan kembali desain institusional. Lembaga legislatif dapat merevisi prosedur untuk memberikan tempat yang lebih terstruktur bagi kesaksian pengalaman dari kelompok-kelompok rentan, bagi audit jangka panjang atas konsekuensi legislasi, dan bagi refleksi eksplisit tentang karakter moral institusi pelaksana (*Waldron 2012; Nussbaum 2006; Fineman 2008; Forst 2012*). Pengadilan dapat memperdalam keterlibatan dengan sumber-sumber historis yang membentuk komitmen konstitusional terhadap martabat, sambil tetap berhati-hati untuk tidak menampilkan diri sebagai penentu kebenaran teologis. Lembaga eksekutif dapat mengintegrasikan proses-proses partisipatif dan pembentukan karakter ke dalam pelatihan aparatur sipil negara. Badan etik dan regulator di bidang bioteknologi dan kecerdasan buatan dapat mengadopsi kerangka evaluasi yang secara eksplisit melacak keenam register dan menolak memperlakukan keberhasilan teknis atau efisiensi sebagai pembenaran yang memadai (*O’Neil 2016; Eubanks 2018; Cath 2018; Floridi and Cowls 2019*). Pada tingkat penelitian, kerja lanjutan dapat mengembangkan studi kasus,

mengeksplorasi bagaimana tradisi-tradisi religius yang berbeda merumuskan pengertian sepadan dengan Sabda, dan merinci indikator untuk menilai Intention–Trace Alignment dalam konteks institusional yang kompleks (*Forst 2012; Sangiovanni 2017; Mutaqin 2025b*).

Di dalam rangkaian kerja yang lebih luas tentang The Cohesive Tetrad, artikel ini menempati posisi antara. Artikel pertama berargumen bahwa logika murni tidak dapat menjadi otoritas tertinggi dalam tata kelola kebenaran. Artikel kedua berargumen bahwa klaim-klaim kuat tentang martabat manusia dan telos memerlukan Sabda, yang terbenam di dalam The Cohesive Tetrad, agar dapat dimengerti (*Mutaqin 2025a, 2025b*). Artikel ini telah memperluas argumen tersebut ke ranah demokrasi dan nalar publik, dengan menunjukkan bagaimana Sabda dan Tetrad dapat menopang arsitektur tata kelola kebenaran demokratis yang menghindari baik sekularisme kosong maupun teokrasi penuh ketakutan. Artikel berikutnya dalam seri ini akan menerapkan arsitektur ini secara lebih ketat pada ranah hukum dan kecerdasan buatan, dengan menanyakan bagaimana sistem hukum dan infrastruktur AI dapat dirancang, ditafsirkan, dan dikelola sehingga menjadi instrumen tata kelola kebenaran yang menghormati martabat manusia dan telos di bawah Sabda, alih-alih menjadi mesin bagi bentuk-bentuk baru dominasi atau proseduralisme kosong (*O’Neil 2016; Cath 2018; Floridi and Cowls 2019*).



1. Anderson, E. (1999). What is the point of equality. *Ethics*, 109(2), 287–337.
2. Andorno, R. (2013). Human dignity and human rights. In D. Beyleveld, R. Brownsword, and
3. R. Andorno (Eds.), *Human Dignity in Bioethics and Law* (pp. 123–136). Oxford: Oxford University Press.
4. Audi, R., and Wolterstorff, N. (1997). *Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
5. Cath, C. (2018). Governing artificial intelligence: Ethical, legal and technical opportunities and challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), 20180080.
6. Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
7. Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St Martin's Press.
8. Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law and Feminism*, 20(1), 1–23.
9. Floridi, L., and Cows, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.
10. Forst, R. (2012). *The Right to Justification: Elements of a Constructivist Theory of Justice*. New York: Columbia University Press.
11. Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80.
12. Fraser, N. (2008). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Cambridge: Polity Press.
13. Galeotti, A. E. (2015). *Political Self-Deception*. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
15. Habermas, J. (2006). Religion in the public sphere. *European Journal of Philosophy*, 14(1), 1–25.
16. Habermas, J. (2008). Notes on a post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29.
17. Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.
18. Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*. New York: Routledge.
19. Larmore, C. (1996). *The Morals of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.
20. MacIntyre, A. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
21. Meilaender, G. (2009). *Neither Beast nor God: The Dignity of the Human Person*. Wilmington, DE: ISI Books.
22. Mutaqin, A. Z. (2025a). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
23. Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints / PhilArchive*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>

23. Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Belknap Press.
24. O’Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
25. Pellegrino, E. D. (1999). The goals and ends of medicine: How are they to be defined. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 20(5), 393–409.
26. Quong, J. (2011). *Liberalism Without Perfection*. Oxford: Oxford University Press.
27. Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
28. Rawls, J. (1997). The idea of public reason revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807.
29. Sangiovanni, A. (2017). *Humanity without Dignity: Moral Equality, Respect, and Human Rights*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
30. Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial spiritual model for the care of patients at the end of life. *The Gerontologist*, 42(special issue III), 24–33.
31. Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Cambridge, MA: Belknap Press.
32. Waldron, J. (2012). *Dignity, Rank, and Rights* (M. Kramer, Ed.). Oxford: Oxford University Press.

*
**

Sabda, Logika, dan Tata Kelola Kebenaran: The Cohesive Tetrad sebagai Kerangka bagi Hukum dan Kecerdasan Buatan

Abstrak

Artikel ini membahas suatu ketegangan struktural di jantung tata kelola kebenaran kontemporer. Lembaga-lembaga modern dalam sains, hukum, dan kecerdasan buatan kerap bergantung pada arsitektur implisit logika murni yang menggabungkan saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, serta naturalisme kuat tentang telos dan martabat manusia. Dengan bertumpu pada perumusan kanonis The Cohesive Tetrad, artikel ini mengembangkan sebuah arsitektur alternatif di mana Sabda (Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos), logika, Qualia, Mistika sebagai dimensi intensional-spiritual dari perjalanan menuju perjumpaan langsung dengan yang transenden, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment diperlakukan sebagai ranah-ranah kebenaran yang berbeda namun saling bergantung. Secara metodologis, studi ini mengadopsi rancangan konseptual normatif yang berakar pada aksioma-aksioma martabat manusia minimal, merekonstruksi arsitektur logika murni, dan kemudian menguji kedua arsitektur tersebut terhadap aksioma-aksioma ini. Analisis ini diterapkan pada dua arena kritis, yakni rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan, untuk membandingkan bagaimana masing-masing arsitektur mengorganisasikan tujuan, pembatasan, dan jejak moral jangka panjang. Artikel ini berargumen bahwa hukum dan AI yang dibangun semata-mata di atas logika murni secara struktural rentan terhadap absolutisme prosedural, ketidakadilan epistemik, kekosongan legitimasi, dan intensifikasi algoritmik atas kerugian-kerugian yang sudah ada; sementara itu, hukum dan AI yang ditempatkan di dalam The Cohesive Tetrad dapat menambatkan kembali norma dan telos pada Sabda, mengintegrasikan dimensi-dimensi pengalaman dan spiritual dari kebenaran, serta menegakkan akuntabilitas melalui konfigurasi-konfigurasi Akhlak dan Intention-Trace Alignment yang dapat diamati dari waktu ke waktu.

Kata kunci: *truth governance; Sabda; logika; martabat manusia; rasionalitas hukum; tata kelola kecerdasan buatan; Qualia; Mistika; Akhlak; Intention-Trace Alignment; The Cohesive Tetrad.*



1. Pendahuluan

Perdebatan tentang kebenaran, bukti, dan legitimasi tidak lagi sekadar berlangsung di ruang-ruang seminar, tetapi telah berpindah ke jantung kehidupan institusional. Pengadilan mengandalkan saksi ahli dan berbagai alat probabilistik, pemerintah berbicara tentang kebijakan berbasis data, dan beragam platform menggunakan model pembelajaran mesin untuk menyaring informasi dan memengaruhi perilaku. Sekilas, lanskap ini tampak meneguhkan janji lama modernitas rasional: jika institusi dipandu oleh logika, didukung oleh bukti, dan dijauhkan dari hasrat sewenang-wenang, tata kelola kebenaran seharusnya menjadi lebih andal dan lebih adil. Namun munculnya ketidakpercayaan publik, polarisasi epistemik, dan krisis berulang dalam hukum serta kecerdasan buatan menunjukkan bahwa ada persoalan yang lebih mendasar.

Berbagai kajian filosofis dan empiris yang terus berkembang mulai mempertanyakan kecukupan arsitektur implisit logika murni yang menopang banyak perkembangan ini. Arsitektur ini memadukan saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, serta naturalisme kuat tentang telos dan martabat manusia (Putnam 2002; Haack 2003; MacIntyre 1988). Rasionalitas dipahami terutama sebagai koherensi formal dan dukungan evidensial, sementara sumber-sumber moral dan spiritual bagi normativitas disisihkan ke ranah privat atau diterjemahkan menjadi preferensi lunak. Dalam praktiknya, bagaimanapun, hukum dan kecerdasan buatan terus mengajukan pengertian-pengertian yang kaya dan padat makna tentang martabat, keadilan, dan tanggung jawab yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan atau dibenarkan di dalam arsitektur ini. Institusi yang sama yang berbicara dengan bahasa netralitas dan optimasi juga harus berjanji menghormati pribadi, melindungi yang rentan, dan bertanggung jawab atas jejak moral jangka panjang mereka.

Ketegangan ini tampak sangat jelas di dua arena. Dalam ranah hukum, teori-teori tentang rasionalitas hukum berupaya mengamankan legitimasi melalui aturan yang koheren, penafsiran yang berprinsip, dan prosedur yang adil (Fuller 1964; Dworkin 1986; Habermas 1996). Namun pengalaman ketidakadilan prosedural, eksklusi epistemik, dan penegakan selektif menunjukkan bahwa rasionalitas formal saja tidak cukup untuk menjaga martabat dan kepercayaan (Fricker 2007). Dalam ranah kecerdasan buatan, kerangka etika dan pedoman kebijakan menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Jobin et al. 2019; Floridi and Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021). Pada saat yang sama, sistem algoritmik memperkuat bias historis, memanipulasi perhatian, dan mereduksi pribadi menjadi titik-titik data dalam fungsi optimasi (O'Neil 2016; Mittelstadt et al. 2016). Bahasa logika murni tampak kuat, tetapi perwujudan institusionalnya berulang kali gagal memenuhi harapan moral yang mereka ajukan sendiri.

The Cohesive Tetrad diajukan sebagai jawaban atas kekurangan struktural ini. Dikembangkan dalam karya filosofis dan *preprint* sebelumnya (Mutaqin 2025a; Mutaqin 2025b), The Cohesive Tetrad merumuskan empat ranah kebenaran dan praksis yang saling terkait erat. Sabda didefinisikan sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Logika mengorganisasikan alasan dan menguji koherensi. Qualia berkaitan dengan dimensi pengalaman dari kebenaran sebagaimana dijalani dan ditanggung oleh pribadi serta komunitas. Mistika didefinisikan sebagai *Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Keempat ranah ini kemudian ditimbang melalui Akhlak sebagai karakter moral yang dapat diamati dan melalui Intention-Trace Alignment, yang didefinisikan sebagai *Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace*, yaitu derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak

epistemik-moral dari waktu ke waktu. Alih-alih membiarkan satu ranah mendominasi yang lain, The Cohesive Tetrad mengajukan sebuah arsitektur di mana masing-masing memiliki peran yang jelas dan tidak satu pun secara sah dapat mengklaim kedaulatan absolut.

Artikel ini tidak hanya memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sekumpulan gagasan, tetapi memperlakukannya sebagai arsitektur tata kelola kebenaran dan menempatkannya dalam konfrontasi langsung dengan arsitektur logika murni yang saat ini membentuk hukum dan kecerdasan buatan. Klaim pokoknya bukan bahwa logika harus ditinggalkan, melainkan bahwa logika tidak sanggup sendirian menopang telos dan martabat. Logika perlu diposisikan ulang sebagai medium yang terdisiplin di dalam arsitektur yang dipimpin oleh Sabda, diinformasikan oleh Qualia, dimurnikan oleh Mistika, dan diaudit melalui Akhlak serta Intention-Trace Alignment. Hanya dalam arsitektur seperti ini institusi dapat secara meyakinkan mengklaim menghormati martabat manusia yang tidak dapat diganggu gugat sambil menggunakan bentuk-bentuk penalaran dan teknologi yang kompleks.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan rancangan konseptual normatif. Pertama, artikel merekonstruksi dari literatur arsitektur implisit logika murni yang membentuk banyak pemikiran kontemporer tentang hukum dan kecerdasan buatan, serta merumuskan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang harus dipenuhi oleh setiap arsitektur tata kelola kebenaran yang masuk akal. Kedua, artikel merekonstruksi The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur eksplisit dengan mendefinisikan ranah-ranah intinya, menjernihkan relasi di antara ranah-ranah tersebut, dan menjelaskan peran Akhlak dan Intention-Trace Alignment sebagai alat diagnosis jangka panjang. Ketiga, artikel menguji kedua arsitektur tersebut terhadap aksioma-aksioma martabat dan menerapkannya pada dua arena kritis, yaitu rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan. Pertanyaannya bukan apakah Sabda atau logika lebih penting secara abstrak, melainkan bagaimana arsitektur yang berbeda atas relasi keduanya membentuk tujuan, batas, dan jejak moral institusi yang konkret.

Kontribusi artikel ini mencakup tiga sisi. Secara konseptual, artikel menawarkan cara berpikir yang terstruktur tentang tata kelola kebenaran yang tidak mereduksi normativitas menjadi keyakinan privat dan juga tidak mereduksinya menjadi rutinitas prosedural. Artikel menunjukkan bahwa banyak kritik yang sudah ada terhadap saintisme, proseduralisme, dan dampak merusak algoritme dapat dikumpulkan menjadi diagnosis tentang kegagalan arsitektural. Secara normatif, artikel berargumen bahwa The Cohesive Tetrad menyediakan arsitektur yang lebih koheren dan lebih memadai bagi manusia untuk mengorganisasikan Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment di bawah aksioma-aksioma martabat manusia minimal. Ketika diterapkan pada hukum dan kecerdasan buatan, artikel ini memperlihatkan bagaimana arsitektur tersebut mengarah pada pilihan desain yang berbeda terkait prosedur hukum, standar pembuktian, tujuan algoritmik, dan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, artikel ini membuka ruang bagi kerja lanjutan tentang bagaimana Sabda dan logika dapat diintegrasikan dalam tata kelola institusi yang semakin menentukan syarat-syarat di mana kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dijalani.

2 Ideologi Logika Murni

Argumen dalam artikel ini menuntut agar pihak yang dikritik digambarkan dengan setingkat keadilan setinggi mungkin. Jika ideologi logika murni hanya disajikan sebagai karikatur, maka “mengalahkannya” tidak akan berarti banyak. Karena itu, bagian ini merekonstruksi logika murni sebagai suatu konstelasi klaim tentang sains, nalar, dan martabat manusia yang dapat

dikenali dan masuk akal secara historis. Hanya setelah rekonstruksi itu dilakukan, kritik di bagian-bagian selanjutnya dapat dianggap serius.

2.1. Aspirasi kepada kemurnian

Di jantung logika murni terdapat sebuah aspirasi yang pada dirinya sendiri mulia. Manusia telah menyaksikan terlalu banyak contoh kekejaman yang dibenarkan atas dasar otoritas sewenang-wenang, adat yang diwarisi, atau hasrat yang tak pernah diperiksa. Sebagai tanggapan, pemikiran modern mencari bentuk-bentuk penalaran yang dapat membebaskan kita dari kesewenang-wenangan. Mimpinya sederhana sekaligus kuat: jika kita dapat menambatkan keyakinan dan institusi pada logika dan bukti, kita dapat membebaskannya dari takhayul, prasangka, dan telanjang kekuasaan.

Aspirasi ini mengambil bentuk dalam beberapa gambaran yang akrab. Sains dibayangkan sebagai sebuah proyek yang menyingkirkan bias personal, mengendalikan gangguan subjektif, dan “membiarkan alam berbicara” melalui data. Hukum dibayangkan sebagai sebuah sistem di mana putusan mengikuti aturan dan fakta, alih-alih mengikuti suasana hati atau posisi sosial hakim. Nalar publik dibayangkan sebagai sebuah forum di mana hanya argumen yang secara prinsip dapat diterima semua agen rasional yang boleh diberi bobot. Dalam setiap gambaran ini, logika berfungsi sebagai pemurni. Logika diminta untuk membakar habis segala sesuatu yang berbau kekhususan, emosi, tradisi, atau pewahyuan.

Ideologi logika murni dimulai ketika aspirasi ini mengeras menjadi doktrin. Apa yang semula berupa seruan terhadap kedisiplinan intelektual perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gambaran tentang dunia di mana hanya satu jenis suara yang diizinkan menentukan apa yang dianggap rasional dan sah. Gambaran itu dapat dirumuskan melalui empat komponen yang saling berkaitan: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat antara fakta dan nilai, dan naturalisme kuat tentang telos dan martabat.

2.2. Empat komponen logika murni

2.2.1. Saintisme

Saintisme tidak sama dengan penghormatan terhadap sains. Saintisme adalah keyakinan bahwa metode dan gaya penalaran yang digunakan dalam sains alam mencakup, atau hampir mencakup, seluruh apa yang layak disebut pengetahuan serius. Dalam pandangan ini, jika sesuatu tidak dapat diselidiki dengan alat observasi terkendali, pengukuran, dan generalisasi, maka hal itu tidak dapat diketahui dalam arti yang kokoh. Dalam taraf terbaik, ia hanya dianggap sebagai persoalan selera, tradisi, atau keyakinan privat.

Saintisme memiliki akar yang mudah dipahami. Keberhasilan fisika, kimia, dan biologi tidak terbantahkan. Teknologi yang dibangun di atas ilmu-ilmu ini telah mengubah kehidupan manusia. Karena itu, menggoda untuk memperlakukan metode-metode tersebut sebagai standar emas bagi semua bentuk penyelidikan. Bahaya mulai muncul ketika godaan ini berubah menjadi sikap eksklusif. Bidang-bidang yang berurusan dengan makna, normativitas, atau transendensi diberitahu bahwa mereka harus meniru fitur-fitur permukaan sains alam atau menerima status marjinal.

Di dalam ideologi logika murni, saintisme bertindak sebagai penjaga gerbang. Ia menyaring setiap rujukan kepada Sabda sebagai *Revelatory Word*, sebab Sabda tidak hadir sebagai objek yang dapat diukur secara eksperimental di antara objek-objek lainnya. Ia juga menyaring banyak aspek Qualia dan Mistika, karena pengalaman hidup dan orientasi intensional menuju yang transenden tidak tampak seperti data laboratorium. Yang tersisa di dalam gerbang adalah proposisi yang dapat diucapkan dengan gaya yang menyerupai sains alam.

2.2.2. Evidensialisme keras

Evidensialisme keras menyatakan bahwa suatu keyakinan hanya dapat diterima secara rasional jika seimbang dengan kumpulan bukti yang secara prinsip dapat dibuat eksplisit dan dibagikan secara publik. Keraguan menjadi default; kepercayaan harus diperoleh. Sekilas, ini tampak seperti seruan sederhana untuk kejujuran intelektual: kita tidak boleh percaya lebih kuat daripada apa yang dibenarkan oleh bukti kita.

Dalam bentuk-bentuk yang lebih ketat, bagaimanapun, evidensialisme mulai tidak mempercayai setiap jenis kepercayaan dasar yang wajar yang tidak berakar pada argumen lebih lanjut. Iman diperlakukan sebagai irasional secara definisional. Ia juga menjadi curiga terhadap keyakinan moral yang tidak mudah diubah menjadi klaim evidensial. Lama-kelamaan, ini menghasilkan gambaran tentang rasionalitas di mana agen manusia diharapkan hampir sepenuhnya hidup dalam sikap menanggukuhkan penilaian, kecuali pada wilayah di mana argumen dan data telah “berbicara”.

Di dalam ideologi logika murni, evidensialisme keras menopang gagasan bahwa Sabda tidak dapat menjadi sumber pengetahuan. Jika Sabda hendak dipertimbangkan sama sekali, ia harus terlebih dahulu melewati filter logis dan empiris yang ditempatkan di atasnya sebagai hakim. Otoritas pewahyuan dengan demikian dibalik. Alih-alih Sabda yang mengadili penggunaan logika dan bukti kita, logika dan bukti diperlakukan sebagai hakim atas Sabda.

2.2.3. Pemisahan ketat antara fakta dan nilai

Komponen ketiga adalah penegasan garis pemisah yang tajam antara fakta dan nilai. Fakta dipahami sebagai deskripsi tentang bagaimana dunia itu ada. Nilai mengekspresikan bagaimana seseorang ingin dunia itu adanya. Dalam bentuk klasik perbedaan ini, logika dan sains dianggap menempati sisi faktual, sementara moralitas, agama, dan estetika diasosiasikan dengan ranah preferensi subjektif atau intersubjektif.

Tujuan awalnya kembali mudah dimengerti. Mencampuradukkan deskripsi faktual dengan persetujuan moral kerap menimbulkan kerusakan serius. Namun pemisahan ketat ini memiliki efek samping. Ia mendorong anggapan bahwa kebenaran hanya dimiliki oleh sisi faktual, sementara normativitas dibiarkan berjuang memperebutkan pengaruh tanpa hak untuk mengklaim kebenaran.

Di dalam ideologi logika murni, pemisahan ini menancapkan baji di dalam wacana manusia. Pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam Sabda, seperti perintah, janji, dan klaim-klaim perjanjian, didorong ke sisi nilai dan dilucuti dari martabat kognitif. Klaim tentang martabat manusia menjadi sulit dirumuskan sebagai kebenaran. Klaim-klaim itu mulai tampak seperti preferensi yang ditekankan: perasaan kuat yang ditopang oleh konsensus sosial, tetapi tidak bertumpu pada struktur realitas.

2.2.4. Naturalisme kuat tentang telos dan martabat

Komponen terakhir adalah bentuk naturalisme kuat yang berpendapat bahwa semua pembicaraan yang sah tentang telos dan martabat pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam istilah-istilah natural, seperti kapasitas evolusioner, stabilitas sosial, atau kesejahteraan psikologis. Dalam pandangan ini, tidak ada tatanan tujuan yang transenden yang mendahului pilihan manusia. Telos adalah sesuatu yang kita proyeksikan ke dunia, bukan sesuatu yang kita terima. Martabat adalah konstruksi berguna untuk mengatur perilaku, bukan cerminan tatanan yang lebih dalam.

Naturalisme ini meratakan medan. Manusia mungkin lebih kompleks daripada hewan lain, tetapi tidak berbeda dalam jenis. Status khusus apa pun yang kita berikan kepada manusia harus sepenuhnya dibenarkan dengan merujuk pada ciri-ciri kontingen dari dunia natural atau sosial. Setelah ciri-ciri itu berubah, status tersebut pada prinsipnya dapat dinegosiasikan ulang.

Di dalam ideologi logika murni, naturalisme kuat memastikan bahwa setiap klaim tentang telos yang lebih tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa deskriptif. Sabda tidak diizinkan berbicara langsung tentang tujuan. Dalam taraf terbaik, Sabda hanya menjadi objek kajian psikologi, sosiologi, atau sejarah intelektual. Sumber otoritatif bagi norma dan telos kini dipahami sebagai preferensi manusia yang diagregasi melalui suatu prosedur rasional, atau proses impersonal evolusi dan adaptasi.

2.3. Dari filsafat ke “akal sehat” institusional

Keempat komponen yang baru saja dijelaskan biasanya tidak hadir secara terpisah. Mereka berjalan bersama dan, seiring waktu, terbenam di dalam praktik-praktik institusional. Pada titik itu, ideologi logika murni tidak lagi perlu diperdebatkan secara eksplisit. Ideologi ini mengeras menjadi akal sehat.

Di universitas, hal ini tampak dalam cara disiplin-disiplin ilmu diberi peringkat. Bidang-bidang yang menyerupai sains alam diberi prestise lebih tinggi dan sumber daya lebih besar. Disiplin yang bekerja dengan Sabda, makna, dan normativitas ditoleransi, kadang dihormati karena alasan kultural, tetapi diam-diam diperlakukan kurang sentral bagi “bisnis serius” pengetahuan. Dalam iklim semacam ini, para sarjana yang ingin dianggap serius sering merasa tertekan untuk mengode ulang pertanyaan mereka dalam istilah yang semata-mata logis atau empiris.

Dalam hukum, ideologi yang sama tampak dalam kecenderungan mereduksi rasionalitas hukum menjadi sekadar kebenaran prosedural dan kecukupan bukti. Sistem bertanya: apakah aturan yang tepat telah diterapkan, apakah jenis bukti yang benar telah diajukan, apakah langkah-langkah yang semestinya telah diikuti. Pertanyaan-pertanyaan ini penting, tetapi ketika mereka mendominasi tanpa sisa, pertanyaan yang lebih dalam-apakah hasil hukum tersebut sungguh menghormati martabat manusia-tergeser ke pinggir atau diasumsikan tanpa diperiksa sungguh-sungguh.

Dalam teknologi dan AI, ideologi ini tampak dalam harapan bahwa data yang cukup dan model yang canggih dapat menggantikan kebutuhan akan penilaian moral yang tebal. *Risk scores*, sistem rekomendasi, dan alat *predictive policing* dibangun atas asumsi bahwa jika suatu algoritme sudah logis, terkalibrasi secara empiris, dan bebas dari bias teknis tertentu, maka

keluarannya aman untuk dipercaya. Pertanyaan apakah keputusan-keputusan tertentu seharusnya diautomasikan sama sekali kerap tidak diajukan.

Di setiap ranah, pola yang sama berulang. Logika, yang dipahami dalam arti sempit sebagai disiplin formal dan empiris, diberi peran yang secara halus meluas dari alat menjadi penguasa. Logika memutuskan bukan hanya bagaimana kita seharusnya menalar tentang dunia, tetapi juga jenis alasan seperti apa yang diizinkan diperhitungkan sebagai alasan publik yang mengikat.

2.4. Daya tarik dan kekuatan logika murni

Akan menjadi kekeliruan jika menggambarkan logika murni hanya dari sisi bahayanya. Ideologi ini memiliki daya tarik yang tidak dangkal. Jika kita mengabaikannya, kita akan meremehkan daya cengkeramnya.

Pertama, logika murni menjanjikan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Ketika keputusan hukum atau politik dibenarkan dengan merujuk pada prosedur bersama dan bukti yang dapat diakses publik, warga menjadi kurang rentan terhadap keinginan privat para pemimpin. Logika tampak menawarkan perisai terhadap tirani.

Kedua, logika murni membentuk citra kesatuan yang kuat. Jika semua agen rasional terikat oleh norma-norma inferensi yang sama dan oleh kumpulan fakta empiris yang sama, maka secara prinsip ruang bagi perbedaan mendalam dapat dipersempit. Hal ini sangat menarik dalam masyarakat majemuk, di mana rujukan kepada Sabda dan tradisi dikhawatirkan sebagai sumber konflik.

Ketiga, logika murni tampak inklusif. Siapa pun pada prinsipnya dapat mempelajari aturan inferensi dan metode penyelidikan empiris. Tidak seorang pun perlu menjadi anggota komunitas iman tertentu atau berbagi warisan kultural yang tebal agar dapat berpartisipasi dalam diskursus rasional.

Kekuatan-kekuatan ini nyata. Kritik yang dikembangkan dalam artikel ini tidak menolaknya. Kritik ini justru akan berargumen bahwa kebaikan-kebaikan yang hendak dilindungi oleh logika murni tidak dapat dipertahankan secara utuh di dalam batas-batas ideologisnya sendiri. Ketika logika mengklaim kedaulatan atas semua ranah kebenaran, perisai itu mulai retak. Kesatuan yang dijanjikannya menjadi rapuh. Inklusivitas yang ingin diamankan ternyata tidak lengkap, karena memaksa banyak warga untuk memisahkan keyakinan terdalam mereka dari penalaran publik mereka.

2.5. Ringkasan

Ideologi logika murni dengan demikian dapat diringkas sebagai berikut. Ia adalah himpunan komitmen yang mengangkat satu gaya rasionalitas tertentu, yang lahir dari keberhasilan sains, menjadi standar universal. Sainisme mempersempit medan pengetahuan serius pada apa yang tampak seperti sains alam. Evidensialisme keras mencurigai setiap kepercayaan dasar yang wajar yang tidak berakar pada argumen dan bukti eksplisit. Pemisahan ketat fakta dan nilai melucuti klaim moral dan revelatori dari martabat kognitif. Naturalisme kuat tentang telos dan martabat menutup kemungkinan rujukan pada sumber norma yang transenden.

Begitu komitmen-komitmen ini terinstitusionalisasi, Sabda menjadi diprivatisasi, dipelajari sebagai objek psikologis atau historis, atau secara fungsional dibungkam. Qualia dipampatkan menjadi metrik dan indikator. Mistika dipaksa tinggal di ruang batin tanpa peran yang diakui dalam penalaran publik. Logika, dalam bentuknya yang sempit, dinobatkan sebagai satu-satunya bahasa kebenaran yang sepenuhnya sah.

Bagian berikutnya akan berargumen bahwa mahkota ini terlalu berat untuk dipikul logika. Dengan memeriksa kembali ketegangan internal dalam saintisme, evidensialisme, pemisahan fakta-nilai, dan naturalisme, kita akan melihat bahwa logika murni pada akhirnya tidak mampu menopang klaim-klaim yang ingin dibelanya sendiri. Dari sana akan terbuka ruang bagi The Cohesive Tetrad untuk diperkenalkan, bukan sebagai penolakan terhadap logika, melainkan sebagai arsitektur di mana logika menemukan martabatnya yang layak di bawah cakrawala Sabda, Qualia, dan Mistika.

3. Kritik internal terhadap logika murni

Ideologi logika murni menampilkan diri sebagai sahabat kejernihan. Ia mengklaim menghilangkan kekacauan dengan menegaskan bahwa hanya hal-hal yang dapat diperdebatkan secara logis dan didukung secara empiris yang layak menyandang nama pengetahuan. Dalam bagian ini, saya tidak menentang ambisi tersebut dari luar. Sebaliknya, saya menanyakan apa yang terjadi ketika logika murni mengarahkan perangkatnya kepada dirinya sendiri. Mampukah ia membenarkan norma-norma inferensinya sendiri, tuntutananya sendiri atas bukti, pemisahan yang dibuatnya sendiri antara fakta dan nilai, serta naturalismenya sendiri tentang telos dan martabat, tanpa diam-diam bergantung pada hal-hal yang justru diklaimnya dikeluarkan?

Jawabannya, sebagaimana akan saya argumentasikan, adalah tidak. Ketika diperiksa dengan sabar, setiap pilar logika murni ternyata bersandar pada bentuk-bentuk kepercayaan, normativitas, dan kedalaman yang tidak dapat dihasilkannya dari gambaran dunianya sendiri. Kritik ini bersifat internal. Logikalah yang menyingkap keterlaluhan logika.

3.1. Masalah pemendasaran diri

Setiap sistem yang menuntut alasan pada akhirnya harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi tak mengenal ampun. Apa yang membenarkan norma-norma penalaran itu sendiri yang sudah diasumsikan oleh sistem tersebut? Jika setiap keyakinan harus ditopang oleh argumen lebih lanjut, dan setiap argumen harus bertumpu pada norma-norma inferensi yang mendahuluinya, maka rantai itu entah berlanjut tanpa akhir, runtuh ke dalam bentuk sirkular, atau berhenti pada sesuatu yang tidak lagi didasarkan pada argumen lain.

Logika murni berusaha hidup dengan dua opsi pertama. Ia memperlakukan sirkularitas sebagai cacat dan regres tak berhingga sebagai masalah, tetapi terus berbicara seolah-olah norma-norma inferensinya sendiri secara *self-evident* mengikat setiap agen rasional. Ketika ditanya mengapa hukum non-kontradiksi, tuntutan penetapan probabilitas yang konsisten, atau kaidah-kaidah konfirmasi empiris harus ditaati, jawabannya biasanya bergeser ke register yang berbeda. Seseorang akan diberitahu entah bahwa menyangkal norma-norma tersebut adalah “irasional secara definisional”, atau bahwa meninggalkannya akan membuat praktik yang koheren menjadi mustahil. Dalam kedua kasus, sistem itu berhenti pada sebuah komitmen yang tidak lagi dibenarkan oleh argumen lebih lanjut. Struktur ini mencerminkan perdebatan lama

dalam epistemologi tentang regres, fondasionalisme, dan batas-batas koherensisme murni, di mana bahkan uraian yang paling ketat sekalipun mengakui bahwa beberapa komitmen harus diterima, bukan diturunkan (*Haack 2003; Putnam 2002*).

Tak satu pun dari ini khas bagi logika. Setiap praktik, termasuk praktik menerima Sabda, hidup dari beberapa titik awal yang tidak dideduksi dari premis-premis sebelumnya. Masalah bagi logika murni muncul hanya ketika ia menyangkal fakta ini. Ia menampilkan diri sebagai *view from nowhere*, sebuah praktik yang secara prinsip dapat memberikan alasan bagi semua yang diterimanya. Namun kehidupannya sendiri bergantung pada landasan kepercayaan terhadap pola-pola inferensi tertentu, bentuk-bentuk pengalaman tertentu, dan kapasitas batin manusia itu sendiri untuk menjangkau kebenaran. Ketika logika menolak mengakui ketergantungan ini, ia mengaburkan kekerabatannya dengan bentuk-bentuk penerimaan penuh komitmen yang lain.

3.2. Batas-batas evidensialisme keras

Evidensialisme keras bersikeras bahwa keyakinan rasional harus menyesuaikan diri secara ketat dengan bukti yang dapat dibagikan secara publik. Dalam bentuk yang lebih moderat, prinsip ini merupakan disiplin yang sehat terhadap *wishful thinking*. Namun dalam rumusan yang lebih ketat, evidensialisme mulai terurai oleh bobotnya sendiri.

Pertimbangkan kasus-kasus sederhana. Seorang ilmuwan percaya bahwa instrumennya secara umum andal, bahwa hasil-hasil yang dilaporkan rekan sejawat yang bereputasi bukanlah fabrikasi total, bahwa jurnal yang ia baca tidak secara acak menukar gambar atau angka antar naskah. Keyakinan-keyakinan ini tidak selalu ditopang oleh penyelidikan independen. Keyakinan tersebut disangga oleh jaringan kepercayaan, norma profesional, dan pengalaman terakumulasi. Jika ia diwajibkan menghadirkan bukti eksplisit untuk setiap simpul dalam jaringan ini sebelum memperlakukannya sebagai dapat diterima secara rasional, ia tidak akan pernah bisa mulai.

Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang cukup mempercayai ingatan mereka untuk bertindak, tanpa setiap pagi menyusun kembali rangkaian argumen guna membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah mengunci pintu kemarin. Mereka mempercayai kesaksian orang lain, dalam batas kewajaran, tanpa menuntut rantai bukti penuh setiap kali sebuah fakta sederhana dikomunikasikan. Mereka percaya bahwa makna kata-kata tidak spontan berbalik arah dari satu hari ke hari berikutnya. Kajian empiris tentang penalaran bermotivasi dan praktik riset yang meragukan menunjukkan bahwa agen tidak sekadar menyeimbangkan setiap keyakinan dengan bukti yang tersedia secara formal, melainkan menegosiasikannya melalui campuran kepercayaan, kebajikan, dan kerentanan (*Kunda 1990; John et al. 2012*).

Evidensialisme keras, ketika didorong hingga batasnya sendiri, tidak dapat membenarkan bentuk-bentuk kepercayaan ini tanpa menjatuhkan diri sendiri. Jika ia menuntut bukti eksplisit bagi setiap keyakinan, termasuk keyakinan bahwa bukti merupakan penuntun yang andal, ia runtuh ke dalam skeptisisme. Jika ia mengecualikan beberapa keyakinan dari tuntutan tersebut dengan alasan “secara praktis niscaya”, maka ia sudah mengakui bahwa tidak semua komitmen rasional berakar dengan cara yang sama.

Apa yang sesungguhnya terjadi dalam penalaran ilmiah dan keseharian jauh lebih halus. Bentuk-bentuk kepercayaan tertentu berfungsi sebagai titik awal. Kepercayaan-kepercayaan ini bukan lompatan buta, melainkan orientasi yang bertahan lama dan dapat diperhalus serta dikoreksi dari waktu ke waktu. Dalam skala kecil dan dalam cakupan terbatas, struktur ini menyerupai Sabda. Kepercayaan-kepercayaan tersebut tidak dideduksi dari bukti; ia diterima terlebih dahulu, lalu diuji dalam praktik.

Logika murni sangat bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan semacam ini, tetapi kisah resminya kesulitan mengakui hal tersebut. Ia lebih suka berbicara seolah-olah segala sesuatu tegak atau runtuh bersama argumen dan bukti eksplisit, padahal keberadaannya sendiri sebagai sebuah praktik sudah mengandaikan lebih banyak daripada yang dapat dibuktikannya.

3.3. Keterjeratan fakta dan nilai

Ideologi logika murni bertumpu pada garis pemisah yang bersih antara fakta dan nilai. Fakta menggambarkan bagaimana sesuatu itu ada. Nilai mengekspresikan preferensi tentang bagaimana sesuatu seharusnya. Logika dan sains ditempatkan di sisi faktual. Sabda dan moralitas digolongkan ke ranah nilai dan diperlakukan sebagai sekunder. Pembedaan ini menjanjikan kejernihan. Ia memungkinkan logika mengklaim bahwa ia berurusan dengan kebenaran, sementara nilai menjadi urusan pilihan.

Dalam praktik, bagaimanapun, garis ini jauh kurang bersih. Kerja ilmiah dimulai dengan keputusan tentang fenomena apa yang layak diukur, perbedaan mana yang penting, dan keluaran mana yang dianggap signifikan. Ini bukan semata-mata pertanyaan faktual. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan penilaian tentang relevansi dan kepentingan. Cara sebuah studi tentang pengangguran dirancang, misalnya, mencerminkan asumsi-asumsi sarat nilai tentang kehidupan dan aktivitas mana yang dihitung sebagai “pekerjaan” dan mengapa.

Bahkan pemilihan dan penggunaan kategori dalam sains membawa bobot normatif. Mengklasifikasikan perilaku, tubuh, atau kebudayaan melibatkan pilihan-pilihan yang dapat memperkuat atau menantang pola-pola kekuasaan yang sudah ada. Melukiskan suatu pola sebagai “gangguan” alih-alih “perbedaan”, atau sebagai “risiko” alih-alih “variasi”, bukanlah tindakan netral. Kategori yang kita pakai untuk menggambarkan fakta membentuk apa yang kita lihat sebagai masalah dan apa yang kita anggap dapat diterima.

Praktik hukum menunjukkan keterjeratan yang sama. Pengadilan tidak sekadar menemukan fakta lalu menerapkan aturan seperti mesin. Pengadilan memutuskan fakta mana yang relevan, kesaksian mana yang kredibel, dan kerugian mana yang cukup serius untuk layak mendapat pemulihan. Keputusan-keputusan ini dipandu oleh pemahaman normatif tentang martabat, tanggung jawab, dan keadilan. Jika pemahaman-pemahaman tersebut diperlakukan hanya sebagai preferensi, seluruh klaim bahwa hukum lebih dari sekadar kekuatan terorganisir mulai terkikis.

Ketika fakta dan nilai demikian terjalin, menjadi sulit mempertahankan gagasan bahwa kebenaran hanya berada di sisi faktual. Nilai hadir di setiap tahap penyelidikan, bukan hanya pada momen penarikan kesimpulan moral. Nilai menuntun perhatian, membentuk konsep, dan menginformasikan penilaian tentang signifikansi. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu boleh-boleh saja. Ini berarti bahwa pencarian kebenaran sudah tersusun secara normatif, entah kita mengakuinya atau tidak. Para filsuf sains telah menunjukkan bahwa pilihan-pilihan sarat nilai

semacam ini bukanlah kebisingan kebetulan, melainkan ciri-ciri struktural dari penyelidikan itu sendiri (*Putnam 2002; MacIntyre 1988*).

Logika murni dapat merespons dengan menegaskan bahwa unsur-unsur nilai ini sendiri harus dibawa ke bawah kendali rasional, mungkin melalui prosedur pembenaran publik atau konsensus. Respons ini penting, tetapi tidak menghapus poin dasarnya. Tidak ada *view from nowhere*. Bahkan upaya mengatur nilai secara rasional pun sudah mengandaikan terlebih dahulu pengertian tentang apa yang dianggap sebagai alasan yang baik dan tata susunan yang dapat dibenarkan. Pada kedalaman itu, pemisahan bersih antara fakta dan nilai mulai tampak sebagai fiksi yang nyaman.

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, inilah yang memang seharusnya kita perkirakan. Qualia mengingatkan bahwa pengalaman dan penilaian tidak pernah sepenuhnya dapat dipisahkan. Akhlak dan Intention-Trace Alignment menunjukkan bahwa cara kita mencari dan menggunakan pengetahuan sudah merupakan perkara moral. Sabda menyediakan cakrawala di mana nilai bukan sekadar preferensi, tetapi respons terhadap tatanan norma dan telos yang mendahului. Ketika logika murni menyangkal hal ini, ia tidak menyingkirkan normativitas; ia hanya mengaburkan sumber-sumbernya.

3.4. Martabat tanpa kedalaman

Barangkali ujian yang paling membuka tabir bagi logika murni adalah kasus martabat manusia. Tatanan hukum dan politik modern kerap merujuk pada martabat sebagai dasar hak-hak yang tidak boleh diperdagangkan. Konstitusi, traktat, dan putusan pengadilan berbicara seakan-akan ada sesuatu dalam diri manusia yang menuntut penghormatan terlepas dari status sosial, produktivitas, atau kegunaan. Bahasa ini berfungsi, pada praktiknya, sebagai semacam Sabda yang disekularisasi. Ia menamai sebuah klaim yang tidak berasal semata-mata dari kesepakatan manusia. Instrumen-instrumen hak asasi manusia kontemporer dan kerangka etika untuk kecerdasan buatan menginvokasi martabat secara tepat dalam cara yang hampir-fondasional ini, sering kali memperlakukannya sebagai dasar yang tak dapat dinegosiasikan bagi hak-hak dan pembatasan atas kekuasaan (*Jobin et al. 2019; Floridi and Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021*).

Namun di dalam ideologi logika murni, sulit menjelaskan mengapa bahasa semacam itu harus diterima apa adanya. Jika semua normativitas harus diekspresikan dalam istilah naturalistik, maka pada akhirnya martabat harus direduksi menjadi sesuatu seperti konsensus sosial, keuntungan evolusioner, atau kesejahteraan psikologis. Masing-masing reduksi ini membawa biaya.

Jika martabat didasarkan pada konsensus, maka isinya hanya setangguh kesepakatan yang menopangnya. Ketika kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda bernegosiasi, pihak yang kuat dapat mengubah konsensus sedemikian rupa sehingga perlindungan bagi yang rentan tergerus. Dalam situasi seperti ini, bahasa tentang hak-hak yang “tak dapat diganggu gugat” mulai tampak sebagai retorika yang menyembunyikan permainan kekuasaan di bawahnya.

Jika martabat didasarkan pada keuntungan evolusioner, martabat menjadi sasaran bergerak. Sifat-sifat yang menguntungkan dalam satu konteks ekologis atau teknologi dapat menjadi merugikan dalam konteks lain. Di dalam bingkai evolusioner yang ketat, tidak ada alasan

husus untuk memperlakukan semua anggota spesies sebagai sama-sama layak dihormati. Mereka yang sifat-sifatnya dinilai kurang adaptif dapat saja diberi klaim yang lebih lemah.

Jika martabat didasarkan pada kesejahteraan psikologis, martabat berisiko runtuh menjadi bentuk pemuasan preferensi yang dimurnikan. Melindungi martabat menjadi setara dengan memastikan bahwa individu merasa dihormati dan dihargai. Meskipun ini bukan hal sepele, hal itu tidak mencapai taraf klaim yang tak bersyarat. Dalam situasi di mana pemenuhan kesejahteraan sebagian orang menuntut biaya besar dari yang lain, kesejahteraan saja tidak menjelaskan mengapa beberapa pelanggaran sama sekali tidak boleh dilakukan, bahkan jika pelanggaran tersebut menghasilkan manfaat agregat yang besar.

Dalam praktik, pengadilan dan lembaga hak asasi manusia kerap memperlakukan martabat seolah-olah memiliki kedalaman yang tak dapat ditangkap oleh reduksi-reduksi ini. Mereka berbicara seakan-akan memang ada telos yang tertulis dalam diri manusia yang menetapkan batas terhadap apa yang boleh dilakukan kepada seseorang, bahkan oleh keputusan bulat suatu mayoritas. Mereka bertindak seakan-akan ada hal-hal yang salah bukan hanya menurut konsensus saat ini, tetapi menurut suatu standar yang mengadili konsensus itu sendiri.

Logika murni bergantung pada tata bahasa yang lebih dalam ini, tetapi tidak mampu menghasilkannya. Logika murni dapat menggambarkan bagaimana bahasa martabat bekerja, mengukur dampak sosialnya, dan memasukkannya ke dalam prosedur pengambilan keputusan. Namun di atas landasannya sendiri, logika murni tidak dapat menjelaskan mengapa martabat harus dihormati ketika martabat itu berbenturan dengan kepentingan kolektif atau preferensi individual. Ketika ideologi logika murni menuntut logika mengemban peran ini, ia menuntut dari logika suatu jenis otoritas yang tidak dapat dibenarkan oleh logika itu sendiri.

Dari sudut pandang The Cohesive Tetrad, ini adalah bukti adanya Sabda yang tersembunyi. Institusi-institusi modern terus bertindak seakan-akan ada tatanan norma dan telos yang mendahului kesepakatan manusia. Mereka tidak menyebutnya pewahyuan, tetapi mereka memperlakukannya sebagai sesuatu yang berbicara dengan otoritas melampaui manusia. Celah antara kesetiaan resmi mereka pada logika murni dan ketergantungan praktis mereka pada bahasa martabat yang nyaris-revelatori merupakan tanda ketegangan internal, bukan keseimbangan yang stabil.

3.5. Kesimpulan sementara: logika di tepi mandatnya

Kritik internal yang dikembangkan dalam bagian ini dapat dirumuskan secara singkat. Logika murni, ketika mencoba berfungsi sebagai satu-satunya penguasa tertinggi rasionalitas, mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankannya tanpa bantuan terselubung. Ia bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan yang tidak dapat diturunkannya dari metodenya sendiri. Ia bekerja di dalam medan fakta dan nilai yang saling terjerat, yang bukan ciptaannya sendiri. Ia bersandar pada konsep-konsep martabat dan telos yang memikul bobot lebih besar daripada yang dapat ditanggung oleh kosakata naturalistiknya.

Tak satu pun dari ini berarti bahwa logika dapat dibuang. Sebaliknya, analisis ini menunjukkan betapa kita membutuhkan disiplin logis untuk menjernihkan, menguji, dan menahan klaim-klaim kita. Yang gagal bukanlah logika itu sendiri, melainkan upaya menjadikan logika satu-satunya bahasa kebenaran yang sah. Ketika logika diminta memikul beban tersebut, ia entah

runtuh ke dalam skeptisisme atau meminjam-tanpa pengakuan-dari ranah-ranah yang justru diklaimnya ditinggalkan.

Inilah celah di mana The Cohesive Tetrad harus ditempatkan. Masalahnya bukanlah bahwa logika terlalu kuat, melainkan bahwa logika telah diberi jabatan yang keliru. Logika telah diperlakukan sebagai raja, padahal sesungguhnya ia dipanggil untuk menjadi menteri. Tugas bagian berikutnya adalah memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur di mana Sabda, Logik, Qualia, dan Mistika masing-masing dapat menjalankan peran sewajarnya dalam tata kelola kebenaran, dengan Akhlak dan Intention-Trace Alignment berfungsi sebagai diagnostik jangka panjang atas integritas.

4. The Cohesive Tetrad sebagai Arsitektur Tata Kelola Kebenaran

Kritik internal terhadap logika murni meninggalkan kita dengan satu tugas yang belum terselesaikan. Kita telah melihat bahwa ideologi logika murni tidak mampu sepenuhnya membenarkan norma-norma inferensinya sendiri, tidak sanggup menampung keterjeratan fakta dan nilai, dan tidak dapat menopang kedalaman martabat manusia yang secara diam-diam sudah diasumsikan oleh institusi modern. Namun kritik saja tidak cukup. Jika logika murni tidak memadai sebagai arsitektur tata kelola kebenaran, apa yang dapat menggantikannya tanpa tergelincir ke dalam kesewenang-wenangan atau nostalgia.

The Cohesive Tetrad diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan arsitektural tersebut, bukan sebagai metafora longgar, melainkan sebagai konfigurasi terstruktur dari ranah-ranah kebenaran yang dapat diperiksa dan diperdebatkan. Bertolak dari karya terdahulu yang memperkenalkan The Cohesive Tetrad sebagai kerangka filosofis dan etis bagi tata kelola kebenaran (*Mutaqin 2025a, 2025b*), bagian ini menyajikan kerangka tersebut secara eksplisit sebagai sebuah arsitektur. Enam elemen inti dan relasinya dibedakan sebagai berikut:

1. Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*.
2. Logika sebagai ranah penalaran formal dan inferensial.
3. Qualia sebagai medan pengalaman hidup, berwujud, dan sosial.
4. Mistika sebagai *Mistika, the intentional spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*.
5. Akhlak sebagai karakter moral yang dapat diamati dan terbentuk dari waktu ke waktu.
6. Intention-Trace Alignment sebagai *Intention-Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic moral trace*.

Tujuan bagian ini sekaligus bersifat deskriptif dan evaluatif. Bagian ini menjelaskan bagaimana The Cohesive Tetrad memahami kebenaran sebagai sesuatu yang diartikulasikan lintas sejumlah ranah, dan menilai bagaimana susunan seperti ini dapat menjelaskan praktik-praktik yang sudah ada dalam hukum dan kecerdasan buatan dengan lebih baik dibandingkan ideologi logika murni. Pergerakannya adalah dari gambaran kebenaran yang satu bahasa menuju gambaran multi ranah, di mana setiap ranah memiliki integritasnya sendiri dan bentuk-bentuk distorsi khas ketika ia dipisahkan dari yang lain.

4.1. Dari kebenaran satu bahasa ke kebenaran multi ranah

Di bawah ideologi logika murni, kebenaran dibayangkan sebagai rezim satu bahasa (*monolingual*). Hanya ada satu bahasa yang dianggap layak bagi wacana serius, yakni bahasa

logika dan sains empiris. Kosakata moral dan spiritual mungkin memiliki nilai ekspresif atau motivasional, tetapi tidak diperlakukan sebagai pembawa kebenaran dalam pengertian yang sama. Dalam taraf terbaik, kosakata tersebut diterjemahkan ke dalam istilah yang lebih netral; dalam taraf terburuk, ia disingkirkan ke keyakinan privat.

The Cohesive Tetrad menawarkan gambaran yang berbeda. Titik berangkatnya adalah pengamatan bahwa dalam kehidupan manusia yang nyata, klaim atas kebenaran memang sudah hadir dalam beberapa register. Ada pernyataan bahwa peristiwa tertentu sungguh terjadi, bahwa relasi kausal tertentu sungguh ada, bahwa tindakan tertentu sungguh adil atau tidak adil, bahwa pengalaman tertentu memanifestasikan rahmat atau keterabaian, bahwa kehidupan tertentu menunjukkan integritas atau korupsi. Ini bukan sekadar perasaan berbeda tentang fakta-fakta netral yang sama. Ini adalah jenis-jenis klaim kebenaran yang berbeda.

Di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, berbagai jenis klaim ini tidak dipaksa masuk ke dalam satu cetakan, juga tidak dibiarkan kacau. Setiap ranah dinamai, diberi peran yang berbeda, dan ditempatkan dalam relasi dengan ranah-ranah lain.

Sabda menamai sumber utama norma dan telos. Sabda menunjuk pada keyakinan bahwa manusia disapa oleh sebuah Word yang bukan ciptaan mereka sendiri, sebuah Word yang berbicara dengan otoritas tentang tujuan keberadaan mereka dan bagaimana mereka seharusnya hidup.

Logika menamai praktik-praktik di mana klaim dirumuskan, dihubungkan, diuji, dan disistematisasi, termasuk disiplin inferensi formal dan konfirmasi empiris.

Qualia menamai ranah di mana konsekuensi dari klaim kebenaran dirasakan dan diamati dalam kehidupan personal dan komunal, termasuk atmosfer kepercayaan, ketakutan, harapan, dan kerugian yang mengelilingi institusi dan teknologi.

Mistika menamai orientasi dan pemurnian niat dalam pencarian kebenaran dan dalam penggunaan kekuasaan, termasuk disiplin-disiplin yang dengannya komunitas menguji kasih dan ketakutan yang mengarahkan penalaran mereka.

Akhlahk dan Intention-Trace Alignment menyediakan perangkat diagnosis jangka panjang. Keduanya menanyakan apakah karakter yang dibentuk oleh sebuah rezim kebenaran dan jejak yang dapat diamati dari tindakannya sepanjang waktu sungguh-sungguh selaras dengan telos yang diakuinya.

Berpindah dari rezim satu bahasa menuju rezim multi ranah bukan berarti bahwa segala sesuatu boleh disebut kebenaran. Perpindahan ini berarti bahwa klaim-klaim diadili di dalam ranah yang menjadi miliknya dan dalam relasinya dengan ranah lain. Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah logika sendiri dapat memutuskan segalanya, melainkan apakah logika ditempatkan secara tepat di dalam keseluruhan arsitektur.

4.2. Sabda: sumber otoritatif bagi norma dan telos

Sabda, dalam pengertian yang digunakan di sini, merujuk pada *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Sabda tidak terbatas pada satu tradisi keagamaan atau satu korpus teks suci. Sabda menunjuk pada keyakinan yang lebih mendasar bahwa manusia

disapa oleh sebuah Word yang bukan karya mereka sendiri, sebuah Word yang sekaligus memanggil dan memerintah, menjanjikan dan mengadili.

Beberapa klarifikasi diperlukan.

Pertama, Sabda bukan lawan rasionalitas. Sabda bukan izin bagi kesewenang-wenangan. Dalam banyak tradisi, penerimaan pewahyuan disertai disiplin ketat penafsiran, argumentasi, dan pengujian moral (*Nasr 1989; Taylor 1989*). Sabda tidak meniadakan kebutuhan akan argumen, penafsiran, dan bukti. Sabda justru menegaskan bahwa beberapa kebenaran, terutama yang berkaitan dengan telos tertinggi dan martabat yang tak dapat diganggu gugat, tidak disimpulkan dari preferensi manusia atau kontrak sosial, melainkan diterima sebagai sesuatu yang mengikat.

Kedua, Sabda bukan sekadar satu ranah wacana di antara yang lain. Dalam The Cohesive Tetrad, Sabda menempati posisi struktural yang lebih tinggi. Ketika Sabda secara kredibel berbicara tentang norma dan telos, ia tidak hanya menyatakan tindakan apa yang boleh atau dilarang, tetapi juga jenis kehidupan seperti apa yang patut disebut bijaksana atau bodoh, dan tujuan-tujuan mana yang layak diklaim sebagai tujuan seorang manusia. Tanpa sumber seperti ini, institusi cenderung berayun antara proseduralisme tipis dan moralitas tebal yang tidak stabil, yang dibangun dari konsensus yang berubah-ubah. Rujukan yang terus-menerus kepada martabat manusia dalam wacana hukum dan politik dapat dibaca sebagai pengakuan implisit bahwa sesuatu seperti Sabda dibutuhkan, bahkan ketika nama itu tidak digunakan (*Habermas 2008; UNESCO 2021*).

Ketiga, Sabda tidak menafsirkan dirinya sendiri. Sabda selalu diterima melalui sejarah, bahasa, dan komunitas. Berbagai tradisi dan mazhab mengembangkan rumusan yang saling bersaing tentang apa yang dituntut Sabda dalam situasi tertentu. Karena itu, The Cohesive Tetrad tidak meromantisasi Sabda sebagai suara murni yang melompati semua mediasi manusia. Sebaliknya, Sabda ditempatkan di puncak sebuah arsitektur yang mencakup logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment sebagai instrumen pengujian, koreksi, dan pemurnian. Penyalahgunaan pewahyuan, termasuk tafsir yang menindas atau melahirkan kekerasan, dapat dan harus diadili melalui kegagalannya untuk selaras dengan telos dan karakter yang Sabda sendiri nyatakan.

Dari perspektif The Cohesive Tetrad, institusi modern kerap hidup dengan Sabda yang tersembunyi. Mereka merujuk pada martabat tanpa syarat dan hak yang tak dapat dinegosiasikan, mereka berbicara tentang kesalahan yang tak dapat dibenarkan bahkan oleh kehendak mayoritas, tetapi mereka enggan menyebut sumber norma dan telos di luar kesepakatan manusia (*Putnam 2002; Jobin et al. 2019*). Tugas arsitektur ini bukan memaksakan satu tradisi keagamaan ke dalam kehidupan publik, melainkan menjelaskan secara eksplisit ketergantungan tata kelola kebenaran pada sumber yang lebih dalam dari konsensus dan membawa ketergantungan tersebut ke dalam tata kelola yang terdisiplin.

4.3. Logika: instrumen terlatih dan medium bersama

Dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, logika memperoleh peran yang sekaligus diagungkan dan dibatasi. Logika diagungkan sebagai *craft* terlatih yang menjernihkan klaim, menguji koherensi, dan membuat perbedaan menjadi terlihat. Logika dibatasi karena ia tidak diizinkan mendefinisikan norma dan telos secara mandiri.

Setidaknya ada tiga fungsi pokok logika.

Pertama, logika adalah instrumen penjernih. Logika memaksa rujukan-rujukan yang kabur kepada Sabda, pengalaman, atau suara hati untuk mengambil bentuk yang dapat diperiksa: proposisi, argumen, model, dan prosedur. Dalam peran ini, logika melindungi Sabda agar tidak diperkecil menjadi slogan dan melindungi Qualia agar tidak disingkirkan sebagai sekadar perasaan. Penjernihan tidak identik dengan reduksi, tetapi tanpa penjernihan, penipuan diri terlalu mudah terjadi.

Kedua, logika adalah instrumen penguji. Logika memeriksa apakah klaim tentang pewahyuan, pengalaman, atau desain institusional koheren secara internal dan apakah premis-premisnya sungguh mendukung kesimpulan yang ditarik. Dalam hukum dan kecerdasan buatan, ini mencakup penelaahan argumen hukum, justifikasi kebijakan, dan model algoritmik. Logika mengungkap ketika bahasa saleh menutupi kontradiksi, ketika niat mulia bertabrakan dengan aturan yang sebenarnya, dan ketika model menghasilkan pola kerugian yang disangkal oleh para perancangannya (*Fuller 1964; O'Neil 2016; Mittelstadt et al. 2016*).

Ketiga, logika adalah medium bersama dalam konteks majemuk. Di masyarakat yang warganya dibentuk oleh tradisi Sabda yang berbeda dan sejarah penderitaan yang berbeda, ruang penalaran publik tidak dapat bergantung pada satu bahasa sakral. Logika menyediakan sebagian tanah bersama. Logika tidak menghapus perbedaan mendalam, tetapi menawarkan tata bahasa di mana perbedaan itu dapat diartikulasikan dan diperdebatkan tanpa segera bersandar pada kekerasan. Dalam pengertian ini, logika bekerja sama dengan cita-cita diskursif dalam teori hukum dan politik yang mengupayakan pembenaran publik lintas pandangan dunia (*Habermas 1996*).

Poin krusialnya adalah bahwa logika tidak menciptakan telos. Logika tidak dapat, sendirian, memberi tahu kita untuk apa manusia diciptakan atau mengapa kerugian tertentu tidak dapat ditoleransi. Logika dapat menunjukkan bahwa beberapa tujuan tidak konsisten atau saling menghancurkan, logika dapat mengungkap bahwa kebijakan tertentu bertentangan dengan prinsip yang telah diumumkan, tetapi logika tidak dapat menganugerahkan nilai intrinsik pada pribadi. Karena itu, dalam *The Cohesive Tetrad*, logika dibebaskan dari tugas mustahil untuk memikul tujuan terakhir dan dikembalikan kepada tugasnya yang layak: melayani tujuan-tujuan tersebut.

4.4. Qualia: perekaman pengalaman dan umpan balik evaluatif

Qualia, dalam kerangka ini, menamai ranah pengalaman hidup, berwujud, dan komunal. Qualia mencakup rasa aman atau ancaman di suatu lingkungan, suasana kepercayaan atau ketakutan di ruang sidang, martabat atau penghinaan yang dialami mereka yang menjadi objek keputusan algoritmik, dan pola harapan atau keputusasaan jangka panjang yang berkumpul di sekitar institusi. Qualia bukan hanya tentang perasaan individu. Qualia adalah atmosfer tak kasat mata yang dihasilkan sebuah rezim kebenaran dari waktu ke waktu.

Di bawah ideologi logika murni, Qualia cenderung diperlakukan sebagai derau. Pengalaman dianggap penting sejauh dapat diukur dan diagregasi, tetapi tekstur kualitatifnya tidak diakui sebagai ranah kebenaran. Tujuannya adalah mengubah perasaan menjadi titik-titik data yang dapat diproses oleh logika yang sama seperti variabel lainnya. Akibatnya, kepekaan hilang.

Situasi di mana prosedur tampak adil secara formal tetapi menindas secara pengalaman sulit dijelaskan, sehingga sulit pula diperbaiki (*Fricker 2007; Medina 2013*).

Di dalam The Cohesive Tetrad, Qualia memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, Qualia berfungsi sebagai medan perekaman. Qualia merekam bagaimana rezim hukum, kebijakan, dan teknologi sungguh dijalani. Kesaksian mereka yang memikul beban terberat, pola trauma atau resiliensi, dan perubahan kepercayaan komunal semuanya menjadi bagian dari rekam kebenaran. Ketika komunitas melaporkan bahwa suatu sistem hukum atau praktik algoritmik secara konsisten menghasilkan rasa takut, penghinaan, atau “ketak-terlihatan”, Qualia menandai kemungkinan ketidakselarasan, bahkan bila aturan dasarnya tampak rapi di atas kertas (*O’Neil 2016; Zuboff 2019*).

Kedua, Qualia menyediakan alasan yang tidak sekadar dapat direduksi ke argumen formal. Kisah penyintas tentang bagaimana sebuah proses dirasakan, narasi komunitas tentang bagaimana sebuah platform mengubah relasi sosial, atau deskripsi seorang pasien tentang bagaimana suatu protokol medis mengikis agensi, bukanlah emosi belaka. Semua itu adalah sumber pengetahuan tentang apa yang sedang dilakukan sebuah sistem terhadap pribadi. Pengetahuan berpengalaman seperti ini tidak tak bersalah dari kesalahan, tetapi juga tidak irasional. Pengetahuan itu dapat dan harus ditimbang dalam terang Sabda, logika, dan Mistika.

Ketiga, Qualia menghubungkan Sabda dengan desain institusional. Sabda berbicara tentang belas kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap yang rentan. Qualia memperlihatkan apakah institusi yang merujuk pada bahasa tersebut sungguh memanifestasikan kualitas-kualitas itu. Ketika terdapat penyimpangan yang persisten antara komitmen resmi dan pengalaman hidup, Qualia mendesak perubahan. Qualia juga menyediakan medan di mana komunitas belajar mempersepsi dengan lebih tajam, menamai bentuk-bentuk halus dari kerugian, dan menolak narasi yang menormalkan ketidakadilan.

Dengan cara ini, Qualia bertindak sebagai lingkaran umpan balik evaluatif yang berkelanjutan. Qualia tidak hanya menanyakan apakah keputusan proseduralnya benar, tetapi juga jenis dunia seperti apa yang sedang diciptakan ketika rezim kebenaran tertentu diterapkan.

4.5. Mistika: pemurnian niat dan kedalaman pencarian

Mistika merujuk pada *Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent*. Dalam The Cohesive Tetrad, Mistika memusatkan perhatian pada orientasi hati dan kehendak dalam pencarian kebenaran dan dalam penggunaan otoritas. Mistika mengingatkan bahwa penalaran selalu dibawa oleh agen, dan para agen digerakkan oleh kasih, ketakutan, dan loyalitas yang membentuk apa yang mereka bersedia lihat.

Ranah ini penting karena penggunaan logika dan bukti tidak pernah sepenuhnya mekanis. Dua peneliti dapat bekerja dengan data dan metode yang sama tetapi mencapai kesimpulan yang sangat berbeda karena niat dasar mereka berbeda. Salah satunya mungkin digerakkan oleh keinginan akan status atau kemenangan, yang lain oleh keinginan untuk memahami dan melayani. Pola-pola *motivated reasoning* yang didokumentasikan dalam psikologi merupakan gejala dari lapisan yang lebih dalam ini, di mana kehendak secara halus mengarahkan persepsi dan argumen (*Kunda 1990*).

Mistika menamai sekaligus dimensi diagnostik dan korektif. Sebagai diagnosis, Mistika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa penyelidikan ini dilakukan. Jenis diri dan komunitas seperti apa yang terbentuk melalui praktik penalaran ini. Kasih, ketakutan, dan loyalitas mana yang secara diam-diam mengarahkan cara bukti dipilih, ditangani, dan disajikan. Sebagai koreksi, Mistika menunjuk pada disiplin-disiplin yang dikembangkan berbagai tradisi untuk memurnikan niat: praktik pemeriksaan batin, penelaahan bersama, askese, dan kesediaan rendah hati untuk mendengarkan mereka yang menderita.

Dalam kaitannya dengan hukum dan kecerdasan buatan, Mistika menuntut agar perancang, hakim, dan pembuat kebijakan memeriksa bentuk spiritual dari pekerjaan mereka. Seorang sarjana hukum dapat menyusun argumen yang secara formal tak bercela demi membela kebijakan yang secara halus mengukuhkan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Seorang insinyur dapat mengoptimalkan sistem rekomendasi dengan cara yang meningkatkan keterlibatan, tetapi dengan harga memperdalam kecanduan dan polarisasi. Dalam kedua kasus, mungkin tidak ada kesalahan logis yang jelas, tetapi terdapat ketidakselarasan antara niat dan telos yang diwahyukan oleh Sabda. Mistika menempatkan ketidakselarasan semacam itu di dalam wilayah tata kelola kebenaran, bukan sekadar meninggalkannya sebagai urusan moral privat.

4.6. Akhlak dan Intention-Trace Alignment: diagnosis jangka panjang

Akhlak dalam kerangka ini merujuk pada karakter moral yang dapat diamati dari pribadi dan komunitas yang terbentuk dari waktu ke waktu di bawah sebuah rezim kebenaran. Akhlak mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, keberanian, belas kasih, dan kerendahan hati intelektual. Intention-Trace Alignment menambahkan satu dimensi lagi. Ia memeriksa derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral-yakni antara apa yang dikatakan agen sebagai tujuan dalam pencarian pengetahuan dan pola efek nyata yang ditinggalkan praktik mereka di dunia.

Bersama-sama, Akhlak dan Intention-Trace Alignment berfungsi sebagai perangkat diagnosis yang lambat namun kuat. Keduanya kurang terpaku pada keputusan-keputusan terpisah, dan lebih pada trajektori. Dengan keduanya, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti: selama bertahun-tahun atau dekade, jenis manusia seperti apa yang dibentuk oleh rezim kebenaran ini. Apakah norma dan telos yang dinyatakan sungguh diwujudkan dalam praktik. Jika terjadi ketidaksesuaian, apakah itu insidental atau justru struktural.

Penekanan diagnostik ini selaras dengan perkembangan dalam epistemologi kebajikan dan studi empiris tentang karakter intelektual, yang menegaskan bahwa disposisi yang stabil seperti kerendahan hati intelektual dan keterbukaan pikiran merupakan pusat bagi penyelidikan yang andal (*Zagzebski 1996; Roberts and Wood 2007; Baehr 2011; Krumrei-Mancuso and Rouse 2016*). The Cohesive Tetrad memperluas perhatian ini melampaui agen individual menuju institusi. The Cohesive Tetrad menanyakan Akhlak seperti apa yang secara statistik didorong atau justru dihambat oleh prosedur hukum tertentu atau arsitektur teknologi tertentu, dan apakah jejak jangka panjang sistem-sistem tersebut selaras dengan niat yang mereka nyatakan.

Jika arsitektur tata kelola kebenaran sehat, kegagalan insidental akan tetap terjadi, tetapi pola kemunafikan yang persisten seharusnya terkoreksi. Sebaliknya, ketika bukti puluhan tahun menunjukkan bahwa prosedur tertentu secara rutin melahirkan penipuan, kekejaman, atau keangkuhan epistemik, Akhlak dan Intention-Trace Alignment memperlakukan hal ini bukan

sebagai kebisingan acak, melainkan sebagai tanda bahwa arsitekturnya sendiri tidak selaras. Jarak antara apa yang diucapkan dan apa yang dijalani tidak akan menyempit sampai susunan dasar ranah-ranahnya diubah.

Fungsi diagnosis ini penting karena menghormati waktu. Banyak kerusakan dari hukum dan teknologi baru tampak setelah pemakaian jangka panjang. Dengan memasukkan karakter dan jejak jangka panjang ke dalam definisi tata kelola kebenaran itu sendiri, The Cohesive Tetrad menolak godaan untuk menilai sistem hanya pada titik keputusan dan mendesak agar kita mengikuti jejak moral yang ditinggalkannya.

4.7. Relasi struktural di dalam The Cohesive Tetrad

Ranah-ranah dalam The Cohesive Tetrad bukan sekadar gagasan yang dikumpulkan secara longgar. Ranah-ranah itu berdiri dalam relasi terstruktur yang penting bagi tata kelola kebenaran.

Pertama, terdapat relasi vertikal otoritas. Sabda berdiri di puncak sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Hal ini tidak berarti bahwa setiap klaim pewahyuan secara otomatis benar atau mengikat. Hal ini berarti bahwa, di dalam arsitektur ini, setiap klaim tentang tujuan tertinggi atau martabat yang tak dapat diganggu gugat pada akhirnya diuji oleh kesetiiaannya pada Sabda, bukan oleh popularitas atau kegunaan jangka pendek. Tanpa rujukan vertikal ini, bahasa tentang martabat berisiko menyusut menjadi cara halus untuk menggambarkan preferensi.

Kedua, terdapat serangkaian relasi horizontal koreksi timbal balik. Logika, Qualia, dan Mistika saling mempertanyakan dan saling memperhalus. Logika memeriksa apakah tafsir Sabda dan narasi pengalaman koheren dan apakah klaim tentang kemurnian batin konsisten dengan perilaku yang dapat diamati. Qualia memperlihatkan ketika sistem yang secara formal rapi tetap menghasilkan pola kerugian yang bertentangan dengan telos Sabda. Mistika menyingkap bagaimana kesombongan, ketakutan, atau keterikatan idolatris pada kekuasaan dapat mendistorsi penalaran logis maupun pengelolaan pengalaman. Tidak ada ranah yang dibiarkan tanpa pengawasan. Setiap ranah diberi “tetangga” yang mampu mengungkap eksis dan titik butanya.

Akhlaq dan Intention-Trace Alignment beroperasi melintasi relasi-relasi ini sebagai audit longitudinal. Keduanya tidak menambahkan ranah isi yang baru, melainkan dimensi temporal. Keduanya menanyakan apakah arsitektur, ketika diwujudkan secara nyata, menghormati klaimnya sendiri dari waktu ke waktu. Dalam pengertian ini, The Cohesive Tetrad bukan hanya peta ranah, tetapi juga rancangan bagi proses interaksi, koreksi, dan penilaian yang terus berlangsung.

4.8. Cara The Cohesive Tetrad menjawab kegagalan logika murni

Kritik sebelumnya terhadap logika murni telah mengidentifikasi sedikitnya empat kerentanan struktural. Arsitektur logika murni tidak dapat memendasarkan norma-normanya sendiri tanpa kepercayaan tersembunyi, tidak mampu mempertahankan evidensialisme keras tanpa runtuh ke dalam skeptisisme, tidak dapat mempertahankan pemisahan ketat fakta-nilai dalam praktik, dan tidak sanggup memberikan penjelasan kokoh tentang martabat manusia. Arsitektur The Cohesive Tetrad berbicara langsung kepada masing-masing titik ini.

Masalah pemendasaran diri dijawab dengan mengakui bahwa logika dan bukti tidak melegitimasi diri sendiri, melainkan bertumpu pada penerimaan Sabda yang mendahului. Komitmen kepada kebenaran dan keyakinan bahwa realitas itu dapat dipahami dipahami sebagai respons terhadap sebuah Word yang memanggil dan memberi mandat bagi penyelidikan. Logika tetap membuka ruang bagi refleksi filosofis tentang norma-normanya sendiri, tetapi refleksi tersebut ditempatkan di dalam cakrawala yang lebih luas.

Batas-batas evidensialisme keras dijawab dengan mengintegrasikan kepercayaan, karakter, dan pengalaman ke dalam struktur rasionalitas. Kepercayaan pada kesaksian dan institusi, Akhlak para agen epistemik, dan Qualia komunitas yang terdampak oleh keputusan diakui sebagai komponen normal dari komitmen yang bertanggung jawab, bukan sebagai penyimpangan yang harus dijelaskan pergi. Bukti tetap menjadi pusat, tetapi apa yang dianggap sebagai bukti diperluas secara terdisiplin.

Keterjeratan fakta dan nilai tidak lagi menjadi hal yang memalukan dan harus disembunyikan, tetapi justru diakui sebagai ciri eksplisit arsitektur. Pencarian kebenaran dipahami selalu sudah bersifat etis, sebab ia dipandu oleh Sabda, dijalankan oleh agen yang Mistika-nya tidak pernah netral, dan dinilai oleh dampaknya terhadap Qualia dan Akhlak komunal. Upaya berpura-pura bahwa penyelidikan bebas nilai diperlakukan sebagai bentuk penipuan diri, bukan sebagai ideal.

Status rapuh martabat diperkuat dengan menempatkannya di bawah Sabda, bukan di bawah konsensus atau utilitas. Martabat menjadi spesifikasi telos, bukan proyeksi preferensi. Pada saat yang sama, klaim martabat tidak kebal dari kritik. Klaim tersebut tetap tunduk pada penelaahan melalui Qualia, Mistika, dan logika, dan keasliannya dilacak melalui Akhlak dan Intention-Trace Alignment. Kombinasi ini memungkinkan institusi berbicara dengan bahasa martabat yang kuat tanpa memberikan kekuasaan tak terkendali kepada otoritas manusia mana pun yang mengklaim berbicara atas nama martabat.

Dalam setiap kasus, solusi yang ditawarkan bukanlah menyingkirkan logika, melainkan melepaskan logika dari tuntutan untuk menjadi segalanya. Ketika logika diposisikan ulang di dalam The Cohesive Tetrad, kekuatannya dapat dimanfaatkan tanpa berlebihan, dan kelemahannya dapat dikenali serta diperbaiki.

4.9. Martabat logika di dalam arsitektur yang setia pada kebenaran

Gambaran yang muncul bukanlah penghinaan terhadap logika. Sebaliknya, The Cohesive Tetrad justru menyelamatkan logika dari mandat yang mustahil dan menganugerahkan peran yang lebih realistis dan lebih terhormat. Logika tidak lagi diminta menyediakan justifikasi terakhir bagi dirinya sendiri, memurnikan penyelidikan dari semua nilai, atau meniupkan isi moral ke dalam konsep martabat yang tidak cocok dengan bingkai naturalistiknya.

Sebaliknya, logika dihormati sebagai *craft* yang menjaga setiap ranah tetap jujur secara intelektual pada level struktur dan inferensi. Logika tetap esensial bagi sains, bagi hukum, dan bagi desain teknologi. Tidak satu pun tafsir Sabda, klaim tentang Qualia, praktik Mistika, atau penilaian tentang Akhlak yang kebal dari penelaahan logis. Logika tetap menuntut koherensi, mengungkap kontradiksi, dan menegaskan bahwa alasan harus diberikan.

Yang berubah adalah bahwa kini logika beroperasi di bawah cakrawala yang didefinisikan ulang. Logika secara eksplisit diarahkan kepada Sabda, terbuka terhadap Qualia, direndahkan oleh Mistika, dan bertanggung jawab kepada diagnosis jangka panjang Akhlak dan Intention-Trace Alignment. Kemuliaan logika yang sejati terletak pada pelayanannya kepada kebenaran yang lebih besar daripada dirinya sendiri, bukan pada berpura-pura menjadi keseluruhan kebenaran.

Dengan demikian, arsitektur The Cohesive Tetrad menawarkan cara bagi institusi untuk tetap rasional sambil mengakui ketergantungannya pada sumber-sumber norma dan telos yang tidak dapat dihasilkan oleh logika semata. Hal ini mempersiapkan landasan bagi bagian-bagian berikutnya dari artikel, yang akan menunjukkan bagaimana arsitektur ini dapat diterapkan pada dua ranah di mana ideologi logika murni sekaligus kuat dan rapuh, yakni rasionalitas hukum dan tata kelola kecerdasan buatan.

5. Rasionalitas Hukum dalam Kerangka Logika Murni dan The Cohesive Tetrad

Hukum merupakan salah satu tempat paling jelas di mana janji dan kegagalan ideologi logika murni menjadi konkret. Pengadilan dan sistem hukum mengklaim bahwa mereka dipandu oleh alasan, bukti, dan prosedur, bukan oleh kehendak sewenang-wenang atau hasrat. Karena itu, rasionalitas hukum adalah lahan uji yang ideal bagi setiap arsitektur tata kelola kebenaran. Jika sebuah arsitektur gagal di sini, ia gagal tepat di titik di mana kerentanan manusia dan kekuasaan institusional paling langsung berjumpa.

Dalam bagian ini, saya terlebih dahulu menggambarkan bagaimana ideologi logika murni membentuk ulang pemikiran dan praktik hukum. Saya kemudian mengidentifikasi titik-titik buta struktural yang muncul ketika rasionalitas hukum dipusatkan pada logika murni. Terakhir, saya merekonstruksi rasionalitas hukum di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, dengan Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment masing-masing memainkan peran yang berbeda. Hukum menjadi medan di mana kontras antara dua arsitektur ini dapat diamati, bukan sekadar ditegaskan.

5.1. Hukum di bawah ideologi logika murni

Ketika ideologi logika murni mengakar dalam pemikiran hukum, beberapa kecenderungan muncul secara bersamaan.

Pertama-tama, hukum dibayangkan ulang sebagai sebuah sistem yang otonom. Legitimasi hukum ditempatkan terutama pada koherensi internal dan keteraturan prosedural. Aturan dan preseden ditafsirkan dengan cara yang menjaga konsistensi sistemik. Pelaku hukum belajar memandang hukum sebagai suatu tatanan mandiri yang dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsipnya sendiri, dengan rujukan minimal pada sumber eksternal dari norma dan telos. Otonomi ini dipandang rasional karena mengisolasi hukum dari perubahan politik yang sewenang-wenang dan dari rujukan sektarian pada pewahyuan.

Pada saat yang sama, pemisahan antara fakta dan nilai diperkeras. Fakta ditempatkan di ranah pembuktian, sedangkan nilai dikurung di ranah kebijakan atau keyakinan personal. Pengadilan berfokus pada pencarian fakta dan penerapan aturan, sementara pertanyaan yang lebih luas tentang tujuan hukum, bentuk masyarakat yang adil, atau makna martabat diperlakukan sebagai

urusan lembaga legislatif atau suara hati privat. Wawasan moral dan spiritual didorong ke pinggiran atau dibungkus dalam abstraksi-abstraksi yang hati-hati.

Bahasa martabat, hak, dan keadilan tidak lenyap. Sebaliknya, bahasa ini sering dirujuk dalam teks-teks konstitusional, traktat, dan putusan yudisial. Namun di bawah ideologi logika murni, bahasa tersebut cenderung dikodekan ulang sebagai cara canggih untuk berbicara tentang kepentingan dan prosedur. Martabat menjadi label bagi hasil-hasil tertentu setelah fakta, bukan sumber utama norma. Hak berubah menjadi alat untuk menyeimbangkan klaim-klaim yang bersaing, bukan ekspresi dari suatu tatanan yang mengadili negara maupun masyarakat.

Akhirnya, para pelaku di dalam sistem hukum didorong untuk memahami diri mereka terutama sebagai teknisi aturan. Tugas mereka adalah menafsirkan teks, menimbang bukti, dan menerapkan standar dengan cara yang dapat dibela sebagai rasional secara formal. Pengembangan Akhlak, pembentukan karakter, dan jejak moral jangka panjang dari keputusan-keputusan dipandang sebagai urusan privat. Selama hakim dan pengacara menghindari korupsi yang nyata dan mengikuti prosedur yang diterima, pertanyaan yang lebih dalam mengenai jenis manusia seperti apa yang dibentuk oleh sistem hampir tidak pernah diajukan.

Konfigurasi ini memiliki kekuatan. Konfigurasi ini menahan otoritas yang sewenang-wenang, mendorong konsistensi, dan memungkinkan banyak sengketa diselesaikan tanpa konflik langsung atas keyakinan-keyakinan pamungkas (*Fuller 1964; Dworkin 1986; Habermas 1996*). Pada saat yang sama, konfigurasi ini mempersiapkan tanah bagi kegagalan-kegagalan khas. Dengan memusatkan rasionalitas hukum pada logika murni, konfigurasi ini melatih dirinya untuk memperlakukan semua normativitas sebagai turunan, semua pengalaman sebagai sekunder, dan semua pertanyaan tentang telos sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan.

5.2. Titik-titik buta struktural dari rasionalitas hukum yang berpusat pada logika

Ketika rasionalitas hukum terutama dibentuk oleh logika murni, sejumlah titik buta struktural muncul.

Pertama, terdapat kecenderungan menuju absolutisme prosedural. Jika legitimasi hukum didefinisikan hampir sepenuhnya oleh apakah prosedur yang benar telah diikuti, maka ketidakadilan yang dalam dapat dirasionalisasi sebagai dapat diterima sejauh semuanya dilakukan “sesuai buku”. Keputusan-keputusan yang menghancurkan kehidupan dapat dipertahankan dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki pilihan setelah fakta-fakta ditetapkan dan aturan diterapkan dengan benar. Seruan pada belas kasih, ekuitas, atau normativitas yang lebih tinggi dibingkai ulang sebagai undangan berbahaya menuju kesewenang-wenangan. Dalam praktiknya, legalitas dan keadilan secara diam-diam diperlakukan sebagai identik, bahkan ketika perbedaan di antara keduanya jelas.

Kedua, pengalaman mereka yang hidup di bawah hukum dengan mudah terpinggirkan. Proseduralisme cenderung mengakui hanya suara-suara yang sesuai dengan kategori yang sudah mapan dan bentuk-bentuk alat bukti yang diakui. Kesaksian yang tidak selaras dengan skrip yang ada sering dianggap tidak relevan atau tidak dapat diandalkan. Qualia hukum-atmosfer yang diciptakannya dalam kehidupan mereka yang bersentuhan dengannya-jarang diperlakukan sebagai sumber pengetahuan. Sebagaimana ditunjukkan kajian tentang ketidakadilan epistemik, hal ini melahirkan pola-pola di mana kelompok tertentu secara

sistematis tidak dipercaya atau disalahpahami, dan di mana penderitaan mereka tidak tercatat sebagai alasan untuk meninjau kembali sistem itu sendiri (*Fricker 2007; Medina 2013*).

Ketiga, pembentukan moral para pelaku hukum diabaikan. Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara memegang kekuasaan yang signifikan atas kehidupan orang lain. Namun di bawah konsepsi yang berpusat pada logika, selama mereka menghindari konflik kepentingan yang jelas dan pelanggaran berat, bentuk batin karakter mereka berada di luar bingkai rasionalitas hukum. Kebajikan seperti kerendahan hati intelektual, keberanian untuk menentang norma yang tidak adil, dan kesediaan mendengar dengan jujur suara-suara yang terpinggirkan diperlakukan sebagai tambahan yang terpuji, bukan sebagai komponen struktural sistem. Karya-karya dalam epistemologi kebajikan menunjukkan bahwa pengabaian ini merusak keandalan penalaran hukum itu sendiri (*Zagzebski 1996; Roberts and Wood 2007; Baehr 2011*).

Keempat, konsep martabat menjadi hampa. Pengadilan merujuk pada martabat manusia untuk membatasi penghukuman, melarang perlakuan yang merendahkan, atau melindungi otonomi. Namun jika martabat tidak ditambahkan dalam Sabda atau sumber norma dan telos yang sepadan, martabat berisiko berubah menjadi perangkat retorik. Dalam kasus-kasus sulit, argumen tentang martabat dapat digunakan oleh kedua belah pihak, dan hasil akhirnya bisa lebih bergantung pada inersia institusional atau tekanan politik daripada pada konsepsi pribadi yang stabil. Seiring waktu, martabat dapat ditafsirkan ulang dengan cara yang mengakomodasi kepentingan dominan alih-alih melindungi mereka yang rentan (*Putnam 2002; MacIntyre 1988*).

Titik-titik buta ini tidak muncul karena para pelaku hukum secara khusus jahat. Titik-titik buta ini berasal dari arsitektur itu sendiri. Ketika logika murni diberi posisi utama dalam rasionalitas hukum, arsitektur ini mempersempit medan tentang apa yang boleh dihitung sebagai alasan, membungkam bagian-bagian pengalaman yang tidak cocok dengan kategorinya, dan meninggalkan sistem tanpa sumber norma dan telos yang sepenuhnya terartikulasikan. Langkah berikutnya adalah mempertimbangkan bagaimana rasionalitas hukum berubah ketika diposisikan ulang di dalam The Cohesive Tetrad.

5.3. Memposisikan ulang rasionalitas hukum di dalam The Cohesive Tetrad

Ketika rasionalitas hukum ditempatkan di dalam arsitektur The Cohesive Tetrad, posisi dan fungsi unsur-unsurnya dikonfigurasi ulang.

Sabda terlebih dahulu menjawab hukum pada level telos. Hukum bukan semata-mata seperangkat aturan untuk mengoordinasikan perilaku. Hukum adalah respons komunal terhadap Sabda, *Revelatory Word* yang menamai keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap yang rentan sebagai perhatian utama. Sabda mengingatkan para legislator dan hakim bahwa hasil-hasil tertentu tidak dapat diterima, bahkan jika hasil tersebut dapat dibela melalui pembacaan ketat terhadap teks atau preferensi mayoritas. Sabda menempatkan batas pada penghukuman, pada eksploitasi, dan pada perlakuan instrumental terhadap pribadi yang tidak dapat diubah melalui pemungutan suara.

Logika kemudian mengambil perannya sebagai instrumen terdisiplin di dalam cakrawala ini. Logika bertanggung jawab untuk menjernihkan isi norma hukum, menguji koherensi undang-undang dan preseden, serta memastikan bahwa keputusan mengikuti alasan yang dapat diartikulasikan secara publik. Logika melestarikan banyak pencapaian teori hukum modern,

termasuk tuntutan akan transparansi, non-kesewenang-wenangan, dan konsistensi (*Fuller 1964; Dworkin 1986*). Perbedaannya yang krusial adalah bahwa logika tidak lagi mengklaim mendefinisikan keseluruhan rasionalitas hukum. Logika melayani telos yang tidak diciptakannya.

Qualia menjadi register kebenaran hukum yang diakui. Atmosfer di pengadilan, cara korban dan terdakwa mengalami proses peradilan, pola ketakutan atau kepercayaan yang dihasilkan hukum dari waktu ke waktu, diperlakukan sebagai bukti mengenai kualitas moral sistem. Kesaksian tentang penghinaan, eksklusi, atau pemulihan bukan sekadar “perasaan” yang harus dikesampingkan, melainkan sinyal bahwa hukum sedang mendekati atau justru mengkhianati telos yang diakuinya (*Fricker 2007; Medina 2013*). Prosedur yang secara konsisten menghasilkan ketakutan dan kebungkaman di antara kelompok-kelompok rentan menuntut peninjauan struktural, bahkan jika prosedur itu secara formal tak bercela.

Mistika memusatkan perhatian pada niat yang menyertai penggunaan kekuasaan hukum. Mistika menanyakan apakah mereka yang membuat dan menerapkan hukum melakukannya dalam roh pelayanan kepada kebenaran dan keadilan, atau dalam roh perlindungan diri, status, dan kontrol. Di dalam The Cohesive Tetrad, penelaahan cermat atas niat bukan latihan privat. Penelaahan ini adalah bagian dari tata kelola kebenaran itu sendiri. Budaya institusional yang memberi ganjaran pada kemenangan adversarial dengan segala cara, atau yang menormalkan ketidakpedulian terhadap kaum miskin, dikenali sebagai terdistorsikan secara spiritual bahkan ketika mematuhi aturan formal (*Kunda 1990; Habermas 1996*).

Akhlaq dan Intention-Trace Alignment menyediakan diagnosis jangka panjang. Keduanya menelaah jenis karakter seperti apa yang dibentuk sistem hukum pada para aparatnya dan jejak moral seperti apa yang ditinggalkannya dalam masyarakat. Jika selama dekade-dekade tertentu suatu tatanan hukum melahirkan pola kejujuran, pengendalian diri, keberanian menghadapi ketidakadilan, dan kesediaan mendengar dengan saksama suara yang lemah, arsitekturnya terkonfirmasi. Jika sistem itu secara konsisten menghasilkan sinisme, kekejaman, dan keangkuhan epistemik, ketidakselarasan antara niat dan jejak mengungkap kegagalan arsitektural, bukan sekadar kelemahan individual (*Zagzebski 1996; Baehr 2011; Krumrei-Mancuso and Rouse 2016*).

Dalam pemposisian ulang ini, rasionalitas hukum tidak menjadi kurang rasional. Rasionalitas hukum justru menjadi lebih utuh, karena beroperasi dengan uraian eksplisit tentang sumber norma dan telosnya, mengakui status epistemik pengalaman, memperhatikan bentuk spiritual dari niat, dan menakar jejak moralnya sendiri dari waktu ke waktu.

5.4. Pola ilustratif: prosedur, belas kasih, dan kerugian struktural

Perbedaan antara dua arsitektur dapat dilihat dalam pola-pola berulang yang dihadapi sistem hukum di banyak yurisdiksi. Tiga pola sudah cukup untuk mengilustrasikan kontras tersebut.

Pola pertama berkaitan dengan hubungan antara prosedur dan belas kasih. Di bawah arsitektur yang berpusat pada logika, para hakim mungkin merasa bahwa satu-satunya tugas sah mereka adalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis. Permohonan keringanan hukuman, pendekatan restoratif, atau solusi kreatif yang mempertimbangkan seluruh kehidupan pelaku dipandang dengan kecurigaan. Belas kasih dilihat sebagai potensi ancaman bagi kesetaraan di hadapan hukum. Di bawah The Cohesive Tetrad, telos hukum mencakup bukan hanya

pembalasan dan efek jera, tetapi juga pemulihan. Sabda berbicara tentang keadilan yang tidak “mematahkan buluh yang terkulai”, dan Qualia merekam apakah praktik pembedaan menghasilkan kehidupan yang diperbarui atau eksklusi permanen. Logika tetap diperlukan untuk mencegah keberpihakan sewenang-wenang, tetapi belas kasih tidak lagi menjadi unsur asing. Belas kasih adalah bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

Pola kedua berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka yang pengalamannya tidak sesuai dengan kategori yang ada. Korban bentuk-bentuk kekerasan tertentu, terutama ketika trauma memengaruhi ingatan dan kesaksian, sering mendapati bahwa prosedur hukum tidak tahu harus berbuat apa terhadap kisah mereka. Logika murni cenderung memperlakukan penyimpangan dari struktur naratif yang diharapkan sebagai tanda ketidakandalan. Sebagaimana ditunjukkan kajian tentang ketidakadilan epistemik, hal ini melahirkan kerugian ganda: luka awal diperparah oleh kegagalan institusional untuk mendengarnya sebagai pengetahuan (*Fricker 2007; Medina 2013*). Di dalam The Cohesive Tetrad, Qualia memberi tempat yang lebih kukuh bagi pengalaman-pengalaman ini. Kesulitannya bukan alasan untuk mengabaikan, melainkan alasan untuk menyempurnakan kategori dan praktik pembuktian, dipandu oleh penegasan Sabda tentang kepedulian pada yang rentan dan oleh perhatian Mistika pada kebenaran, bukan perlindungan diri institusi.

Pola ketiga berkaitan dengan kerugian struktural. Sistem hukum dapat beroperasi dalam waktu lama dengan prosedur yang secara formal adil sambil secara konsisten menghasilkan hasil yang merugikan kelompok tertentu. Undang-undang perumahan, praktik kepolisian, dan kerangka pembedaan mungkin semuanya dapat dipertahankan secara individual, namun secara kolektif membentuk pola eksklusi yang tampak dalam disparitas statistik dan dalam kenyataan hidup komunitas. Di bawah logika murni, pola-pola ini dapat dianggap sebagai efek samping atau sebagai hasil faktor non-hukum. Di bawah The Cohesive Tetrad, Akhlak dan Intention-Trace Alignment memperlakukan pola-pola ini sebagai bagian dari rekam kebenaran. Jika jejak hukum secara persisten tidak selaras dengan niatnya yang diaku untuk menjamin keadilan bagi semua, yang diperlukan adalah reformasi, bukan sekadar penyesuaian retorika (*O’Neil 2016; Zuboff 2019*).

Pola-pola ini menunjukkan bahwa pergeseran yang diusulkan oleh The Cohesive Tetrad bukan sekadar konseptual. Pergeseran ini mengubah apa yang dianggap sebagai masalah hukum, jenis bukti apa yang diterima, bagaimana pemeriksaan diri institusional dijalankan, dan pertanyaan mana yang dianggap sah. Hukum menjadi ruang di mana Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment benar-benar berinteraksi, bukan bidang yang diatur oleh logika semata.

5.5. Hukum sebagai lahan uji bagi tata kelola kebenaran

Hukum bukan hanya salah satu aplikasi di antara yang lain. Hukum adalah lahan uji bagi setiap usulan serius tentang tata kelola kebenaran. Di dalam hukum, klaim abstrak mengenai rasionalitas, martabat, dan normativitas dipaksa bersentuhan dengan kasus-kasus konkret. Seseorang harus dinyatakan bersalah atau dibebaskan, diberi ganti rugi atau ditolak, dilindungi atau dibiarkan terekspos. Keputusan tidak dapat ditunda tanpa batas. Orang tidak bisa dibiarkan tanpa kepastian.

Jika ideologi logika murni gagal di sini, kegagalannya tampak dalam pola absolutisme prosedural, penghapusan pengalaman, deformasi moral para pelaku hukum, dan kehampaan

dalam wacana martabat. Ini bukan efek samping kebetulan. Ini adalah gejala dari arsitektur yang telah mencoba menjadikan logika memikul beban yang lebih berat daripada yang dapat ditanggungnya.

Jika arsitektur The Cohesive Tetrad berhasil di sini, keberhasilannya juga akan tampak. Pengadilan akan tetap menalar dengan cermat melalui teks dan preseden, tetapi melakukannya secara terbuka di bawah telos yang tidak mereka ciptakan sendiri. Pengadilan akan mendengarkan dengan lebih dalam pengalaman mereka yang paling terdampak. Pengadilan akan menumbuhkan Akhlak pada para aparatnya dan menundukkan sejarah institusionalnya sendiri pada analisis Intention-Trace. Hukum akan dikenali bukan hanya sebagai instrumen keteraturan, tetapi sebagai citra kasar namun otentik dari keadilan yang berakar pada Sabda.

Untuk kepentingan artikel ini, peran hukum dengan demikian bersifat ganda. Hukum menyediakan arena konkret di mana kontras antara logika murni dan The Cohesive Tetrad dapat diamati. Hukum juga berfungsi sebagai medan pembuktian untuk menilai apakah suatu arsitektur tata kelola kebenaran dapat menopang institusi yang sekaligus rasional dan manusiawi. Dalam bagian berikutnya, lahan uji ini diperluas ke domain kecerdasan buatan yang berkembang pesat, di mana godaan dan bahaya ideologi logika murni menjadi lebih intens dan di mana kebutuhan akan arsitektur alternatif seperti The Cohesive Tetrad menjadi semakin mendesak.

6. Kecerdasan Buatan dalam Kerangka Logika Murni dan The Cohesive Tetrad

Jika hukum adalah teater klasik bagi rasionalitas, kecerdasan buatan adalah panggungnya yang paling baru dan paling ambisius. Dalam kecerdasan buatan, ideal logika murni muncul dalam bentuk teknologi. Sistem dirancang untuk menyerap data, menerapkan kaidah formal atau parameter yang dipelajari, dan menghasilkan keluaran yang dipresentasikan sebagai rasional, objektif, dan bebas dari bias manusia. Janji yang ditawarkan sudah akrab: jika lebih banyak keputusan didelegasikan kepada mesin yang terdisiplin secara logis, maka kesalahan, ketidakkonsistenan, dan prasangka dapat dikurangi.

Namun pertanyaan yang sama yang mengganggu logika murni dalam filsafat dan hukum muncul kembali-sering dalam bentuk yang lebih tajam-dalam kecerdasan buatan. Apa yang menjadi dasar norma yang membimbing sistem ini. Siapa yang menentukan tujuan yang mereka optimalkan. Bagaimana martabat manusia dan telos direpresentasikan, jika direpresentasikan sama sekali. Bagian ini menerapkan arsitektur The Cohesive Tetrad pada kecerdasan buatan: pertama dengan menelusuri bagaimana ideologi logika murni membentuk kecerdasan buatan, kemudian dengan menyingkap ketegangan internalnya, dan akhirnya dengan menguraikan bagaimana tata kelola kecerdasan buatan dapat terlihat ketika diatur ulang di bawah Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

6.1. Kecerdasan buatan sebagai mimpi teknologi logika murni

Banyak sistem kecerdasan buatan kontemporer dibangun di atas asumsi yang sangat selaras dengan ideologi logika murni. Detail teknis algoritme beragam, tetapi gambaran dasarnya tetap mengejutkan konsisten.

Data diperlakukan sebagai sumber utama kebenaran faktual. Semakin banyak data yang dapat dihimpun suatu sistem, semakin akurat representasinya tentang dunia diasumsikan. Model

diperlakukan sebagai mekanisme rasional yang mentransformasikan masukan ke keluaran melalui relasi matematis yang ditentukan. Evaluasi berfokus pada kinerja yang terukur: akurasi, fungsi kerugian, tingkat kesalahan, dan metrik sejenis.

Norma dan nilai, ketika diakui, sering direpresentasikan sebagai batasan atas optimisasi atau sebagai suku tambahan dalam fungsi objektif. Keadilan, misalnya, dapat dikodekan sebagai penalti atas disparitas tertentu antar kelompok. Privasi dapat dimasukkan sebagai syarat bahwa data tertentu tidak boleh digunakan. Kerugian dapat ditangani melalui filter pasca-proses yang memblokir atau menyesuaikan keluaran tertentu. Pedoman etika kemudian ditafsirkan sebagai rangkaian batasan di sekitar inti yang pada dasarnya bersifat teknis (*Mittelstadt et al. 2016; Floridi dan Cowls 2019; Jobin et al. 2019*).

Dalam konfigurasi ini, kecerdasan buatan tampak sebagai perwujudan logika murni dalam kode. Sistem beroperasi menurut kaidah yang transparan bagi para perancangannya, atau setidaknya bagi mereka yang memahami modelnya. Pelaku manusia diajak untuk mempercayai sistem-sistem tersebut karena sistem dianggap konsisten, dapat diskalakan, dan bebas dari fluktuasi subjektif yang mengganggu penilaian manusia.

Bahasa yang digunakan untuk mempromosikan kecerdasan buatan kerap memperkuat citra ini. Sistem digambarkan sebagai netral, berbasis bukti, dan rasional. Pengawasan manusia diposisikan sebagai jaring pengaman, tetapi daya tarik utamanya terletak pada janji pengambilan keputusan yang lebih logis daripada intuisi manusia. Mimpi teknologi logika murni dengan demikian berubah menjadi proyek sosial dan ekonomi.

6.2. Ketegangan internal dalam kecerdasan buatan yang berpusat pada logika

Ketika kecerdasan buatan dibentuk oleh ideologi logika murni, sejumlah ketegangan muncul yang mencerminkan, mempertajam, dan memperluas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pertama, terdapat ketergantungan tersembunyi pada norma dan telos yang tidak dapat didefinisikan oleh sistem itu sendiri. Setiap model kecerdasan buatan dilatih untuk mengoptimalkan sesuatu: prediksi, klasifikasi, pemeringkatan, atau ganjaran. Pemilihan fungsi objektif tidak ditentukan oleh data. Pemilihan itu adalah keputusan para perancang dan institusi. Tujuan sempit seperti tingkat klik, waktu di platform, atau laba jangka pendek mungkin nyaman secara matematis, tetapi tidak mencerminkan untuk apa manusia diciptakan. Ketika sistem mengoptimalkan proksi tersebut tanpa merujuk pada telos yang lebih tinggi, sistem dapat sangat rasional dalam bingkainya yang tertutup namun sangat destruktif dalam istilah kemanusiaan (*O'Neil 2016; Zuboff 2019*).

Kedua, pemisahan antara fakta dan nilai runtuh dalam praktik. Data yang digunakan untuk melatih sistem kecerdasan buatan memantulkan sejarah, institusi, dan prasangka manusia. Label dan kategori sarat dengan penilaian sebelumnya. Keputusan tentang kesalahan mana yang lebih dapat ditoleransi, trade-off mana yang dapat diterima, dan kerugian mana yang cukup serius untuk dicegah, semuanya sarat nilai. Namun di bawah ideologi logika murni, ada tekanan untuk berbicara seolah-olah model hanya belajar dari dunia sebagaimana adanya, tanpa komitmen normatif. Padahal, setiap pilihan himpunan data, label, dan metrik kinerja sudah mengekspresikan pandangan tentang kesalahan siapa yang penting dan penderitaan siapa yang diperhitungkan.

Ketiga, bahasa martabat sering dikutip tetapi tidak ditambahkan. Kerangka etika kecerdasan buatan kerap berbicara tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, otonomi, dan non-diskriminasi. Namun jika arsitektur kecerdasan buatan didefinisikan sepenuhnya dalam bingkai naturalistik dan berpusat pada logika, komitmen-komitmen ini tetap menjadi ornament eksternal. Tidak ada ruang batin di dalam sistem di mana keniscayaan pribadi secara struktural diakui. Dalam skenario terbaik, martabat didekati melalui batasan dan penalti. Dalam skenario terburuk, martabat diam-diam disubordinasikan pada kinerja dan efisiensi ketika trade-off menjadi sulit (*Jobin et al. 2019; OECD 2019; UNESCO 2021*).

Keempat, niat mereka yang merancang dan menerapkan kecerdasan buatan sering dikeluarkan dari deskripsi formal. *Model card*, laporan teknis, dan dokumentasi berbicara panjang lebar tentang data, arsitektur, dan pelatihan, tetapi jarang tentang cinta dan ketakutan yang menggerakkan pekerjaan tersebut. Insentif ekonomi, tekanan institusional, dan ambisi personal diperlakukan sebagai latar belakang, padahal faktor-faktor ini sangat memengaruhi sistem seperti apa yang dibangun, kerugian mana yang ditoleransi, dan komunitas mana yang menanggung risiko (*Kunda 1990; O'Neil 2016*).

Ketegangan-ketegangan ini bukan berarti kecerdasan buatan secara inheren korup atau bahwa logika dalam kode selalu berbahaya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa ketika kecerdasan buatan dibangun dan diatur di bawah ideologi logika murni, kecerdasan buatan mewarisi kelemahan struktural yang sama: tuntutan agar logika menyediakan apa yang hanya dapat ditopang oleh Sabda, kebutaan terhadap keterjalinan fakta dan nilai, dan pegangan yang rapuh pada martabat.

6.3. Membingkai ulang kecerdasan buatan di dalam *The Cohesive Tetrad*

Ketika kecerdasan buatan ditempatkan di dalam arsitektur *The Cohesive Tetrad*, gambaran yang muncul berubah. Kecerdasan buatan tetap menjadi alat yang kuat, tetapi tidak lagi menjadi penguasa sunyi atas rasionalitas. Kecerdasan buatan menjadi salah satu instrumen dalam tugas tata kelola kebenaran.

Dari sudut pandang Sabda, sistem kecerdasan buatan bukan artefak netral. Sistem-sistem tersebut merupakan bagian dari panggilan manusia yang lebih luas untuk mencari kebenaran, menegakkan keadilan, dan melindungi yang rentan. Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* berbicara kepada kecerdasan buatan setidaknya dalam tiga cara.

Sabda mengingatkan para perancang dan institusi bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai titik data, sumber daya, atau objek prediksi. Sabda menegaskan bahwa beberapa bentuk pengambilan keputusan otomatis adalah tidak sah, apa pun tingkat efisiensinya, karena bentuk-bentuk itu melanggar martabat pribadi sebagai pembawa telos yang lebih tinggi. Sabda menetapkan batas luar terhadap apa yang boleh dioptimalkan, bahkan ketika optimisasi tampak sepenuhnya mungkin secara logis.

Logika kemudian mengambil perannya sebagai instrumen di dalam cakrawala ini. Dalam kecerdasan buatan, hal ini berarti merancang model dengan kejelasan tentang asumsi, batasan, dan ranah validitasnya. Hal ini mencakup penelaahan struktur inferensial algoritme, identifikasi sumber bias dan ketidakstabilan, serta pemastian bahwa sifat-sifat formal selaras dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Sabda (*Mittelstadt et al. 2016*). Logika menjadi

keterampilan untuk mengungkapkan secara eksplisit bagaimana sistem bekerja, bukan otoritas yang memutuskan untuk apa sistem itu seharusnya dipakai.

Qualia masuk sebagai domain yang merekam bagaimana sistem kecerdasan buatan sungguh-sungguh dialami. Qualia mencakup pengalaman dinilai, direkomendasikan, diprofilkan, atau ditolak oleh sistem yang tampak jauh dan buram. Qualia mencatat dampak keputusan otomatis terhadap kepercayaan, kohesi sosial, eksklusivitas, dan rasa takut. Pengalaman-pengalaman ini bukan sekadar anekdot. Pengalaman ini merupakan bagian dari basis evidensial untuk menilai apakah tata kelola kecerdasan buatan selaras dengan telos yang dinyatakannya (*O'Neil 2016; Zuboff 2019*).

Mistika memperhatikan niat di balik kecerdasan buatan. Mistika menanyakan mengapa proyek tertentu didanai sementara yang lain diabaikan. Mistika menanyakan apakah pengembangan kecerdasan buatan dipandu oleh kerendahan hati dan pelayanan, atau oleh keinginan akan dominasi, keuntungan, dan kontrol. Mistika mengakui bahwa keterampilan teknis yang sama dapat menopang lintasan spiritual yang sangat berbeda: satu lintasan menuju respons yang lebih dalam terhadap Sabda, dan lintasan lain menuju pemujaan pada kemampuan dan kekuasaan.

Akhlaq dan Intention-Trace Alignment kemudian memberikan evaluasi jangka panjang atas rezim kecerdasan buatan. Dari waktu ke waktu, jenis karakter seperti apa yang berkembang di institusi yang sangat bergantung pada kecerdasan buatan. Apakah institusi-institusi tersebut menunjukkan kepedulian yang makin besar terhadap yang rentan, transparansi, dan akuntabilitas. Atau justru menjadi lebih buram, semakin abai terhadap kerusakan kolateral, dan semakin nyaman memperlakukan pribadi sebagai data. Jarak antara prinsip yang dideklarasikan dan jejak yang dapat diamati kembali menjadi diagnosis utama tentang apakah tata kelola kecerdasan buatan itu benar atau tidak.

6.4. Implikasi praktis: tujuan, batasan, dan pengawasan

Pembingkai ulang kecerdasan buatan di dalam The Cohesive Tetrad membawa konsekuensi praktis bagi cara sistem dikonsepsikan, dibangun, dan diatur. Beberapa area memperlihatkan kontras yang sangat tajam dengan ideologi logika murni.

Pertama, dalam pendefinisian tujuan. Di bawah pandangan yang berpusat pada logika, para perancang sering memulai dari apa yang secara teknis layak dan menarik secara ekonomi. Tujuan kemudian didefinisikan dalam istilah efisiensi atau daya prediksi. Di dalam The Cohesive Tetrad, tujuan harus disaring melalui Sabda dan Qualia sebelum diformalkan. Sebagian tujuan, seperti memaksimalkan keterlibatan tanpa mengindahkan kerusakan psikologis, ditolak sejak awal. Tujuan lain diterima hanya jika dapat ditanamkan di dalam telos yang lebih luas, yang memprioritaskan keberlangsungan hidup yang manusiawi, bukan metrik semata.

Kedua, dalam perancangan batasan. Logika murni cenderung memperlakukan batasan sebagai tambahan eksternal yang dipaksakan oleh regulasi atau tekanan publik. The Cohesive Tetrad memperlakukan batasan tertentu sebagai unsur intrinsik dari arsitektur yang benar. Batasan yang melindungi martabat, menjaga agensi manusia yang bermakna, dan mencegah bentuk-bentuk tertentu dari pengawasan atau pemprofilan bukan aksesoris opsional. Batasan ini

merupakan bagian dari struktur yang membuat kecerdasan buatan tetap selaras dengan telos manusia (*Floridi dan Cowls 2019; OECD 2019; UNESCO 2021*).

Ketiga, dalam pengorganisasian pengawasan. Di bawah logika murni, pengawasan sering dirumuskan sepenuhnya dalam istilah teknis: audit bias, uji ketahanan, verifikasi kinerja. Semua ini perlu, tetapi tidak cukup. Di dalam The Cohesive Tetrad, pengawasan juga harus memeriksa niat dan jejak. Pengawasan harus menanyakan siapa yang diuntungkan oleh sistem, suara siapa yang diikuti atau dikeluarkan dalam perancangannya, dan apakah dampak jangka panjang terhadap Akhlak konsisten dengan tujuan yang dideklarasikan. Karena itu, dewan evaluasi, komite etika, dan badan regulator diharapkan tidak hanya berisi pakar teknis, tetapi juga komunitas yang terdampak oleh sistem dan pribadi-pribadi yang dibentuk oleh tradisi penelaahan moral dan spiritual.

Keempat, dalam status penolakan. Rezim yang berpusat pada logika cenderung mengasumsikan bahwa apabila suatu sistem dapat dibangun dan menunjukkan kinerja tinggi, maka beban pembuktian ada pada pihak yang ingin membatasinya atau menundanya. Rezim yang dibentuk oleh The Cohesive Tetrad membalik praduga tersebut dalam domain tertentu. Untuk beberapa aplikasi-misalnya keputusan otomatis yang sangat memengaruhi hidup, kebebasan, atau inti identitas personal-beban pembuktian berada pada pihak yang ingin menyerahkan kekuasaan kepada mesin. Sabda dan Qualia dapat bersama-sama menunjukkan bahwa kapasitas tertentu harus tetap berada di tangan agen manusia yang memikul pertanggungjawaban langsung, sekalipun mesin pada prinsipnya dapat melaksanakan tugas itu dengan lebih murah atau lebih konsisten.

Implikasi-implikasi ini bukanlah cetak biru teknis. Implikasi ini adalah batasan dan prioritas arsitektural. Implikasi ini menyatakan bahwa tata kelola kecerdasan buatan harus dibangun sejak awal dengan mempertimbangkan Sabda, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment, bukan ditambahkan belakangan sebagai hiasan di sekeliling inti logika murni.

6.5. Kecerdasan buatan sebagai penguat arsitektur yang sudah ada

Pada akhirnya, kecerdasan buatan menguatkan arsitektur tata kelola kebenaran yang sudah ada dalam suatu masyarakat. Jika rezim yang dominan dibentuk oleh ideologi logika murni, kecerdasan buatan akan cenderung memperdalam rezim tersebut. Kecerdasan buatan akan memperluas jangkauan optimisasi sempit, memantapkan pemisahan fakta dan nilai, dan mempercepat erosi martabat yang substantif.

Jika rezim yang dominan mulai mengadopsi arsitektur The Cohesive Tetrad, kecerdasan buatan dapat diarahkan dan dibatasi sedemikian rupa sehingga mendukung, bukan merusak, integritas kebenaran. Sistem tetap akan mengoptimalkan, mengklasifikasikan, dan memprediksi, tetapi melakukannya di bawah telos yang tidak mereka ciptakan sendiri, dengan perhatian pada pengalaman hidup, niat yang dimurnikan, dan jejak moral jangka panjang.

Pemahaman ini memperkuat tesis utama artikel ini. Konflik yang sesungguhnya bukan antara manusia dan mesin, dan bukan pula antara tradisi dan teknologi. Konflik tersebut adalah antara arsitektur-arsitektur kebenaran yang berbeda. Logika murni, ketika diberi kedaulatan, menempatkan rasionalitas dalam posisi berkonflik dengan sumber-sumber normativitas dan telos yang justru dibutuhkannya. The Cohesive Tetrad mengajukan tatanan lain, di mana Sabda

tetap utama dan logika-dalam bentuk yang terkode maupun yang tidak terkode-dipulihkan ke tempatnya yang benar sebagai pelayan kuat bagi panggilan yang lebih tinggi.

7. Keberatan dan Tanggapan

Setiap proposal yang memulihkan Sabda ke peran struktural yang utama dalam tata kelola kebenaran akan memicu keberatan-keberatan serius. Ideologi logika murni tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh, antara lain, dari pelajaran pahit tentang konflik keagamaan, penyalahgunaan otoriter atas wahyu, dan rapuhnya perdamaian sosial. Jika The Cohesive Tetrad hendak diperhitungkan secara serius dalam forum akademik yang peka terhadap logika, ia harus berhadapan langsung dengan pelajaran-pelajaran tersebut.

Dalam bagian ini saya membahas lima rumpun keberatan yang secara alami muncul ketika Sabda ditempatkan di pusat sebuah arsitektur yang tetap mengaku menghormati rasionalitas:

1. Keberatan pluralisme.
2. Keberatan nalar publik (*public reason*).
3. Keberatan otoritarianisme.
4. Keberatan “Sabda yang mana” dan relativisme.
5. Keberatan instrumentalisasi.

Setiap keberatan menyentuh sebuah kerentanan yang nyata. Tidak satu pun dapat disingkirkan hanya dengan mengajukan otoritas. Tugasnya adalah menunjukkan bahwa arsitektur The Cohesive Tetrad memiliki sumber daya internal untuk merespons secara masuk akal dan meyakinkan, bukan hanya bagi mereka yang sudah berbagi komitmen terdalamnya, tetapi juga bagi mereka yang peduli pada hukum, kecerdasan buatan, dan martabat manusia dalam masyarakat majemuk.

7.1. Keberatan pluralisme

Keberatan pertama berangkat dari fakta sosiologis dan politis. Masyarakat kontemporer beragam secara religius dan moral. Warga dibentuk oleh banyak tradisi, termasuk tradisi yang secara eksplisit sekuler. Dalam konteks ini, klaim bahwa Sabda, *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, harus memiliki primasi struktural dalam arsitektur publik kebenaran, bagi sebagian orang tampak sebagai resep bagi dominasi yang terbaru. Jika Sabda milik satu komunitas diberi prioritas, bukankah itu sekadar memasang kembali masalah yang justru hendak diatasi oleh The Cohesive Tetrad: berkuasanya keyakinan terdalam satu kelompok atas kelompok lain.

Arsitektur The Cohesive Tetrad menawarkan tanggapan berlapis.

Pertama, ia membedakan klaim struktural dan klaim substantif. Klaim struktural menyatakan bahwa suatu bentuk Sabda, suatu pengertian bahwa norm dan telos itu diterima, bukan diproduksi, tidak terhindarkan dalam setiap rezim yang benar-benar memandang serius martabat manusia. Bahkan kerangka yang sangat sekuler sekalipun, ketika memperlakukan martabat dan hak sebagai tanpa syarat, dalam praktik merujuk pada suatu otoritas yang melampaui preferensi dan kuasa yang berubah-ubah, meskipun enggan menamainya sebagai Sabda (Putnam, 2002; Habermas, 1996; UNESCO, 2021). Klaim substantif, sebaliknya, menyangkut tafsir konkret mana atas Sabda yang seharusnya menuntun suatu komunitas

tertentu. Arsitektur ini bersikeras bahwa klaim pertama dapat dipertahankan tanpa harus terlalu cepat memutuskan klaim kedua.

Kedua, arsitektur ini memberi logika peran yang tidak sepele dalam memediasi klaim-klaim yang saling bersaing. Tradisi yang berbeda mengajukan konsepsi norm dan telos yang berbeda. Fakta bahwa tradisi itu merujuk kepada Sabda tidak membebaskannya dari telaah rasional. Logika memeriksa koherensi internal, kompatibilitas dengan aksioma martabat manusia minimal, serta konsistensi antara telos yang diakui dan jejak yang teramati. Tradisi yang secara sistematis merusak martabat yang mereka sendiri kumandangkan, atau yang tidak mampu menjelaskan norma-normanya tanpa kontradiksi, menunjukkan diri sebagai kandidat tata kelola kebenaran yang tidak stabil.

Ketiga, Qualia dan Akhlak memperkenalkan uji empiris dan moral jangka panjang. Komunitas yang hidup di bawah tafsir Sabda yang berbeda menghasilkan suasana batin, pola luka dan pemulihan, serta trajektori karakter yang berbeda. Buah-buah jangka panjang ini bukan indikator yang tak mungkin keliru, tetapi merupakan bagian dari evidensi tentang tafsir mana yang membawa kehidupan dan tafsir mana yang justru memperkuat dominasi dan penipuan diri (*Fricker, 2007; Medina, 2013; Zagzebski, 1996; Baehr, 2011*). Pluralisme tidak diselesaikan hanya lewat perbandingan abstrak, tetapi melalui evaluasi komparatif buah jangka panjang.

Keempat, The Cohesive Tetrad tidak mengharuskan semua warga secara sadar menganut teologi Sabda yang sama tebal. Kita dapat membedakan antara arsitektur lembaga dan kehidupan batin pribadi. Pada tingkat kelembagaan, Sabda dapat membentuk batas konstitusional dan kerangka hak asasi manusia dengan cara yang kompatibel dengan tumpang-tindih keyakinan etis, bahkan di antara mereka yang tidak berbagi narasi religius yang sama (*Habermas, 1996*). Pada tingkat pribadi, warga dapat terus menafsirkan batas-batas tersebut melalui tradisi dan alasan mereka masing-masing. Logika berperan penting dalam mengenali dan menstabilkan zona-zona tumpang tindih ini.

Keberatan pluralisme, dengan demikian, menyingkap sebuah ketegangan yang nyata, tetapi tidak fatal. Keberatan ini menunjukkan bahwa arsitektur harus mengakui pluralisme dan menahan diri dari triumfalisme. Namun keberatan ini tidak menunjukkan bahwa kerangka yang berpusat pada logika murni, yang menyembunyikan ketergantungannya pada fragmen Sabda yang tak diakui, lebih jujur atau lebih stabil.

7.2. Keberatan nalar publik (public reason)

Keberatan kedua menyangkut keteraksesan publik. Doktrin nalar publik modern berpendapat bahwa dalam masyarakat yang beragam, justifikasi politis seharusnya berlandaskan alasan yang pada prinsipnya dapat diterima semua warga, terlepas dari doktrin komprehensif mereka. Rujukan kepada wahyu sering diperlakukan sebagai sesuatu yang bermakna secara privat, tetapi tidak dapat diterima di ruang publik. Dari sudut pandang ini, The Cohesive Tetrad tampak bermasalah. Jika Sabda memegang primasi struktural, bukankah itu melanggar tuntutan bahwa warga harus dapat membenarkan hukum yang koersif dalam istilah yang dapat dibagikan dengan para tetangga mereka.

Di sini penting untuk membedakan beberapa lapisan.

Pada lapisan terdalam, setiap doktrin komprehensif, termasuk liberalisme sekuler, berpijak pada komitmen yang tidak dapat diturunkan dari premis netral. Keyakinan tentang kesetaraan nilai moral semua orang, prioritas kebebasan, atau keharusan justifikasi publik, semuanya adalah tesis etis yang tidak dapat ditegakkan oleh logika dan evidensi empiris semata (Habermas, 1996; Putnam, 2002). Klaim bahwa warga harus mampu membenarkan hukum satu kepada yang lain dalam istilah bersama sudah merupakan komitmen normatif, bukan hasil murni dari rasio.

Namun pada tingkat praktik kelembagaan, tetap penting bahwa hukum koersif dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang tidak berbagi teologi eksplisit tentang Sabda. The Cohesive Tetrad dapat mengakomodasi hal ini dengan pendekatan dua tingkat terhadap nalar publik.

Pada tingkat fondasional, para sarjana, hakim, dan pembuat kebijakan bersikap eksplisit tentang komitmen terdalam yang membentuk pemahaman mereka tentang manusia dan batas-batas ultimat, termasuk ketergantungan mereka pada Sabda sebagai *the authoritative source of norm and telos*. Komitmen ini diartikulasikan dan dipertahankan secara terbuka, tanpa berpura-pura netral.

Pada tingkat operasional, ketika hukum dan kebijakan diperdebatkan serta diterapkan, alasan yang diajukan menggunakan istilah yang dapat diakses lintas tradisi, sepanjang alasan itu konsisten dengan komitmen yang lebih dalam dan tidak menyelundupkan kepentingan yang bahkan tidak dapat dibenarkan oleh standarnya sendiri. Argumen tentang kejahatan penyiksaan, ketidakbolean perlakuan yang merendahkan martabat, atau perlunya melindungi kelompok rentan, dapat disusun dalam bahasa martabat dan kerugian yang dapat dipahami oleh para pelaku dari berbagai tradisi, sekalipun teologi akhir mereka berbeda (Habermas, 1996; UNESCO, 2021).

Dengan demikian, tuntutan nalar publik bukan lagi larangan terhadap Sabda, melainkan disiplin penerjemahan dan kerendahan hati. Tuntutan ini mensyaratkan agar mereka yang bertindak dari Sabda bersedia menjelaskan dan membela usulannya dengan cara yang dapat diikuti dan digugat pihak lain. Logika murni tidak memiliki monopoli atas keteraksesan publik. Yang penting adalah apakah alasan yang diajukan dapat dipahami, bukan apakah alasan itu berakar pada metafisika yang diklaim netral.

7.3. Keberatan otoritarianisme

Keberatan ketiga memperingatkan bahwa arsitektur apa pun yang memberi primasi kepada Sabda berisiko tergelincir ke otoritarianisme. Sejarah menyimpan banyak contoh otoritas keagamaan yang mengklaim berbicara atas nama wahyu, lalu menggunakan klaim itu untuk membungkam oposisi, membenarkan kekerasan, dan melindungi diri dari akuntabilitas. Menempatkan Sabda di pusat tata kelola kebenaran dapat tampak bagi banyak orang sebagai cara yang lebih canggih untuk membangun teokrasi.

Bahaya ini nyata. The Cohesive Tetrad tidak menafikan rekam jejak penyalahgunaan tersebut. Justru sebaliknya, karena wahyu dapat disalahgunakan, wahyu perlu ditempatkan di dalam sebuah arsitektur yang memperbanyak mekanisme pengawasan, bukan menghapusnya.

Pertama, Sabda dalam kerangka ini tidak memvalidasi dirinya sendiri pada tingkat tafsir manusiawi. Bahwa Sabda adalah *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* tidak berarti setiap klaim kelompok bahwa merekalah wakil Sabda otomatis benar. Tafsir harus diuji oleh logika untuk koherensi, oleh aksioma martabat manusia minimal untuk kompatibilitas, dan oleh buah jangka panjangnya untuk integritas. Sebuah rezim yang mengklaim bertindak atas nama Sabda tetapi secara sistematis merendahkan pribadi, gagal dalam uji ini.

Kedua, Qualia berfungsi sebagai alarm publik. Jika rezim yang mengklaim bertindak atas nama Sabda menghasilkan ketakutan, penghinaan, dan keheningan yang luas di tengah orang kebanyakan, pengalaman-pengalaman tersebut merupakan evidensi yang relevan. Itu bukan sekadar reaksi emosional, tetapi indikasi bahwa cara Sabda ditafsirkan dan dilembagakan mungkin telah menyimpang. Qualia menghimpun kesaksian ini dan membawanya ke dalam medan penilaian (*Fricker, 2007; Medina, 2013*).

Ketiga, Mistika bersikeras pada penelaahan niat. Pemimpin yang mengajukan klaim atas nama Sabda tidak diberi praduga kemurnian secara otomatis. Motif, pola hidup, dan respons mereka terhadap kritik ikut diperiksa. Seruan atas wahyu yang dikombinasikan dengan pola pengagungan diri yang konsisten, penghinaan terhadap yang lemah, dan penolakan terhadap koreksi, dikenali sebagai bentuk keteraturan spiritual yang menyimpang. The Cohesive Tetrad mengembalikan motif ke ranah tata kelola, bukan dibiarkan sebagai urusan privat.

Keempat, Akhlak dan Intention-Trace Alignment mengalihkan klaim ke evaluasi jangka panjang. Tidak cukup bagi sebuah rezim untuk menyatakan prinsip luhur. Sejarahnya harus menunjukkan pertumbuhan dalam kebajikan seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Ketika terdapat jurang yang terus-menerus antara telos yang diakui dan jejak aktual, arsitektur itulah yang tertuduh. Seiring waktu, jejak ini berbicara lebih lantang daripada retorika resmi (*Zagzebski, 1996; Roberts dan Wood, 2007; Baehr, 2011*).

Mekanisme-mekanisme ini tidak menjadikan otoritarianisme mustahil. Kebebasan manusia selalu menyisakan kemungkinan untuk merusak bahkan arsitektur terbaik sekalipun. Namun mekanisme ini membuat sakralisasi kekuasaan sewenang-wenang menjadi lebih sulit. Sebaliknya, suatu sistem yang memperlakukan logika murni atau keahlian teknis sebagai penguasa juga dapat menjadi otoriter, tetapi dengan sumber daya internal kritik yang lebih sedikit, karena ia tidak mengakui adanya standar di atas perhitungannya sendiri.

7.4. Keberatan “Sabda yang mana” dan relativisme

Keberatan keempat menyoroti persoalan spesifisitas. Sekalipun disepakati bahwa suatu bentuk Sabda secara struktural diperlukan, dunia berisi banyak klaim tentang *Revelatory Word*. Di dalam dan di antara tradisi, tafsir berbeda tajam. Siapa yang menentukan Sabda mana yang benar. Apakah rujukan kepada Sabda tidak sekadar memindahkan problem relativisme ke tingkat yang lebih tinggi, di mana setiap kelompok memusatkan versinya sendiri dan menyatakan diri dibenarkan.

Arsitektur ini menjawab dalam dua tahap.

Pertama, ia menegaskan perlunya pengujian komparatif. Berbagai klaim Sabda beserta tafsirnya dapat dibandingkan di sepanjang beberapa dimensi: koherensi internal; kompatibilitas

dengan aksioma martabat manusia minimal; kapasitas untuk menopang pengakuan yang stabil atas kesetaraan nilai pribadi; dan jejak Akhlak serta Qualia jangka panjang. Tradisi yang melegitimasi kekejaman, menyangkal kesetaraan dasar, atau secara konsisten menghasilkan pola dominasi dan ketakutan tidak setara kedudukannya dengan tradisi yang melahirkan kerendahan hati, perlindungan terhadap yang rentan, dan kesiapsediaan untuk mengoreksi diri (*MacIntyre, 1988; Fricker, 2007; Medina, 2013*).

Uji ini tidak menghasilkan peringkat mekanis yang harus diterima semua pihak. Uji ini menyediakan kerangka di mana percakapan rasional tentang “Sabda yang mana” dapat berlangsung, alih-alih runtuh menjadi slogan dan kekerasan. Fakta bahwa ketidaksepakatan mendalam tetap ada tidak berarti tidak ada yang bisa dikatakan. Artinya, kerja penelaahan komparatif itu panjang dan menuntut.

Kedua, arsitektur ini memungkinkan diferensiasi peran Sabda di berbagai tingkat kehidupan politik. Pada tingkat terdalam, komunitas dapat terus menghayati artikulasi partikular tentang Sabda dalam ibadah, pengajaran, dan pembentukan moral. Pada tingkat kewargaan, lembaga-lembaga dapat disusun di sekitar afirmasi minimal yang dapat disepakati dari berbagai sudut pandang, misalnya pengakuan atas nilai tanpa syarat setiap pribadi dan ketidakbolehan bentuk-bentuk kerugian tertentu. Afirmasi tersebut dapat dipandang, dari dalam tradisi yang berbeda, sebagai artikulasi parsial dari Sabda masing-masing, tanpa menuntut homogenisasi paksa. Dengan demikian, kita menghindari sekaligus ilusi bahwa semua klaim sama benarnya dan godaan untuk memaksakan satu tradisi yang sangat tebal sebagai norma publik tunggal (*Habermas, 1996; UNESCO, 2021*).

Relativisme, dalam arti ketat bahwa semua klaim sama benarnya, dengan demikian ditolak. The Cohesive Tetrad menegaskan kemungkinan dan keniscayaan penilaian yang kuat, tetapi ditegakkan dengan kerendahan hati dan diuji oleh waktu.

7.5. Keberatan instrumentalisasi

Keberatan terakhir datang dari arah lain. Keberatan ini mengkhawatirkan bahwa dengan menempatkan Sabda di dalam sebuah arsitektur, The Cohesive Tetrad menjadikan wahyu sebagai instrumen belaka. Sabda tereduksi menjadi salah satu komponen dalam kerangka yang dirancang manusia, tunduk pada analisis dan sistematisasi. Bagi orang beriman, hal ini tampak sebagai hilangnya transendensi. Sabda seharusnya mengadili semua arsitektur, bukan dikurung di dalamnya.

Keberatan ini penting, khususnya bagi pembaca yang berasal dari tradisi yang memandang wahyu sebagai hidup dan berdaulat. Tanggapan The Cohesive Tetrad terletak pada pengakuan perbedaan dua tingkat wacana.

Tingkat pertama adalah tingkat konfesional. Di sini Sabda bukan elemen dalam skema konseptual, melainkan Sabda yang hidup, yang memanggil, memerintah, dan menghibur. Pada tingkat ini, kerangka apa pun yang dirancang manusia, termasuk The Cohesive Tetrad, bersifat provisional dan dapat direvisi. Sabda senantiasa memiliki hak untuk membalikkan, merevisi, atau menyingkirkan konstruksi manusia mana pun yang mengklaim telah “menangkapnya”.

Tingkat kedua adalah tingkat analitik. Di sini kita menanyakan bagaimana berbagai domain kebenaran bekerja dalam praktik dan bagaimana domain-domain itu dapat diatur agar lembaga-

lembaga menghormati, bukan mengkhianati, telos manusia. Pada tingkat ini, The Cohesive Tetrad diajukan sebagai model untuk berpikir tentang tata kelola kebenaran yang memberi Sabda primasi struktural dan menyediakan peran eksplisit bagi Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Model ini tidak mengklaim menghabiskan misteri Sabda. Model ini hanya mengklaim mengartikulasikan cara agar Sabda dapat menuntun lembaga-lembaga tanpa bergantung pada otoritas manusia yang tak terkendali atau pada asumsi diam-diam.

Dipandang dari sudut ini, The Cohesive Tetrad bukan penjara bagi wahyu. Ia adalah upaya untuk merancang ruang kelembagaan dan intelektual yang tetap terbuka untuk diadili oleh Sabda, seraya melindungi komunitas dari penyalahgunaan otoriter atas wahyu dan dari absolutisme yang lebih senyap milik logika murni. Kecukupan arsitektur ini sendiri tunduk pada uji yang sama yang diterapkannya pada kerangka lain: koherensi, kesetiaan pada aksioma martabat minimal, kepekaan terhadap Qualia, kemurnian Mistika, dan Akhlak serta Intention-Trace Alignment jangka panjang dari mereka yang mengadopsinya.

7.6. Ringkasan

Keberatan-keberatan yang dibahas dalam bagian ini bukan tepi perifer. Keberatan-keberatan tersebut muncul tepat di titik di mana arsitektur The Cohesive Tetrad tampak paling rentan: pluralisme, nalar publik, risiko otoritarianisme, masalah “Sabda yang mana”, dan bahaya menjadikan wahyu sebagai instrumen. Tanggapan yang ditawarkan tidak mengklaim menutup perdebatan. Tanggapan tersebut bertujuan menunjukkan bahwa arsitektur ini memiliki sumber daya untuk menghadapinya tanpa mundur ke dogmatisme ataupun skeptisisme.

Pluralisme diakui dan ditanggapi melalui klaim berlapis, pengujian komparatif, dan diferensiasi peran Sabda. Nalar publik dibingkai ulang sebagai disiplin penerjemahan dan kerendahan hati, bukan larangan atas komitmen terdalam. Otoritarianisme dilawan dengan membangun sejumlah mekanisme pengawasan internal atas tafsir dan kuasa. Pertanyaan “Sabda yang mana” dihadapi melalui penelaahan komparatif jangka panjang dan afirmasi kewargaan yang saling tumpang tindih. Risiko instrumentalisasi dijawab dengan membedakan tingkat konfesional dan analitik serta dengan menegaskan bahwa arsitektur ini sendiri tetap berada di bawah penghakiman Sabda.

Secara keseluruhan, tanggapan-tanggapan ini tidak menghapus semua alasan kekhawatiran. Namun tanggapan tersebut mengisyaratkan bahwa pilihannya tidak terletak antara logika murni dan wahyu yang tidak akuntabel. Alternatif yang lebih menjanjikan adalah sebuah arsitektur di mana Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment diikat bersama dalam disiplin yang ketat. Bagian terakhir akan merangkai seluruh benang argumen dan menunjukkan arah riset lanjutan tentang tata kelola kebenaran di bawah arsitektur ini.

8. Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari satu pertanyaan yang sederhana, tetapi tidak kenal ampun: apakah ideologi logika murni, yang bercita-cita mengelola kebenaran hanya dengan rasio dan evidensi, benar-benar mampu menanggung beban yang saat ini diletakkan lembaga-lembaga kontemporer di atasnya. Jawabannya bersifat negatif. Ketika diuji dengan standar yang ia ajukan sendiri, logika murni memperlihatkan kelemahan struktural. Ia tidak mampu meletakkan dasar bagi norma-normanya sendiri tanpa bergantung pada kepercayaan yang

tersembunyi. Ia tidak mampu mempertahankan pemisahan ketat antara fakta dan nilai dalam praktik. Ia tidak mampu menyediakan penjelasan yang kokoh tentang martabat manusia sambil tetap berada dalam bingkai naturalisme yang sempit. Padahal tepat pada dimensi-dimensi inilah hukum modern dan kecerdasan buatan paling dituntut untuk dapat diandalkan.

Dalam perjalanan menuju kesimpulan tersebut, artikel ini berkembang melalui beberapa langkah. Pertama, artikel merekonstruksi ideologi logika murni sebagai sebuah arsitektur yang serius dan menarik. Saintisme, evidensialisme keras, pembelahan tajam fakta-nilai, dan naturalisme kuat tentang telos dan martabat dipaparkan bukan sebagai manusia jerami, tetapi sebagai kecenderungan yang koheren dan secara historis dapat dikenali, yang telah bermigrasi dari filsafat ke “akal sehat” kelembagaan. Logika murni memosisikan diri sebagai penjaga terhadap kesewenang-wenangan, takhayul, dan konflik sektarian. Ia menawarkan visi kehidupan publik yang diatur oleh alasan-alasan yang secara prinsip dapat diperiksa semua orang. Aspirasi ini diakui sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara historis dan signifikan secara moral.

Kedua, artikel mengembangkan kritik internal. Tanpa bertumpu pada otoritas eksternal, artikel menunjukkan bagaimana logika murni bergantung pada bentuk-bentuk kepercayaan, normativitas, dan kedalaman makna yang tidak dapat ia hasilkan dari dirinya sendiri. Ia bertumpu pada komitmen dasar tentang keterpahaman realitas dan kelayakan kebenaran, yang tidak dideduksi dari premis-premis sebelumnya. Ia beroperasi di dalam praktik yang kategori dan standarnya sudah terlebih dahulu dipenuhi nilai-nilai. Ia meminjam bahasa martabat dan keluhuran yang tak dapat diganggu gugat, namun kesulitan menjelaskan mengapa bahasa itu layak diambil apa adanya. Masalahnya bukan bahwa logika itu irasional, melainkan bahwa ideologi yang mengangkat logika ke derajat penguasa tunggal menuntut dari logika tugas-tugas yang melampaui mandatnya.

Ketiga, artikel memperkenalkan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif bagi tata kelola kebenaran. Alih-alih memperlakukan kebenaran sebagai rezim satu bahasa, artikel ini mengartikulasikan konfigurasi multi-domain di mana Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment masing-masing memiliki peran yang terdefinisi. Sabda, sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, menyediakan horizon di dalam mana pertanyaan tentang tujuan dan martabat pertama-tama diajukan. Logika menjernihkan dan menguji, tetapi tidak menetapkan telos. Qualia merekam konsekuensi hidup dari rezim-rezim kebenaran. Mistika menaruh perhatian pada orientasi niat dalam pencarian kebenaran dan dalam pengelolaan kekuasaan. Akhlak dan Intention-Trace Alignment menyediakan diagnosis longitudinal, dengan menanyakan apakah karakter moral dan jejak lembaga-lembaga selaras dengan tujuan yang mereka nyatakan. Diambil bersama, domain-domain ini membentuk sebuah arsitektur yang mempertahankan kekuatan disiplin logis sekaligus mengoreksi klaim berlebihan.

Keempat, artikel membawa arsitektur ini ke dalam dua ranah krusial: hukum dan kecerdasan buatan. Dalam hukum, artikel menunjukkan bagaimana konsepsi rasionalitas hukum yang berpusat pada logika cenderung melahirkan absolutisme prosedural, penghapusan pengalaman, pengabaian pembentukan karakter, dan pengosongan makna martabat. Dengan memosisikan kembali rasionalitas hukum di dalam The Cohesive Tetrad, menjadi mungkin untuk menegaskan capaian legalitas sekaligus bersikeras bahwa telos, pengalaman hidup, intensi spiritual, dan jejak moral jangka panjang adalah unsur struktural yang relevan dalam mengevaluasi sistem hukum. Dalam kecerdasan buatan, pola serupa muncul. Logika murni yang diterjemahkan ke dalam kode melahirkan sistem yang mengoptimalkan tujuan-tujuan

sempit sambil menyembunyikan ketergantungannya pada keputusan nilai dan intensi kelembagaan yang sudah didahului. Di bawah The Cohesive Tetrad, kecerdasan buatan diposisikan ulang sebagai instrumen yang harus diarahkan oleh Sabda, dibatasi oleh martabat, diinformasikan oleh Qualia, dimurnikan oleh Mistika, dan dinilai melalui Akhlak serta Intention-Trace Alignment.

Kelima, artikel berhadapan dengan serangkaian keberatan besar. Kekhawatiran tentang pluralisme, nalar publik, penyalahgunaan otoritarian atas wahyu, problem “Sabda yang mana”, dan risiko instrumentalisasi wahyu ditanggapi secara langsung. Tanggapan-tanggapan tersebut tidak diajukan sebagai kemenangan final, melainkan sebagai demonstrasi bahwa arsitektur ini mampu terlibat dengan keberatan-keberatan tersebut tanpa mundur ke jaminan dogmatis atau kepasrahan skeptis. Langkah kunci di sini adalah membedakan antara klaim struktural bahwa suatu tatanan norm dan telos yang melampaui preferensi semata diperlukan untuk menopang pengakuan martabat secara stabil, dan kerja substantif menelaah bagaimana tradisi-tradisi Sabda yang partikular dapat membentuk kehidupan publik dalam kondisi keberagaman dan kejatuhan manusia.

Kontribusi teoretis utama artikel ini dengan demikian bersifat arsitektural. Artikel ini tidak mengajukan aturan keputusan baru, algoritme baru, atau formula doktrinal baru. Artikel ini mengajukan cara yang berbeda untuk menata domain-domain kebenaran dalam relasi satu dengan yang lain. Dalam penataan ini, logika tidak didudukkan sebagai berhala, tetapi juga tidak direndahkan. Ia dihormati sebagai keterampilan yang tak tergantikan untuk menjaga klaim tetap jujur, tetapi dicegah dari kecenderungan pelan-pelan menggantikan sumber-sumber norm dan telos yang justru memberi makna pada praktiknya sendiri. The Cohesive Tetrad menawarkan kosakata dan kerangka di mana penataan ini dapat dibuat eksplisit, diperdebatkan, dan disempurnakan.

Kontribusi praktisnya terletak pada cara arsitektur ini dapat menginformasikan perdebatan yang sedang berlangsung dalam tata kelola hukum dan kecerdasan buatan. Bagi hukum, arsitektur ini menyarankan kriteria untuk mengevaluasi reformasi yang melampaui kerapian prosedural, dengan menanyakan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi Qualia mereka yang hidup di bawah hukum dan Akhlak mereka yang mengelolanya. Bagi kecerdasan buatan, arsitektur ini menawarkan cara untuk menafsirkan panduan etika dan proposal regulasi yang sudah ada dalam terang komitmen implisit mereka tentang Sabda, telos, dan martabat, serta untuk mengidentifikasi di mana komitmen-komitmen itu masih kurang berkembang atau tidak konsisten. Di kedua ranah, arsitektur ini mengundang pergeseran dari penyeimbangan nilai secara ad hoc ke penjelasan yang lebih berprinsip tentang bagaimana domain-domain kebenaran berinteraksi.

Artikel ini adalah sebuah permulaan, bukan penutup. Beberapa jalur riset lanjutan segera tampak. Aksioma minimal tentang martabat manusia yang digunakan di sini sebagai landasan normatif memerlukan perumusan dan pengujian lebih rinci lintas konteks hukum dan teknologi. Penerapan The Cohesive Tetrad ke ranah lain, seperti pendidikan, kebijakan ekonomi, atau tata kelola lingkungan, masih menunggu untuk dieksplorasi. Kajian empiris dan historis diperlukan untuk menelaah bagaimana berbagai pengaturan kelembagaan mewujudkan, menyimpangkan, atau menolak arsitektur yang diusulkan ini. Keterlibatan filosofis dengan gagasan-gagasan tandingan tentang normativitas dan wahyu dapat mempertajam sekaligus memperjelas batas kekuatan dan keterbatasan kerangka ini.

Namun satu hal yang telah dibuat sulit untuk disangkal oleh analisis ini adalah berikut ini: ideologi logika murni, jika diambil sebagai arsitektur eksklusif bagi tata kelola kebenaran, tidak mampu memikul beban moral, legal, dan teknologi yang diletakkan di atasnya. Ia akan runtuh ke dalam skeptisisme, atau terus bergantung-tanpa pengakuan-pada fragmen Sabda yang enggan ia namai. Alternatif yang digambar di sini tidak menawarkan penyelesaian yang mudah. Namun alternatif ini mengajukan suatu cara untuk membiarkan Sabda tetap menjadi apa yang diklaimnya, seraya memberi ruang bagi Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment untuk menjalankan peran-peran yang semestinya. Bagi lembaga-lembaga yang ingin tetap rasional sekaligus manusiawi di era hukum dan kecerdasan buatan, pergeseran arsitektural tersebut mungkin bukan sekadar pilihan, melainkan syarat yang tak terhindarkan.



1. Baehr, J. S. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology*. Oxford University Press.
2. Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Belknap Press of Harvard University Press.
3. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1-15.
<https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
4. Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
5. Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
6. Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
7. Haack, S. (2003). *Defending science within reason: Between scientism and cynicism*. Prometheus Books.
8. John, L. K., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2012). Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. *Psychological Science*, 23(5), 524-532. <https://doi.org/10.1177/0956797611430953>
9. Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399.
<https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
10. Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2016). The development and validation of the Comprehensive Intellectual Humility Scale. *Journal of Personality Assessment*, 98(2), 209-221. <https://doi.org/10.1080/00223891.2015.1068174>
11. Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological Bulletin*, 108(3), 480-498. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480>
12. MacIntyre, A. (1988). *Whose justice? Which rationality*. University of Notre Dame Press.
13. Medina, J. (2013). *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and resistant imaginations*. Oxford University Press.
14. Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1-21.
<https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
15. Mutaqin, A. Z. (2025a). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
16. Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints / PhilArchive*.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V>
17. Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the sacred*. State University of New York Press.
18. OECD. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
19. O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.
20. Putnam, H. (2002). *The collapse of the fact/value dichotomy and other essays*. Harvard University Press.
21. Roberts, R. C., & Wood, W. J. (2007). *Intellectual virtues: An essay in regulative epistemology*. Oxford University Press.
22. UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

23. Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge*. Cambridge University Press.

**

Apakah Sabda hanya terkait dengan satu agama tertentu

Tidak. Dalam traktat ini, Sabda dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Pengertian ini mencakup apa yang dalam berbagai tradisi dapat disebut sebagai tutur ilahi, hukum perjanjian, perintah yang mengikat, atau wahyu pendiri. Kerangka ini tidak berupaya memaksakan satu sistem keagamaan tunggal, tetapi menjelaskan bahwa setiap uraian serius tentang tata kelola kebenaran harus mengakui adanya sumber norma dan tujuan yang tidak dapat direduksi menjadi preferensi manusia, kontrak sosial, atau optimasi teknis.

Bagaimana hubungan The Cohesive Tetrad dengan virtue epistemology dan AI ethics

The Cohesive Tetrad bersifat kompatibel dan komplementer dengan virtue epistemology maupun AI ethics. Dari virtue epistemology, kerangka ini berbagi kepedulian terhadap karakter intelektual, kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab dalam mengejar kebenaran. Dari AI ethics, kerangka ini berbagi kepedulian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan dampak buruk dalam perancangan dan penerapan sistem yang digerakkan data. Kontribusi khas The Cohesive Tetrad adalah bahwa ia menempatkan kepedulian tersebut di dalam arsitektur eksplisit Sabda, Logic, Qualia, dan Mistika, yang diverifikasi melalui Akhlak dan Intention-Trace Alignment, sehingga pertanyaan tentang karakter dan desain tidak terlepas dari pertanyaan tentang norma dan telos.

Bagaimana kebijakan publik dapat diaudit dengan The Cohesive Tetrad

Audit kebijakan publik dengan The Cohesive Tetrad dimulai dengan menanyakan bagaimana suatu kebijakan mengatur Sabda, Logic, Qualia, dan Mistika. Pada tingkat Sabda, diajukan pertanyaan komitmen normatif apa tentang martabat manusia, keadilan, dan tujuan hidup yang diprasuposisikan atau diabaikan. Pada tingkat Logic, yang diperiksa adalah definisi, klasifikasi, dan inferensi yang membentuk struktur kebijakan. Pada tingkat Qualia, yang didengarkan adalah bagaimana kebijakan tersebut sungguh-sungguh dialami, terutama oleh mereka yang paling terdampak atau paling rentan. Pada tingkat Mistika, yang ditelaah adalah integritas niat dan akuntabilitas di hadapan yang transenden. Akhirnya, audit menelusuri Akhlak dan Intention-Trace Alignment dari waktu ke waktu, dengan menanyakan apakah kebijakan tersebut menghasilkan pola perilaku yang dapat dipercaya, adil, dan penuh belas kasih, atau hanya mempertunjukkan kepedulian terhadap martabat pada tataran retorika.

Apa yang membedakan The Cohesive Tetrad dari daftar periksa etika AI yang sederhana?

Daftar periksa etika AI biasanya menyebut nilai-nilai penting seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi sering memperlakukannya sebagai butir-butir yang dapat dicentang sekali untuk selamanya pada tingkat desain sistem. The Cohesive Tetrad bukan daftar periksa. Ia merupakan arsitektur bagi tata kelola kebenaran yang memetakan bagaimana sumber normatif, struktur penalaran, pengalaman hidup, kedalaman spiritual, dan karakter moral saling berinteraksi sepanjang waktu. Dalam arsitektur ini, sistem AI, institusi, dan kerangka hukum dievaluasi bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap kriteria formal, tetapi juga berdasarkan bagaimana semuanya itu selaras dengan Sabda, melindungi Qualia kelompok

lemah, dimurnikan melalui Mistika, dan meninggalkan jejak jangka panjang Akhlak yang dapat diaudit.

Dapatkan The Cohesive Tetrad digunakan dalam sistem hukum sekuler atau plural?

Ya. Kerangka ini menyadari bahwa tatanan hukum dan politik kontemporer bersifat plural dan bahwa warga berbeda dalam cara mereka menamai atau menerima Sabda. Kerangka ini tidak menuntut agar satu kosakata keagamaan tertentu mendominasi hukum publik. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap tatanan hukum pada dasarnya sudah bertumpu pada asumsi substantif tentang martabat, kewajiban, dan kehidupan yang baik. The Cohesive Tetrad mengundang agar asumsi-asumsi tersebut dijadikan eksplisit dan dikaji secara kritis, alih-alih disembunyikan di balik klaim netralitas. Dalam praktik, ini berarti melindungi ruang publik di mana berbagai artikulasi Sabda dapat berbicara, berdebat, dan membentuk hukum di bawah komitmen bersama terhadap martabat manusia dan akuntabilitas.

Dapatkan mereka yang tidak beriman atau agnostik berinteraksi secara bermakna dengan kerangka ini?

Dapat. Traktat ini tidak mengharuskan pembaca untuk mengakui suatu credo tertentu. Namun, ia menuntut kejujuran tentang fakta bahwa dalam praktik ada hal-hal yang diperlakukan sebagai tak dapat diganggu gugat, bahkan ketika hal-hal tersebut tidak diturunkan dari kalkulasi atau preferensi mayoritas. Pembaca yang tidak menggunakan bahasa teologis secara eksplisit tetap dapat bekerja di dalam arsitektur ini, misalnya dengan berbicara tentang nilai dasar kemanusiaan, keprihatinan ultimat, atau hukum moral, selama mereka menerima bahwa martabat manusia dan telos tidak sepenuhnya tercakup oleh penalaran teknis atau kontraktual.

Jenis kerja lanjutan seperti apa yang diundang oleh Traktat 1?

Traktat 1 bukan sistem tertutup. Ia mengundang kerja lanjutan pada beberapa tingkatan. Sarjana dan praktisi hukum dapat menggunakan arsitektur ini untuk mengevaluasi undang-undang tertentu, putusan pengadilan, dan rezim regulasi. Pembuat kebijakan dapat menggunakannya untuk mengkaji ulang program dan anggaran yang sangat bergantung pada klasifikasi berbasis data. Peneliti dan insinyur AI dapat menggunakannya untuk memikirkan alignment, bukan hanya pada tingkat keselamatan teknis, tetapi juga pada tingkat martabat, telos, dan Akhlak. Para filsuf, teolog, dan ilmuwan sosial dapat menelaah dan memurnikan setiap pilar beserta relasinya. Teks ini ditawarkan sebagai titik awal yang terbuka bagi koreksi dan pendalaman.



Glosarium

Glosarium ini memberikan penjelasan singkat tentang istilah-istilah kunci sebagaimana digunakan dalam Traktat 1. Rumusan kanonis secara penuh disajikan dalam dokumen *The Cohesive Tetrad Canonical Semantic Definitions: Sabda, Logika, Qualia, Mistika, Akhlak* dan padanannya dalam bahasa Indonesia.

The Cohesive Tetrad

Sebuah kerangka epistemik dan etis bagi tata kelola kebenaran di bawah aksioma minimal tentang martabat manusia, yang diartikulasikan dalam buku kanonis *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran* (DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V). Kerangka ini mengajukan sebuah monisme epistemik yang tugasnya bukan untuk menghapus pluralitas ilmu dan tradisi, melainkan menata ulang keduanya di sekeliling kebenaran yang menuntun manusia menuju telos yang benar dan melindungi martabat setiap orang, terutama yang paling lemah, melalui empat bahasa kebenaran yang saling mengikat dan permukaan Akhlak.

Sabda

Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Sabda menamai suatu modus sapaan yang memanggil, memerintah, dan mengorientasikan pribadi serta komunitas, dan yang diakui sebagai sumber otoritas yang lebih tinggi daripada sekadar preferensi, konvensi, atau kalkulasi. Dalam kerangka ini, Sabda berada pada puncak tata kelola kebenaran dan menyediakan horizon di dalamnya semua bentuk penalaran dan bukti lainnya dievaluasi.

Logic

Penggunaan konsep, definisi, dan inferensi secara teratur yang menjaga koherensi antara premis dan kesimpulan. Logic mendisiplinkan penalaran sehingga klaim-klaim menjadi dapat dipahami, konsisten, dan bertanggung jawab pada standar validitas dan kekokohan. Dalam *The Cohesive Tetrad*, Logic mengabdikan kepada Sabda dengan menjernihkan makna dan menguji argumen, sembari menolak godaan untuk menempatkan dirinya sebagai sumber terakhir norma dan telos.

Qualia

Dimensi pengalaman yang dihayati secara pertama-pribadi, the “what it is like” dari menjalani suatu keadaan atau kondisi tertentu. Qualia dalam kerangka ini mencakup bagaimana hukum, kebijakan, dan teknologi dirasakan oleh mereka yang hidup di bawahnya, khususnya mereka yang rentan. Qualia merekam pengalaman pengakuan atau penghinaan, rasa aman atau keterpaparan, kepercayaan atau kecurigaan, dan dengan demikian menyingkap apakah rezim tata kelola kebenaran menghormati atau merusak martabat manusia.

Mistika

Mistika, the intentional spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Mistika merujuk pada upaya-upaya terdisiplin untuk memurnikan niat, menyelaraskan kehidupan batin dengan kebenaran yang diakui, dan hidup di hadapan pandangan yang transenden dengan kejujuran dan kerendahan hati. Mistika melindungi

arsitektur tata kelola kebenaran dari reduksi menjadi sekadar sesuatu yang lahiriah atau teknis, dan buah-buahnya diuji melalui koherensinya dengan Sabda, keterbukaannya terhadap koreksi rasional dan empiris, serta Akhlak jangka panjangnya.

Akhlak

Konfigurasi yang relatif stabil dari disposisi dan kebiasaan moral yang menghubungkan orientasi batin dan laku lahiriah. Akhlak menyangkut karakter pribadi dan institusi, yang tampak dalam pola kejujuran, keadilan, belas kasih, keberanian, dan kepedulian terhadap yang lemah. Dalam The Cohesive Tetrad, Akhlak merupakan permukaan yang dapat diamati, tempat Sabda, Logic, Qualia, dan Mistika meninggalkan jejaknya, dan karenanya menjadi lokus kunci bagi verifikasi dan audit.

Truth governance

Rangkaian praktik, institusi, dan kriteria yang melaluinya masyarakat memutuskan apa yang akan dihitung sebagai benar, siapa yang berwenang berbicara, dan bagaimana keputusan-keputusan yang didasarkan pada klaim kebenaran dibenarkan, direvisi, dan diminta pertanggungjawaban. Truth governance mencakup prosedur hukum, protokol ilmiah, ekosistem media, sistem pendidikan, serta norma-norma keseharian tentang kesaksian dan kepercayaan.

Intention-Trace Alignment

Intention-Trace Alignment, derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik. Konsep ini menanyakan apakah apa yang diklaim oleh para pelaku dan institusi sebagai sesuatu yang mereka cari dalam perkara kebenaran sungguh tercermin dalam keputusan jangka panjang, kelalaian, dan dampak mereka atas kehidupan nyata. Intention-Trace Alignment merupakan lensa diagnostik untuk menyingkap kemunafikan, penyimpangan, atau korupsi dalam tata kelola kebenaran.

Public reason

Modus penalaran yang melaluinya hukum dan kebijakan dibenarkan dalam istilah-istilah yang dimaksudkan dapat diakses oleh semua anggota komunitas politik. Banyak uraian kontemporer tentang public reason cenderung mengecualikan rujukan eksplisit kepada Sabda. The Cohesive Tetrad mengundang pengakuan yang lebih jujur atas sumber-sumber normatif yang sudah sejak awal membentuk apa yang dianggap masuk akal dalam ruang publik.

Sabda logic

Relasi teratur antara Sabda dan Logic di mana Logic menjernihkan dan mendisiplinkan penalaran sekaligus tetap berada di bawah horizon Sabda sebagai sumber otoritatif norma dan telos. Sabda logic menolak sekaligus marginalisasi Sabda dan pengabsolutan logika murni. Sabda logic merupakan perhatian utama Traktat 1 sebagai arsitektur bagi tata kelola kebenaran dalam hukum dan era data.

SALOQUM Treatises

SALOQUM Treatises adalah empat traktat pertama dalam Cohesive Tetrad Treatise Series, yaitu Treatise 1 on the Logic of Sabda, Treatise 2 on the Language of Logic, Treatise 3 on the Logic of Qualia, dan Treatise 4 on the Logic of Mistika. Keempatnya mengembangkan Sabda, Logic, Qualia, dan Mistika sebagai empat bahasa kebenaran yang tak terpisahkan di dalam satu keseluruhan arsitektural. SALOQUM Treatises dimaksudkan untuk dibaca secara bersama, karena setiap pilar saling mengoreksi dan menyempurnakan, dan makna gabungan mereka pada akhirnya termanifestasi dalam Akhlak, yang dibahas dalam Treatise 5.



Bibliografi

Referensi di bawah ini merujuk pada karya-karya yang secara eksplisit digunakan atau erat terlibat dalam tubuh Traktat 1. Daftar ini tidak mencakup keseluruhan basis riset The Cohesive Tetrad. Pekerjaan bibliografis yang lebih terperinci disajikan dalam artikel dan pra-cetak tersendiri yang membentuk korpus jurnal Traktat 1.

1. Baehr, J. S. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology*. Oxford University Press.
2. Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Belknap Press of Harvard University Press.
3. Floridi, L., and Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1-15.
4. Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
5. Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
6. Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
7. Haack, S. (2003). *Defending science within reason: Between scientism and cynicism*. Prometheus Books.
8. John, L. K., Loewenstein, G., and Prelec, G. (2012). Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. *Psychological Science*, 23(5), 524-532.
9. Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran*. OSF Preprints. DOI: 10.17605/OSF.IO/D5S7V.
10. Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad as an epistemic ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms*. OSF Preprints and related repositories.

Daftar ini secara sengaja disusun secara hemat. Daftar ini ditawarkan untuk membantu pembaca melacak beberapa mitra dialog utama dan menempatkan Traktat 1 dalam percakapan yang lebih luas tentang hukum, martabat, kebajikan epistemik, public reason, dan tata kelola berbasis data, sembari tetap membuka ruang bagi pengayaan dan koreksi lebih lanjut seiring berjalannya riset.

*
**